

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 432/ HK / 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nmor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

24 Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 12);

25. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024.
KETIGA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Pj Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 432/ HK /2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

1. Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
2. Renja Dinas Kesehatan
3. Renja Rumah Sakit Umum Daerah
4. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Renja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Renja Dinas Ketenagakerjaan
10. Renja Dinas Lingkungan Hidup
11. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Renja Dinas Perhubungan
14. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
20. Renja Sekretariat Daerah
21. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. Renja Badan Perencanaan Daerah
23. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah
26. Renja Inspektorat Daerah
27. Renja Kecamatan Karangasem
28. Renja Kecamatan Abang
29. Renja Kecamatan Kubu
30. Renja Kecamatan Bebandem

31. Renja Kecamatan Selat
32. Renja Kecamatan Rendang
33. Renja Kecamatan Sidemen
34. Renja Kecamatan Manggis
35. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KARANGASEM

KARANGASEM AGUNG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2025

YUDHA BRAMA JAYA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 307/ HK / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 432/HK/2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya oleh Badan Perencanaan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pereaturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nmor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9).
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 22);
24. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Juli 2025

PLT. BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 307/ HK / 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 432/HK/2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan
3. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah
4. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan
10. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup
11. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
20. Perubahan Renja Sekretariat Daerah
21. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. Perubahan Renja Badan Perencanaan Daerah
23. Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah
25. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Perubahan Renja Inspektorat Daerah
27. Perubahan Renja Kecamatan Karangasem
28. Perubahan Renja Kecamatan Abang

Dipindai dengan CamScanner

29. Perubahan Renja Kecamatan Kubu
30. Perubahan Renja Kecamatan Bebandem
31. Perubahan Renja Kecamatan Selat
32. Perubahan Renja Kecamatan Rendang
33. Perubahan Renja Kecamatan Sidemen
34. Perubahan Renja Kecamatan Manggis
35. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 751/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 751 /HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	1. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem 2. Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten karangasem 3. Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten karangasem
6.	Kelompok Kerja Bidang Pencegahan	1. Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten karangasem 3. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten karangasem
7.	Kelompok Kerja Administrasi dan Manajemen	1. Sekretaris Dinas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem 2. Kasubag Umum pada Dinas Pemadam

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem 3. Kasubag Keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem 4. Perencana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini disusun merupakan penyesuaian rencana kerja terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem memuat analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Kami juga menyadari bahwa dengan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem belum memadai, dengan demikian koreksi, saran, dan masukan sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem di masa mendatang.

Demikian semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 10 Agustus 2025
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Karangasem,

I Made Agus Budiyasa, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730815 199903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 .. 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II 7
2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 13
3.1 Tujuan dan Sasaran 13
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 17
3.3 Program dan Kegiatan 17

BAB IV PENUTUP 22
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 22
4.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan 22
4.3 Rencana Tindak Lanjut 23

DAFTAR TABEL

2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025..... 9

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025..... 14

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2025 16

3.3 Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025..... 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 343 ayat (1) dinyatakan bahwa perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025 yang akan disepakati bersama antara Bupati Karangasem dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem, dan selanjutnya menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 Bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem dan penyusunan Perubahan RKA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 berdasarkan pada Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun

2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Karangasem No 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 751/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah menyesuaikan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebagai implementasi dari perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai pedoman :

1. Pelaksanaan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem
2. Pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem.
3. Penyusunan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025, sesuai dengan pasal 361 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dapat disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai TW II

2.2 Isu-isu Penting yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 merupakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II mencangkup evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II. Hasil evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja akan menjadi umpan balik bagi perencanaan pembangunan dan akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja tahun berjalan dan atau Rencana Kerja tahun berikutnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah:

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 berdasarkan Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.119.677.851,00
2. Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 2.163.598.937,00 atau sebesar 34,65% dari anggaran induk Tahun 2025.

Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya :

1. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang berpengaruh terhadap tingkat capaian kinerja program dan kegiatan dan juga tingkat serapan anggaran.
2. Belum optimalnya koordinasi antar kepala bidang dan sekretaris dinas dalam mengatasi permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi.
3. Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 menggunakan e-katalog lokal sehingga masih perlu dilakukan penyesuaian dalam pengadaan barang dan jasa, apalagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem

belum memiliki Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan untuk itu ditunjuk staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penataan kembali terhadap rancangan APBD 2025 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;
2. Perlunya koordinasi teknis secara efektif dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas – terukur.
3. Para PPTK agar lebih intens melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Secara lebih lengkap rekapitulasi hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Kode rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	K		6	K	7	K	8	K	9	K	10	K	11	K	12	13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
									Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			UNSUR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																							
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																							
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																							
1	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah	500	%	15.961.950.235,00	100%	33.556.699.958,00	100%	5.359.270.699,00	21,00%	965.194.362,00	13,05%	839.927.707,00					34,05%	1.405.122.069,00	134,05%	34.961.822.027,00	0,27%	219,83%	Disdamkartan
		1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksanaya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	500	Persen	487.700.000,00	100%	97.262.920,00	100	40.971.360,00	5,50%	12.760.440,00	8,34%	19.140.660,00					13,83%	31.901.100,00	113,83%	129.164.020,00	0,23%	26,48%	Disdamkartan
		1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	20.500.000,00	2	365.000,00	2	365.000,00	0%	0,00	0%	0,00					0,00%	0,00	200,00%	365.000,00	20,00%	1,78%	Disdamkartan
		1 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80	Dokumen	4.800.000,00	2	150.000,00	2	475.000,00	0%	0,00	0%	0,00					0,00%	0,00	200,00%	150.000,00	2,50%	3,13%	Disdamkartan
		1 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80	Dokumen	4.800.000,00	2	150.000,00	2	479.700,00	0%	0,00	0%	0,00					0,00%	0,00	200,00%	150.000,00	2,50%	3,13%	Disdamkartan
		1 05 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	80	Dokumen	4.800.000,00	2	400.000,00	2	475.000,00	0%	0,00	0%	0,00					0,00%	0,00	200,00%	400.000,00	2,50%	8,33%	Disdamkartan
		1 05 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	80	Dokumen	4.800.000,00	2	600.000,00	2	400.400,00	0%	0,00	0%	0,00					0,00%	0,00	200,00%	400.000,00	2,50%	8,33%	Disdamkartan
		1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Dokumen	448.000.000,00	2	95.797.920,00	2	38.682.260,00	33%	12.760.440,00	50,01%	19.140.660,00					83,00%	31.901.100,00	283,00%	127.699.020,00	28,30%	26,50%	Disdamkartan
		1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksanaya administrasi keuangan	500	Persen	12.018.250.215,00	100%	2.583.394.975,00	100	4.811.910.345,00	10,39%	499.963.972,00	22,94%	747.146.097,00					33,33%	1.247.110.069,00	133,33%	3.830.505.044,00	0,27%	31,87%	Disdamkartan
		1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	ang/Bula	12.018.250.215,00	19		19	4.811.910.345,00	10,39%	499.963.972,00	22,94%	747.146.097,00					33,33%	1.247.110.069,00	1933,33%	1.247.110.069,00	32,22%	10,38%	Disdamkartan
		1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksanaya administrasi kepegawaian	500	Persen	321.500.000,00	100%	24.000.000,00	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00					0,00%	0,00	100,00%	24.000.000,00	0,20%	7,47%	Disdamkartan
		1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang Diadakan	109	Paket	321.500.000,00	86	24.000.000,00	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00					0,00%	0,00	8600,00%	24.000.000,00	76,90%	7,47%	Disdamkartan

	1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi umum**	**500**	**Persen**	**1.001.000.000,00**	**100%**	**138.538.908,00**	**100**	**231.248.090,00**	**9,02%**	**28.182.140,00**	**6,85%**	**15.670.150,00**					**15,87%**	**43.852.290,00**	**115,87%**	**182.391.198,00**	**0,23%**	**18,22%**	**Disdamkartan**
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	28.000.000,00	17	4.490.000,00	20	6.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00					0,00%	0,00	1700,00%	4.490.000,00	28,33%	16,04%	Disdamkartan
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	481.000.000,00	54	76.424.900,00	54	157.879.532,00	20,33%	26.862.140,00	10,00%	14.890.150,00					30,33%	41.752.290,00	5430,33%	118.177.190,00	90,51%	24,57%	Disdamkartan
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	79	Paket	36.500.000,00	11	5.646.800,00	11	8.420.230,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00					0,00%	0,00	1100,00%	5.646.800,00	13,92%	15,47%	Disdamkartan
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dokumen	38.500.000,00	36	3.135.000,00	36	3.300.000,00	15,76%	520.000,00	24,24%	780.000,00					40,00%	1.300.000,00	3640,00%	4.435.000,00	60,67%	11,52%	Disdamkartan
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	417.000.000,00	9	48.942.208,00	9	55.448.328,00	4,00%	800.000,00	0,00%	0,00					4,00%	800.000,00	904,00%	49.742.208,00	15,07%	11,93%	Disdamkartan
	1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase tersedianya barang milik daerah**	**500**	**Persen**	**503.000.000,00**	**0**	**311.045.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**					**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**311.045.000,00**	**0,00%**	**61,84%**	**Disdamkartan**
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	2	Unit	50.000.000,00	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00					0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Disdamkartan
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	50	Unit	190.000.000,00	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00					0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Disdamkartan
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukungn Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang tersedias	80	Unit	263.000.000,00	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00					0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Disdamkartan
	1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**500**	**Persen**	**479.500.000,00**	**100%**	**53.448.695,00**	**100**	**65.327.938,00**	**21,89%**	**7.215.270,00**	**12,23%**	**13.018.390,00**					**34,12%**	**20.233.660,00**	**134,12%**	**73.682.355,00**	**0,27%**	**15,37%**	**Disdamkartan**
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750	Laporan	7.500.000,00	1	800.000,00	1	1.500.000,00	33,33%	500.000,00	0,00%	0,00					33,33%	500.000,00	133,33%	1.300.000,00	0,18%	17,33%	Disdamkartan
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	221.000.000,00	1	34.965.315,00	1	45.500.000,00	15,00%	4.243.182,00	15,70%	9.310.258,00					30,70%	13.553.440,00	130,70%	48.518.755,00	2,18%	21,95%	Disdamkartan
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	251.000.000,00	1	17.683.380,00	1	18.327.938,00	17,33%	2.472.088,00	21,00%	3.708.132,00					38,33%	6.180.220,00	138,33%	23.863.600,00	2,31%	9,51%	Disdamkartan
	1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**500**	**Persen**	**1.151.000.000,00**	**100%**	**147.879.460,00**	**100**	**209.812.966,00**	**10,22%**	**17.072.540**	**14,89%**	**44.952.410,00**					**25,11%**	**62.024.950,00**	**125,11%**	**209.904.410,00**	**0,25%**	**18,24%**	**Disdamkartan**
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Unit	807.000.000,00	15	112.908.180,00	15	139.735.052,00	13,33%	9.656.276,00	21,67%	33.828.014,00					35,00%	43.484.290,00	1535,00%	156.392.470,00	25,58%	19,38%	Disdamkartan
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliha	60	Unit	54.000.000,00	15	9.000.000,00	15	20.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00					0,00%	0,00	1500,00%	9.000.000,00	25,00%	16,67%	Disdamkartan
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	5	Unit	290.000.000,00	1	25.971.280,00	1	50.077.914,00	17,33%	7.416.264,00	23,00%	11.124.396,00					40,33%	18.540.660,00	140,33%	44.511.940,00	28,07%	15,35%	Disdamkartan
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	**34%**	**26,22%**					
																						Predikat kinerja	**Sedang**	**Rendah**					

2	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran dan non kebakaran	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	500	Persen	15.984.899.786,00	100%	4.788.712.781,00	100%	1.760.407.152,00	14,00%	229.510.268	20,35%	522.066.600,00						34%	758.476.868,00	134,25%	5.542.189.949,00	0,27%	34,67%	Disdamkartan
		1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	500	Persen	12.864.899.786,00	100%	4.544.037.591,00	100	1.406.972.968	16,00%	223.652.592	20,50%	433.922.786,00						37%	657.575.378,00	136,50%	5.201.612.969,00	0,27%	40,43%	Disdamkartan
			1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	335	Laporan	7.440.038.000,00		1.337.799.450,00	65	982.972.968	20,00%	216.203.392	32,00%	339.133.558,00						57%	555.336.950,00	52,00%	1.803.132.000,00	0,16%	25,45%	Disdamkartan
			1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non	300	Dokumen	480.000.000,00		31.959.840,00	60	57.500.000	24,00%	5.298.500	24,00%	8.336.378,00						48%	13.634.878,00	48,00%	45.614.718,00	0,16%	9,50%	Disdamkartan
			1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	60	Dokumen	1.148.886.318,00		768.482.301,00	1	309.000.000	20,00%	2.150.700	26,00%	86.433.250,00						46%	88.583.950,00	46,00%	857.066.251,00	1,15%	74,61%	Disdamkartan
			1	05	04	2.01	0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sasaran dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	241	Unit	3.123.115.253,00		2.405.800.000,00	-	0	0,00%	0	0,00%	0,00						0%	0,00	0,00%	2.405.800.000,00	0,00%	77,03%	Disdamkartan
			1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	204	Orang	673.050.215,00	0	0	51	57.500.000	0,00%	0	0,00%	0,00						0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Disdamkartan
			1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana prasarana proteksi kebakaran yang didata	500	Persen	510.000.000,00	100%	1.434.100,00	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00						0%	0,00	100,00%	1.434.100,00	0,20%	0,28%	Disdamkartan
			1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan/ yang Dipersyaratkan Harus memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100	Dokumen	510.000.000,00	1	1.434.100,00	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00						0%	0,00	100,00%	1.434.100,00	1,00%	0,28%	Disdamkartan
		1	05	04	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran	500	Persen	2.610.000.000,00	100%	238.241.090,00	100	353.434.184,00	2,50%	5.857.676,00	20,00%	95.043.814,00						23%	100.901.490,00	122,50%	339.142.580,00	0,25%	12,99%	Disdamkartan
			1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	125	Orang	1.305.000.000,00	300	108.063.310,00	900	273.584.184,00	5,00%	5.857.676,00	40,00%	95.043.814,00						45%	100.901.490,00	300,45,00%	208.964.800,00	240,36%	16,01%	Disdamkartan
			1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	400	A/Kelurah	1.305.000.000,00	8	180.177.780,00	8	79.858.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00						0%	0,00	800,00%	180.177.780,00	2,00%	9,98%	Disdamkartan

Rata-rata capaian kinerja (%)	34%	43,09%
Predikat kinerja	Sedang	Tinggi

Rata-rata capaian kinerja (%)	68%	68,30%
Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1. Terjalinnya komunikasi yang intens dari atasan kebawahan untuk mencapai target - target kinerja yang belum tercapai
2. Adanya motivasi kerja dari pelaksana untuk menyelesaikan target program dan kegiatan yang telah ditetapkan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

1. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan kepada masyarakat
2. Terbatasnya kemampuan secara teknis sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan
3. Sistem Pengadaan Secara E - Purchasing Sehingga Membutuhkan Waktu
4. Realisasi didasarkan atas intensitas kejadian

2.2. Isu-isu Penting yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Karangasem di masa depan, isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem adalah :

1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem belum memiliki gedung kantor yang refresentatif yang bisa ditempati oleh pasukan dan sekretariat (pegawai administrasi dan pejabat struktural)
2) Pos Pemadam Kebakaran yang ada saat ini baru 2 Pos, mestinya ada minimal 5 buah pos sesuai dengan wilayah yang ada
3) Kurangnya sarana prasarana pemadam kebakaran
4) Kualifikasi petugas pemadam kebakaran baru memiliki sertifikat Pemadam I, sehingga masih diperlukan Diklat Pemadam II dan III
5) Masih rendahnya pemahaman masyarakat di dunia usaha dan instansi pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran

Dalam meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, dihadapkan kepada isu-isu strategis yang berkembang untuk ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya. Adapun isu-isu strategis yang berkembang di Kabupaten Karangasem adalah :

1) Rendahnya kompetensi aparatur pemadam kebakaran
2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
3) Rendahnya kualitas pelayanan penanggulangan/penanganan pasca bencana kebakaran.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati Karangasem serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem terdapat pada Tujuan ke-5 yaitu Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman terhadap Pangan, Sandang dan Papan; Unggul dalam bidang Pertanian dalam arti Luas, Aman dibidang KAMTIBMAS, Aman dibidang ber-USAHA, dan Unggul dalam bidang Perekonomian UMKM.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem adalah sasaran ke-16 yaitu Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman masyarakat Karangasem.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(5)
Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman terhadap Pangan, Sandang dan Papan; Unggul dalam bidang Pertanian dalam arti Luas, Aman dibidang KAMTIBMAS, Aman dibidang ber- USAHA, dan Unggul dalam bidang Perekonomian UMKM	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman masyarakat Karangasem	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	84,2%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	78%

Guna mendukung terwujudnya misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Bupati terpilih, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem yang melaksanakan bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran), tujuan renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman masyarakat Karangasem

Sasaran renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan penunjang administrasi perkantoran
2. Meningkatnya cakupan layanan dan penyelamatan korban bencana kebakaran dan non kebakaran

Tujuan dan sasaran renstra yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatkan ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman masyarakat Karangasem	Meningkatkan akuntabilitas dan realibilitas pelaporan kinerja dan keuangan secara efektif dan transparan	Indeks kepuasan masyarakat	88,31
		Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan	8 Dokumen
	Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban pada kejadian kebakaran dan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) pelayanan bencana kebakaran	30%
		Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100%
		Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran pencegahan dini kebakaran melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi	600 Orang
		Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran	33 Desa/Kelurahan

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan pula arah kebijakan. Arah kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.

Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 adalah : Peningkatan upaya mitigasi bencana kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas masyarakat dan/atau aparatur dalam penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah : Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas masyarakat dan/atau aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam pengurangan risiko kebakaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun rencana pendanaan per program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel. 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		DPA Induk 2025	Renja Perubahan 2025	DPA Induk 2025	Renja Perubahan 2025	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas Perangkat daerah**	100%	100%	**5.359.270.699,00**	**4.913.305.113,00**	
	A Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daerah	**A Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	100%	**40.971.360,00**	**53.733.180,00**	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	465.000	465.000	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	475.000	475.000	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	473.700	473.700	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	475.000	475.000	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	400.400	400.400	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	38.682.260	51.444.080	

	B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**4.811.910.345**	**4.426.144.865**	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	4.811.910.345	4.426.144.865	
	C Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**C Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**231.248.090**	**146.945.294**	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	15 Paket	6.200.000	3.986.700	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket	57 Paket	157.879.532	100.463.000	
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	8.420.230	7.986.630	
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	3.300.000	3.300.000	
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	9 Laporan	55.448.328	31.208.964	
	D Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**D Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**65.327.938**	**66.463.184**	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1.500.000	1.500.000	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	45.500.000	44.150.000	
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	18.327.938	20.813.184	

	E **Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	E **Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**209.812.966**	**220.018.590**	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	139.735.052	145.516.038	
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	20.000.000	16.000.000	
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	50.077.914	58.502.552	
2	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100%**	**100%**	**1.760.407.152**	**3.717.366.436**	
	A **Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	A **Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus kebakaran yang ditangani**	**100%**	**100%**	**1.406.972.968**	**3.468.518.524**	
	1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	65 Laporan	65 Laporan	982.972.968	1.192.044.824	
	2 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	60 Dokumen	60 Dokumen	57.500.000	48.855.200	
	3 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala (Setiap Tahun), Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	309.000.000	295.792.000	
	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	0 Unit	1 Unit	-	1.900.000.000	
	5 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	5 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	51 orang	30 orang	57.500.000	31.826.500	

	B Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**B Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	**100%**	**100%**	**353.434.184**	**248.847.912**	
	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang	600 Orang	273.584.184	201.933.912	
	2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap tahunnya	8 Desa	8 Desa	79.850.000	46.914.000	
Jumlah						**7.119.677.851,00**	**8.630.671.549,00**	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan Rancangan Renja didasarkan pada program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 – 2029 dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 harus menerapkan prinsip – prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, baik dalam kerangka regulasi yang mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan disusunnnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi serta meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
3. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja dengan sebaik-baiknya.
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

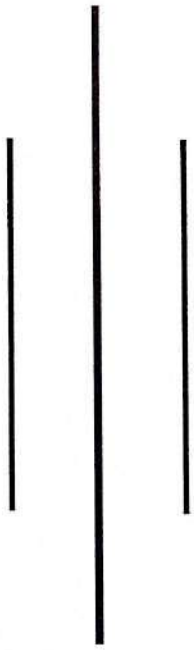
a. Aparatur Sipil Negara yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
b. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih itensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan bidang – bidang, agar tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan dapat tercapai dan proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Amlapura, 10 Agustus 2025
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Karangasem,

I Made Agus Budiyasa, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730815 199903 1 013

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KECAMATAN KUBU
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN KUBU

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugra-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kubu Tahun 2025 dengan tepat waktu. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Renja ini merupakan rumusan sebagai tindak lanjut atau penjabaran untuk mewujudkan Renstra setiap tahunnya untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem untuk lima tahun kedepan yaitu Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Kubu, 9 Juli 2025
Camat Kubu

I Gede Kaneka Setiawan, S.STP, MPA
Pembina Tk. I
NIP. 19830809 200212 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kubu Sampai Dengan Triwulan II	10
2.2 Isu-isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kubu	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KUBU	25
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kubu	25
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	26
3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV PENUTUP	40

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kubu secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi Wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Kubu membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Rencana Kerja (Renja) dalam 1 (satu) Tahun mendatang yang merupakan panduan atau acuan kegiatan pembangunan yang akan di laksanakan agar supaya sesuai rencana kerja dan tepat sasaran serta multi fungsi. Dengan suatu Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dari RPJMD Kabupaten Karangasem (2025-2029) dan Rensta Perangkat Daerah. Renja PD Kecamatan Kubu untuk Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah ini hanya berdasarkan kebutuhan sesuai skala prioritas yang perlu dicukupi demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kubu.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Dipindai dengan CamScanner

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada : a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rencana Kerja Perubahan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja PD sebagai penjabaran Renstra PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Kecamatan Kubu menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem ke dalam program dan kegiatan Kecamatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Kecamatan secara

Dipindai dengan CamScanner

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Perubahan Renja Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Kubu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perubahan PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD Perubahan dan Renja Perubahan PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD Perubahan merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBDP.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Dipindai dengan CamScanner

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomam Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
31. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 776/HK/2024 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Pada Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja ini adalah untuk menyediakan dokumen rencana kerja Kecamatan Kubu yang memuat tentang perubahan-perubahan terhadap Renja Kecamatan Kubu Tahun 2025 sesuai perkembangan keadaan yang ada sehingga dapat menjadi arah dalam mewujudkan target kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan perubahan Renja ini adalah untuk :

a. Menjadi pedoman penyusunan RKAP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

Dipindai dengan CamScanner

b. Menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja
c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kubu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kubu Sampai Triwulan II

2.2 Isu-isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kubu

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KUBU

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kubu

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kubu Sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kubu sampai dengan triwulan II, diperoleh gambaran sebagai berikut :

2.1.1. Capaian Sasaran Renja Tahun 2025

Dalam Renstra Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 menetapkan 3 tujuan dan 3 sasaran yaitu :
Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan
2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Kubu dalam periode pembangunan 2025-2029 antara lain :

1. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya
2. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dipindai dengan CamScanner

Capaian Sasaran Kecamatan Kubu tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi sampai TW II	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketahanan bencana sertarasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100,00%	50,00%	50,00%
2.	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	90,00%	50,00%	50,00%
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	85%	47,00%	47,00%

2.1.2. Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Kubu sampai dengan Triwulan II masih sangat rendah , hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan teknis dilaksanakan pada Triwulan III

Dipindai dengan CamScanner

dan IV. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Kubu sampai dengan Triwulan II adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Induk 2025			Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Perubahan 2025			Realisasi s/d Triwulan II		Keterangan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN			2.744.276.721	KECAMATAN			2.790.826.721	1.214.303.551	44,25	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.667.008.353	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.704.468.897	1.161.640.631	43,56	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2.200.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2.200.000	-	0,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	300.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	300.000	-	0,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	300.000	-	0,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	-	0,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	-	0,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	300.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	**100%**	**2.274.131.704**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	**100%**	**2.337.275.156**	**1.058.963.149**	**46,57**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.260.377.520	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.318.976.244	1.047.602.709	46,35	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	13.634.184	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	18.178.912	11.360.440	83,32	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	120.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	120.000	-	0,00	
c	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	**100%**	**144.301.695**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	**100%**	**134.301.695**	**29.620.135**	**20,53**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.506.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.506.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.881.695	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.881.695	25.157.035	21,16	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.914.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.914.000	-	0,00	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 kali	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 kali	10.000.000	4.463.100	22,32	
d	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik Daerah yang diadakan**	**100%**	**14.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik Daerah yang diadakan**	**100%**	**14.000.000**	-	**0,00**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.000.000	-	0,00	
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	**100%**	**80.240.276**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	**100%**	**58.557.368**	**23.782.260**	**29,64**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.000.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 rekening	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 rekening	31.000.000	13.921.820	39,78	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	20.640.276	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	26.557.368	9.860.440	47,77	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	21.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	-			
f	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**152.134.678**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**158.134.678**	**49.275.087**	**32,39**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	126.134.678	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	148.134.678	49.275.087	39,07	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	13.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10.000.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	13.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	-	0,00	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**36.134.184**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**40.678.912**	**27.855.940**	**77,09**	
a	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**26.817.092**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**29.089.456**	**22.175.720**	**82,69**	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 organisasi	26.817.092	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 organisasi	29.089.456	22.175.720	82,69	
b	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan**	**100%**	**9.317.092**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan**	**100%**	**11.589.456**	**5.680.220**	**60,97**	

Dipindai dengan CamScanner

1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 pendampinga n	8.317.092	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 pendampin gan	10.589.456	5.680.220	68,30	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 rekomendasi	1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 rekomenda si	1.000.000	-	0,00	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**27.817.092**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**30.089.456**	**18.334.760**	**65,91**	
a	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100%**	**27.817.092**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100%**	**30.089.456**	**18.334.760**	**65,91**	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	14.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	14.000.000	12.654.540	90,39	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	9 laporan	13.817.092	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	9 laporan	16.089.456	5.680.220	41,11	

Dipindai dengan CamScanner

IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan**	**100%**	**1.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan**	**100%**	**1.000.000**	**352.000**	**35,20**	
a	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**1.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**1.000.000**	**352.000**	**35,20**	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 instansi	1.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 instansi	1.000.000	352.000	35,20	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum perangkat daerah di kecamatan**	**100%**	**1.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum perangkat daerah di kecamatan**	**100%**	**1.000.000**	**440.000**	**44,00**	

Dipindai dengan CamScanner

a	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**1.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**1.000.000**	**440.000**	**44,00**	
1	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan	9 desa	1.000.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan	9 desa	1.000.000	440.000	44,00	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**11.317.092**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**13.589.456**	**5.680.220**	**50,19**	
a	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**100%**	**11.317.092**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**100%**	**13.589.456**	**5.680.220**	**50,19**	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 desa	1.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 desa	1.500.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	9 desa	1.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	9 desa	1.000.000	-	0,00	
3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPerdesaan di Wilayah Kecamatan	9 desa	8.817.092	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPerdesaan di Wilayah Kecamatan	9 desa	11.089.456	5.680.220	64,42	
	TOTAL			**2.744.276.721**				**2.790.826.721**	**1.214.303.551**	**44,25**	

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel di atas rata-rata capaian program dan kegiatan kinerja Kecamatan Kubu tahun 2025 sampai triwulan II yaitu :

a. Capaian Fisik sebesar 47,46% ini dikatagorikan predikat kinerja tinggi. adapun capaian fisik ini belum maksimal karena ada beberapa program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya ditempatkan pada triwulan III dan IV.
b. Capaian Keuangan 44,25%, capaian ini dikatagorikan tinggi, hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor.

Faktor-faktor pendorong dan Penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kubu :

1. Faktor Pendorong

Adapun beberapa faktor pendorong yang dapat mempengaruhi capaian kinerja Kecamatan Kubu pada triwulan II tahun anggaran 2025 antara lain :

- Adanya rencana kerja yang matang sehingga kegiatan dapat direncanakan
- Adanya rencana aksi sehingga kegiatan dapat dipersiapkan sebelum kegiatan itu dilaksanakan.
- Adanya kekompakan SteakHolder, Masyarakat dan ASN kecamatan Kubu dalam melaksanakan kegiatan.
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung.
- Adanya anggaran yang memadai.

2. Faktor Penghambat

Sedangkan beberapa factor yang dapat menghambat capaian kinerja program, kegiatan Kecamatan Kubu antara lain :

- Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun 2025 mengunakan system e-katalog cukup menyulitkan Perangkat Daerah dalam proses pencairan anggaran.
- Adanya gangguan jaringan yang sering dialami oleh Perangkat Daerah dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga proses pengadaan barang/jasa sering mengalami penundaan.
- Adanya penempatan anggaran kas masih keliru, sehingga proses pencairan anggaran terhambat.

Dipindai dengan CamScanner

- Adanya keterlambatan respon oleh Rekanan disaat proses pelaksanaan pengadaan barang jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa harus Perubahan Renja Kecamatan Kubu Tahun 2025 diulang kembali yang menyebabkan pelaksanaan Program/kegiatan terhambat.

2.2 Isu-isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kubu

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Adapun isu-isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian serta upaya mencarikan solusi terbaik, diantaranya :

1. Masih tingginya potensi gangguan ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum di kecamatan
2. Masih tingginya potensi konflik sosial di kecamatan
3. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KUBU

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kubu

Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Kubu merupakan penjabaran atau implementasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada Tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan
   Wisatawan
2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan
   nilai-nilai Budaya Bali
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dati tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kubu dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah :

1. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama
   Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya
2. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan

Dipindai dengan CamScanner

menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkanm visi dan misi.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

b. Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Secara rinci rumusan strategi dan arah kebijakan yang diambil kecamatan Kubu dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	1 Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparatur pemerintah daerah untuk menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten 2 Karangasem. Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan	1 Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu	Didukung dengan Satu Program dan Satu Kegiatan
Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	1 Membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap hukum	1 Pendidikan politik kepada masyarakat Desa	Didukung dengan Satu Program dan Satu Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1 Membangun sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi	1 Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran 2 Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan 3 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan 4 Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima	Didukung dengan Satu Program dan Satu Kegiatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kubu memuat didalamnya indikator kinerja dan kelompok sasaran. Indikator kinerja dan kelompok sasaran menggambarkan tolak ukur pencapaian rencana kerja dalam kurun satu tahun anggaran. Kelompok sasaran merupakan target kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kubu merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja Tahun 2025.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2025 tersebut disusun berdasarkan potret permasalahan Kecamatan Kubu sebagai Perangkat Daerah yang mengemban tugas kewilayahan

Dipindai dengan CamScanner

(teritorial) dengan tugas pokok adalah menyelenggarakan pemerintahan umum dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki serta keterbatasan alokasi anggaran.

Indikator kinerja dan kelompok sasaran ini merupakan alat yang berguna untuk mencek pelaksanaan tugas dan fungsi serta menngukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan dan seberapa besar kontribusi kecamatan dalam mencapai visi dan misi kabupaten yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten. Selain itu dengan merumuskan indikator kinerja dan sasaran akan lebih bisa mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun anggaran dengan membandingkan rencana target dengan realisasi yang meliputi lima indikator kinerja, yaitu masukan (*in-put),* Keluaran (*out-put*), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaannya yang akan dituangkan melalui program dan kegiatan, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program Kegiatan Kecamatan Kubu Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Induk 2025			Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/Berkurang		Keterangan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN			2.744.276.721	KECAMATAN			2.790.826.721	46.550.000	1,70	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.667.008.353	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.704.468.897	37.460.544	1,40	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2.200.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2.200.000	-	0,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	300.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	300.000	-	0,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	300.000	-	0,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	-	0,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	-	0,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	300.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	**100%**	**2.274.131.704**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	**100%**	**2.337.275.156**	**63.143.452**	**2,78**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.260.377.520	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.318.976.244	58.598.724	2,59	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	13.634.184	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	18.178.912	4.544.728	33,33	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	120.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	120.000	-	0,00	
c	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	**100%**	**144.301.695**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	**100%**	**134.301.695**	**-10.000.000**	**-6,93**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.506.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.506.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.881.695	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.881.695	-	0,00	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.914.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.914.000	-	0,00	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 kali	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 kali	10.000.000	- 10.000.000	-50,00	
d	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik Daerah yang diadakan**	**100%**	**14.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik Daerah yang diadakan**	**100%**	**14.000.000**	-	**100,00**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.000.000	-	100,00	
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	**100%**	**80.240.276**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	**100%**	**58.557.368**	**- 21.682.908**	**-27,02**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.000.000	- 2.000.000	-66,67	

Dipindai dengan CamScanner

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 rekening	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 rekening	31.000.000	- 4.000.000	-11,43	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	20.640.276	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	26.557.368	5.917.092	28,67	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	21.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	-	- 21.600.000	-100,00	
f	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**152.134.678**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**158.134.678**	**6.000.000**	**3,94**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	126.134.678	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	148.134.678	22.000.000	17,44	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	13.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10.000.000	- 3.000.000	-23,08	

Dipindai dengan CamScanner

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	13.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	- 13.000.000	100,00	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**36.134.184**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**40.678.912**	**4.544.728**	**12,58**	
a	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**26.817.092**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**29.089.456**	**2.272.364**	**8,47**	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 organisasi	26.817.092	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 organisasi	29.089.456	2.272.364	8,47	
b	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan**	**100%**	**9.317.092**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan**	**100%**	**11.589.456**	**2.272.364**	**24,39**	

Dipindai dengan CamScanner

1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 pendampingan	8.317.092	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 pendampingan	10.589.456	2.272.364	27,32	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 rekomendasi	1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	600 rekomendasi	1.000.000	-	0,00	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**27.817.092**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**30.089.456**	**2.272.364**	**8,17**	
a	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100%**	**27.817.092**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100%**	**30.089.456**	**2.272.364**	**8,17**	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	14.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	14.000.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	9 laporan	13.817.092	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	9 laporan	16.089.456	2.272.364	15,45	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan**	**100%**	**1.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan**	**100%**	**1.000.000**	-	**0,00**	
a	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**1.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**1.000.000**	-	**0,00**	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 instansi	1.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 instansi	1.000.000	-	0,00	

Dipindai dengan CamScanner

V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum perangkat daerah di kecamatan	100%	1.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum perangkat daerah di kecamatan	100%	1.000.000	-	0,00	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	1.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	1.000.000	-	0,00	
1	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan	9 desa	1.000.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan	9 desa	1.000.000	-	0,00	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	11.317.092	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	13.589.456	2.272.364	20,08	
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%	11.317.092	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%	13.589.456	2.272.364	20,08	

Dipindai dengan CamScanner

1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 desa	1.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 desa	1.500.000	-	0,00	
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	9 desa	1.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	9 desa	1.000.000	-	0,00	
3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPerdesaan di Wilayah Kecamatan	9 desa	8.817.092	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9 desa	11.089.456	2.272.364	25,77	
	TOTAL			**2.744.276.721**				**2.790.826.721**	**46.550.000**	**1,70**	

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Kubu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah dan kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Kubu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Kubu.

Pembahasan secara sistematis dan detail tentang segala permasalahan di masyarakat maupun menyangkut kewilayahan, hal ini untuk memberikan ruang bagi OPD agar dapat menentukan langkah dalam mencapai sasaran pelayanan yang lebih maksimal dan mewujudkan kesejahteraan di Kecamatan Kubu. Rumusan yang digali dari permasalahan mikro diharapkan dapat mengerucut menjadi kegiatan yang dapat mengakomodir setiap permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Kubu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan harapan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Kubu, 30 Juli 2025

Camat Kubu

I Gede Kanena Setiawan, S.STP, MPA

Pembina Tk. I

NIP. 19830809 200212 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KAB. KARANGASEM

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

2025

2025

(0363) 21037
http://diskominfo.karangasemkab.go.id
Jl. Ngurah Rai No. 29, Karangasem

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas karunia serta anugrah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja merupakan kewajiban Dinas/ Instansi Pemerintah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kegiatan sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

Keberhasilan penyusunan Renja ini berkat kerja sama yang baik semua komponen bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Bahwa materi Renja ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon partisipasi semua pihak untuk memberikan masukan berupa kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan dari laporan ini. Untuk itu kami tak lupa mengucapkan terima kasih.

Demikian semoga ini bisa bermanfaat bagi pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 7 Pebruari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem

I Arta Negara, S.STP.,MAP
NIP.19820722 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ---------- **i**
Daftar Isi ---------- **ii**
BAB I PENDAHULUAN ---------- **1**
1.1 Latar Belakang ---------- 1
1.2 Landasan Hukum ---------- 2
1.3 Maksud dan Tujuan ---------- 5
1.4 Sistematika Penulisan ---------- 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU ---------- 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai TW II ---------- 8
2.2 Isu-isu Penting yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ---------- 14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ---------- **34**
3.1 Tujuan dan Sasaran ---------- 34
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan ---------- 36
3.3 Program dan Kegiatan ---------- 37
BAB IV PENUTUP ---------- **47**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pemerintahan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika tidak hanya berfungsi sebagai pengelola teknologi informasi, tetapi juga sebagai penggerak utama keterbukaan informasi publik, komunikasi pemerintahan, serta keamanan data dan informasi di tingkat daerah.Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai Perangkat Daerah menyusun rencana kerja yang merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini disusun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
b. Pelaksanaan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
d. Pelaksanaan administrasi dinas meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tahun 2025 ditetapkan sebagai masa transisi penting dari SPBE menuju konsep pemerintahan digital. Transformasi ini diarahkan agar layanan publik semakin berorientasi kepada pengguna, efisien, terpadu, serta meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam operasional kegiatan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya rencana kerja ini akan mengarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang terukur, cermat, efisien dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun

2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 11);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
20. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda Tanggal 12 Juni 2024 Tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Tanggal 27 Maret 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 -2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11).

30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud :

Rencana Kerja (Renja) merupakan instrumen penting dalam manajemen kinerja dan pengendalian program pembangunan tahunan. Renja menjabarkan arah kebijakan dan sasaran strategis dalam RPJMD dan renstra perangkat daerah ke dalam rencana tahunan yang lebih operasional, terukur, dan dapat dilaksanakan. Dengan adanya Renja, setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas, sehingga capaian pembangunan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara obyektif. Selain itu, Renja berfungsi sebagai dasar penganggaran, sehingga alokasi sumber daya dapat diarahkan secara tepat sesuai prioritas pembangunan daerah. Renja juga menjadi instrumen pengendalian yang memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah kepada masyarakat. Dengan demikian, Renja merupakan landasan utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan :

Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi

program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun berjalan, sehingga tercapai keselarasan dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan arah kebijakan pembangunan daerah serta disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2) Pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BerdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika penyusuanan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai TW II
2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran
3.2 Strategi dan arah kebijakan
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai TW II

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Dari sisi realisasi fisik, sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan. Kegiatan yang bersifat reguler dan berulang, seperti pelayanan administrasi, fasilitasi, serta koordinasi lintas sektor, dapat terlaksana dengan capaian output yang relatif tinggi. Namun, untuk kegiatan pembangunan fisik maupun pengadaan barang dan jasa, masih terdapat beberapa yang baru pada tahap proses lelang maupun penandatanganan kontrak, sehingga progres fisiknya belum signifikan.

Dari sisi realisasi keuangan, hingga akhir Triwulan II rata-rata serapan anggaran berada pada kisaran 27,24%, yang relatif masih di bawah target ideal semester pertama. Rendahnya penyerapan ini umumnya dipengaruhi oleh faktor administrasi, antara lain proses verifikasi dokumen, keterlambatan pencairan dana, serta pergeseran jadwal kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dari sisi capaian kinerja, beberapa indikator kinerja perangkat daerah telah menunjukkan tren positif, terutama pada indikator pelayanan publik, peningkatan kualitas tata kelola, dan efektivitas koordinasi program lintas sektor. Berikut pada tabel 2.1 disajikan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah

Tabel 2.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
								Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana						
1					2	3		4		5		6		7		8		9	10	11	12	13
						Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							Rp10,234,771,195	Rp19,030,653,145			Rp12,131,854,674	Rp10,796,343,635					
2	16				**BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							Rp10,184,271,207	Rp18,967,205,081			Rp11,931,854,674	Rp10,702,593,635					
2	16	1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*	*Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah*			100 %	100 %	Rp5,690,499,195	Rp5,783,909,259	100 %	100 %	Rp5,892,091,044	Rp5,026,728,977					
2	16	1	02	01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Persentase Terlaksanaya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Terlaksanaya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			100 %	100 %	Rp7,886,588	Rp19,386,588	100 %	100 %	Rp106,083,922	Rp17,083,922					
				0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar	6 dokumen	6 dokumen	Rp5,049,088	Rp11,949,088	6 dokumen	6 dokumen	Rp65,329,622	Rp10,329,622	✓				
				0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar	3 laporan	3 laporan	Rp0,857,500	Rp7,457,500	3 laporan	3 laporan	Rp40,754,300	Rp6,754,300	✓				
2	16	1	02	02	**Administasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Persentase Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Terlaksanaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			100 %	100 %	Rp5,066,490,766	Rp5,084,047,002	100 %	100 %	Rp4,522,730,502	Rp4,400,730,502					
				0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar	28 orang	28 orang	Rp4,175,316,404	Rp5,083,047,002	28 orang	28 orang	Rp4,472,730,502	Rp4,399,730,502	✓				
				0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PJK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PJK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PJK	Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar	11 orang		Rp890,174,362	Rp0	-	-	Rp0		✓				
				0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar	2 laporan	2 laporan	Rp1,000,000	Rp1,000,000	2 laporan	2 laporan	Rp50,000,000	Rp1,000,000	✓				

2	**16**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			100 %	100 %	Rp5,066,490,766	Rp5,084,047,002	100 %	100 %	Rp4,522,730,502	Rp4,400,730,502					
				0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	28 orang	28 orang	Rp4,175,316,404	Rp5,083,047,002	28 orang	28 orang	Rp4,472,730,502	Rp4,399,730,502	✔				
				0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan P3K	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	11 orang		Rp890,174,362	Rp0	-	-	Rp0		✔				
				0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	2 laporan	2 laporan	Rp1,000,000	Rp1,000,000	2 laporan	2 laporan	Rp50,000,000	Rp1,000,000	✔				
2	**16**	**1**	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***			100 %	100 %	Rp1,000,000	Rp1,000,000	100 %	100 %	Rp15,000,000	Rp1,000,000					
				0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	2 laporan	2 laporan	Rp1,000,000	Rp1,000,000	2 laporan	2 laporan	Rp15,000,000	Rp1,000,000	✔				
2	**16**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***							100%	100%	Rp100,000,000	Rp0					
				0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem					53 paket	53 paket	Rp100,000,000	Rp0	✔				
2	**16**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***			100 %	100 %	Rp146,372,750	Rp158,432,018	100 %	100 %	Rp344,021,358	Rp140,021,368					
				0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	12 paket	12 paket	Rp1,894,600	Rp1,885,500	12 paket	12 paket	Rp17,517,800	Rp2,517,800	✔				
				0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	2 paket	2 paket	Rp1,982,600	Rp34,050,968	2 paket	2 paket	Rp63,065,058	Rp33,065,068	✔				
				0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	12 paket	12 paket	Rp82,589,550	Rp92,589,550	12 paket	12 paket	Rp74,339,100	Rp74,339,100	✔				
				0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	5 paket	5 paket	Rp6,000,000	Rp6,000,000	5 paket	5 paket	Rp16,194,200	Rp6,194,200	✔				
				0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	12 dokumen	12 dokumen	Rp3,906,000	Rp3,906,000	2 dokumen	12 dokumen	Rp9,905,200	Rp3,905,200	✔				
				0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	12 laporan	12 laporan	Rp50,000,000	Rp20,000,000	12 laporan	12 laporan	Rp160,000,000	Rp20,000,000	✔				

	2	**16**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***							100%	100%	Rp297,000,000	Rp0					
					0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem					2 unit	2 unit	Rp100,000,000	Rp0	✔				
					0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem					3 unit	3 unit	Rp97,000,000	Rp0	✔				
	2	**16**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			100%	100%	Rp131,200,000	Rp263,200,000	100%	100%	Rp241,646,374	Rp263,200,000					
					0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	12 laporan	12 laporan	Rp1,200,000	Rp1,200,000	12 laporan	12 laporan	Rp3,200,000	Rp1,200,000	✔				
					0002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	12 laporan	12 laporan	Rp130,000,000	Rp262,000,000	12 laporan	12 laporan	Rp238,446,374	Rp262,000,000	✔				
	2	**16**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			100%	100%	Rp337,549,091	Rp257,843,651	100%	100%	Rp265,608,888	Rp204,693,185					
					0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	8 unit	8 unit	Rp112,200,000	Rp165,702,552	8 unit	8 unit	Rp165,702,552	Rp165,702,552	✔				
					0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelih	Jumlah Mebel yang Dipelihara									Rp4,000,000	Rp2,000,000	✔				
					0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	17 unit	17 unit	Rp20,949,091	Rp20,949,091	17 unit	17 unit	Rp52,920,344	Rp14,492,034	✔				
					0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	1 unit	1 unit	Rp204,400,000	Rp71,192,008	1 unit	1 unit	Rp42,985,992	Rp22,498,599	✔				
	2	**16**	**2**			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	***Persentase Pemenuhan Layanan dan Pengendalian Komunikasi, Informasi dan Media Massa***	***Persentase Pemenuhan Layanan dan Pengendalian Komunikasi, Informasi dan Media Massa***			100 %	100 %	Rp649,297,664	Rp8,714,123,200	100 %	100 %	Rp1,228,576,306	Rp1,170,072,672					
	2	**16**	**2**	**02.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola***	***Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola***			100 %	100 %	Rp649,297,664	Rp8,714,123,200	100 %	100 %	Rp1,228,576,306	Rp1,170,072,672					
					0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	78 komunitas	78 komunit	Rp21,389,888	Rp21,009,688	komunitas	78 komunitas	Rp34,113,000	Rp21,009,688	✔				
					0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	3 permohonan	3 permohon	Rp199,646,300	Rp159,835,556	rmohonan	3 permohonan	Rp214,063,192	Rp203,963,192	✔				
					0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	100 %	100 %	Rp15,000,000	Rp28,000,000	100 %	100 %	Rp28,300,322	Rp15,000,000	✔				
					0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	4 media	4 media	Rp413,261,476	Rp8,505,277,956	4 media	4 media	Rp952,099,792	Rp930,009,792	✔				

16	**3**			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	***Persentase Pemenuhan Data Elektronik***	***Persentase Pemenuhan Data Elektronik***			100 %	100 %	Rp3,844,474,348	Rp4,469,172,622	100 %	100 %	Rp4,811,187,324	Rp4,505,791,986					
16	**3**	**02.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Terkelolanya Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Terkelolanya Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***			100 %	100 %	Rp100,000,000	Rp100,000,000	100 %	100 %	Rp125,395,338	Rp100,000,000	✔				
			0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100,000,000	Rp100,000,000	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp125,395,338	Rp100,000,000	✔				
16	**3**	**02.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Sistem Layanan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola***	***Persentase Sistem Layanan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola***			100%	100%	Rp3,744,474,348	Rp4,369,172,622	100%	100%	Rp4,685,791,986	Rp44,057,910,986					
			0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	8 aplikasi	8 aplikasi	Rp2,354,224,360	Rp2,276,922,184	8 aplikasi	8 aplikasi	Rp2,439,912,360	Rp2,336,912,360	✔				
			0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SBPE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SBPE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	8 aplikasi	8 aplikasi	Rp25,000,000	Rp25,000,000	8 aplikasi	8 aplikasi	Rp25,000,000	Rp25,000,000	✔				
			0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah implementasi inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	1 program	1 program	Rp25,000,000	Rp25,000,000	1 program	1 program	Rp20,108,788	Rp2,025,770,838	✔				
			0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	1 dokumen	1 dokumen	Rp40,249,988	Rp40,249,988	1 dokumen	1 dokumen	Rp0	Rp0	✔				
			0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	Rp1,300,000,000	Rp2,002,000,450	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	Rp2,200,770,838	Rp18,108,788	✔				

2	**20**				**BIDANG STATISTIK**					100 %	100 %	Rp40,500,000	Rp42,758,620	100 %	100 %	Rp100,000,000	Rp70,000,000					
2	**20**	**2**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	***Persentase Penyusunan Statistik Sektoral dan Metadata***	***Persentase Penyusunan Statistik Sektoral dan Metadata***			100 %	100 %	Rp40,500,000	Rp42,758,620	100 %	100 %	Rp100,000,000	Rp70,000,000					
2	**20**	**2**	**02.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***			100 %	100 %	Rp40,500,000	Rp42,758,620	100 %	100 %	Rp100,000,000	Rp70,000,000					
				0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	100 %	100 %	Rp20,250,000	Rp22,508,620	100 %	100 %	Rp50,000,000	Rp40,000,000	✔				
				0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	1 dokumen	1 dokumen	Rp20,250,000	Rp20,250,000	1 dokumen	1 dokumen	Rp50,000,000	Rp30,000,000	✔				
2	**21**				**BIDANG PERSANDIAN**					100 %	100 %	Rp9,999,988	Rp20,689,444	100 %	100 %	Rp100,000,000	Rp23,750,000					
2	**21**	**2**			**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	***Persentase Pemenuhan Sumber Daya Persandian untuk Pengamanan Informasi***	***Persentase Pemenuhan Sumber Daya Persandian untuk Pengamanan Informasi***			100 %	100 %	Rp9,999,988	Rp20,689,444	100 %	100 %	Rp100,000,000	Rp23,750,000					
2	**21**	**2**	**02.01**		**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***			100 %	100 %	Rp9,999,988	Rp20,689,444	100 %	100 %	Rp100,000,000	Rp23,750,000					
				0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	2 dokumen	2 dokumen	Rp9,999,988	Rp20,689,444	2 dokumen	2 dokumen	Rp100,000,000	Rp23,750,000	✔				

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target kinerja. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja berperan dalam:

1. **Menjamin Ketercapaian Sasaran**
   Pengendalian dilakukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu, kualitas, maupun anggaran.
2. **Identifikasi Permasalahan dan Penyimpangan**
   Evaluasi memberikan gambaran mengenai hambatan dan deviasi yang terjadi dalam pelaksanaan program, sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif.
3. **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi**
   Melalui laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun secara periodik, perangkat daerah mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mendukung transparansi pengelolaan anggaran dan sumber daya.
4. **Dasar Penyusunan Perencanaan Tahun Berikutnya**
   Hasil evaluasi menjadi referensi dalam penyusunan Renja tahun selanjutnya, sehingga perencanaan lebih tepat sasaran dan mampu mengakomodasi rekomendasi perbaikan.

Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pada tabel 2.2 diuraikan rekapitulasi capaian kinerja program dan kegiatan renja per triwulan II tahun 2025

Tabel 2.2

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Renja per Triwulan II Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									I		II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	16	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100%	Rp 5,805,015,807	38%	Rp855,371,490	40%	Rp 1,209,901,242.00	100%	Rp 7,133,680,388	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 19,386,588	32%	Rp 2,838,516	19%	Rp 225,800.00	100%	Rp 23,652,200	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Rp 11,949,088	30.00%	Rp 2,838,516	31.00%	Rp 225,800.00	100%	Rp 20,814,700	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Rp 7,437,500	3.00%	0.00	6.00%	0.00%	100%	Rp 2,837,500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp5,141,844,282	28.00%	Rp766,419,692	41.00%	Rp 1,077,976,219.00	100%	Rp 3,666,478,287	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp5,140,844,282	25.00%	Rp766,419,692	38.00%	Rp 1,077,976,219.00	100%	Rp 3,666,478,287	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Rp 1,000,000	3.00%	0.00	6.00%	0.00%	0.00%	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 1,000,000	3.00%	0.00	6.00%	0.00%	0.00%	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Rp 1,000,000	3.00%	0.00	6.00%	0.00%	0.00%	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 150,414,926	87.17%	Rp 26,312,301	60.00%	Rp 24,815,006.00	100%	Rp 385,903,974	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 1,885,500	3.00%	0.00%	45.00%	Rp 598,845.00	100%	Rp 1,894,600	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 26,033,876	32.00%	Rp 5,344,176	58.00%	Rp 8,016,264.00	100%	Rp 31,113,824	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Rp 92,589,550	15.00%	Rp 5,356,225	25.00%	Rp 12,916,097.00	100%	Rp 92,989,550	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Rp 6,000,000	3.00%	0.00%	35.00%	Rp 1,447,000.00	100%	Rp 6,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp 3,906,000	20.00%	Rp 466,100	42.00%	Rp 726,800.00	100%	Rp 3,906,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait	100%	Rp 20,000,000	85.00%	Rp 15,145,800	95.00%	Rp 1,110,000.00	100%	Rp 250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 263,200,000	52.50%	Rp 31,337,167	61.00%	Rp 36,339,261.00	100%	Rp 2,148,966,062	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Rp 1,200,000	45.00%	Rp 300,000	46.00%	0.00%	100%	Rp 16,965,612	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.08	0002w	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Rp 262,000,000	15.00%	Rp 31,037,167	30.00%	Rp 36,339,261.00	100%	Rp 2,132,000,450	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 229,170,011	24.33%	Rp 28,463,814	52.67%	Rp 70,544,956.00	100%	Rp 448,679,865	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Rp 152,326,914	13.00%	Rp 14,503,374	40.00%	Rp 42,162,296.00	100%	Rp 188,283,029	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100%	Rp 20,949,091	3.00%	0.00	51.00%	Rp 7,442,000.00	100%	Rp 19,300,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Rp 55,894,006	25.00%	Rp 13,960,440	67.00%	Rp 20,940,660.00	100%	Rp 231,096,836	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	100%	Rp1,170,072,672	9.75%	Rp 8,183,150	23.75%	Rp 28,239,764.00	100%	Rp 2,868,594,500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100%	Rp1,170,072,672	9.75%	Rp 8,183,150	23.75%	Rp 28,239,764.00	100%	Rp 2,868,594,500	Dinas Komunikasi dan Informatika	

						Kabupaten/Kota yang Terkelola										
2	16	02	2.01	0015	Kenitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	100%	Rp 21,009,688	3.00%	0.00%	6.00%	0.00%	100%	Rp 100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	Rp 203,963,192	3.00%	Rp 2,672,088	10.00%	Rp 8,808,132.00	100%	Rp 2,517,292,700	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik media berbayar sesuai kriteria/juknis	100%	Rp 15,000,000	3.00%	0.00%	6.00%	0.00%	100%	Rp 219,396,300	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100%	Rp 930,099,792	3.00%	Rp 5,511,062	7.00%	Rp 19,431,632.00	100%	Rp 31,905,500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Pemenuhan Data Elektronik	100%	Rp4,582,083,166	116.80%	Rp218,980,522	59.10%	Rp 454,458,222.00	100%	Rp 3,979,698,114	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terkelolanya Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 100,000,000	100.00%	Rp 99,511,500	100.00%	0.00%	100%	Rp 479,145,530	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	100%	Rp 100,000,000	100.00%	Rp 99,511,500	100.00%	0.00%	100%	Rp 479,145,530	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.02		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sistem Layanan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola	100%	Rp4,482,083,166	33.60%	Rp119,469,022	18.20%	Rp 454,458,222.00	100%	Rp 3,500,552,584	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	100%	Rp2,389,832,728	8.00%	Rp113,119,922	11.00%	Rp 84,582,628.00	100%	Rp 33,362,800	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100%	Rp 25,000,000	3.00%	0.00%	6.00%	0.00%	100%	Rp 3,092,424,184	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	100%	Rp 25,000,000	3.00%	0.00%	30.00%	Rp 5,880,000.00	100%	Rp 316,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.02	0028	Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	100%	Rp 40,249,988	19.00%	Rp 6,349,100	21.00%	0.00%	100%	Rp 50,765,600	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	03	2.02	00030	Penyediaan Akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses	100%	Rp 2,002,000,450	3.00%	0.00%	23.00%	Rp 363,995,594.00	100%	Rp 8,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

						internet yang disediakan oleh Dinas											
2	16	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Penyusunan Statistik Sektoral dan Metadata	100%	Rp 45,017,240	24.00%	Rp 2,460,000	20.50%	Rp 3,200,000.00	100%	Rp 157,706,503	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 45,017,240	16.50%	Rp 2,460,000	20.50%	Rp 3,200,000.00	100%	Rp 157,706,503	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01	00096	Peningkatan Kualitas data statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	100%	Rp 24,767,240	15.00%	Rp 2,460,000	35.00%	Rp 3,200,000.00	100%	Rp 145,867,653	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01	0010	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100%	Rp 20,250,000	3.00%		6.00%	Rp -	100%	Rp 11,838,850	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	Rp 18,017,080	19.00%	Rp 2,672,088	45.00%	Rp 4,008,132.00	100%	Rp 25,765,600	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 18,017,080	19.00%	Rp 2,672,088	45.00%	Rp 4,008,132.00	100%	Rp 25,765,600	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02	2.01	0001	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	100%	Rp 18,017,080	19.00%	Rp 2,672,088	45.00%	Rp 4,008,132.00	100%	Rp 25,765,600	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Total Rata-Rata Capain Kinerja dan Anggaran Seluruh Kegiatan 2025(%)	**Capaian Kinerja (27,24%)**
	Anggaran (Rp 2,787,474,610)

2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.2.1 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Untuk mengembangkan peluang mengembangakan komunikasi dan informatika yang merata, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informasi, antara lain:

1. Sering terjadinya perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan komunikasi dan informatika terutama eksistensi lembaga yang membidangi komunikasi dan informatika.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman pentingnya media informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Masih rendahnya sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi.

Dari berbagai tantangan yang terjadi terdapat solusi yang mungkin saja bisa meminimalisir semua tantangan yang terjadi di antaranya sebagai berikut.

1. Meningkatkan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
3. Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur IT yang ada sekarang.
4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
5. Mendukung serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

2.2.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2025-2029 yaitu :

Nangun Sat Kerthi Loka Bali "Menuju Karangasem yang AGUNG "Aman, Gigih, Unggul, Nyaman dan Gemah Ripah Loh Jinawi".

Pemaknaan lebih lanjut dari Visi Menuju Karangasem yang Agung, tercermin ke dalam 7 (tujuh) indikator pencapaian untuk 5 (lima) tahun kedepan meliputi:

1. Besar harapan dan tinggi cita-citanya,
2. Besar PAD, APBD dan PDRB nya,
3. Besar Pembangunannya,
4. Tinggi hasil serta manfaatnya untuk masyarakat Karangasem,
5. Besar Kesejahteraannya,
6. Tinggi Kemuliaannya dan,
7. Besar Sejarahnya.

Untuk mewujudkan Visi Menuju Karangasem yang AGUNG, disusun 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Menyelenggarakan Pembangunan yang Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaftif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuar reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba.
2. Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah.
3. Menyelenggarakan Sosial Kemasyarakatan yang Nyaman dan Harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.

Sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 ditetapkan berpedoman pada sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045. Berdasarkan pada RPJMD 2025-2029, misi yang ingin dicapai **Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaftif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba dan Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman** dan **Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah** dengan

sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem dan Meningkatnya jaringan komunikasi yang lebih memadai** Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Misi Bupati di atas, maka program yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pemerintahan yang prakerti-nadi adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

2.2.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan komunikasi dan informasi, pengelolaan persandian daerah, serta statistik sebagai penggabungan atas tiga urusan telah menjadikan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi relatif besar. Walaupun demikian, dari sisi pelayanan kepada masyarakat terutama dari sisi informasi dan komunikasi diharapkan lebih inten dan optimal. Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan salah satunya adalah dengan metode pendekatan yang efektif seperti dialog interaktif, komunikasi keliling, media elektronik, website serta media sosial.

Untuk mengembangkan peluang tersebut, maka media teknologi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam era sekarang, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan IT telah menyentuh sebagian besar masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat perdesaan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik antara lain sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia.
3. Tingginya risiko keamanan informasi pemerintah daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
5. Kurangnya sarana dan prasarana kantor terutama yang mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Masih adanya wilayah *Blank Spot* yang belum tersedia infrastruktur komunikasi.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan.
2. Optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia.
3. Terkendalinya risiko keamanan informasi pemerintah daerah.
4. Optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor terutama yang mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Berkurangnya wilayah *Blank Spot* yang belum tersedia infrastruktur komunikasi.

2.2.4 Formulasi Isu-Isu Penting Yang Perlu Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi.Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*.Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Isu strategis yang

menjadi tantangan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem ke depan lebih menitikberatkan pada peran teknologi dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Melalui peran teknologi, maka tiga hal pilar penting dalam pembangunan reformasi yakni transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dapat tercapai.

Dengan pendekatan ilmiah dan logis (teknokratik) maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna : segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan intansi publik Negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik dan diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

Isu strategis bidang keterbukaan informasi saat ini diantaranya adalah, **"Satu data dan layanan berbasis online untuk Kabupaten Karangasem".**Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu, pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan teknologi informasi komunikasi (TIK).Melaluisatuintegrasi data, layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Karangasem akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, dan sebagainya) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

2. Komitmen terhadap e-development

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di Negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global,

maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Demikian juga dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan usia informasi dan informasi yang sudah usang akan terabaikan dengan adanya informasi yanglebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Karangasem memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas selaku *stake holder*. Sistem informasi daerah yang terpadu sangat dibutuhkan dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat menyeluruh, dan terkoordinasi secara dinamis dan realistis, untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintahan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun pengevaluasian.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah. Isu strategis dibidang elektronik goverment diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Manajemen perkantoran yang paperless serta tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata

Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas dan menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja. Di sampingitu, juga diperlukan akses pemerataaninformasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas

bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Karangsem. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.

2. Tumbuh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi begitu pesat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat. Bila tidak diantisipasi secara tepat, tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat. Melaui pemanfaatan teknologi informasi, maka tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin menggema, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya. Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya, akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat dan berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya.

3. Adanya harapan dan kebutuhan yang besar terhadap dukungan sistem informasi dan telematika untuk meningkatkan kinerja manajemen aparatur.

Keberadaan sistem informasi dan telematikapada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan fungsi aparatur serta meningkatkan aspek transparansi aparatur sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RPJMN 2025-2029 dengan visi **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".** Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, Delapan Asta Cita, yaitu :

1. **ASTA CITA 1** :Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. **ASTA CITA 2** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. **ASTA CITA 3** :Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong wirausaha, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. **ASTA CITA 4** : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,

kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. **ASTA CITA 5** :Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. **ASTA CITA 6**: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. **ASTA CITA 7** : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. **ASTA CITA 8** : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumaat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan, yang mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

Tujuan I **Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Unggul dan Nyaman dalam bidang Pelayanan Umum/Publik**

Sasaran : 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem

Tujuan II **Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman kondisi infrastruktur dasar**

Sasaran : 6 Meningkatnya jaringan komunikasi yang lebih memadai

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dalam Mendukung Asta Cita adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Urusan, Arah Kebijakan, Asta Cita

Urusan	**Arah Kebijakan**	**Asta Cita**
Bidang Komunikasi Dan Informatika	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila,demokrasi,dan hak asasi manusia (HAM).
		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Bidang Statistik	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat, pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Bidang Persandian	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh Instansi. Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Keseluruhan program yang dilaksanakan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Rincian keseluruhan program diuraikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Rencana Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**19,030,653,145**					**15,167,000,000**
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**18,967,205,081**					**14,417,000,000**
2	**16**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah***		***100***	***%***	**5,783,909,259**			***100***	***%***	**5,842,000,000**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***100***	***%***	**19,386,588**			***100***	***%***	**34,000,000**
				0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karangasem	6	dokumen	11.949.088,00	APBD		6	dokumen	30,000,000
				0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karangasem	3	laporan	7.437.500,00	APBD		3	laporan	4,000,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***100***	***%***	**5,084,047,002**			***100***	***%***	**4,510,000,000**
				0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karangasem	28	Orang/bulan	5.083.047.002	APBD		28	Orang/bulan	4,500,000,000

				0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karangasem	2	laporan	1,000,000	APBD		2	laporan	10,000,000
2	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		***100***	***%***	**1,000,000**			***100***	***%***	**5,000,000**
				0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karangasem	2	laporan	1,000,000	APBD		2	laporan	5,000,000
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***									53,000,000
				0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	***Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan***	Kab. Karangasem								53,000,000
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***100***	***%***	**158.432.018,**			***100***	***%***	**252,000,000**
				0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	12	paket	1,885,500	APBD		12	paket	3,000,000
				0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	2	paket	34,050,968	APBD		2	paket	35,000,000
				0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	12	paket	92,589,550	APBD		12	paket	100,000,000
				0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karangasem	5	paket	6,000,000	APBD		5	paket	9,000,000

				0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karangasem	12	dokumen	3,906,000	APBD		12	dokumen	5,000,000
				0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karangasem	12	laporan	20,000,000	APBD		12	laporan	100,000,000
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**155,000,000**
				0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan									75,000,000
				0006	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan									80,000,000
				0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									0,00
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***100***	***%***	**263.200.000**			***100***	***%***	**285,000,000**
				0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karangasem	12	laporan	1,200,000	APBD		12	laporan	35,000,000
				0002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karangasem	12	laporan	262,000,000	APBD		12	laporan	250,000,000
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***100***	***%***	**257,843,651**			***100***	***%***	**548,000,000**
				0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karangasem	8	unit	165,702,552	APBD		8	unit	120,000,000

				0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Karangasem								3,000,000
				0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karangasem	17	unit	20,949,091	APBD		17	unit	25,000,000
				0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karangasem	1	unit	71.192.008	APBD		1	unit	400,000,000
2	**16**	**02**			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	***Persentase Pemenuhan Layanan dan Pengendalian Komunikasi, Informasi dan Media Massa***		***100***	***%***	**8,588,123,200**			***100***	***%***	**1,400,000,000**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola***			***%***	**8,588,123,200**				***%***	**1,400,000,000**
				0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Karangasem	78	komunitas	21,009,688	APBD		78	komunitas	150,000,000
				0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Karangasem	3	permohonan	159,835,556	APBD		3	permohonan	300,000,000
				0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Karangasem	100	persentase	10,000,000	APBD		100	persentase	500,000,000
				0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Karangasem	4	media	8,397,277,956	APBD		4	media	450,000,000
2	**16**	**03**			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	***Persentase Pemenuhan Data Elektronik***		***100***	***%***	**4.595.172.622**			***100***	***%***	**7,175,000,000**

2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Terkelolanya Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***100***	***%***	**100,000,000**			***100***	***%***	**350,000,000**
				0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Karangasem	1	dokumen	100,000,000	APBD		1	dokumen	350,000,000
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Sistem Layanan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola***		***100***	***%***	**4,495,172,622**			***100***	***%***	**6,825,000,000**
				0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Karangasem	8	Aplikasi	2,402,922,184	APBD		8	Aplikasi	3,700,000,000
				0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SBPE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Karangasem	8	Aplikasi	25,000,000	APBD		8	Aplikasi	75,000,000
				0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Karangasem	1	Program	25,000,000	APBD		1	Program	400,000,000
				0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Kab. Karangasem	1	dokumen	40,249,988	APBD		1	dokumen	150,000,000
				0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Karangasem	44	perangkat daerah	2,002,000,450	APBD		44	perangkat daerah	2,500,000,000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK**			***100***	***%***	**42,758,620**			***100***	***%***	**500,000,000**

2	**20**	**02**			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	***Persentase Penyusunan Statistik Sektoral dan Metadata***		***100***	***%***	**42,758,620**			***100***	***%***	**500,000,000**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***		***100***	***%***	**42,758,620**			***100***	***%***	**500,000,000**
				0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Karangasem	100	persentase	22,508,620	APBD		100	persentase	250,000,000
				0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Karangasem	1	dokumen	20,250,000	APBD		1	dokumen	250,000,000
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN**			***100***	***%***	**20,689,444**			***100***	***%***	**250,000,000**
2	**21**	**02**			**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	***Persentase Pemenuhan Sumber Daya Persandian untuk Pengamanan Informasi***		***100***	***%***	**20,689,444**			***100***	***%***	**250,000,000**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***100***	***%***	**20,689,444**			***100***	***%***	**250,000,000**
				0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Karangasem	1	dokumen	20,689,444	APBD		2	dokumen	250,000,000

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Pelaksanaannya dikendalikan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala yang mengacu pada indikator kinerja, meliputi capaian kegiatan, realisasi anggaran, dan sasaran program. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar koreksi, perbaikan, dan percepatan agar pelaksanaan program tetap sesuai target.

Keberhasilan Renja tidak hanya ditentukan oleh arah kebijakan dan strategi, tetapi juga oleh dedikasi aparatur, dukungan stakeholder, dan partisipasi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan program berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Amlapura, 7 Pebruari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem

Arta Negara, S.STP.,MAP
NIP.19820722 200012 1 001



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN MANGGIS

KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2025

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 774/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 732/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Camat Manggis Kabupaten Karangasem, di Tanahampo.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 774/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA
KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN
KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Camat Manggis Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Camat Manggis Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem
6.	Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Pemerintahan	Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem
8.	Kelompok Kerja Kesejahteraan Sosial	Kasi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem
9.	Kelompok Kerja Ketentraman dan Ketertiban	Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem
10.	Kelompok Kerja Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem
11.	Kelompok Kerja Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kasubag Penusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Keccamatan Manggis Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) oleh karena berkat rahmat-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Manggis Tahun 2025 dapat disusun dan terselesaikan.

Dokumen Renja (Renja) ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan
dimasa yang akan datang.

Tanahampo, 28 Juli 2025
CAMAT MANGGIS

PUTU EKA PUTRA TIRTANA, S.STP., MA
PEMBINA
NIP. 19830603 200112 1 004

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2025 10

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II 10

2.2 Isu-isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1 Tujuan dan Sasaran 23

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 24

3.3 Program dan Kegiatan 28

BAB IV PENUTUP 41

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 126 ayat 1 menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, ayat 2, Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, Kecamatan bukan sebagai wilayah administrasi dan Camat Bukan sebagai Kepala Wilayah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Camat mempunyai suatu kewenangan dalam menyusun program maupun kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di Kecamatan, perubahan ini mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kecamatan, tetapi juga hubungan antara Kecamatan dan Pemerinatahan Desa.

1.1 Latar Belakang

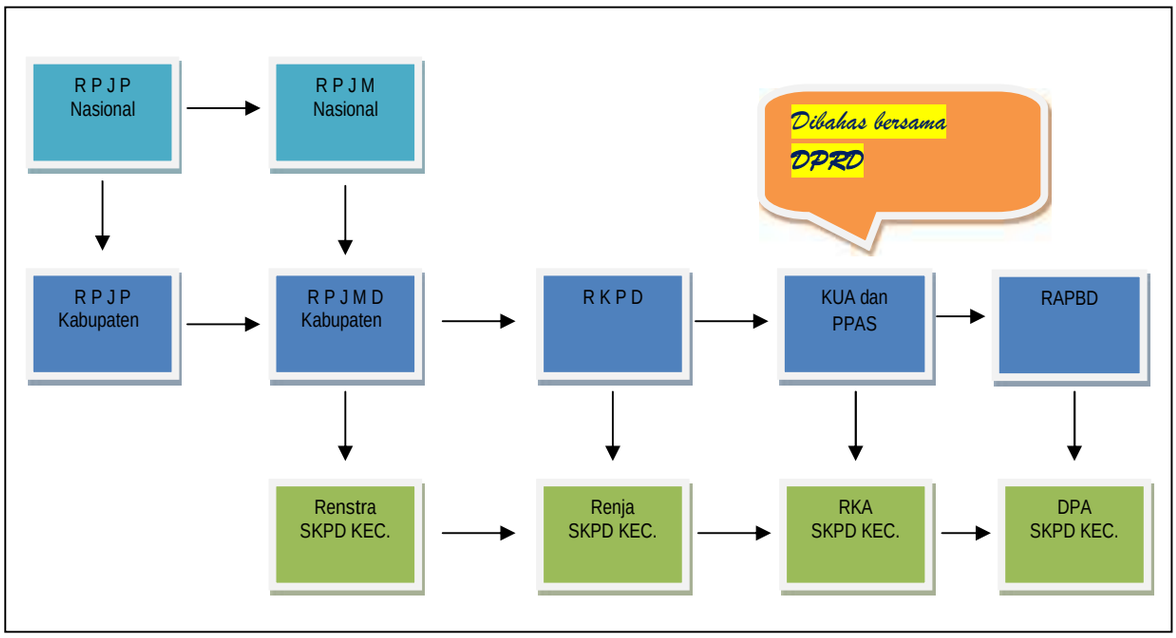
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahunan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Dokumen RKPD, merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD juga merupakan acuan dalam menyempurnakan RENJA Perangkat Daerah. Hal tersebut diatas didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Undang-Undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karangasem. Penyusunan RENJA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai proyeksi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Karangasem di Kecamatan Manggis dalam rangka MENUJU KARANGASEM YANG “AGUNG“ (Aman; Gigih; Unggul; Nyaman; dan Gemah Ripah Loh Jinawi) Visi Kabupaten Karangasem inilah yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD sendiri adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Dengan mengacu RPJMD maka langkah selanjutnya adalah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah. RENSTRA Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA SKPD ini berisi tentang visi-misi, tujuan, strategi dan kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif. Dari dokumen RENSTRA selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan RENJA Perangkat Daerah merujuk pada dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi RENJA tahun sebelumnya. Kecamatan Manggis masuk kedalam Misi Pertama Kabupaten Karangasem yaitu “Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaftif, Responsif, Profesional, dan Gigih serta memperkuar reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan bebas narkoba” Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Manggis merupakan Dokumen Perencanaan yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Karangasem yang disusun

sebagai pedoman dalam melaksanakan perubahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan Perubahan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Manggis yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja Kecamatan Manggis adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Manggis Tahun 2025-2029.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 25;
21. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
22. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 749/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
23. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 774/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;

24. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 307 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu ditindaklanjuti dengan program kegiatan yang diupayakan untuk mendukung program tersebut melalui pengembangan kegiatan kecamatan dengan memperhatikan semua potensi yang dimiliki. Semua itu perlu pencermatan dalam menyusun suatu rencana kerja sehingga dapat mengambil langkah yang benar-benar strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja disemua bagian.

Maksud : penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Manggis Tahun 2025 yakni sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati, dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem. Dan sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, serta untuk gambaran riil tentang permasalahan dan usulan kebutuhan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi.

tujuan : penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Manggis Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Manggis dalam mengoperasionalkan RKPD perubahan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manggis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2. Sebagai dasar dalam menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Manggis dalam anggaran perubahan tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Manggis Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Manggis dalam perubahan perubahan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Manggis, proses penyusunan Renja Kecamatan Manggis, keterkaitan antara Renja Kecamatan Manggis dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Manggis.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Manggis.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN MANGGIS TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triulan II factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target kinerja, dan menjelaskan factor-faktor yang menghambat dalam mencapai target kinerja.

2.2 Isu-isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MANGGIS

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat penjelasan tentang perumusan strategi dan arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun satu tahun kedepan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bab ini memuat penjelasan tentang perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting perubahan Renja dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja.

BAB II
EVALUASI RENJA TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Manggis Tahun 2025 Triwulan II mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2025 (diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025). Adapun realisasi Program/Kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan II dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

2.1.1 Capaian Sasaran Renja Tahun 2025

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran strategik kecamatan manggis untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
b. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.
c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penetapan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Manggis berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan isu-isu strategis daerah selama 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026. Dalam Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Manggis menetapkan tiga sasaran. Adapun capaian sasaran Kecamatan Manggis tersebut adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator kinerja Sasaran	Target 2025	Realisasi sampai TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%
Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%	90%	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87%	86%	97,64%

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran perangkat daerah sampai triwulan II (dua) Tahun 2025 di atas, ada 1 (satu) sasaran strategis yang belum terlaksana terlaksana yaitu Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yangmana sasaran ini beru terlaksana 97,64% dari target yang telah ditetapkan. Adapun factor-faktor yang menyebabkan 2 (dua) sasaran dari indicator kinerja yang ditetapkan tidak terlaksana antara lain :

1. Penempatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dari sasaran strategis tersebut ditempatkan pada Triwulan III.
2. Penempatan Anggaran Kas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dari sasaran tersebut ditempatkan pada Triwulan III.
3. Adanya pengadaan barang/jasa di Kabupaten Karangasem menggunakan system e-katalog, masih menghambat dalam proses pengadaan baik dalam pencairan anggaran maupun dalam mencari rekanan, terutama disaat ada gangguan pada internet.

2.1.2 Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem per triwulan II adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

PERANGKAT DAEARAH : KECAMATAN MANGGIS

Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat s/d tahun 2025 (%)	
									I		II					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN MANGGIS		100%	3.887.497.210	20%	994.127.995	20%	682.604.853	40%	1.676.732.848	40%	43%
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	100%	3.837.497.210	10%	979.503.220	30%	682.604.853	40%	1.662.108.073	40%	43%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	5.700.000	0%	-	75%	-	75%	-	75%	0%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000	0%	-	50%	-	50%	-	50%	0%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen KA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	0%	-	100%	-	100%	-	100%	0%

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	850.000	0%	-	75%	-	75%	-	75%	0%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	0%	-	100%	-	100%	-	100%	0%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	850.000	0%	-	50%	-	50%	-	50%	0%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun	100%	3.353.740.327	25%	949.912.590	25%	638.035.844	50%	1.587.948.434	50%	47%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	3.285.019.407	25%	915.981.270	25%	615.414.964	50%	1.531.396.234	50%	47%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.870.920	25%	33.931.320	25%	22.620.880	50%	56.552.200	50%	83%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	850.000					0%	-	0%	0%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi	100%	210.000.000	10%	7.576.200	15%	7.710.000	25%	15.286.200	25%	7%

7	03	03	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	2.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	03	03	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	185.000.000	10%	7.396.200	10%	4.350.000	20%	11.746.200	20%	6%
7	04	04	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	8.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	04	04	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.000.000	15%	180.000	25%	360.000	40%	540.000	40%	11%
7	04	04	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	10.000.000	0%	-	75%	3.000.000	75%	3.000.000	75%	30%
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah yang diadakan	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi kantor yang dilaksanakan	100%	86.475.638	30%	12.498.166	20%	7.767.147	50%	20.265.313	50%	23%
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000	65%	400.000	0%	-	65%	400.000	65%	53%

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	40.000.000	25%	8.990.034	25%	5.695.059	50%	14.685.093	50%	37%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.325.638	20%	3.108.132	0%	2.072.088	20%	5.180.220	20%	39%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	2 Laporan	32.400.000					0%	-	0%	0%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	181.581.245	10%	9.516.264	25%	29.091.862	35%	38.608.126	35%	21%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	143.581.245	10%	9.516.264	0%	29.091.862	10%	38.608.126	10%	27%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	23.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100%	20.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	20.000.000	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan	100%	3.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	1.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	1.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	14.500.000	50%	9.155.400	0	-	50%	9.155.400	50%	63%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	14.500.000	50%	9.155.400	0%	-	50%	9.155.400	50%	63%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga	10.000.000	100%	9.155.400	0%	-	100%	9.155.400	100%	92%

7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Sekolah	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	2.500.000	0%	1.667.750	0%	-	0%	1.667.750	0%	67%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	100%	2.500.000	80%	1.667.750	0%	-	80%	1.667.750	80%	67%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.500.000	80%	1.667.750	0%	-	80%	1.667.750	80%	67%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							0%	-	0%	0%

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	2.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	100%	2.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Lapran	2.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	7.500.000	50%	3.801.625	0%	-	50%	3.801.625	50%	51%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%	7.500.000	50%	3.801.625	0%	-	50%	3.801.625	50%	51%
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	4.500.000	100%	3.801.625	0%	-	100%	3.801.625	100%	84%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	3.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%

7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
									Rata0rata capaian kinerja (%)				50,00%	43,13%		
									Predikat kinerja				Tinggi	Tinggi		

Berdasarkan table di atas rata-rata capaian program dan kegiatan kinerja Kecamatan Manggis tahun 2025 sampai triwulan II yaitu :

a. Capaian Fisik sebesar 50,00% ini dikatagorikan predikat kinerja TINGGI adapun capaian fisik ini belum maksimal. karena ada beberapa program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya ditempatkan pada triulan III.
b. Capaian Keuangan 43,13%, capaian ini dikatagorikan TINGGI, hal ini disebabkan karena ada beberapa factor.

Faktor-faktor pendorong dan Penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja program dan kegiagatan yang dilaksanakan Kecamatan Manggis :

1. Faktor Pendorong

Adapun beberapa factor pendorong yang dapat mempengaruhi capaian kinerja kecamatan manggis pada triwulan II tahun anggaran 2025 antara lain :

- Adanya rencana kerja yang matang sehingga kegiatan dapat direncanakan jauh-jauh hari.
- Adanya rencana aksi sehingga kegiatan dapat dipersiapkan sebelum kegiatan itu dilaksanakan.
- Adanya kekompakan SteakHolder, Masyarakat dan ASN kecamatan manggis dalam melaksanakan kegiatan.
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung.
- Adana anggaran yang memadai.

2. Faktor Penghambat

Sedangkan beberapa factor yang dapat menghambat capaian kinerja program, kegiatan Kecamatan Manggis antara lain :

- Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun 2025 mengunakan system e-katalog cukup menyulitkan Perangkat Daerah dalam proses pencairan anggaran.
- Belum adanya sosialisasi dalam pengadaan barang/jasa secara e-katalog kepada para bendahara pengeluaran Perangkat Daerah, sehingga dalam prses pencairan anggaran terhambat.
- Adanya gangguan jaringan (jaringan lemot) yang sering dialami oleh Perangkat Daerah dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga proses pengadaan barang/jasa sering mengalami penundaan.
- Adanya penempatan anggaran kas masih keliru, sehingga proses pencairan anggaran terhambat.
- Adanya keterlambatan respon oleh Rekanan disaat proses pelaksanaan pengadaan barang jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa harus

diulang kembali yang menyebabkan pelaksanaan Program/kegiatan terhambat.

2.2 Isu-isu Penting Yang Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Manggis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, wilayah kerja meliputi 12 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Manggis. Dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Manggis memiliki potensi SDM yang sangat beragam. Kecamatan Manggis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Karangasem yang dilaksanakan oleh Camat Manggis beserta seluruh jajaran sesuai SOTK, dalam hal ini menyangkut tugas dan fungsi jajaran aparatur di Kecamatan Manding antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha untuk meningkatkan sumber daya aparatur sehingga tercapai pelayanan yang maksimal dan fokus kepada tugas pokok dan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorporate Social Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa.

2.2.1 Permasalahan yang ada di Kecamatan Manggis

Adapun permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan antara lain :

1. Kwalitas SDM kurang optimal
2. Lingkunan kantor perlu perawatan rutin
3. Belum ada SDM pengelola arsip
4. Kondisi bangunan perkantoran yang kurang memadai untuk pelayanan publik.
5. Kompetensi pegawai kurang optimal
6. Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai

2.2.2 Tantangan yang dihadapi Kecamatan Manggis

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengelolaan surat
2. Melakukan perawatan secara rutin dan berkesinambungan
3. Mengadakan perbaikan peralatan kerja kantor
4. Meningkatkan pengelola arsip, baik arsip dinamis aktif, dinamis in aktif dan dinamis pasif
5. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan bangunan kantor secara kontinu
6. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
7. Diadakan pengelolaan kepegawaian dan pembinaan pegawai secara rutin
8. Menyampaikan laporan keuangan dan pemerintahan yang akurat dan tepat waktu
9. Mengadakan Musrenbang secara berjenjang (*Bottom Up Planning*) mulai dari tingkat desa dan kecamatan
10. Mengadakan peringatan Hari Besar Nasional secara rutin serta mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai, wawasan kebangsaan
11. Mengadakan rapat koordinasi pimpinan atau rapat koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
12. Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
13. Mengadakan koordinasi monitoring pengendalian dan evaluasi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan pada Kecamatan Manggis, maka program dan kegiatan disusun berdasarkan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun dari tahun 2021-2026. Perumusan Perubahan Renja Kecamatan Manggis didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Dearah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Manggis berdasarkan rencana strategis tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan.
b. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali.
c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar

perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara focus, efektif dan efisien. Adapun tujuan dan sasaran dari rencana kerja tahun 2025 terbagi dalam sasaran dan tujuan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sasaran strategik kecamatan manggis untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
2. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Perangkat Daerah.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor internal (kekuatan, kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan tantangan) dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan menyusun strategi melalui :

1. *Strengts - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengts - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Peluang (O)	Tantangan (T)
	1. Adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait.	1. Masih kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima 2. Makin banyaknya anggaran yang terserap di Desa,sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal
	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal	1. Tersedianya Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok,fungsi dan tata kerja Kecamatan. 2. Tersedianya dukungan APBD.	1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal. 2. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada. 3. masih kurang profesionalnya beberapa personel organisasi 4. Sarana & Prasarana kerja yang belum memadai

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis daerah, dikaitkan dengan target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dalam table sebagai berikut.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	:	NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI (“KARANGASEM PRAKERTI NADI”)					
MISI 5	:	Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu					
Tujuan			Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 20	: Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan		1. Sasaran : 31		Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1. Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparatur pemerintah daerah untuk menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Karangasem.	1. Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu
						2. Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan	

Tujuan 21 : Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	1. Sasaran : 32 Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	1. Membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap hukum	Pendidikan politik kepada masyarakat

MISI 6	:	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 22 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Sasaran : 33 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
			2. Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan
			3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan
			4. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Manggis memuat didalamnya indikator kinerja dan kelompok sasaran. Indikator kinerja dan kelompok sasaran menggambarkan tolak ukur pencapaian rencana kerja dalam kurun satu tahun anggaran. Kelompok sasaran merupakan target kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Kecamatan Manggis merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja tahun 2025.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025 tersebut disusun berdasarkan potret permasalahan Kecamatan Manggis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban tugas kewilayahan (teritorial) dengan tugas pokok adalah menyelenggarakan pemerintahan umum dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki serta keterbatasan alokasi anggaran.

Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem terdiri dari penambahan dan pengurangan anggaran kegiatan, pengurangan target kinerja, pagu indikatif. Pergeseran dan perubahan belanja pada program dan kegiatan serta penyesuaian kembali kebutuhan belanja program dan kegiatan sebagaimana penyusunan awal tahun anggaran serta menyelaraskan kembali indikator kinerja kegiatan (keluaran) Perangkat Daerah pada tiap kegiatan sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran. Berdasarkan pagu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manggis Tahun Anggaran 2025 terdapat penambahan dan pengurangan anggaran pada Perubahan Renja yang diusulkan sebagai table berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MANGGIS DALAM APBD TAHUN 2025
DAN RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perubahan Renja Tahun 2025				Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Progaram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7					Unsur Kewilayahan										
7	01				Kecamatan										
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	Kec. Manggis	100 Persen	3.837.497.210	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	Kec. Manggis	100 Persen	4.146.047.438	308.550.228	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100 Persen	5.700.000	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100 Persen	5.950.000	250.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Manggis	2 Dokumen	1.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Manggis	2 Dokumen	1.000.000	-	

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Manggis	1	Dokumen	1.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Manggis	1	Dokumen	1.000.000	-	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Manggis	1	Dokumen	850.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Manggis	1	Dokumen	850.000	-	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Manggis	1	Dokumen	1.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Manggis	1	Dokumen	1.000.000	-	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Manggis	1	Dokumen	850.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Manggis	1	Dokumen	850.000	-	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Manggis	2	Laporan	1.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Manggis	2	Laporan	1.250.000	250.000	

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun	Kec. Manggis	100	Persen	3.353.740.327	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun	Kec. Manggis	100	Persen	3.634.464.917	280.724.590	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Manggis	29	Orang/ Bulan	3.285.019.407	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Manggis	29	Orang/ Bulan	3.562.620.357	277.600.950	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Manggis	12	Dokumen	67.870.920	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Manggis	12	Dokumen	70.594.560	2.723.640	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Manggis	1	Laporan	850.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Manggis	1	Laporan	1.250.000	400.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi	Kec. Manggis	100	Persen	210.000.000	Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi	Kec. Manggis	100	Persen	201.350.000	(8.650.000)	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Manggis	25	Paket	2.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Manggis	25	Paket	2.000.000	-	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Manggis	25	Paket	185.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Manggis	25	Paket	185.000.000	-	

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Manggis	10	Paket	8.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Manggis	10	Paket	8.000.000	-	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Manggis	2	Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Manggis	2	Dokumen	1.350.000	(3.650.000)	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Manggis	3	Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Manggis	3	Laporan	5.000.000	(5.000.000)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah yang diadakan	Kec. Manggis	2	Unit	-	Persentase Barang milik daerah yang diadakan	Kec. Manggis	2	Unit	17.500.000	17.500.000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Manggis	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Manggis				-	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Manggis	-	-		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Manggis	2	Unit	17.500.000	17.500.000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Manggis	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Manggis		-		-	

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi kantor yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100	Persen	86.475.638	Persentase administrasi kantor yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100	Persen	92.184.184	5.708.546	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Manggis	1	Laporan	750.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Manggis	1	Laporan	750.000	-	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Manggis	4	Laporan	40.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Manggis	4	Laporan	75.000.000	35.000.000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Manggis	1	Laporan	13.325.638	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Manggis	1	Laporan	16.434.184	3.108.546	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kec. Manggis			32.400.000		Kec. Manggis			-	(32.400.000)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kec. Manggis	100	Persen	181.581.245	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kec. Manggis	100	Persen	194.598.337	13.017.092	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Manggis	8	unit	143.581.245	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Manggis	8	unit	156.598.337	13.017.092	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Manggis	23	unit	13.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Manggis	23	unit	13.000.000	-	

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Manggis	3	Unit	25.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Manggis	3	Unit	25.000.000	-	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Manggis	100	Persen	23.000.000	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Manggis	100	Persen	23.000.000	-	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100	Persen	20.000.000	Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100	Persen	20.000.000	-	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Manggis	2	Dokumen	20.000.000	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Manggis	2	Dokumen	20.000.000	-	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan	Kec. Manggis	100	Persen	3.000.000	Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan	Kec. Manggis	100	Persen	3.000.000	-	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Manggis	3	Dokumen	1.500.000	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Manggis	3	Dokumen	1.500.000	-	

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Manggis	1	Laporan	1.500.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Manggis	1	Laporan	1.500.000	-	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Manggis	100	Persen	14.500.000	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Manggis	100	Persen	14.500.000	-	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100	Persen	14.500.000	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100	Persen	14.500.000	-	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Manggis	3	Lembaga	10.000.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Manggis	3	Lembaga	10.000.000	-	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Manggis	3	Dokumen	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Manggis	3	Dokumen	-	-	

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Manggis	1	Laporan	4.500.000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Manggis	1	Laporan	4.500.000	-	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Manggis	100	Persen	2.500.000	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Manggis	100	Persen	2.500.000	-	
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	Kec. Manggis	100	Persen	2.500.000	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	Kec. Manggis	100	Persen	2.500.000	-	
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas denganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Manggis	1	Laporan	2.500.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas denganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Manggis	1	Laporan	2.500.000	-	
7	01	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Manggis	1	Laporan	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Manggis	1	Laporan		-	

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Manggis	100	Persen	2.500.000	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Manggis	100	Persen	2.500.000	-	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Manggis	100	Persen	2.500.000	Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Manggis	100	Persen	2.500.000	-	
7	01	05		05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Manggis	1	Laporan	2.500.000	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Manggis	1	Laporan	2.500.000	-	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Manggis	100	Persen	7.500.000	PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Manggis	100	Persen	7.500.000	-	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100	Persen	7.500.000	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	Kec. Manggis	100	Persen	7.500.000	-	
				02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Manggis	3	Dokumen	4.500.000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Manggis	3	Dokumen	4.500.000	-	

				03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Manggis	24	Dokumen	3.000.000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Manggis	24	Dokumen	3.000.000	-	
				18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Manggis	1	Laporan	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Manggis	1	Laporan	-	-	
TOTAL ANGGARAN										3.887.497.210					4.196.047.438	308.550.228	

Berdasarkan tabel rumusan rencana kerja program dan kegiatan Kecamatan Manggis dalam APBD Tahun 2025 dan Rencana Perubahan Tahun 2025 di atas, bahwa perubahan rencana kerja Kecamatan Manggis tahun 2025 hanya pada Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan target kinerja, karena pada rumusan indicator yang ditetapkan pada rencana kerja sebelumnya tidak mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun perubahan rencana kerja Kecamatan Manggis pada Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif mendapat tambahan dana/pagu indikatif diperubahan tahun 2025 sebesar Rp. 308.550.228,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), dari penambahan anggaan tersebut alokasi anggaan secara keseluruhan sebesar RP. 4.196.047.438,00 (empat milyar seratus sembilan puluh enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). Adapun sub kegiatan yang mengalami penambahan dan rasionalisasi anggaran kegiatan dimaksud antara lain :

1. Penambahan Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Penambahan Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 277.600.950,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

3. Penambahan Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 2.723.640,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah).

4. Penambahan Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

5. Penambahan Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah, pada Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah).

6. Penambahan Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupih).

7. Penambahan Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 3.108.546,00 (tiga juta seratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

8. Penambahan Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 13.017.092,00 (tiga belas juta tujuh belas ribu sembilan puluh dua rupiah).

9. Rasionalisasi Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Rasionalisasi Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

11. Rasionalisasi Anggaran pada Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Manggis merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Manggis selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2025, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) OPD tahun 2025 dalam rangka hal tersebut Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Kecamatan Jetis ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Tanahampo, 28 Juli 2025

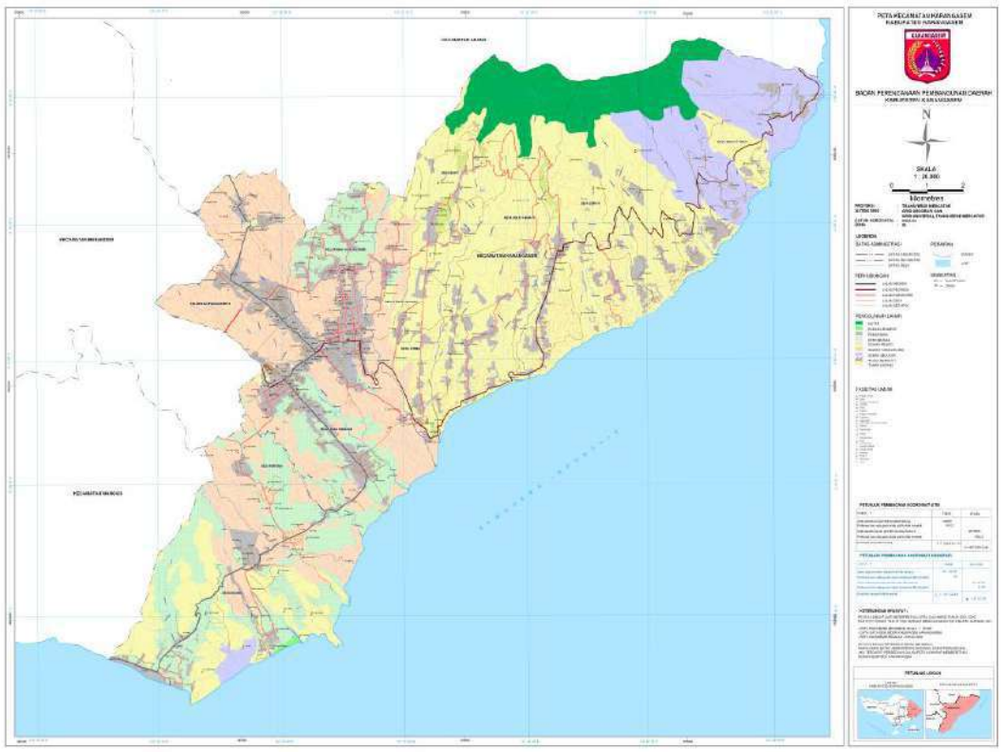
CAMAT MANGGIS

PUTU EKA PUTRA TIRTANA, S.STP., MA

PEMBINA

NIP. 19830603 200112 1 004

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGASEM TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM KECAMATAN KARANGASEM

KATA PENGANTAR

OM Swastyastu

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugra-Nya, kami dapat menyusun Rencangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2025. Penyusunan Rencangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Rencangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangasem Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangasem untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada Kecamatan Karangasem.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tentu banyak kekurangannya, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang telah ikut membantu demi terselesaikannya penyusunan Rencangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini kami mengucapkan banyak terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Amlapura, 11 September 2025

Camat Karangasem,

I Gusti Lanang Agung Wirawan, S.STP., MH

Pembina

NIP. 19860909 200602 1 004

DAFTAR ISI

Isi		Halaman
Cover	.....	i
Kata Pengantar	.....	ii
Daftar Isi	.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	.....	4
BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN KARANGASEM TAHUN 2022	....	6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangasem Sampai TW II	.....	6
2.1.1 Capaian Sasaran Renja Tahun 2025	.....	6
2.1.2 Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	..	7
2.2 Isu-Isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karangasem	.....	11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGASEM	.....	12
3.1 Tujuan dan sasaran	.....	12
3.1.1. Tujuan	.....	12
3.1.2 Sasaran	.....	12
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	.....	13
3.3 Program dan Kegiatan	.....	14
BAB V PENUTUP	.....	25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sehingga dipandang perlu untuk menyusun Rencangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangasem. Rencangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP).

Rencangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Karangasem dalam penyusunan Rencangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;

14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Awal Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016- 2022;
17. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Awal Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Awal atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
19. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1. 15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Karangasem Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Seta Tata Kerja Perangakat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
27. Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 732/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
28. Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 767/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangakat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangakat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem.
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan Renja

Maksud penyusunan Rencangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA perubahan Kecamatan Karangasem Tahun Anggaran 2025 serta sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja Kecamatan Karangasem Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2025 adalah :

1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Karangasem sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya serta mengacu pada peraturan yang baru.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencangan Akhir Perubahan RENJA Kecamatan Karangasem Tahun 2025, meliputi:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencangan Akhir Perubahan Renja, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penyusunan Rencangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja).

Bab II Evaluasi Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2025 sampai Triwulan II.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.

2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karangasem menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Karangasem saat ini.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karangasem

Bab ini dijelaskan mengenai perubahan-perubahan pada program dan kegiatan serta pendanaan program kegiatan berdasarkan hasil program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan. Pada bab ini berisikan tahapan dan

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA KECAMATAN KARANGASEM TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangasem sampai Triwulan II

2.1.1 Capaian Sasaran Renja Tahun 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai Tahun berjalan, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra perangkat daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA perangkat daerah tahun berjalan. Evaluasi terhadap capaian Kinerja Kecamatan Karangasem sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2,1
Capaian Kinerja Kecamatan Karangasem Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Sampai TW II	Capaian (%)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	30,85	36,38 %
Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktifitas kehidupannya	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	43	43 %
Meningkatnya Peran Serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokrasi	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	90	45	50 %

Berdasarkan table di atas ada 2 (dua) sasaran strategis yang yang realisasinya rendah, yaitu 36,38% sedangakan ada 2 (dua) sasaran strategis yang yang realisasinya sedang yaitu 43% dan 45%, hal ini ketiganya tidak sesuai dengan target yang telah

ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan 3 (tiga) sasaran dari indikator kinerja yang ditetapkan realisasinya rendah dan sedang antara lain sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yakni Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey kepuasan kepada masyarakat mengalami gangguan alias eror system.
2. LKPP tentang belanja menggunakan E-Purchasing (E-Catalog) menggunkan Pejabat Pengadaan dalam melakukan belanja pada E-Catalog Lokal mengacu pada belanja HVS, sehingga didapatkan efisiensi harga
3. Pelaksanaan dana kelurahan masih memerlukan pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah teknis yang terkait.
4. Adanya keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasana pelayanan dikarenakan realokasi anggaran
5. Penempatan Anggaran Kas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dari sasaran tersebut di tempatkan pada Triwulan III dan IV.

2.1.2 Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024:

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Karangasem per triwulan II adalah sebagaimana dilihat dari Tabel 2.2 sebagai berikut

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Triwulan II Tahun 2025

OPD : KECAMATAN KARANGASEM

No	Sasaran	Kode rekening				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Penyebab tidak tercapaian target kinerja
														I		II		III		IV									
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16	17
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7				UNSUR KEWILAYAHAN																							
		7	1			KECAMATAN KARANGASEM																							
1	33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	500%	35.427.709.509	188%	12.402.256.417	100%	7.502.416.426	24,99%	1.357.845.033	25,17%	1.888.041.218	0,00%	-	0,00%	-	50%	3.245.886.251	238%	6.836.610.926	48%	19,30%	Kec Karangasem dan ketiga Kelurahan	
		7	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi perangkat Daerah yang dilaksanakan	500%	264.733.450	174%	66.576.800	100%	10.405.792	22,80%	2.372.088	34,19%	3.558.132	0,00%	-	0,00%	-	57%	5.930.220	231%	47.768.000	46%	18,04%	Kec Karangasem dan ketiga Kelurahan	
		7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang	500%	27.744.523.620	190%	9.840.077.481	100%	6.621.220.162	24,99%	1.264.864.498	26,00%	1.721.564.934	0,00%	-	0,00%	-	51%	2.986.429.432	241%	6.125.981.291	48%	22,08%	Kec Karangasem dan ketiga	

		7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Kecamatan yang	500%	2.376.167.216	174%	844.445.080	100%	323.272.200	5,76%	18.619.310	19,72%	63.757.864	0,00%	-	0,00%	-	25%	82.377.174	199%	471.272.230	40%	19,83%	Kec Karangasem dan ketiga	
		7	1	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	500%	811.570.911	193%	241.161.500	100%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	0	193%	182.344.000	39%	22,47%	Kec Karangasem dan ketiga Kelurahan	
		7	1	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi kantor yang dilaksanakan	500%	1.938.123.336	173%	567.986.113	100%	294.674.170	23,69%	43.623.301	19,04%	56.118.012	0,00%	-	0,00%	-	43%	99.741.313	216%	374.259.240	43%	19,31%	Kec Karangasem dan ketiga	
		7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	500%	2.292.590.976	191%	842.009.443	100%	252.844.102	11,22%	28.365.836	17,02%	43.042.276	0,00%	-	0,00%	-	28%	71.408.112	219%	568.671.770	44%	24,80%	Kec Karangasem dan ketiga Kelurahan	
2		7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**	500%	776.662.400	196%	160.514.950	100%	28.324.184	7,50%	4.444.176	25,39%	7.191.264	0,00%	-	0,00%	-	33%	11.635.440	229%	108.563.600	46%	13,98%	Kec Karangasem	
		7	1	2	02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Penyelenggraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan yang Terkoordinasikan**	500%	535.000.000	194%	77.137.900	100%	10.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	0	194%	56.601.700	39%	10,58%	Kec Karangasem	
		7	1	2	02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase pedampingan pelanyanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang terkoordinasikan**	500%	241.662.400	199%	83.377.050	100%	18.324.184	14,99%	4.444.176	39,24%	7.191.264	0,00%	-	0,00%	-	54%	11.635.440	253%	40.921.300	51%	16,93%	Kec Karangasem	
3		7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**	500%	21.094.054.201	191%	7.550.469.594	100%	4.785.860.840	27,69%	559.829.427	18,56%	888.484.447	0,00%	-	0,00%	-	46%	1.448.313.874	237%	2.888.034.669	47%	13,69%	Kec Karangasem dan ketiga Kelurahan	
		7	1	3	02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang terkoordinasikan**	500%	194.000.000	176%	49.478.460	100%	17.740.000	43,81%	7.772.000	27,06%	4.800.000	0,00%	-	0,00%	-	71%	12.572.000	247%	35.266.870	49%	18,18%	Kec Karangasem dan ketiga Kelurahan	
		7	1	3	02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan**	500%	8.000.000.000	191%	7.500.991.134	100%	4.768.120.840	11,58%	552.057.427	18,53%	883.684.447	0,00%	-	0,00%	-	30%	1.435.741.874	221%	2.373.183.380	44%	29,66%	Kec Karangasem dan ketiga Kelurahan	

4	**31.Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**	**7**	**1**	**4**		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**500%**	**53.000.000**	**196%**	**10.560.450**	**100%**	**6.512.500**	0,00%	-	**30,10%**	**1.960.000**	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**30%**	**1.960.000**	**226%**	**2.427.950**	**45%**	**4,58%**	Kec Karangasem	
		7	**1**	**4**	**02.01**	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**500%**	**53.000.000**	**196%**	**10.560.450**	**100%**	**6.512.500**	0,00%	-	**30,10%**	**1.960.000**	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**30%**	**1.960.000**	**226%**	**2.427.950**	**45%**	**4,58%**	Kec Karangasem	
5	**32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak hak**	**7**	**1**	**5**		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**	**500%**	265.000.000	**197%**	**9.158.400**	**100%**	**14.881.000**	0,00%	-	**19,89%**	**2.960.000**	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**20%**	**2.960.000**	**217%**	**4.918.950**	**43%**	**1,86%**	Kec Karangasem	
		7	**1**	**5**	**02.01**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Umum Penugasan Kepala Daerah yang Terkoordinasikan**	**500%**	**265.000.000**	**197%**	**9.158.400**	**100%**	**14.881.000**	0,00%	-	**19,89%**	**2.960.000**	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**20%**	**2.960.000**	**217%**	**4.918.950**	**43%**	**1,86%**	Kec Karangasem	
6	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**1**	**6**		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**	**500%**	**1.045.000.000**	**194%**	**371.756.750**	**100%**	**81.413.600**	4,15%	-	**35,56%**	**28.953.090**	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**40%**	**28.953.090**	**234%**	**217.952.200**	**47%**	**20,86%**	Kec Karangasem dan ketiga Kelurahan	
		7	**1**	**6**	**02.01**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi**	**500%**	**1.045.000.000**	**194%**	**371.756.750**	**100%**	**81.413.600**	4,15%	3.380.000	**35,56%**	**28.953.090**	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**40%**	**32.333.090**	**234%**	**226.111.200**	**47%**	**21,64%**	Kec Karangasem dan ketiga Kelurahan	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		**50,16%**	**43,26%**						
																				Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	1. LKPP tentang belanja menggunakan E-Purchasing (E-Catalog) menggunkan Pejabat Pengadaan dalam melakukan belanja pada E-Catalog Local mengacu pada belanja HVS, sehingga didapatkan efisiensi harga
		2. Pelaksanaan dana kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait
		3. Adanya keeterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasana pelayanan dikarenakan realokasi anggaran
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Kepemimpinan yang kuat, Kerjasama yang baik dan solid oleh seluruh Aparatur Kecamatan Karangasem, 3 Kelurahan , Aparatur Desa dan stekholder terkait sesuai tupoksi masing-masing dengan memaksimalkan anggaran,sarana dan prasarana yang ada serta optimalisasi disemua layanan Publik Kecamatan dan 3 kelurahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Kegiatan supaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Kec. Karangasem berikutnya	:	Evaluasi Kinerja

Amlapura, 1 Juli 2025
Camat Karangasem

I Ketut Juni Arta Wijaya, S.STP., MAP
19800608 199810 1 021

2.2 Isu-Isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karangasem

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Karangasem di masa depan, isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tergambar dalam akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, yakni tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai dengan urusan yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, sedangkan laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Karangasem cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangasem adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya kinerja Kecamatan Karangasem dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
2) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
3) Tata kelola pemerintahan belum optimal

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGASEM

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangasem Tahun 2025 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Karangasem tahun 2006-2025, RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangasem Tahun 2021–2026. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan pada Kecamatan Karangasem, maka program dan kegiatan disusun berdasarkan kelompok sasaran dan pendanaan perangkat daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Karangasem, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2025, yaitu:

3.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Karangasem adalah :

1. Terwujudnya stabilitas keamanan & kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan & Pelayanan Publik

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan ujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus

dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktifitas kehidupannya
3. Meningkatnya Peran Serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokrasi.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Karangasem dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya stabilitas keamanan & kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktifitas kehidupannya	Persentase desa/Kelurahan dengan kategori berkembang dengan nilai minimal 350
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan & Pelayanan Publik	Meningkatnya Peran Serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokrasi.	Persentase penyelenggaraan pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Perangkat Daerah.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor internal (kekuatan, kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan tantangan) dalam mengembangkan kelembagaan secara

menyeluruh, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan menyusun strategi melalui:

1. *Strengts - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengts - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangasem sebagai berikut:

a. **Strategi**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktifitas kehidupannya
3. Meningkatkan Peran Serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokrasi.

b. Kebijakan

1. Mengoptimalkan stabilitas keamanan & kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Mengoptimalkan tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan & Pelayanan Publik

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke

dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Karangasem, dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangasem Tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025 tersebut disusun berdasarkan potret permasalahan Kecamatan Karangasem sebagai Perangkat Daerah (PD) yang mengemban tugas kewilayahan (teritorial) dengan tugas pokok adalah menyelenggarakan pemerintahan umum dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026. Kecamatan Karangasem tahun 2025 melaksanakan kegiatan sebanyak 6 Program, 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, yang mana ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut selain dilaksanakan di Kecamatan juga di 3 (tiga) Kelurahan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dimaksud seperti tabel di bawah ini:

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangasem Tahun 2025

A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**LOKASI**
1	**2**	**3**	**4**
	I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1**
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kec Karangasem**
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kec Karangasem**
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kec Karangasem**
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kec Karangasem**
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	**Kec Karangasem**
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kec Karangasem**
	II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2**
	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec Karangasem**
	8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
	III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3**
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**

	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec Karangasem**
	IV	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**
	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
	16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
	V	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5**
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kec Karangasem & 3 Kelurahan**
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**LOKASI**
	VI	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**6**
	20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Karangasem**
	VII	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	
	21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Nonusaha	**Kec Karangasem**
	22	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	**Kec Karangasem**
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**LOKASI**
	VIII	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**7**
	23	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Karangasem**
	24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Karangasem**
	IX	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	8
	25	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**3 Kelurahan**
	26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**3 Kelurahan**
	27	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**3 Kelurahan**
	28	Evaluasi Kelurahan	**3 Kelurahan**
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**LOKASI**
	X	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**9**
	29	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec Karangasem**

E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**LOKASI**
	XI	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10**
	30	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**Kec Karangasem**
	31	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	**Kec Karangasem**
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**LOKASI**
	XII	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**11**
	32	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec Karangasem & Kel. Karangasem**
	33	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**&**

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Karangasem tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel T-C. 31 sebagai berikut

Tabel T-C. 31

Rumusan Rencana Program Kegiatan Kecamatan Karangasem Dalam APBD Tahun 2025

Dan Rencana Akhir Renja Perubahan Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2025				Pagu Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2025				Bertambah / Berkurang
							Lokasi	Volume	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Volume	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN KARANGASEM & KELURAHAN															
					URUSAN KEWILAYAHAN										
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH.**		**100**	**persen**	**7.509.916.426**		**100**	**persen**	**7.853.383.942**	**343.467.516**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100**	**persen**	**10.405.792**		**100**	**persen**	**12.778.156**	**2.372.364**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangasem	2	dokumen	567.000	Kec. Karangasem	2	dokumen	567.000	-
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Karangasem	1	dokumen	459.600	Kec. Karangasem	1	dokumen	459.600	-
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Karangasem	1	dokumen	476.500	Kec. Karangasem	1	dokumen	476.500	-
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Karangasem	1	dokumen	567.800	Kec. Karangasem	1	dokumen	567.800	-
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Karangasem	1	dokumen	588.800	Kec. Karangasem	1	dokumen	588.800	-

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Karangasem	2	laporan	629.000	Kec. Karangasem	2	laporan	629.000	-
						Jumlah bulan Jasa Tenaga Administrasi Teknis/Operator yang terbayar.	Kec. Karangasem	12	bulan	7.117.092	Kec. Karangasem	12	bulan	9.489.456	2.372.364
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang Tersusun**		**100**	**persen**	**6.621.220.162**		**100**	**persen**	**6.955.679.504**	**334.459.342**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangasem	76	0rang/bulan	6.503.746.690	Kec. Karangasem	76	0rang/bulan	6.799.048.208	295.301.518
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	12	dokumen	117.473.472	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	12	dokumen	156.631.296	39.157.824
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum Kecamatan yang tersusun		**100**	**persen**	**330.772.200**		**100**	**persen**	**328.222.200**	**- 2.550.000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	172	paket	9.532.600	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	172	paket	9.532.600	-
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	1812	paket	272.395.800	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	1812	paket	277.345.800	4.950.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	45	paket	19.796.400	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	45	paket	19.796.400	-
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	dokumen	14.047.400	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	dokumen	14.047.400	-
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangasem	3	laporan	15.000.000	Kec. Karangasem	3	laporan	7.500.000	- 7.500.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan**		**100**	**persen**	**-**		**100**	**persen**	**-**	**-**

7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-	unit	-	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-	unit	-	-
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-	unit	-	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-	unit	-	-
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-	unit	-	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-	unit	-	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-	unit	-	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-	unit	-	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Administrasi kantor yang dilaksanakan**		**100**	**persen**	**294.674.170**		**100**	**persen**	**254.945.812**	**(39.728.358)**
7	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	laporan	2.000.000	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	laporan	2.000.000	-
						Jumlah bulan Jasa Tenaga Adminmistrasi yang terbayar.	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	12	bulan	75.588.012	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	12	bulan	100.784.016	25.196.004
7	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	laporan	83.310.000	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	laporan	97.110.000	13.800.000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	laporan	13.549.244	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	laporan	13.549.244	-
						Jumlah bulan Jasa Tenaga kebersihan yang terbayar.	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-		31.126.914	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	-		41.502.552	10.375.638
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	laporan	89.100.000	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	4	laporan	-	(89.100.000)
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**		**100**	**persen**	**252.844.102**		**100**	**persen**	**301.758.270**	**48.914.168**

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	26	unit	127.137.350	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	26	unit	127.137.350	-
						Jumlah bulan Jasa Tenaga Pengemudi/Sopir yang terbayar.	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	12	bulan	43.131.114	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	12	bulan	79.878.190	36.747.076
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	18	unit	60.550.000	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	18	unit	68.708.546	8.158.546
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	1	unit	10.000.000	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	1	unit	26.034.184	16.034.184
										12.025.638				-	(12.025.638)
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.**		**100**	**persen**	**28.324.184**		**100**	**persen**	**32.768.912**	**4.444.728**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan yang Terkoordinasikan**		**100**	**persen**	**10.000.000**		**100**	**persen**	**10.000.000**	**-**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangasem	1	Dokumen	10.000.000	Kec. Karangasem	1	Dokumen	10.000.000	-
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pedampingan pelanyanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang terkoordinasikan**		**100**	**persen**	**18.324.184**		**100**	**persen**	**22.768.912**	**4.444.728**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Karangasem	2	dokumen	2.978.000	Kec. Karangasem	2	dokumen	2.978.000	-
						Jumlah bulan Jasa Tenaga Administrasi yang terbayar.	Kec. Karangasem	12	bulan	13.334.184	Kec. Karangasem	12	bulan	17.778.912	4.444.728

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Karangasem	2	laporan	2.012.000	Kec. Karangasem	2	laporan	2.012.000	-
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.**		**100**	**persen**	**4.819.890.840**		**100**	**persen**	**4.885.954.426**	**66.063.586**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang terkoordinasikan**		**100**	**persen**	**17.740.000**		**100**	**persen**	**17.740.000**	**-**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangasem	3	lembaga kemasyarakatan	7.940.000	Kec. Karangasem	3	lembaga kemasyarakatan	7.940.000	-
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Karangasem	-	dokumen	-	Kec. Karangasem	-	dokumen	-	-
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangasem	1	laporan	9.800.000	Kec. Karangasem	1	laporan	9.800.000	-
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan**		**100**	**persen**	**4.802.150.840**		**100**	**persen**	**4.868.214.426**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	43.585.300	3 Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	43.585.300	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Kelurahan	18	unit	830.926.900	3 Kelurahan	18	unit	918.126.900	

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	3.829.868.040	3 Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	3.808.731.626	
7	01	03	2.02	03	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Kelurahan	9	laporan	97.770.600	3 Kelurahan	9	laporan	97.770.600	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100**	**persen**	**6.512.500**		**100**	**persen**	**6.512.500**	**-**
7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**		**100**	**persen**	**6.512.500**		**100**	**persen**	**6.512.500**	**-**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vaertikal di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangasem	1	laporan	6.512.500	Kec. Karangasem	1	laporan	6.512.500	-
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100**	**persen**	**14.881.000**		**100**	**persen**	**14.931.000**	**50.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Umum Penugasan Kepala Daerah yang Terkoordinasikan**		**100**	**persen**	**14.881.000**		**100**	**persen**	**14.931.000**	**50.000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Karangasem	**300**	**Orang**	10.875.000	Kec. Karangasem	**300**	**Orang**	10.925.000	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Karangasem	1	laporan	4.006.000	Kec. Karangasem	1	laporan	4.006.000	-

7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100**	**persen**	**81.413.600**		**100**	**persen**	**81.413.600**	**-**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**		**100**	**persen**	**81.413.600**		**100**	**persen**	**81.413.600**	**-**
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	3	dokumen	79.189.600	Kec. Karangasem & 3 Kelurahan	3	dokumen	79.189.600	-
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Karangasem	1	dokumen	2.224.000	Kec. Karangasem	1	dokumen	2.224.000	-
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangasem	-	laporan	-	Kec. Karangasem	-	laporan	-	-
					JUMLAH					**12.460.938.550**				**12.874.964.380**	**414.025.830**

BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun mengacu pada Renja Tahun 2025 yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai triwulan II. Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah dan kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Karangasem, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Karangasem. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Penyusunan Renja Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Di dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2025 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja Karangasem Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJPD Kabupaten Karangasem, RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026, Rancangan RKPD Perubahan Kabupaten Karangasem Tahun 2025, serta Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Rencangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karangasem Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 11 September 2025

Camat Karangasem,

I Gusti Lanang Agung Wirawan, S.STP., MH

Pembina

NIP. 19860909 200602 1 004

RANHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN RENDANG

KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2025

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 770/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 732/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Camat Rendang Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 770/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Camat Rendang Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Camat Rendang Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
6.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kasi Pemerdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan	Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
8.	Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Sosial	Kasi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
9.	Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
10	Kelompok Kerja Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
11	Kelompok Kerja Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kasubbag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugra-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rendang Tahun 2025 dengan tepat waktu. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Renja ini merupakan rumusan sebagai tindak lanjut atau penjabaran untuk mewujudkan Renstra setiap tahunnya untuk lima tahun kedepan yaitu Tahun 2021-2026.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Menanga, 08 Agustus 2025
CAMAT RENDANG

I WAYAN PUTU ARYANTA, SH,. MAP
PEMBINA TK I
NIP. 19700423 199303 1 007

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.3.1 Maksud..... 6

1.3.2 Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN RENDANG TAHUN 2025 9

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rendang sampai Triwulan I 9

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rendang..... 22

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RENDANG..... 25

BAB IV PENUTUP 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada : a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pertimbangan yang menjadi dasar dilaksanakannya perubahan Renja Kecamatan Rendang Tahun 2025 adalah telah ditetapkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Rendang dimaksud dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan

dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rendang ini dapat menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif perangkat daerah sesuai dengan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RENJA Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut **:**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Baratdan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Nomor 770 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 652 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Perubahan Renja merupakan perubahan dari rencana rerja yang memuat penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, Lokasi kegiatan, kelompok sasaran, Pagu Indikatif. Adapun maksud

penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Rendang tahun 2025 adalah untuk untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

b) Tujuan :

Tujuan penyusunan perubahan RENJA Kecamatan Rendang Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dan mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Rendang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ayat 3) meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

menyajikan secara ringkas tentang latar belakang/pertimbangan dilakukan perubahan renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum/ peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan renja perangkat daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan renja perangkat daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan renja perubahan per Bab.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai TW II. Memuat capaian sasaran renja tahun 2025 capaian program dan kegiatan renja tahun 2025, Isu-isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan. (sesuaikan dengan lampiran Perubahan RKPD 2025). Tujuan dan sasaran : Memuat penyesuaian tujuan dan sasaran dan indikatornya (jika ada). Strategi dan arah kebijakan : Memuat penyesuaian strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan renja (jika ada). Program dan kegiatan : Memuat perubahan program dan kegiatan serta perubahannya

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Rendang sampai dengan triwulan II, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Capaian Sasaran Renja Tahun 2025:

Dalam Renstra Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 menetapkan 3 tujuan dan 3 sasaran yaitu :

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

a. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan
b. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali
c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Rendang dalam periode pembangunan 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya
2. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Capaian Sasaran Kecamatan Rendang tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi sampai TW II	Capaian (%)
	Meningkatnya ketahanan bencana sertarasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100,00%	671.804	14,02 %
2.	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	90,00%	0	95,66 %
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	85,00%	11,710,440	93.82 %

Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025:

Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Rendang sampai dengan Triwulan II sudah sangat tinggi, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan teknis sudah berjalan dengan baik. Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dalam perencanaan dan dukungan pendanaan kegiatan dan Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses pengadaan masih proses melalui e-Purchasing. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Rendang sampai dengan triwulan II adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Kode rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
																I		II		III		IV							
										6			7		8		9		10		11,00		12,00		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%	
1	2	3						4	5	K			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								UNSUR KEWILAYAHAN																					
								KECAMATAN RENDANG				23.068.730.801,00	232,67	2.587.783.382,00	100%	3.984.104.929,00	20,19	709.947.999,00	36,76	1.135.552.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**56,95**	1.845.500.222,00	574,36	4.433.283.604	95,73	738.880.601
1	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**1**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dukungan Oprasional Pelaksanaan Tugas-Tugas Perangkat Daerah**	**500**	%	**21.768.730.801,00**	**94,72**	**2.495.297.308,00**	**100%**	**3.906.837.061,00**	**34,23**	**691.085.397,00**	20,17	**1.129.120.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,40**	**1.820.206.370**	149,12	**4.315.503.678**	**24,853**	**719.250.613**
		7	**1**	**1**	**2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	**500**	%	**18.364.101.977,00**	**95,71**	**2.164.260.602,00**	**100%**	**3.492.394.854,00**	**55,05**	**665.975.049,00**	**28,14**	**1.059.027.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,19**	**1.725.002.093**	178,90	**3.889.262.695**	**29,817**	**648.210.449**
		7	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	orng/bulan	18.031.461.977,00	33.095	2.127.443.012,00	35 org/bulan	3.471.612.578,00	31,83	658.927.085	34,43	1.048.802.648,00					**66,26**	**1.707.729.733**	33.161,26	**3.835.172.745**	**5526,877**	**639.195.458**
		7	1	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	324.140.000,00	33.277	36.450.773,00	12 dokumen	20.451.276,00	33,33	6.816.264	50,00	10.224.396,00					**83,33**	**17.040.660**	33.360,33	**53.491.433**	**5560,055**	**8.915.239**
		7	1	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	laporan	8.500.000,00	31485	366.817,00	1 dokumen	331.000,00	100,00	231.700	0,0	0,00					**100,00**	**231.700**	31.585,00	**598.517**	**5264,167**	**99.753**

								Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																								
		7	**1**	**1**	**2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	**500**	%	**1.055.325.000,00**	**59,24**	**86.691.161,00**	**100%**	**129.616.200,00**	**33,94**	**3.527.520,00**	**14,45**	**29.949.000,00**		**0,00**		**0,00**	**48,39**	**33.476.520**	107,63	**120.167.681**	**17,939**	**20.027.947**
		7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	30.000.000,00	32.273	3.044.350,00	1 paket	4.999.600,00	25,00	0	25,00						**50,00**	**0**	32.323,00	**3.044.350**	**5387,167**	**507.392**
		7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	paket	739.325.000,00	24.542	60.083.484,00	9 paket	120.546.100,00	18,41	3.527.520	22,69	27.955.889,00					**41,10**	**31.483.409**	24.583,10	**91.566.893**	**4097,183**	**15.261.149**
		7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	60.000.000,00	32,265	4.358.000,00	2 paket	4.070.500,00	26,30	0	24,57	1.993.111,00					**50,87**	**1.993.111**	83,14	**6.351.111**	**13,856**	**1.058.519**
		7	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	16.000.000,00	10,285	690.000	0	0	0,00	0	0						**0,00**	**0**	10,29	**690.000**	**1,714**	**115.000**
		7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	laporan	210.000.000,00	0	18.515.327	3 laporan	0,00	100,00	0	0	0,00					**100,00**	**0**	100,00	**18.515.327**	**16,667**	**3.085.888**
		7	**1**	**1**	**2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang diadakan**	**500**	%	**885.000.000,00**	**22,14**	**87.896.026,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0,00	0	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0**	122,14	**87.896.026**	**20,357**	**14.649.338**

		7	1	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	0,00	0	10886667	0	0,00	0,00	0	0	0,00					**0,00**	**0**	0,00	**10.886.667**	**0,000**	**1.814.445**
		7	1	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	175.000.000,00	33,085	21.420.833,00	0	0	0,00	0	0	0,00					**0,00**	**0**	33,09	**21.420.833**	**5,514**	**3.570.139**
		7	1	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	710.000.000,00	16,667	55.588.526,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00					**0,00**	**0**	16,67	**55.588.526**	**2,778**	**9.264.754**
		7	**1**	**1**	**2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	**500**	%	**279.556.000,00**	**27,793**	**26.032.201,00**	**100%**	**84.917.476,00**	**8,33**	**6.139.140,00**	**22,95**	**9.543.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,28**	**15.682.942**	59,07	**41.715.143**	**9,846**	**6.952.524**
		7	1	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	8.900.000,00	25,468	740.000,00	12 laporan	1.000.000,00	33,33	0	33,33	1.000.000,00					**66,66**	**1.000.000**	92,13	**1.740.000**	**15,355**	**290.000**
		7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	109.000.000,00	25,385	6.117.895,00	36 laporan	14.000.000,00	0,00	0	25,71	1.693.024,00					**25,71**	**1.693.024**	51,10	**7.810.919**	**8,516**	**1.301.820**
		7	1	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	laporan	161.656.000,00	32,527	19.174.306,00	2 laporan	26.217.476,00	0,00	0	32,76	6.850.778,00					**32,76**	**6.850.778**	65,29	**26.025.084**	**10,881**	**4.337.514**
		7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia**	**36**	laporan	**81.000.000,00**	**0**	**0,00**	**2 laporan**	**8.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**										

		7	**1**	**1**	**2**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**500**	**%**	**1.146.247.824,00**	**31,25**	**127.132.335,00**	**100%**	**194.310.031,00**	**58,03**	**13.531.638,00**	**21,77**	**30.601.127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,80**	**44.132.765**	**111,05**	**171.265.100**	**18,508**	**28.544.183**
		7	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	951.247.824,00	29,177	111.848.710,00	9 unit	169.310.031,00	40,77	13.531.638	38,63	28.601.127,00					**79,40**	**42.132.765**	108,58	**153.981.475**	**18,096**	**25.663.579**
		7	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	unit	85.000.000,00	32,572	9.065.000,00	41 unit	15.000.000,00	33,33	0	26,67	2.000.000,00				0,00	**60,00**	**2.000.000**	92,57	**11.065.000**	**15,429**	**1.844.167**
		7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	110.000.000,00	16,658	6.218.625,00	3 unit	10.000.000,00	100,00	0	0	0,00					**100,00**	**0**	116,66	**6.218.625**	**19,443**	**1.036.438**
		7	**1**	**1**	**2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**500**	%	**38.500.000,00**	**31,445**	**3.284.983,00**	**100%**	**5.598.500,00**	**50,00**	**1.912.050,00**	**33,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,33**	**1.912.050**	114,78	**5.197.033**	**19,129**	**866.172**
		7	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	3.500.000,00	31,303	253.450	2 dokumen	500.000	100,00	350.000	0	0,00					**100,00**	**350.000**	131,30	**603.450**	**21,884**	**100.575**
		7	1	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	3.500.000,00	31,303	266.583	1 dokumen	500.000	0,00	0	100,00	0,00					**100,00**	**0**	131,30	**266.583**	**21,884**	**44.431**
		7	1	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	dokumen	3.500.000,00	31,303	266.583	1 dokumen	500.000	0,00	0	100,00	0,00					**100,00**	**0**	131,30	**266.583**	**21,884**	**44.431**

								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																											
		7	1	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	8.000.000,00	32,473	800.017	1 dokumen	1.500.000	100,00	1.050.000	0	0,00					**100,00**	**1.050.000**	132,47	**1.850.017**	**22,079**	**308.336**
		7	1	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	14.000.000,00	32,453	1.029.383,00	1 dokumen	1.867.000,00	0,00	0	0	0,00					**0,00**	**0**	32,45	**1.029.383**	**5,409**	**171.564**
		7	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan	6.000.000,00	29,837	668.976,00	2 dokumen	731.500,00	100,00	512.050	0	0,00					**100,00**	**512.050**	129,84	**1.181.026**	**21,640**	**196.838**
2	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**1**	**2**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**500**	%	**655.000.000,00**	**33,173**	**50.377.038,00**	**100%**	**27.364.684,00**	**28,17**	**5.854.176,00**	**68,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92**	**5.854.176**	130,09	**56.231.214**	**21,682**	**9.371.869**
		7	**1**	**2**	**2**	**1**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	**500**	%	**430.000.000,00**	**33,223**	**23.033.567,00**	**100%**	**12.031.500,00**	**9,56**	**960.000,00**	**90,44**	**0,00**			**0,00**		**100,00**	**960.000**	133,22	**23.993.567**	**22,204**	**3.998.928**

								di Tingkat Kecamatan	**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**																											
		7	1	2	2	1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	dokumen	430.000.000,00	33,223	23.033.567,00	2 dokumen	12.031.500,00	9,56	3.360.000	90,44	2.400.000,00					**100,00**	**5.760.000**	133,22	**28.793.567**	**22,204**	**4.798.928**
		7	**1**	**2**	**2**	**4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan**	**500**	%	**225.000.000,00**	**33,027**	**27.343.471,00**	**100%**	**15.333.184,00**	**46,77**	**4.894.176,00**	**47,05**	**6.816.264,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**93,82**	**11.710.440**	126,85	**39.053.911**	**21,141**	**6.508.985**
		7	1	2	2	4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3	dokumen	110.000.000,00	33,09	12.112.757,00	3 dokumen	7.594.592,00	44,05	2.272.088	44,88	3.408.132,00					**88,93**	**5.680.220**	122,02	**17.792.977**	**20,337**	**2.965.496**
		7	1	2	2	4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1	laporan	115.000.000,00	33,052	15.238.714	1 laporan	7.738.592,00	49,49	2.622.088	49,21	3.408.132,00			0,00		**98,70**	**6.030.220**	131,75	**21.268.934**	**21,959**	**3.544.822**
3	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**1**	**3**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**500**	%	**300.000.000,00**	**27,226**	**18.221.845,00**	**100%**	**25.683.592,00**	50,29	**10.736.338**	**5,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,63**	**10.736.338**	82,86	**28.958.183**	**13,809**	**4.826.364**
		7	**1**	**3**	**2**	**1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**500**	%	**300.000.000,00**	**27,227**	**18.221.845,00**	**100%**	**25.683.592,00**	50,29	**10.736.338,00**	**5,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,63**	**10.736.338**	82,86	**28.958.183**	**13,810**	**4.826.364**
		7	1	3	2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2	lembaga	110.000.000,00	32,77	6.025.798,00	2 lembaga	12.586.000,00	100,00	8.464.250	0	1.679.510,00					**100,00**	**10.143.760**	132,77	**16.169.558**	**22,128**	**2.694.926**

								Pembangunan di Desa																												
		7	1	3	2	1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3	Dokumen	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0								**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0,000**	**0**
		7	1	3	2	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	130.000.000,00	32,242	12.196.046,00	2 laporan	13.097.592,00	50,88	2.272.088	26,02	5.807.782,00					**76,90**	**8.079.870**	109,14	**20.275.916**	**18,190**	**3.379.319**
4	**32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis**	**7**	**1**	**5**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**500**	%	**60.000.000,00**	**29,788**	**3.234.283,00**	**100%**	**5.049.000,00**	0,00	**0**	**95,66**	0,00			**0,00**		**95,66**	**0**	125,45	**3.234.283**	**20,908**	**539.047**
		7	**1**	**5**	**2**	**1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase keamanan dan ketertiban lingkungan terkendali**	**500**	%	**60.000.000,00**	**29,788**	**3.234.283,00**	**100%**	**5.049.000,00**	0,00	**0**	**95,66**	0,00			**0,00**		**95,66**	**0**	125,45	**3.234.283**	**20,908**	**539.047**
		7	1	5	2	1	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani	6	laporan	60.000.000,00	29,788	3.234.283,00	6 laporan	5.049.000,00	0,00	0	95,66	0,00					**95,66**	**0**	125,45	**3.234.283**	**20,908**	**539.047**

								Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																								
5	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**1**	**5**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**500**	%	**225.000.000,00**	**31,1**	**16.485.708,00**	**100%**	**13.427.092,00**	8,46	**2.272.088**	**16,59**	**5.759.446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,05**	**8.031.534**	56,15	**24.517.242**	**9,359**	**4.086.207**
		7	**1**	**5**	**2**	**1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**500**	%	**225.000.000,00**	**31,1**	**16.485.708,00**	**100%**	**13.427.092,00**	8,46	**2.272.088**	**16,59**	**5.759.446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,05**	**8.031.534**	56,15	**24.517.242**	**9,359**	**4.086.207**
		7	1	5	2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	Dokumen	135.000.000	0	11.744.138	6 dokumen	13.427.092	25,39	2.272.088	49,78	5.759.446,00					**75,17**	**8.031.534**		**19.775.672**	**0,000**	**3.295.945**
		7	1	5	2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	Dokumen	45.000.000	15,158	1.420.633	0	0	0,00	0							**0,00**	**0**	15,16	**1.420.633**	**2,526**	**236.772**
		7	1	5	2	1	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	45.000.000	29,017	3.320.937	0	0	0,00	0							**0,00**	**0**	29,02	**3.320.937**	**4,836**	**553.490**

6	**31. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.**	**7**	**1**	**4**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Peresentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban umum**	**500**	%	**60.000.000**	**16,667**	**4.167.200**	**100%**	**5.743.500**	0,00	**0**	**14,02**	671.804,00	**0,00**				**14,02**	**671.804**	30,69	**4.839.004**	**5,115**	**806.501**
		7	**1**	**4**	**2**	**1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**500**	%	**60.000.000**	**16,667**	**4.167.200**	**100%**	**5.743.500**	0,00	**0**	**14,02**	671.804,00	**0,00**				**14,02**	**671.804**	30,69	**4.839.004**	**5,115**	**806.501**
		7	1	4	2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	60.000.000	16,667	4.167.200	1 laporan	5.743.500	0,00	0	14,02	671.804,00					**14,02**	**671.804**	30,69	**4.839.004**	**5,115**	**806.501**
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		56,95	**46,32%**				
																								Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rendang

Kecamatan Rendang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, wilayah kerja meliputi 6 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Rendang. Dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Rendang memiliki potensi SDM yang sangat beragam. Kecamatan Rendang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Karangasem yang dilaksanakan oleh Camat Rendang beserta seluruh jajaran sesuai SOTK, dalam hal ini menyangkut tugas dan fungsi jajaran aparatur di Kecamatan Rendang antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha untuk meningkatkan sumber daya aparatur sehingga tercapai pelayanan yang maksimal dan fokus kepada tugas pokok dan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat.

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorporate Social Responsibility (CSR),

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa.

Tingkat Pelayanan Kecamatan Rendang

Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah sebagai berikut :

1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahanPerumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah;
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Rendang :

1. Kwalitas SDM kurang optimal
2. Lingkunan kantor perlu perawatan rutin
3. Belum ada SDM pengelola arsip
4. Kondisi bangunan perkantoran yang kurang memadai untuk pelayanan publik.
5. Kompetensi pegawai kurang optimal
6. Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rendang :

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengelolaan surat
2. Melakukan perawatan secara rutin dan berkesinambungan
3. Mengadakan perbaikan peralatan kerja kantor
4. Meningkatkan pengelola arsip, baik arsip dinamis aktif, dinamis in aktif dan dinamis pasif

5. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan bangunan kantor secara kontinu
6. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
7. Diadakan pengelolaan kepegawaian dan pembinaan pegawai secara rutin
8. Menyampaikan laporan keuangan dan pemerintahan yang akurat dan tepat waktu
9. Mengadakan Musrenbang secara berjenjang (*Bottom Up Planning*) mulai dari tingkat desa dan kecamatan
10. Mengadakan peringatan Hari Besar Nasional secara rutin serta mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai, wawasan kebangsaan
11. Mengadakan rapat koordinasi pimpinan atau rapat koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
12. Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
13. Mengadakan koordinasi monitoring pengendalian dan evaluasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Rendang tahun 2025 disusun berdasarkan program dan kegiatan hasil pemetaan (mapping) dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, isu strategis dan tugas fungsi perangkat daerah serta memperhatikan target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya . Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Rendang 2025

RUMUS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN RENDANG DALAM APBD TAHUN 2025

DAN RANCANGAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	DPA Tahun 2025 (Tahun Rencana)					DPPA Tahun 2025					Bertambah / berkurang	Keterangan Perubahan
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	3	4	10	11	12		
7					**Kecamatan Rendang**												
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dukungan Oprasional Pelaksanaan Tugas-Tugas Perangkat Daerah**	Kec. Rendang	**100**	**%**	**3.916.837.061,00**	**Persentase Dukungan Oprasional Pelaksanaan Tugas-Tugas Perangkat Daerah**	Kec. Rendang	**100**	**%**	**4.489.860.605,00**	**573.023.544,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kec. Rendang	100	%	**5.598.500,00**	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kec. Rendang	100	%	**5.598.500,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rendang	2	dokumen	500.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rendang	2	dokumen	500.000,00	**0,00**	
7	**01**	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Rendang	1	dokumen	500.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Rendang	1	dokumen	500.000,00	**0,00**	
7	**01**	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Rendang	1	dokumen	500.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Rendang	1	dokumen	500.000,00	**0,00**	

7	**01**	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Rendang	1	dokumen	1.500.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Rendang	1	dokumen	1.500.000,00	**0,00**	
7	**01**	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Rendang	1	dokumen	1.867.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Rendang	1	dokumen	1.867.000,00	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rendang	2	laporan	731.500,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rendang	2	laporan	731.500,00	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	Kec. Rendang	**100**	**%**	3.492.394.854,00	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	Kec. Rendang	**100**	**%**	3.671.679.760,00	**179.284.906,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rendang	35	orng/bulan	3.471.612.578,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rendang	35	orng/bulan	3.644.080.392,00	**172.467.814,00**	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Rendang	12	dokumen	20.451.276,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Rendang	12	dokumen	27.268.368,00	**6.817.092,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kec. Rendang	1	laporan	331.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Rendang	1	laporan	331.000,00	**0,00**	

						Keuangan Akhir Tahun SKPD											
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	Kec. Rendang	**100**	**%**	**139.616.200,00**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	Kec. Rendang	**100**	**%**	**127.518.200,00**	**-12.098.000,00**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Rendang	1	paket	4.999.600,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Rendang	1	paket	4.999.600,00	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Rendang	9	paket	120.546.100,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Rendang	9	paket	114.746.100,00	**-5.800.000,00**	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Rendang	2	paket	4.070.500,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Rendang	2	paket	7.772.500,00	**3.702.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Rendang	1	dokumen	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Rendang	1	dokumen		**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rendang	3	laporan	10.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rendang	3	laporan	-	**-10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang diadakan**	Kec. Rendang	**0**	**0%**	-	**Persentase Barang milik daerah yang diadakan**	Kec. Rendang	**100**	**%**	50.800.000,00	**50.800.000,00**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Rendang	0	0	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Rendang				**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Rendang	0	0	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Rendang	4	unit		**0,00**	

7	**01**	**01**	**2.07**	**10**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Rendang	0	0	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Rendang	12	unit	50.800.000,00	**50.800.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	Kec. Rendang	**100**	**%**	**84.917.476,00**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	Kec. Rendang	**100**	**%**	**41.325.668,00**	**-43.591.808,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rendang	12	laporan	1.500.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rendang	12	laporan	1.500.000,00	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Rendang	36	laporan	14.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Rendang	36	laporan	10.000.000,00	**-4.000.000,00**	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Rendang	2	laporan	26.217.476,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Rendang	2	laporan	29.825.668,00	**3.608.192,00**	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Rendang	48	laporan	43.200.000,00	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Rendang	0	0	-	**-43.200.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	Kec. Rendang	**100**	**%**	**194.310.031,00**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	Kec. Rendang	**100**	**%**	**592.938.477,00**	**398.628.446,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**	**02**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Rendang	9	Unit	169.310.031,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Rendang	9	Unit	177.938.477,00	**8.628.446,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**	**06**	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Rendang	41	unit	15.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Rendang	41	unit	15.000.000,00	**0,00**	

7	**01**	**01**	**2.09**	**09**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Rendang	3	unit	10.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Rendang	3	unit	400.000.000,00	**390.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**27.364.684,00**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**31.909.412,00**	**4.544.728,00**	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rendang	**100**	%	**12.031.500,00**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rendang	**100**	%	**12.031.500,00**	**0,00**	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rendang	2	dokumen	12.031.500,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rendang	2	dokumen	12.031.500,00	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**15.333.184,00**	**Persentase Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**19.877.912,00**	**4.544.728,00**	
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	**Kec. Rendang**	3	dokumen	7.594.592,00	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	**Kec. Rendang**	3	dokumen	9.866.956,00	**2.272.364,00**	
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	**Kec. Rendang**	1	laporan	7.738.592,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	**Kec. Rendang**	1	laporan	10.010.956,00	**2.272.364,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**25.683.592,00**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**42.342.956,00**	**16.659.364,00**	
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**25.683.592,00**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**42.342.956,00**	**16.659.364,00**	

					Desa												
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec. Rendang**	2	lembaga	12.586.000,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec. Rendang**	2	lembaga	12.586.000,00	**0,00**	
7	01	03	2,01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	**Kec. Rendang**	0	0	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	**Kec. Rendang**	3	Dokumen	-	**0,00**	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec. Rendang**	2	Laporan	13.097.592,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec. Rendang**	2	Laporan	29.756.956,00	**16.659.364,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Peresentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban umum**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**5.743.500,00**	**Peresentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban umum**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**5.743.500,00**	**0,00**	
7	01	**04**	2,01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**5.743.500,00**	**Persentase Koordinasi Upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**5.743.500,00**	**0,00**	
7	01	**04**	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	**Kec. Rendang**	1	Laporan	5.743.500,00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	**Kec. Rendang**	1	Laporan	5.743.500,00	**0,00**	

						Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Vertikal di Wilayah Kecamatan						
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**5.049.000,00**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**5.049.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase keamanan dan ketertiban lingkungan terkendali**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**5.049.000,00**	**Persentase keamanan dan ketertiban lingkungan terkendali**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**5.049.000,00**	**0,00**	
7	01	05	2,01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**Kec. Rendang**	6	Laporan	5.049.000,00	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**Kec. Rendang**	6	Laporan	5.049.000,00	**0,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**13.427.092,00**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**19.951.456,00**	**6.524.364,00**	
7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**13.427.092,00**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**Kec. Rendang**	**100**	**%**	**19.951.456,00**	**6.524.364,00**	
7	01	06	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec. Rendang**	6	Dokumen	13.427.092,00	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec. Rendang**	6	Dokumen	15.699.456,00	**2.272.364,00**	
7	01	06	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	**Kec. Rendang**	2	Dokumen	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	**Kec. Rendang**	2	Dokumen	4.252.000,00	**4.252.000,00**	

					Aset Desa	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Pendayagunaan Aset Desa						
7	01	06	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Rendang	6	Laporan	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Rendang	6	Laporan	-	**0,00**	
										3.994.104.929,00					4.594.856.929,00	600.752.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rendang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rendang 2021-2026. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai degan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara seluruh pihak terkait sehingga keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rendang tahun 2025 ini dirancang untuk menerapkan segala arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam menangani permasalahan dan isu-isu aktual di Kecamatan Rendang. Rencana Kerja (RENJA) agar digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Rendang. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum akan berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Rendang berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
2. Perubahan RENJA Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal penyusunan anggaran perubahan Tahun 2025, dimana perubahan RENJA Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rendang, seluruh aparatur Kecamatan Rendang secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanan RENJA Tahun 2025.
4. Tata cara penyusunan perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Perubahan Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sehingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhitungkan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektifitas dan efesiensi dalam penyelengaraan pemerintah dan pembangunan.

Menanga, 8 Agustus 2025
CAMAT RENDANG

I WAYAN PUTU ARYANTA, SH,.MAP
PEMBINA TK I
NIP. 19700423199303 1 007

RANHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SELAT

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) oleh karena berkat rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Selat Tahun 2025 dapat disusun dan terselesaikan dengan tepat waktu. Renja ini merupakan rumusan sebagai tindak lanjut atau penjabaran untuk mewujudkan renstra setiap tahunnya sesuai visi Kecamtan Selat untuk lima tahun kedepan yaitu Tahun 2016-2021.

Renja Kinerja (Renja Perubahan Tahun 2025) ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen anggaran di Kecamatan Selat , Renja ini juga menyajikan informasi terkait evaluasi pencapaian program/kegiatan pada tahun sebelumnya yang tentunya bermanfaat dalam menyusun perencanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa Renja Kinerja (Renja) ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang dan kepada semua pihak yang telah ikut membantu demi terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami mengucapkan banyak terima kasih

Om Shanti Shanti Shanti Om

Selat, 28 Juli 2025

CAMAT SELAT

KETUT RATMA, SE., MAP
Pembina
NIP 19730329 200801 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada :

a) rancangan perubahan RKPD; dan

b) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pertimbangan yang menjadi dasar dilaksanakannya Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah telah ditetapkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Selat dimaksud dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Selat dapat menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif perangkat daerah sesuai dengan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Karangaem Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, (Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Karagasem, Provinsi Bali:4,33/2021);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
20. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 768/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renja merupakan perubahan dari rencana kerja yang memuat penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, Lokasi kegiatan, kelompok sasaran, Pagu Indikatif. Adapun maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Renja Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dan mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ayat 3) meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan..

1.1. Latar Belakang

menyajikan secara ringkas tentang latar belakang/pertimbangan dilakukan perubahan renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum/ peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan renja perangkat daerah ,

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan renja perangkat daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan renja perubahan per Bab.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2025

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai TW II. Memuat capaian sasaran renja Tahun 2025, capaian program dan kegiatan renja tahun 2025, Isu-isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan. (sesuaikan dengan lampiran Perubahan RKPD 2025). Tujuan dan sasaran : Memuat penyesuaian tujuan dan sasaran dan indikatornya (jika ada). Strategi dan arah kebijakan : Memuat penyesuaian strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja (jika ada). Program dan kegiatan : Memuat perubahan program dan kegiatan serta perubahannya

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SELAT TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Selat Sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Selat Tahun 2025 sampai dengan triwulan II Semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan meneyesuaikan dengan Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari hasil pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan diperoleh penyesuaian dari program dan kegiatan sebelumnya ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025. Seiring penyesuaian yang dilaksanakan perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021. Berdasarkan pemetaan diperoleh penyesuaian sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota
    a) Penambahan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 6 Sub Kegiatan
    b) Penambahan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan
    c) Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 Sub Kegiatan
    d) Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 sub Kegiatan
    e) Pada Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 Sub Kegiatan
    f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 Sub Kegiatan

2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
   a) Pada Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan dengan 1 sub kegiatan
   b) Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat 2 sub kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan
   a) Pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan 2 Sub Kegiatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 Sub Kegiatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
   a) Pada Kegiatan Fasilitasi Rekomindasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan 3 Sub Kegiatan

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan sampai triwulan II telah dilaksanakan sebagaimana perencanaan namun realisasi anggaran masih dibawah target yang ditentukan. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai triwulan II diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sasaran	Kode rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan				
																I		II		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		
									K			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							UNSUR KEWILAYAHAN													
		7	1				KECAMATAN SELAT		500		19.722.513.642,00	300	9.497.732.306,00	100,00%	3.292.144.154,00	23,53	598.344.508,00	25,00	807.127.0	69,00
1	33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	500	%	18.239.844.696,00	300	9.239.388.180,00	100%	3.242.144.154,00	26,47	585.784.358,00	17,32	789.430.6	69,00
		7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dilaksanakan	500	%	58.497.175,00	300	14.861.215,00	100%	2.890.500,00	51,67	946.050,00	5	0	00
		7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	11.500.000,00	6	3.363.420,00	2 Dokumen	501.000,00	2	350.700,00	0		0
		7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	7.000.000,00	3	1.543.670,00	1 Dokumen	283.500,00	1	198.450,00	0		0

		7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	7.000.000,00	3	1.612.170,00	1 Dokumen	381.000,00	0	0,00	0		0
		7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	7.500.000,00	3	2.191.450,00	1 Dokumen	567.000,00	1	396.900,00	0		0
		7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	8.000.000,00	3	2.229.530,00	1 Dokumen	588.000,00	0	0,00	0		0
		7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	dokumen	17.497.175,00	6	3.920.975,00	2 Dokumen	570.000,00	0	0,00	0		0

		7	**1**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan kecamatan yang tersusun**	**500**	**%**	**14.680.794.256,00**	**300**	**7.242.558.008,00**	**100%**	**2.667.343.305,00**	**18,52**	**534.041.916,00**	**31,48**	**722.097.941,00**
		7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	14.350.638.356,00	36	7.054.331.908,00	12 Bulan	2.624.991.253,00	3	521.545.432,00	3	700.513.105,00
		7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bulan	313.656.000,00	36	182.415.000,00	12 Bulan	40.902.552,00	3	12.496.484,00	3	21.584.836,00
		7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	16.499.900,00	2	5.811.100,00	1 Dokumen	1.449.500	0		0		0
		7	**1**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	**500**	**%**	**1.372.060.180,00**	**300**	**596.265.320,00**	**100%**	**212.503.659,00**	**26,00**	**19.966.472,00**	**24,20**	**22.454.605,00**	**0**
		7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	bulan	21.570.700,00	36	10.084.800,00	12 Bulan	3.988.900,00	0	0,00	6	1.965.000,00	
		7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	bulan	1.020.331.880,00	36	427.587.550,00	12 Bulan	184.096.759,00	3	12.659.000,00	3	16.977.105,00	

		7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34	paket	92.157.600,00	17	34.659.550,00	5 paket	11.410.000,00	0	0,00	1	3.512.500,00	
		7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	jenis	33.000.000,00	5	14.640.000,00	2 Jenis	6.000.000,00	0	300.000,00	0	0,00	
		7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	kali	205.000.000,00	11	109.293.420,00	1 kali	7.008.000,00	1	7.007.472,00	0	0,00	
		7	**1**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang diadakan**	**500%**	**%**	**621.300.960,00**	**300**	**234.081.000,00**		**0,00**	**0**	**0**		**0**	
		7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	15	Unit	230.000.000,00	2	65.320.000,00		0,00	0	0,00	0		0
		7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin gedung kantor yang diadakan	22	unit	60.000.000,00	19	128.966.000,00		0,00	0	0,00	0		0
		7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	22	Paket	331.300.960,00	3	39.795.000,00		0,00	0	0	0		0
		7	**1**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase administrasi kantor yang dilaksanakan**	**500**	**%**	**455.636.300,00**	**300**	**165.497.273,00**	**100%**	**109.929.776,00**	**19,50**	**9.772.834,00**	**12,58**	**7.707.742,00**	

		7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1700	lembar	17.000.000,00	300	3.000.000,00	300 lembar	3.000.000,00	100	1.000.000,00	0		0
		7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bulan	144.000.000,00	36	28.685.223,00	12 bulan	24.000.000,00	3	3.092.614,00	3	2.027.522	00
		7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	86	paket	294.636.300,00	41	133.812.050,00	12 Bulan	28.929.776,00	3	5.680.220,00	3	5.680.220	00
		7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0,00	0	0,00	12 Laporan	54.000.000,00		0,00	0	0	00
		7	**1**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**500**	**%**	**1.051.555.825,00**	**300**	**986.125.364,00**	**100%**	**249.476.914,00**	**16,67**	**21.057.086,00**	**13,33**	**37.170.38**	**1,00**
		7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	unit	710.231.025,00	27	586.835.315,00	9 unit	192.525.638,00	0	16.512.910,00	3	25.639.11	7,00
		7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	paket	96.000.000,00	40	42.050.000,00	15 Paket	14.000.000,00	0	0,00	5	4.715.000	00

		7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	245.324.800,00	8	357.240.049,00	3 unit	42.951.276,00	0	4.544.176,00	0	6.816.264,00	
	33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	**7**	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**500**	**%**	**690.000.000,00**	**300**	**121.130.963,00**	**100,00%**	**17.082.400,00**	**16,50**	**788.600,00**	**43,50**	**8.742.000,00**	
		7	**1**	**2**	**02.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**500**	**%**	**550.000.000,00**	**300**	**103.579.683,00**	**100,00%**	**10.000.000,00**	**10**	**0,00**	**60**	**6.480.000,00**	
		7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	kegiatan	550.000.000,00	15	103.579.683,00	5 kegiatan	10.000.000,00	1	0	3	6.480.000,00	
		7	**1**	**2**	**02.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomenasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan**	**500**	**%**	**140.000.000,00**	**300**	**17.551.280,00**	**100%**	**7.082.400,00**	**22,50**	**788.600,00**	**27,5**	**2.262.000,00**	
		7	1	2	02.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	150	ijin	80.000.000,00	140	12.638.230,00	3 Dokumen	6.140.000,00	7	473.600	2	2.262.000,00	

		7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3000	Non perijinan	60.000.000,00	1.322	4.913.050,00	1 Laporan	942.400,00	37	315.000,00	24	0,00
	33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	**7**	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**500**	**%**	**297.668.946,00**	**300**	**64.447.813,00**	**100%**	**12.624.200,00**	**50**	**7.385.950,00**	**25**	**1.612.200,00**
		7	**1**	**3**	**02.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**500**	**%**	**297.668.946,00**	**300**	**64.447.813,00**	**100%**	**12.624.200,00**	**50**	**7.385.950,00**	**25**	**1.612.200,00**
		7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	kali	180.000.000,00	5	44.209.913,00	2 Lembaga Kemasyarakatan	10.116.200,00	1	7.385.950	0	652200
		7	1	3	02.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sekolah yang dibina tentang PKTP	15	Sekolah	50.000.000,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00
		7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	desa	67.668.946,00	6	20.237.900,00	1 Laporan	2.508.000,00	0	0	0	960.000,00

	31.Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	**7**	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**500**	**%**	**100.000.000,00**	**300**	**37.036.650,00**	**100%**	**4.479.200,00**	**0**	**0,00**	**90**	**3.781.800,00**	
		7	**1**	**4**	**02.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**500**	**%**	**100.000.000,00**	**300**	**37.036.650,00**	**100%**	**4.479.200,00**	**0**	**0,00**	**90**	**3.781.800,00**	
		7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20	kali	100.000.000,00	12	37.036.650,00	4 Laporan	4.479.200,00	0	0,00	4	3.781.800,00	

	32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	**7**	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**%**	**95.000.000,00**	**300**	**10.067.950,00**	**100%**	**4.257.400,00**	**0**	**0,00**	**90**	**3.560.400,00**
		7	**1**	**5**	**02.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan**	**500**	**%**	**95.000.000,00**	**300**	**10.067.950,00**	**100%**	**4.257.400,00**	**0**	**0,00**	**90**	**3.560.400,00**
		7	1	5	02.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40	desa	95.000.000,00	24	10.067.950,00	8 desa	4.257.400,00	0	0	8	3.560.400,00
	33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	**7**	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**500**	**%**	**300.000.000,00**	**300**	**25.660.750,00**	**100%**	**11.556.800,00**	**25**	**4.385.600,00**	**6,67**	**0,00**

		7	**1**	**6**	**02.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**500**	**%**	**300.000.000,00**	**300**	**25.660.750,00**	**100%**	**11.556.800,00**	**25**	**4.385.600,00**	**6,67**	**0,00**
		8	1	6	02.02	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40	desa	100.000.000,00	24	10.067.150,00	8 desa	6.000.000,00	1	4.385.600	0	0,00
		9	1	6	02.03	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40	desa	100.000.000	24	5.669.600,00	8 desa	786.000,00	0	0	0	0
		10	1	6	02.04	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	40	desa	100.000.000	24	9.924.000,00	8 desa	4.770.800,00	0	0	0	0
																			Ra

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Selat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, wilayah kerja meliputi 8 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Selat. Dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Selat memiliki potensi SDM yang sangat beragam. Kecamatan Selat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Karangasem yang dilaksanakan oleh Camat Selat beserta seluruh jajaran sesuai SOTK, dalam hal ini menyangkut tugas dan fungsi jajaran aparatur di Kecamatan Selat antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha untuk meningkatkan sumber daya aparatur sehingga tercapai pelayanan yang maksimal dan fokus kepada tugas pokok dan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat.

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorporate Social Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di

Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Selat antara lain :

1. Kwalitas SDM kurang optimal
2. Lingkungan kantor perlu perawatan rutin
3. Belum ada SDM pengelola arsip
4. Kondisi bangunan perkantoran yang kurang memadai untuk pelayanan publik.
5. Kompetensi pegawai kurang optimal
6. Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai

Tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengelolaan surat
2. Melakukan perawatan secara rutin dan berkesinambungan
3. Mengadakan perbaikan peralatan kerja kantor
4. Meningkatkan pengelola arsip, baik arsip dinamis aktif, dinamis in aktif dan dinamis pasif
5. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan bangunan kantor secara kontinu
6. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
7. Diadakan pengelolaan kepegawaian dan pembinaan pegawai secara rutin
8. Menyampaikan laporan keuangan dan pemerintahan yang akurat dan tepat waktu
9. Mengadakan Musrenbang secara berjenjang (*Bottom Up Planning*) mulai dari tingkat desa dan kecamatan
10. Mengadakan peringatan Hari Besar Nasional secara rutin serta mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai, wawasan kebangsaan
11. Mengadakan rapat koordinasi pimpinan atau rapat koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
12. Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
13. Mengadakan koordinasi monitoring pengendalian dan evaluasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Selat Tahun 2025 disusun berdasarkan program dan kegiatan hasil pemetaan (mapping) dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub.kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem terdiri dari penambahan dan pengurangan anggaran kegiatan, pengurangan target kinerja, pagu indikatif. Pergeseran dan perubahan belanja pada program dan kegiatan serta penyesuaian kembali kebutuhan belanja program dan kegiatan sebagaimana penyusunan awal tahun anggaran serta menyelaraskan kembali indikator kinerja kegiatan (keluaran) Perangkat Daerah pada tiap kegiatan sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran. Berdasarkan pagu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selat Tahun Anggaran 2025 terdapat penambahan dan pengurangan anggaran pada Perubahan Renja yang diusulkan sebagai table berikut :

TABEL.3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	DPA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				KETERANGAN
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Bertambah/Berkurang	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**01**	**01**			***PROGRAM PENU***	***Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah***	***Kec. Selat***	***100%***	***3.242.144.154,00***		***Kec. Selat***	***100%***	***3.729.250.452,00***	***487.106.298,00***	
7	**01**	**01**	**2.01**		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	*Kec. Selat*	*12 bulan*	*2.890.500*		*Kec. Selat*	*12 bulan*	*2.890.500*	*0*	

7	**01**	**01**	**2.01**	**01**			Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kec. Selat	2 Dokumen	501.000		Kec. Selat	2 Dokumen	501.000	*0*	
7	**01**	**01**	**2.01**	**02**		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kec. Selat	1 Dokumen	283.500		Kec. Selat	1 Dokumen	283.500	*0*	
7	**01**	**01**	**2.01**	**03**		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kec. Selat	1 Dokumen	381.000		Kec. Selat	1 Dokumen	381.000	*0*	
7	**01**	**01**	**2.01**	**04**		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kec. Selat	1 Dokumen	567.000		Kec. Selat	1 Dokumen	567.000	*0*	
7	**01**	**01**	**2.01**	**05**		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Kec. Selat	1 Dokumen	588.000		Kec. Selat	1 Dokumen	588.000	*0*	
7	**01**	**01**	**2.01**	**06**		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	Kec. Selat	3 Dokumen	570.000		Kec. Selat	3 Dokumen	570.000	*0*	

7	**01**	**01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun***		***Kec. Selat***	***100%***	***2.667.343.305***		***Kec. Selat***	***100%***	***2.843.013.686***	**175.670.381**	
7	**01**	**01**	**2.02**	**01**		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN Lainnya	Kec. Selat	12 Bulan	2.624.991.253		Kec. Selat	12 Bulan	2.800.661.634	175.670.381	
7	**01**	**01**	**2.02**	**03**		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan tenaga administrasi yang terbayar	Kec. Selat	12 Bulan	40.902.552		Kec. Selat	12 Bulan	40.902.552	*0*	
7	**01**	**01**	**2.02**	**05**		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kec. Selat	1 Dokumen	1.449.500		Kec. Selat	1 Dokumen	1.449.500	*0*	
7	**01**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi***		Kec. Selat	***100%***	212.503.659		Kec. Selat	***100%***	214.403.659	1.900.000	

7	**01**	**01**	**2.06**	**01**		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	Kec. Selat	12 Bulan	3.988.900		Kec. Selat	12 Bulan	5.007.000	*1.018.100*	
7	**01**	**01**	**2.06**	**04**		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Selat	12 Bulan	184.096.759		Kec. Selat	12 Bulan	189.712.159	5.615.400	
7	**01**	**01**	**2.06**	**05**		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. Selat	5 dokumen	11.410.000		Kec. Selat	5 dokumen	12.376.500	*966.500*	
7	**01**	**01**	**2.06**	**06**		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar /bahan bacaan lainnya yang tersedia	Kec. Selat	2 dokumen	6.000.000		Kec. Selat	2 dokumen	300.000	*-5.700.000*	
7	**01**	**01**	**2.06**	**09**		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi	Kec. Selat	3 dokumen	7.008.000		Kec. Selat	3 dokumen	7.008.000	*0*	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Kec. Selat**	**100%**	**0**		**Kec. Selat**	**100%**	**0**	**0**	
7	**01**	**01**	**2.07**	02		**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau**		Kec. Selat	2 unit	**0**		Kec. Selat	2 unit	0	0	

						lapangan										
7	**01**	**01**	**2.07**	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kec. Selat	3 Paket	-		Kec. Selat	3 Paket	-	0	
7	**01**	**01**	**2.07**	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Kec. Selat	12 Bulan	-		Kec. Selat	12 Bulan	-	*0*	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase administrasi kantor yang dilaksanakan**		**Kec. Selat**	**100%**	**109.929.776**		**Kec. Selat**	**100%**	**60.746.868**	**4.817.092**	
7	**01**	**01**	**2.08**	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan	Kec. Selat	300 Lembar	3.000.000		Kec. Selat	300 Lembar	1.000.000	*-2.000.000*	
7	**01**	**01**	**2.08**	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	Kec. Selat	12 Bulan	24.000.000		Kec. Selat	12 Bulan	24.000.000	*0*	

7	**01**	**01**	**2.08**	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat-alat serta perlengkapan kantor yang tersedia	Kec. Selat	17 Paket	28.929.776		Kec. Selat	17 Paket	35.746.868	*6.817.092*	
7	**01**	**01**	**2.08**	04		Penyedian Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Selat	12 Laporan	54.000.000		Kec. Selat	12 Laporan	12 Laporan		
7	**01**	**01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Barang milik daerah yang diadakan***		***Kec. Selat***	***100%***	***249.476.914***		***Kec. Selat***	***100%***	***608.195.739***	***358.718.825***	
7	**01**	**01**	**2.09**	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Kec. Selat	9 Unit	192.525.638		Kec. Selat	9 Unit	198.034.184	5.508.546	
7	**01**	**01**	**2.09**	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kec. Selat	15 Unit	14.000.000		Kec. Selat	15 Unit	14.000.000	*0*	

7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhab	Kec. Selat	3 Unit	42.951.276		Kec. Selat	3 Unit	396.161.555	*353.210.279*	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Kec. Selat	100%	17.082.400		Kec. Selat	100%	17.082.400	0	
7	**01**	**02**	**2.01**		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan***		***Kec. Selat***	***100%***	***10.000.000***		***Kec. Selat***	***100%***	***10.000.000***	***0***	
7	**01**	**02**	**2.01**	**02**		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektivitasnya dapat ditingkatkan	Kec. Selat	6 Kegiatan	10.000.000		Kec. Selat	6 Kegiatan	10.000.000	0	
7	**01**	**02**	**2.04**		***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan***		***Kec. Selat***	***100%***	***7.082.400***		***Kec. Selat***	***100%***	***7.082.400***	***0***	

7	01	02	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi pelayanan perijinan yang dikeluarkan	Kec. Selat	30 Ijin	6.140.000		Kec. Selat	30 Ijin	6.140.000	*0*	
7	01	02	2.04	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan nonperijinan yang dikeluarkan	Kec. Selat	450 Non Ijin	942.400		Kec. Selat	450 Non Ijin	942.400	*0*	
7	**01**	**03**			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***		***Kec. Selat***	***100%***	***12.624.200***		***Kec. Selat***	***100%***	***12.624.200***	***0***	
7	**01**	**03**	**2.01**		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan***		***Kec. Selat***	***100%***	***12.624.200***		***Kec. Selat***	***100%***	***12.624.200***	***0***	
7	01	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah forum perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kec. Selat	2 Kali	10.116.200		Kec. Selat	2 Kali	10.116.200	*0*	

						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Selat	3 Dokumen	-		Kec. Selat	3 Dokumen	-	0	
7	**01**	**03**	**2.01**	**03**		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang disasar/diberdayakan dalam rangka efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Selat	2 desa	2.508.000		Kec. Selat	2 desa	2.508.000	*0*	
7	***1***	***4***			***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum***		***Kec. Selat***	***100%***	***4.479.200***		***Kec. Selat***	***100%***	***4.479.200***	***0***	
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	***Persentase fasilitasi penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum***		Kec. Selat	100%	4.479.200		Kec. Selat	100%	4.479.200	*0*	

7	1	4	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi sinergitas forkopinca dengan istansi vertikal di kecamatan Selat	Kec. Selat	4 Kali	4.479.200		Kec. Selat	4 Kali	4.479.200	*0*	
7	**01**	**05**			***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***		Kec. Selat	***100%***	***4.257.400***		Kec. Selat	100%	***4.257.400***	*0*	
7	**01**	**05**	**2.01**		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan***		***Kec. Selat***	***100%***	***4.257.400***		Kec. Selat	***100%***	***4.257.400***	***0***	
7	**01**	**05**	**2.01**	**05**		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Kec. Selat	8 desa	4.257.400		Kec. Selat	8 desa	4.257.400	*0*	

7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		Kec. Selat	100%	11.556.800		Kec. Selat	100%	11.556.800	0	
7	**01**	**06**	**2.01**		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan***		***Kec. Selat***	***100%***	***11.556.800***		Kec. Selat	***100%***	***11.556.800***	***0***	
7	**01**	**06**	**2.01**	**02**		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertata dan tertib administrasi	Kec. Selat	8 desa	6.000.000		Kec. Selat	8 desa	6.000.000	*0*	
7	**01**	**06**	**2.01**	**03**		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	Kec. Selat	8 desa	786.000		Kec. Selat	8 desa	786.000	*0*	
7	**01**	**06**	**2.01**	**18**		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang kegiatan pembangunannya dimonitoring dan dievaluasi	Kec. Selat	8 desa	4.770.800		Kec. Selat	8 desa	4.770.800	*0*	
										3.292.144.154				**3.779.250.452**	**487.106.298**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana perubahan Kerja (RENJA) Kecamatan Selat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selat 2016-2021 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai degan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara seluruh pihak terkait sehingga keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Selat Tahun 2025 ini dirancang untuk menerapkan segala arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Rencana Kerja (RENJA) agar digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Selat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Selat berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
2. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Ranhir Perubahan Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sehingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhitungkan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektifitas dan efesiensi dalam penyelengaraan pemerintah dan pembangunan.

Selat, 28 Juli 2025

CAMAT SELAT



Pembina

NIP 19730329 200801 1 010

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJAPER)

KECAMATAN SIDEMEN

KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) oleh karena berkat rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renjaper) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Sidemen Tahun 2025 dapat disusun dan terselesaikan.

Dokumen Renja Perubahan (Renjaper) ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Sidemen, 2 Juli 2025
Plt. CAMAT SIDEMEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN SIDEMEN

Dr. PUTU AGUS SUMAHENDRA, SIP. MAP
PEMBINA
NIP. 19880402 200701 1 028

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 32

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 37

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 39

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 51

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 53

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 53

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 55

3.3 Program dan Kegiatan 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 75

BAB V PENUTUP 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada : a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pertimbangan yang menjadi dasar dilaksanakannya perubahan Renja Kecamatan Sidemen Tahun 2025 adalah telah ditetapkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Sidemen dimaksud dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem

Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidemen ini dapat menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif perangkat daerah sesuai dengan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RENJA Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut **:**

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
   18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Intruksi Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomam Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61)
30. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 732 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025

31. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 640/HK/2024 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Pada Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

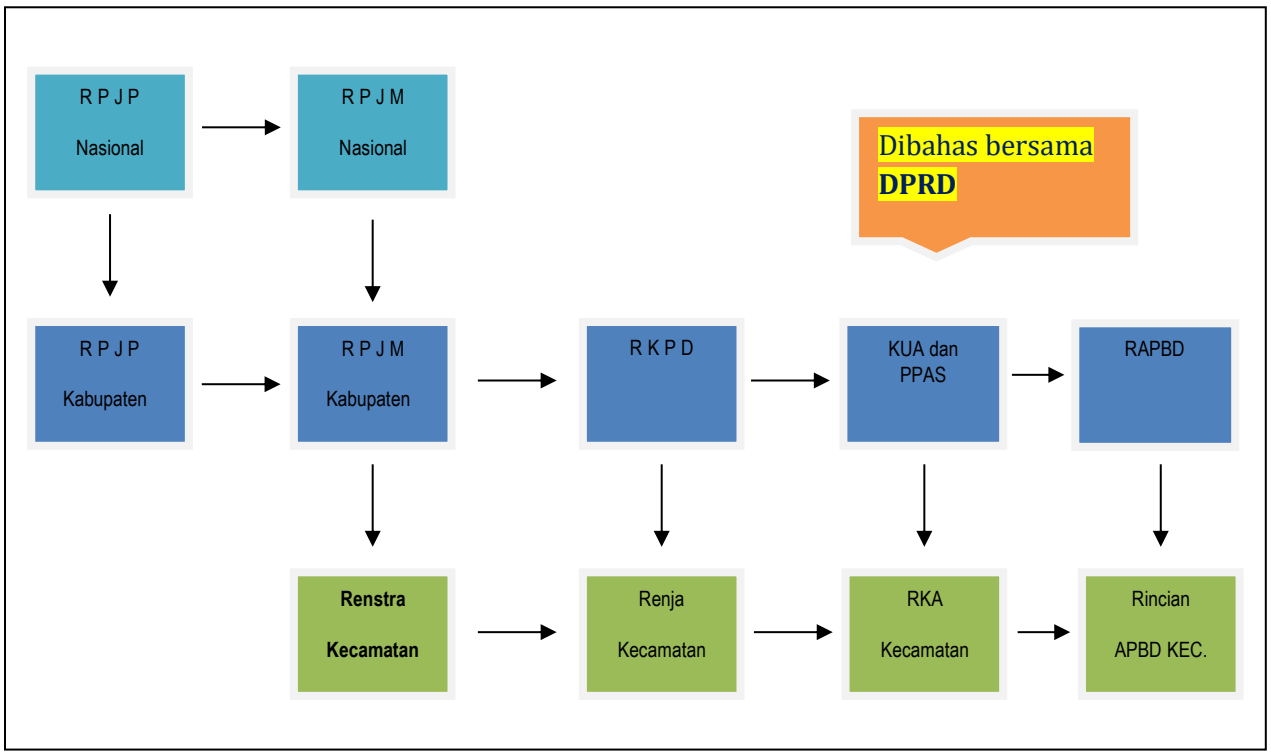
Sejalan dengan penyusunan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan pula pada SKPD untuk membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dengan mengacu pada Renstra SKPD, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan dari masyarakat. Oleh karena itu Renjaper ini disusun mengacu pada Renstra Kecamatan Sidemen Tahun 2021 – 2026 dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang muncul dalam forum musrenbang.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah. Perencanaan juga merupakan alat ukur untuk melakukan evaluasi.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Renja sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistis, tepat anggaran dan tepat sasaran, karena di dalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui dokumen Renja ini kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidemen Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang merupakan rencana tindak yang akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun berlangsungnya program pembangunan. Renstra yang dibuat akan menjadi acuan bagi pelaksanaan rencana kerja tiap tahunnya, sehingga akan ada kesinambungan antara pelaksanaan program tiap tahunnya. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Renja merupakan perubahan dari rencana rerja yang memuat penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, Lokasi kegiatan, kelompok sasaran, Pagu Indikatif. Adapun maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sidemen tahun 2025 adalah untuk untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan RENJA Kecamatan Sidemen Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dan mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Sidemen berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ayat 3) meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

menyajikan secara ringkas tentang latar belakang/pertimbangan dilakukan perubahan renja perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum/ peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan renja perangkat daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan renja perangkat daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan renja perubahan per Bab.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai

TW II. Memuat capaian sasaran renja tahun 2025

capaian program dan kegiatan renja tahun 2025, Isu-isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan. (sesuaikan dengan lampiran Perubahan RKPD 2025). Tujuan dan sasaran : Memuat penyesuaian tujuan dan sasaran dan indikatornya (jika ada). Strategi dan arah kebijakan : Memuat penyesuaian strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja (jika ada). Program dan kegiatan : Memuat perubahan program dan kegiatan serta perubahannya

BAB IV
PENUTUP

Memuat tentang catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sidemen sampai dengan triwulan II, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Capaian Sasaran Renja Tahun 2025:

Dalam Renstra Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2021- 2026 menetapkan 3 tujuan dan 3 sasaran yaitu :

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

a. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan
b. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali
c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sidemen dalam periode pembangunan 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya
2. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Capaian Sasaran Kecamatan Sidemen tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi sampai TW I	Capaian (%)
	Meningkatnya ketahanan bencana sertarasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	97,00%		
2.	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	91,00%		
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80,00%	-	-

Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025:

Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Sidemen sampai dengan Triwulan II sudah sangat tinggi, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan teknis sudah berjalan dengan baik. Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dalam perencanaan dan dukungan pendanaan kegiatan dan Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses pengadaan masih proses melalui e-Purchasing. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sidemen sampai dengan triwulan II adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Kode rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		SKPD Penanggung Jawab
																I		II		III		IV								
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								UNSUR KEWILAYAHAN																						
								KECAMATAN SIDEMEN		**500**	**17,408,713,355**	**400**	**10,967,464,723**	**100**	**3,362,672,696**	**25**	**571,258,489**	**25**	**717,454,386**					**50**	**1,288,712,875**	**450**	**12,256,177,598**	**90 %**	**70 %**	Kecamatan Sidemen
1	33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	7	1	1				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	**500**	**15,861,713,355**	**400**	**9,719,367,855**	**100**	**3,312,841,396**	**25**	**565,850,489**	**25**	**716,514,386**					**50**	**1,282,364,875**	**450**	**10,901,314,112**	**90 %**	**69 %**	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas	**500**	**13,080,612,968**	**400**	**9,719,367,855**	**100**	**2,918,874,464**	**25**	**518,389,935**	**25**	**663,556,322**					**50**	**1,181,946,257**	**450**	**10,901,314,112**	**90 %**	**83 %**	Kecamatan Sidemen

								perangkat daerah																						
		7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	60	12,804,629,093	48	9,500,462,094	12	2,889,123,188.00	3	508,873,671	4	649,281,926					7	1,158,155,597	55	10,658,617,691	92 %	83 %	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan yang terbayar	180	263,484,000	141	210,704,436	18	29,051,276	6	9,516,264	6	14,274,396					12	23,790,660	153	234,495,096	85 %	89 %	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	15	12,499,875	12	8,201,325	3	700,000	-	-	-	-					-	-	12	8,201,325	80 %	66 %	Kecamatan Sidemen
		7	**01**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**500**	**816,627,595**	**300**	**522,670,396**	**100**	**127,528,766**	**25**	**6,261,300**	**25**	**1,972,000**					**50**	**8,233,300**	**350**	**530,903,696**	**70 %**	**65 %**	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	245	12,466,000	168	8,729,400	21	2,438,800	-	-	-	-					-	-	168	8,729,400	69 %	70 %	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4,500	589,220,375	3600	359,910,900	6,779	111,102,266	783	3,525,200	786	1,972,000					1,569	5,497,200	5,169	365,408,100	115 %	62 %	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia/Jumlah fotokopi yang tersedia	67,810	44,998,500	54,248	33,346,375	2,625	8,987,700	-	-	-	-					-	-	54,248	33,346,375	80 %	74 %	Kecamatan Sidemen

		7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar /bahan bacaan lainnya yang tersedia	300	33,000,000	180	12,625,000	-	-	-	-	-	-					-	-	180	12,625,000	60 %	38 %	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terfasilitasi	15	136,942,720	4	108,058,721	1	5,000,000	1	2,736,100	-	-					1	2,736,100	5	110,794,821	33 %	81 %	Kecamatan Sidemen
		7	**01**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**500**	**240,095,850**	**300**	**377,525,720**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**300**	**377,525,720**	**60 %**	**157 %**	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	2.07	06		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di adakan	3	60,000,000	2	65,320,000	-	-									-	-	2	65,320,000	67 %	109 %	Kecamatan Sidemen
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin gedung kantor yang di adakan	9	130,095,850	14	84,300,000	-	-									-	-	14	84,300,000	156 %	65 %	Kecamatan Sidemen
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di adakan	65	50,000,000	1	227,905,720	-	-									-	-	1	227,905,720	2%	456 %	Kecamatan Sidemen
		7	**01**	**01**	**1.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**500**	**847,115,500**	**400**	**638,058,010**	**100**	**113,420,328**	**25**	**30,062,178**	**25**	**37,858,330**					**50**	**67,920,508**	**450**	**705,978,518**	**90 %**	**83 %**	Kecamatan Sidemen

		7	01	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa tenaga pembantu surat-menyurat yang terbayar/Jumlah materai yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan jasa surat menyurat	1,740	327,312,000	1262	256,239,248	246	35,668,368	158	12,888,352	8	17,082,528					166	29,970,880	1,428	286,210,128	82%	87%	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening telpon, air dan listrik yang terbayar	60	151,500,000	48	74,397,914	12	27,900,000	3	5,585,474	3	3,393,274					6	8,978,748	54	83,376,662	90%	55%	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	1.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat-alat serta perlengkapan kantor yang tersedia/Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayar	1,405	368,303,500	1124	307,420,848	258	49,851,960	8	11,588,352	8	17,382,528					16	28,970,880	1,140	336,391,728	81%	91%	Kecamatan Sidemen
		7	**01**	**01**	**1.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**500**	**1,082,360,292**	**300**	**871,023,470**	**100**	**149,306,738**	**25**	**11,137,076**	**25**	**13,127,734**					**50**	**24,264,810**	**350**	**895,288,280**	**70%**	**83%**	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa tenaga sopir yang dibayar/ Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100	684,328,000	68	536,537,097	10	128,806,738	2	11,137,076	2	13,127,734					4	24,264,810	72	560,801,907	72%	82%	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	205	100,000,000	164	48,811,000	41	15,500,000	-	-	-	-					-	-	164	48,811,000	80%	49%	Kecamatan Sidemen

		7	01	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	5	298,032,292	4	285,675,373	1	5,000,000	-	-	-	-					-	-	4	285,675,373	80 %	96 %	Kecamatan Sidemen
		7	**01**	**01**	**1.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**500**	**34,997,000**	**300**	**18,762,850**	**100**	**3,711,100**	-	-	-	-					**-**	**-**	**300**	**18,762,850**	**60 %**	**54 %**	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	10	4,999,000	8	2,548,825	2	441,000	-	-	-	-					-	-	8	2,548,825	80 %	51 %	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	5	7,499,875	4	3,306,925	1	504,000	-	-	-	-					-	-	4	3,306,925	80 %	44 %	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	5	7,500,000	5	4,051,950	1	469,000	-	-	-	-					-	-	5	4,051,950	100 %	54 %	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	5	7,498,750	4	4,135,550	1	1,109,800	-	-	-	-					-	-	4	4,135,550	80 %	55 %	Kecamatan Sidemen
		7	01	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	5	7,499,375	5	4,719,600	1	1,187,300	-	-	-	-					-	-	5	4,719,600	100 %	63 %	Kecamatan Sidemen
2	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**500**	**715,000,000**	**22**	**108,670,587**	**100**	**33,975,300**		**-**	**25**	**940,000**					**25**	**940,000**	**22**	**109,610,587**	**220 %**	**26 %**	Kecamatan Sidemen
		7	**01**	**02**	**2.01**			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah desa yang disasar dalam rangka efektifitas kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan**	**10**	**415,000,000**	22	**108,670,587**	10	**31,460,700**		**-**		**940,000**					**-**	**940,000**	**22**	**109,610,587**	**220 %**	**26 %**	Kecamatan Sidemen

		7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang disasar dalam rangka efektifitas kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan	10	415,000,000	20	108,670,587	10	31,460,700.00			1	940,000					1	940,000	21	109,610,587	210%	26%	Kecamatan Sidemen
		7	**01**	**02**	**2.04**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pendampingan dan rekomendasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha dan non perizinan**	**500**	**300,000,000**	**320**	**58,599,163**	**100**	**2,514,600**		**-**		**-**					**-**	**-**	**320**	**58,599,163**	**64%**	**20%**	Kecamatan Sidemen
		7	01	02	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pendampingan pelayanan perijinan yang dilaksanakan	250	90,000,000	128	26,564,088	50	1,089,000.00									-	-	128	26,564,088	51%	30%	Kecamatan Sidemen
		7	01	02	2.04	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah rekomendasi pelayanan nonperijinan yang dikeluarkan	250	210,000,000	734	32,035,075	50	1,425,600.00									-	-	734	32,035,075	294%	15%	Kecamatan Sidemen
3	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**500**	**272,000,000**	**300**	**76,035,950**	**100**	**6,837,100**	**50**	**4,848,000**		**-**					**-**	**4,848,000**	**300**	**80,883,950**	**60%**	**30%**	Kecamatan Sidemen
		7	**01**	**03**	**2.01**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase ketuntasan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**500**	**272,000,000**	**300**	**76,035,950**	**100**	**6,837,100**		**4,848,000**		**-**					**-**	**4,848,000**	**300**	**80,883,950**	**60%**	**30%**	Kecamatan Sidemen

		7	01	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah forum perencanaan pembangunan yang dilaksanakan	5	188,000,000	4	50,287,425	1	5,807,500.00	1	4,848,000							1	4,848,000	5	55,135,425	100%	29%	Kecamatan Sidemen
		7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang disasar/diberdayakan dalam rangka efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	10	84,000,000	16	25,748,525	10	1,029,600.00	-	-	-	-					-	-	16	25,748,525	160%	31%	Kecamatan Sidemen
4	**32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis**	**7**	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum perangkat daerah di kecamatan**	**500**	**170,000,000**	**10**	**40,866,677**	**100**	**5,692,500**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**10**	**40,866,677**	**100%**	**24%**	Kecamatan Sidemen
		7	**01**	**05**	**2.01**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Desa Sasaran yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali**	**10**	**170,000,000**	**10**	**40,866,677**	**10**	**5,692,500**	**-**	**-**	**-**	**-**					-	-	10	40,866,677	100%	24%	Kecamatan Sidemen
		7	01	05	2.01	05		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	10	170,000,000	18	40,866,677	10	5,692,500.00	-	-	-	-					-	-	18	40,866,677	180%	24%	Kecamatan Sidemen

5	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**500**	**280,000,000**	**300**	**52,752,600**	**100**	**2,554,200**	**25**	**560,000**		**-**					**25**	**560,000**	**325**	**53,312,600**	**65%**	**19%**	Kecamatan Sidemen
		7	01	06	2.01			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase ketuntasan fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**500**	**280,000,000**	**300**	**52,752,600**	**100**	**2,554,200**	**25**	**560,000**		**-**					**25**	**560,000**	**325**	**53,312,600**	**65%**	**19%**	Kecamatan Sidemen
		7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang tertata dan tertib administrasi	10	100,000,000	18	27,317,000	10	1,425,600.00	2	560,000							2	560,000	20	27,877,000	200%	28%	Kecamatan Sidemen
		7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang rancangan APB Desanya dievaluasi tepat waktu	10	180,000,000	20	25,435,600	10	1,128,600.00								-	-	20	25,435,600	200%	14%	Kecamatan Sidemen
6	**31. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**	**7**	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**400**	**110,000,000**	**0**	**35,265,250**	**100**	**772,200**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**35,265,250**	**0%**	**32%**	Kecamatan Sidemen

		7	**0 1**	**0 4**	**2. 01**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**10**	**110,000,000**	**0**	**35,265,250**	**10**	**772,200**	**-**	**-**	**-**	**-**					-	-	-	35,265,250	0%	32 %	Kecamatan Sidemen
		7	0 1	0 4	2.0 1	0 1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10	110,000,000	10	35,265,250	10	772,200.00	-	-	-	-					-	-	10	35,265,250	100 %	32 %	Kecamatan Sidemen
																Rata-rata capaian kinerja (%)								**50.00%**	**38.32%**					
																Predikat kinerja								**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidemen

Kecamatan Sidemen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, wilayah kerja meliputi 10 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Sidemen. Dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Sidemen memiliki potensi SDM yang sangat beragam. Kecamatan Sidemen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Karangasem yang dilaksanakan oleh Camat Sidemen beserta seluruh jajaran sesuai SOTK, dalam hal ini menyangkut tugas dan fungsi jajaran aparatur di Kecamatan Sidemen antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha untuk meningkatkan sumber daya aparatur sehingga tercapai pelayanan yang maksimal dan fokus kepada tugas pokok dan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat.

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorporate Social Responsibility (CSR),

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa.

4. Mewabahnya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk di Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem khususnya, membawa dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat yang berujung pada dampak sosial sehingga memerlukan perhatian dan penangangan khusus dari pemerintah

2.1.1 Tingkat Pelayanan Kecamatan Sidemen

Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah sebagai berikut :

1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahanPerumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah;
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidemen :

1. Kwalitas SDM kurang optimal
2. Lingkunan kantor perlu perawatan rutin
3. Belum ada SDM pengelola arsip
4. Kondisi bangunan perkantoran yang kurang memadai untuk pelayanan publik.
5. Kompetensi pegawai kurang optimal
6. Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai

2.2.3 **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sidemen** :

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengelolaan surat
2. Melakukan perawatan secara rutin dan berkesinambungan
3. Mengadakan perbaikan peralatan kerja kantor
4. Meningkatkan pengelola arsip, baik arsip dinamis aktif, dinamis in aktif dan dinamis pasif
5. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan bangunan kantor secara kontinu
6. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
7. Diadakan pengelolaan kepegawaian dan pembinaan pegawai secara rutin
8. Menyampaikan laporan keuangan dan pemerintahan yang akurat dan tepat waktu
9. Mengadakan Musrenbang secara berjenjang (*Bottom Up Planning*) mulai dari tingkat desa dan kecamatan
10. Mengadakan peringatan Hari Besar Nasional secara rutin serta mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai, wawasan kebangsaan
11. Mengadakan rapat koordinasi pimpinan atau rapat koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
12. Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
13. Mengadakan koordinasi monitoring pengendalian dan evaluasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sidemen tahun 2025 disusun berdasarkan program dan kegiatan hasil pemetaan (mapping) dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, isu strategis dan tugas fungsi perangkat daerah serta memperhatikan target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya khususnya pasca mewabahnya pandemi Covid-19. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sidemen 2025

2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajeman Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (button up) dalam wadah kegiatan Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Kecamatan Sidemen telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di Tahun 2025. Berikut usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal … Februari 2024 antara lain sesuai table di bawah ini :

BAB V

PENUTUP

Dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renjaper) Tahun 2025 Kecamatan Sidemen ini dapat diketahui langkah kerja yang pasti dan terarah. Pembahasan secara sistematis dan detail tentang segala permasalahan di masyarakat maupun menyangkut kewilayahan, hal ini untuk memberikan ruang bagi SKPD agar dapat menentukan langkah dalam mencapai sasaran pelayanan yang lebih maksimal dan mewujudkan kesejahteraan di Kecamatan Sidemen.

Rumusan yang digali dari permasalahan mikro diharapkan dapat mengerucut menjadi kegiatan yang dapat mengakomodir setiap permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Sidemen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan harapan dapat

dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dokumen Renja ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sidemen Tahun 2021-2026. Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan solusinya untuk keperluan laporan. Sehingga penilaian dengan mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil dilapangan atau kondisi empiris pada saat program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternative yang mungkin satu-satunya bagi kebutuhan informasi yang valid. Secara umum program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikategorikan berhasil dengan baik.

Sidemen,2 Juli 2025
CAMAT SIDEMEN

Dr. I PUTU AGUS SUMAHENDRA, SIP, MAP
PEMBINA
NIP. 19880402 200701 1 028

PERUBAHAN
RENJA
2025

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN
KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 758/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 732/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem;

c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 758/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas	1. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Penegakan Hukum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 3. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 4. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem
6.	Kelompok Kerja Bidang Angkutan	1. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 2. Kepala Seksi Terminal dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		3. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 4. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana	1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 2. Kepala Seksi Penyediaan Perlengkapan dan Prasarana Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 4. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem
8.	Kelompok Kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 3. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem
9.	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi	1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 2. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 3. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem Tahun 2021 - 2026.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan penyesuaian dan perubahan terhadap RENJA awal Tahun 2025 yang disusun pada tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang dilakukan penyesuaian tehadap kondisi saat ini dan berdasarkan prioritas kebutuhan pencapaian tujuan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dengan Indikator Output dan Indikator Outcome yang akan dicapai dalam mewujudkan konsep pembangunan di sektor perhubungan yang efisien dan efektif.

Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Oleh karenanya sejalan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem ini disampain terima kasih.

Amlapura, 16 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARAANGASEM

Tjokorda Made Surya Darma, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196811211990031003

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR.....i.
DAFTAR ISI.....ii.
DAFTAR TABEL.....iii.
BAB I. PENDAHULUAN.....1.
1.1 Latar Belakang.....1.
1.2 Landasan Hukum.....4.
1.3 Maksud dan Tujuan.....6.
1.4 Sistematika Penulisan.....6.
BAB II. EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024.....8.
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan TW II.....8.
2.2 Isu-Isu Penting yang Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....17.
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN.....19.
3.1 Tujuan dan Sasaran.....19.
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....19.
3.3 Program dan Kegiatan.....21.
BAB IV PENUTUP .....29.
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....29.
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....30.
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....30.

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025.....9.
Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Renja per Triwulan II Tahun 2025.....9.
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.....20.
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025.....25.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Karangasem, melalui Dinas Perhubungan berupaya mendorong peningkatan kualitas layanan dengan melakukan inovasi dalam pengelolaan sektor perhubungan agar lebih efisien dan memberikan nilai tambah secara ekonomi. Dalam upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata, penguatan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Karangasem menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Kawasan wisata yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan perlu dihubungkan secara optimal dengan pusat-pusat ekonomi, seperti pasar tradisional, sentra kerajinan, kawasan industri kecil, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Konektivitas yang baik tidak hanya akan memperlancar arus kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat lokal melalui peningkatan akses terhadap peluang usaha dan lapangan kerja.

Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah pengembangan sistem transportasi umum yang efisien, aman, dan terjangkau. Saat ini, masih banyak wilayah di Karangasem yang belum memiliki layanan transportasi umum yang memadai, terutama yang menjangkau area-area wisata terpencil atau yang berpotensi dikembangkan. Transportasi umum yang baik akan mendorong pergerakan wisatawan secara lebih mudah dan nyaman, serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemacetan dan dampak lingkungan.

Selain itu, integrasi antar moda transportasi juga turut menjadi perhatian agar pergerakan antarwilayah menjadi lebih lancar dan efisien. Pemerintah daerah perlu merancang sistem transportasi yang saling terhubung antara terminal, pelabuhan, dan jalur-jalur utama menuju destinasi wisata. Tak hanya itu, penyediaan informasi transportasi yang mudah diakses, baik secara fisik maupun digital,

juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan konektivitas yang mendukung pariwisata.

Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Karangasem, aspek keamanan dan kenyamanan menjadi elemen penting yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah minimnya keberadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di sejumlah ruas jalan, terutama di area-area yang rawan kecelakaan dan tindak kejahatan. Kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga dapat menurunkan citra daerah sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman.

Oleh karena itu, pemasangan LPJU pada ruas-ruas jalan yang mengarah ke objek-objek wisata menjadi bagian penting dalam upaya penataan kawasan pariwisata. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat infrastruktur pendukung pariwisata, tetapi juga meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan, khususnya pada malam hari. Penambahan LPJU di lokasi-lokasi strategis diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, terang, dan aman, sehingga mampu memberikan pengalaman kunjungan yang lebih baik serta mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem.

Hal penting lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan sektor transportasi adalah pengelolaan terminal tipe C, yang merupakan salah satu tugas utama Dinas Perhubungan. Terminal tipe C berfungsi sebagai tempat pelayanan kendaraan umum, baik angkutan kota maupun angkutan pedesaan, yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di daerah. Saat ini, Kabupaten Karangasem memiliki dua terminal tipe C yang telah beroperasi dengan cukup baik dan memberikan kontribusi dalam mendukung kelancaran arus transportasi lokal. Namun demikian, untuk mengoptimalkan fungsi terminal secara maksimal, masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Peningkatan tersebut mencakup perbaikan akses jalan keluar dan masuk terminal agar kendaraan dapat bergerak dengan

lancar dan aman, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya seperti ruang tunggu yang nyaman, sanitasi yang layak, area parkir yang memadai, dan sistem informasi transportasi yang jelas. Peningkatan kualitas terminal ini diharapkan tidak hanya mampu mendukung aktivitas harian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari wajah pelayanan publik yang representatif dan ramah bagi pengguna jasa transportasi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur transportasi seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata yang signifikan. Infrastruktur transportasi yang memadai menjadi kunci dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta wisatawan. Renja memiliki peran penting dalam sistem perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari Renstra PD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, Renja Dinas Perhubungan berfungsi untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan tujuan strategis jangka menengah dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan. Perubahan Renja Tahun 2025 mencakup perubahan pagu anggaran, indikator kinerja program dan kegiatan, serta disusun berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2025. Dokumen ini disusun sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkembangan isu dan permasalahan aktual, sehingga mampu memberikan dampak optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2006-2025;
k. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
l. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
o. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
p. Peraturan Bupati Karangasem No 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
q. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

r. Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 758/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja ini adalah untuk menyediakan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang memuat tentang perubahan-perubahan terhadap Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sesuai perkembangan keadaan yang ada sehingga dapat menjadi arah dalam mewujudkan target kinerja Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja ini adalah untuk:

a. Menjadi pedoman penyusunan RKAP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
b. Menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangakat Daerah; dan
c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.
d. Menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan pasal 361 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai:

BAB I PENDAHULUAN
memuat tentang latar belakang Perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025
memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai

dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan pendanaan Program kegiatan.

BAB IV PENUTUP

memuat tentang catatan penting Perubahan Renja dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renja.

II EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan II, diperoleh gambaran sebagai berikut:

2.1.1. Capaian Sasaran Renja Tahun 2025:

Dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 Dinas Perhubungan menetapkan satu Tujuan Utama, satu Tujuan Penunjang dan satu Sasaran Utama, satu sasaran penunjang yaitu:

Tujuan utama adalah: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur di bidang Perhubungan secara Terintegrasi dan Terkoneksi, tujuan penunjangnya adalah: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi dan sasarannya yaitu:

1. Sasaran utama adalah: Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dengan indikator sasaran yaitu: Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)
2. Sasaran Penunjang adalah: Meningkatnya Kualitas layanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang baik dengan indikator sasaran yaitu: Persentase peneyelenggaraan pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah.

Capaian sasaran Dinas Perhubungan tersebut adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi sampai TW II	Capaian (%)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan Masyarakat (transportasi)	78,5 Indeks	79,9 Indeks	101,78 Persen
2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang baik	Persentase peneyelenggaraan pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	50 Persen	50 Persen

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat (transportasi) pada triwulan II tercapai sebesar 101,78 persen. Capaian Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang baik dengan indikator kinerja Persentase peneyelenggaraan pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah baru tercapai sebesar 50 persen, capaian sasaran ini kemungkinan akan tercapai diakhir tahun anggaran 2025.

2.1.2. Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025:

Hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan per triwulan II adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Renja per Triwulan II Tahun 2025
Dinas perhubungan

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
						I		II					
				5		6		7		8		9	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR											
		DINAS PERHUBUNGAN											
1	**Meningkatnya Kualitas layanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang baik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-Tugas Perangkat Daerah**	**100%**	**14.937.248.169**	**25%**	**2.186.469.969**	25,00%	**3.088.672.919**	**50,00%**	**5.275.142.888**	**0,00**	**0,0008**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	2.600.000	25%	788.211	25,00%	0	50,00%	788.211	0,30	0,1617
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminstrasi keuangan yang tertangani	100%	8.349.716.161	25%	871.606.908	25,00%	1.769.218.429	50,00%	2.640.825.337	0,30	0,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah yang tertangani	0%	0	0%	0	0,00%	0,00	0%	0	0,20	0,00

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tertangani	0%	0	0%	0	0,00%	0,00	0%	0	0,20	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Umum yang tertangani	100%	152.857.400	25%	22.420.435	25,00%	39.779.500	50,00%	62.199.935	0,30	0,26
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	0%	0	0%	0	0,00%	0	0%	0	0,20	0,08
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	6.169.073.560	25%	1.266.778.363	25,00%	1.222.748.812	50,00%	2.489.527.175	0,30	0,52
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	263.001.048	25%	24.876.052	25,00%	56.926.178	50,00%	81.802.230	0,30	0,36
						Rata-rata capaian kinerja (%)				**50%**	**35,32%**		
						Predikat kinerja				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
2	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**PERSENTASE LAYANAN ANGKUTAN DARAT**	**32%**	**4.058.898.824**	5,94%	**350.091.501**	5,94%	**608.433.776**	**11,88%**	**958.525.277**	**1,30**	**0,14**
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang dipasang dalam kondisi baik	100%	2.797.542.540	10%	136.056.457	30,00%	214.150.260	40%	350.206.717	0,28	0,68
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	0%	0	0%	0	0,00%	0	0%	0	0,93	0,02
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tercapainya target retribusi parkir	100%	454.407.812	8,00%	50.528.952	54,62%	145.946.228	62,62%	196.475.180	0,33	0,44
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pelayanan uji berkala	100%	271.662.312	10,00%	37.432.968	32,20%	57.620.652	42,20%	95.053.620	0,28	0,20
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kemacetan lalu lintas terselesaikan	100%	458.284.140	0%	117.593.860	50,00%	176.174.840	50,00%	293.768.700	0,30	0,42
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase meningkatnya kemampuan awak angkutan umum tentang tertib berlalu lintas	100%	6.817.600	0%	638.000	50,00%	0	50,00%	638.000	0,30	0,02

		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya angkutan umum yang beroperasi di dalam trayek	67%	58.636.328	18,94%	4.944.176	30%	10.524.064	49,21%	15.468.240	1,55	0,05
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan jaringan trayek pedesaan	100%	0	0%	0	0,00%	0	0%	0	0,00	0,00
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpanjangan ijin trayek	100%	11.548.092	10,0%	2.897.088	50,00%	4.017.732	60,00%	6.914.820	0,32	0,34
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tarif dari trayek angdes yang ada	0%	0	0%	0	0,00%	0	0%	0	0,00	0,00
					18.996.146.993	**30,94%**	**2.536.561.470**	30,94%	**3.697.106.695**				
						Rata0rata capaian kinerja (%)				**37%**	**23,62%**		
						Predikat kinerja				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan per triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja outcomenya baru tercapai 50 persen, sedangkan kinerja keuangan program baru tercapai 32,30 persen. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerjanya sudah tercapai 50 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan tercapai 30,32 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 6 (enam) Sub Kegiatan.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerjanya baru tercapai 50 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan baru tercapai 26,12 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan.
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerjanya baru tercapai 50 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan baru tercapai 47,64 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 5 (lima) Sub Kegiatan.
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerjanya baru tercapai 50 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan baru tercapai 40,35 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan.
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerjanya baru tercapai 50 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan baru tercapai 32,08 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) indikator kinerja outcomenya belum tercapai, sedangkan kinerja keuangan program baru tercapai 23,18 persen. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :
   a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerjanya sudah tercapai sebesar 30 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan baru tercapai 12,18 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 2 (dua) Sub Kegiatan.
   b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan indikator kinerjanya baru tercapai sebesar 6 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan sebesar 43,24 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan.
   c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator kinerjanya baru tercapai sebesar 32,2 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan sebesar 34,99 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 3 (tiga) Sub Kegiatan.
   d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerjanya sudah tercapai sebesar 50 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan sebesar 64,10 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 2 (dua) Sub Kegiatan.
   e. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan indikator kinerjanya sudah mencapai 50 persen, sedangkan kinerja keuangan kegiatan baru tercapai 9,36 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan.
   f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerjanya baru tercapai sebesar 30,27 persen, sedangkan kinerja keuangan sebesar 26,38

persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 2 (dua) Sub Kegiatan

g. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerjanya baru tercapai 50 persen, sedangkan kinerja keuangan sebesar 59,88 persen, dan didukung dengan pelaksanaan Sub Kegiatan sebanyak 1 (satu) Sub Kegiatan.

2.2. Isu - isu penting yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem sebagai salah satu Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perhubungan di wilayah Kabupaten Karangasem yang mempunyai tugas dan fungsi sangat strategis. Salah satu tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem yaitu pelayanan di bidang transportasi yang meliputi masalah lalu lintas, parkir, angkutan, terminal, operasional petugas dan pengujian kendaraan bermotor.

Berbagai persoalan bidang perhubungan yang dihadapi Dinas perhubungan Kabupaten Karangasem menjadikan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pelayanan. Permasalahan seperti, terbatasnya pendanaan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, rendahnya pelayanan angkutan darat, keterbatasan SDM dan peralatan pengujian kendaraan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi merupakan masalah yang sangat penting dan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.

Terbatasnya anggaran menghambat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang merata, sehingga menciptakan ketimpangan akses antar wilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Hal ini berdampak pada menurunnya konektivitas, memperlambat distribusi logistik, serta menurunkan daya saing daerah. Pelayanan angkutan darat yang masih

rendah baik dari sisi jumlah armada, kualitas layanan, maupun ketepatan waktu turut berkontribusi terhadap kemacetan, tingginya biaya transportasi, dan menurunnya kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya peralatan pengujian kendaraan yang memadai mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap kelayakan kendaraan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama di daerah rawan kecelakaan, menunjukkan belum optimalnya peran pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, serta minimnya infrastruktur keselamatan seperti rambu, marka jalan, dan penerangan. Selain itu, masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas juga memperparah situasi ini. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perhubungan juga menjadi tantangan tersendiri. Di era digital, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi cerdas, seharusnya dapat meningkatkan efisiensi layanan seperti pengujian kendaraan, manajemen lalu lintas, integrasi data transportasi, hingga sistem tiket dan pengaduan masyarakat. Namun, keterbatasan infrastruktur digital dan SDM yang mampu mengoperasikan sistem tersebut membuat Dinas Perhubungan belum mampu memberikan layanan yang cepat, transparan, dan berbasis data. Oleh karena itu, isu-isu ini harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan pada Dinas Perhubungan, tidak hanya untuk memperbaiki kualitas layanan transportasi, tetapi juga dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang aman, andal, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam Renstra Perubahan Tahun 2021 - 2026 Dinas Perhubungan menetapkan satu tujuan utama, satu tujuan penunjang dan satu sasaran utama, satu sasaran penunjang. Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan, adapun tujuan dan sasaran yang ingin capai adalah sebagai berikut :

Tujuan

- Tujuan Utama adalah: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dibidang perhubungan secara terintegrasi dan terkoneksi.
- Tujuan Penunjang adalah: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi.

Sasaran

- Sasaran Utama adalah: Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi;
- Sasaran Penunjang adalah: Meningkatnya Kualitas layanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang baik;

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir Strategi

Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 - 2026.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021 - 2026. Adapun Strategi dan Kebijakan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dibidang perhubungan secara terintegrasi dan terkoneksi	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Pembangunan infrastruktur transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan ekonomi Kabupaten Karangasem	Pembangunan insfrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendukung pariwisata	Didukung dengan Satu Program dan tujuh Kegiatan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi	Meningkatnya Kualitas layanan administrasi dan tata laksana perkantoran yang baik	• Peningkatan kualitas pelayanan aparatur; • Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur; • Peningkatan kualitas data dan informasi	Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan bebas dari korupsi.	Didukung dengan satu Program dan lima kegiatan

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif', baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program dan Kegiatan yang akan di dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem pada Renja Perubahan Tahun 2025 meliputi:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** dengan sub Kegiatan, yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan, yaitu **:**
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pengadaan Mebel
   c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

I. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**, dengan Kegiatan

1. **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2. **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**, dengan Sub Kegiatan, yaitu:
   a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
3. **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
4. **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
   b. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
   c. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5. **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
   b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
6. **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :

a. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C

7. **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Sub Kegiatan, yaitu :
   a. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
   b. Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten karangasem
8. **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,** dengan sub kegiatan, yaitu :
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem menyusun Perubahan Rencana Kerja dan pendanaannya yang akan dituangkan melalui Program dan Kegiatan, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2025

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-Tugas Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.871.975.056**	**11.597.630.066**	**725.655.010**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**718.000**	**718.000**	-
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	93.500	93.500	-
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000	120.000	-
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	141.000	141.000	-
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000	120.000	-
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000	120.000	-
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	123.500	123.500	-
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-Tugas Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**14.937.248.169**	**14.844.613.295**	**(92.634.874)**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.600.000**	**2.600.000**	-
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000	250.000	-
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	300.000	-
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	300.000	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	800.000	-
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	800.000	-
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	150.000	150.000	-
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan adminstrasi keuangan yang tertangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.349.716.161**	**8.544.510.611**	194.794.450
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1778 Orang/bulan	842 Orang/bulan	8.318.472.993	8.503.377.987	184.904.994
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	74.800	74.800	-
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	31.168.368	41.057.824	9.889.456
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan Administrasi Umum yang tertangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**152.857.400**	**150.563.200**	(2.294.200)
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.759.100	3.759.100	-
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	87.077.600	85.874.100	(1.203.500)
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.026.400	9.526.400	(500.000)
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.825 Dokumen	1.825 Dokumen	6.000.000	6.000.000	-
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	45.994.300	45.403.600	**(590.700)**
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor**	-	**100 Persen**	-	**81.435.011**	81.435.011
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	6 Unit	-	81.435.011	81.435.011
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.169.073.560**	**5.810.204.252**	(358.869.308)
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	17.834.184	22.778.912	**4.944.728**

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	6.051.546.724	5.728.098.504	**(323.448.220)**
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	99.692.652	59.326.836	(40.365.816)
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**263.001.048**	**255.300.221**	(7.700.827)
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	175.449.772	185.531.853	**10.082.081**
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	35.500.000	35.500.000	**-**
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	52.051.276	34.268.368	**(17.782.908)**
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Layanan Angkutan Darat**	**32 Persen**	**32 Persen**	**4.058.898.824**	**6.043.211.388**	1.956.770.064
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase perlengkapan jalan yang dipasang dalam kondisi baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.797.542.540**	**3.461.045.972**	**663.503.432**
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150 Unit	110 Unit	1.020.500.000	1.296.997.388	276.497.388
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000 Unit	1000 Unit	1.777.042.540	2.164.048.584	387.006.044
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**					**500.000.000**	500.000.000
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	**-**	1 unit	**-**	500.000.000	500.000.000
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase tercapainya target retribusi parkir**	**100 Persen**	**100 Persen**	**454.407.812**	**620.516.668**	166.108.856
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	454.407.812	620.516.668	166.108.856
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Terlaksananya pelayanan uji berkala**	**100 Persen**	**100 Persen**	**271.662.312**	**417.443.316**	145.781.004
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	30.680.000	**85.765.000**	-
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4986 Unit	2000 Unit	143.619.312	178.815.316	35.196.004
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3000 Dokumen	900 Dokumen	22.500.000	**22.500.000**	-

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU ANGGARAN 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	74.863.000	130.363.000	55.500.000
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase kemacetan lalu lintas terselesaikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**458.284.140**	**950.386.320**	492.102.180
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	449.264.140	941.366.320	492.102.180
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	9.020.000	9.020.000	-
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase meningkatnya kemampuan awak angkutan umum tentang tertib berlalu lintas**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.817.600**	**6.817.600**	-
2	15	02	2.08	0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	4 Laporan	4 Laporan	6.817.600	6.817.600	-
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya angkutan umum yang beroperasi di dalam trayek**	**72 Persen**	**72 Persen**	**58.636.328**	**72.981.056**	14.344.728
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	41.503.184	46.447.912	4.944.728
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten karangasem	Jumlah armada angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	185 Unit	150 Unit	17.133.144	26.533.144	9.400.000
2	**15**	**02**	**2.14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perpanjangan ijin trayek**	**100 Persen**	**100 Persen**	**11.548.092**	**14.020.456**	2.472.364
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	11.548.092	14.020.456	2.472.364
					JUMLAH				**18.996.146.993**	**20.887.824.683**	1.864.135.190

IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran - sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem Tahun 2021- 2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 harus menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, baik dalam kerangka regulasi yang mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Pra Musrenbang dan Musrenbang di tiap - tiap kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kelompok fungsi uruasan agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

4.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJPD Kabupaten Karangasem, RPJMD Kabupaten Karangasem 2021 - 2026, Rancangan RKPD Perubahan Kabupaten Karangasem Tahun 2025, serta Visi dan misi Kepala Daerah periode 2021 - 2026.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

a. Aparatur Sipil Negara yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
b. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih itensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Bidang-bidang, agar tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan dapat tercapai dan proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Amlapura, 16 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KARAANGASEM



Tjokorda Made Surya Darma, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196811211990031003

RENCANA KERJA

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Ngurah Rai No. 21

dlh.karangasemkab.go.id

dlh@karangasemkab.go.id

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektifitas pembangunan di daerah yang selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9).

24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

25. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pemerintah di tingkat pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 yang dituangkan kedalam program pembangunan pada setiap urusan pemerintahan yang didasari permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2025.

(3) Sistematika RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Bab VI : Penutup

(4) Ketentuan mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 25

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 752/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;

b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;

c. mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;

d. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;

e. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
9. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
11. Yang Bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 752/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN	JABATAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem
		2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1. Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 2. JF. Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 3. JF. Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
6.	Kelompok Kerja Pengelolaan Sampah.	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 2. JF. Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	1. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 2. JF. Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 3. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
8.	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem

NO.	JABATAN	JABATAN
		2. JF. Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem
9.	Staf Sekretariat	1. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup 2. Pengelolaan pada Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2025 tepat pada waktunya.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja.

Perubahan RENJA ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 1 Agustus 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karangasem,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. I Nyoman Tari, M.Si
NIP. 19661113 199203 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…… i

DAFTAR ISI…… ii

DAFTAR TABEL……... iii

BAB I PENDAHULUAN……... 1

1.1 Latar Belakang…… 1

1.2 Landasan Hukum…… 2

1.3 Maksud dan Tujuan……... 5

1.4 Sistematika Penulisan…….. 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025……. 7

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai TW II……..7

2.2 Isu-isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah……..…….…..…16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……19

3.1 Tujuan dan Sasaran……...19

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan…….. 20

3.3 Program dan Kegiatan……..21

BAB IV PENUTUP ……33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup pertriwulan II ……. 8

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam APBD Tahun 2025 dan Rencana Perubahan Tahun 2025 …… 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada: a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pertimbangan yang menjadi dasar dilaksanakannya perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Asumsi keuangan juga mengalami perubahan pada perkiraan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dan DBH (dana bagi hasil). Oleh karenanya berdasarkan SE Bupati Karangasem tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 juga dimaksudkan untuk menyesuaikan Renja dengan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. pelaksanaan perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup juga didasarkan adanya penyesuaian-penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II dan hasil evaluasi terhadap LKPJ dan hasil reviu Inspektorat terhadap dokumen perencanaan daerah, serta hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, Standar Pelayanan dan evaluasi SAKIP yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Dengan adanya

pertimbangan tersebut, maka Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan agar selaras dengan RPJMD/Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem untuk Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2016 yang didalamnya berisi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 18).
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
- Undang-undang (UU) Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali
- Keputusan Bupati Karangasem Nomor 752/HK/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang memuat tentang perubahan-perubahan terhadap RENJA DLH Tahun 2025 sesuai perkembangan, sehingga dapat menjadi arah dalam mewujudkan target kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan. Disamping itu juga untuk memberikan gambaran perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebagai akibat:

1. Adanya penambahan dan pengurangan anggaran kegiatan;
2. Penyesuaian perubahan indikator kinerja program dan indikator kerja kegiatan, serta.
3. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar program, kegiatan, maupun jenis belanja.

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKAP Perangkat Daerah Tahun anggaran 2025.
2. Untuk menjadi instrument dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai TW II

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai TW II

Sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem menetapkan 3 sasaran yaitu:

1) Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim wilayah kota untuk menjaga kualitas udara, tanah, dan air.
2) Meningkatnya penataan dan penaatan perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3) Meningkatnya pelayanan persampahan dengan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II, diperoleh gambaran sebagai berikut:

TABEL 2.1.

Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup pertriwulan II

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2025)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
									I		II		III		IV					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	30	31
2	**11**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**10.968.319.755**	**14,61%**	**716.469.545**	**33,71%**	**1.038.943.579**					**48,32%**	**1.755.413.124**		
2	**11**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkata Daerah**	**Persentase tingkat penyediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**29.778.622**	**15,44%**	**8.776.214**	**25,92%**	**11.724.396**					**41,36%**	**20.500.610**		
2	11	1	2,01	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	17.753.984	16,06%	6.078.126	25,88%	8.316.264					41,94%	**14.394.390**		
2	11	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	239.800	0,00%	0	25,52%	0					25,52%	**0**		
2	11	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	239.800	0,00%	0	0,00%	0					0,00%	**0**		
2	11	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	489.800	0,00%	426.000	76,15%	0					76,15%	**426.000**		
2	11	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	539.800	0,00%	0	0,00%	0					0,00%	**0**		
2	11	1	2,01	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.515.438	15,70%	2.272.088	25,69%	3.408.132					41,39%	**5.680.220**		

2	**11**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**100%**	**5.092.474.275**	18,19%	**620.903.596**	36,33%	**897.318.783**					**54,51%**	**1.518.222.379**		
2	11	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**5.092.474.275**	18,19%	620.903.596	36,33%	897.318.783					54,51%	**1.518.222.379**		
2	**11**	**1**	**2,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase tingkat pemenuhan administrasi retribusi persampahan**	**100%**	**82.582.476**	4,87%	**14.537.876**	40,22%	**18.335.564**					**45,09%**	**32.873.440**		
2	11	1	2,04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	82.582.476	4,87%	14.537.876	40,22%	18.335.564					45,09%	**32.873.440**		
2	**11**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tingkat Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**190.804.430**	1,17%	**19.011.226**	17,92%	**40.974.497**					**19,09%**	**59.985.723**		
2	11	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	6.874.800	0,00%	0	41,54%	274.506					41,54%	**274.506**		
2	11	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	158.772.030	1,34%	11.577.476	13,53%	38.415.591					14,88%	**49.993.067**		
2	11	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	13.980.400	0,00%	2.493.750	5,69%	919.400					5,69%	**3.413.150**		
2	11	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 eksp	1.177.200	0,00%	170.000	36,10%	255.000					36,10%	**425.000**		
2	11	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000	0,00%	4.770.000	85,17%	1.110.000					85,17%	**5.880.000**		
2	**11**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**5.351.149.538**	**1,91%**	**32.308.069**	**26,04%**	**36.929.273**					**27,95%**	**69.237.342**		
2	11	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.500.000	12,84%	500.000	25,61%	500.000					38,44%	**1.000.000**		
2	11	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Rekening	230.500.000	0,00%	29.535.981	25,91%	29.158.892					25,91%	**58.694.873**		
2	11	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	20.549.538	9,51%	2.272.088	27,44%	7.270.381					36,96%	**9.542.469**		
2	11	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.097.600.000	0,00%	0	30,17%	0					36,96%	**0**		

2	**11**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang diadakan**	**100%**	**221.530.414**	**10%**	**20.932.564**	**28,26%**	**33.661.066**					**38,26%**	**54.593.630**		
2	11	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61 Unit	161.079.138	1,21%	16.388.388	31,91%	21.994.802					33,12%	**38.383.190**		
2	11	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	20.000.000	0,00%	0	30,17%	0					30,17%	**0**		
2	11	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	40.451.276	8,15%	4.544.176	12,06%	11.666.264					20,22%	**16.210.440**		
2	**11**	**2**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**100%**	**244.899.100**	0,97%	**1.424.300**	2,68%	**1.582.500**					3,65%	**3.006.800**		
2	**11**	**2**	**2,01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100%**	**111.506.100**	2,39%	**1.043.500**	6,61%	**1.092.300**					9,00%	**2.135.800**		
2	11	2	2,01	6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	4 Dokumen	111.506.100	2,39%	1.043.500	6,61%	1.092.300					9,00%	**2.135.800**		
2	**11**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Tingkat Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**100%**	**133.393.000**	**0,00%**	**380.800**	0,00%	490.200					0,00%	**871.000**		
2	11	2	2,02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	133.393.000	0,00%	380.800	0,00%	490.200					0,00%	**871.000**		
2	**11**	**3**			**Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**Persentase Tingkat Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100%**	**357.809.376**	**3,82%**	**4.950.976**	**12,15%**	**30.220.132**					15,97%	**35.171.108**		
2	**11**	**3**	**2,01**		**Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota**	**Persentase Tingkat Pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh unit usaha dan/atau kegiatan**	**100%**	**355.809.376**	**3,89%**	**4.950.976**	**12,39%**	**30.220.132**					16,28%	**35.171.108**		
2	11	3	2,01	1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Media	249.951.276	1,98%	4.544.176	2,97%	4.105.332					4,95%	**8.649.508**		

					media tanah, air, udara dan laut														
2	11	3	2,01	2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Desa	78.020.000	3,92%	0	8,62%	23.420.000					12,54%	**23.420.000**		
2	11	3	2,01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	100%	27.838.100	7,98%	406.800	34,63%	2.694.800					42,61%	**3.101.600**		
2	**11**	**3**	**2,02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota**	**Persentase Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**100%**	**2.000.000**	0%	**0**	**0%**	**0**					0%	**0**		
2	11	3	2,02	1	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	6 Kali	2.000.000	0%	0	0%	0					0%	**0**		
2	**11**	**4**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)**	**100%**	**993.684.424**	5,36%	**165.105.824**	66,52%	**220.538.211**					71,88%	**385.644.035**		
2	**11**	**4**	**2,01**		**Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/ kota**	**Persentase Luas Keanikaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten/Kota**	**100%**	**993.684.424**	5,36%	**165.105.824**	66,52%	**220.538.211**					71,88%	**385.644.035**		
2	11	4	2,01	4	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7 HA	993.684.424	5,36%	165.105.824	66,52%	220.538.211					71,88%	**385.644.035**		
2	**11**	**5**			**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)**	**100%**	**14.595.092**	8,91%	**2.272.088**	13,36%	**3.738.332**					22,27%	**6.010.420**		
2	**11**	**5**	**2,01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Tingkat Pemenuhan Persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara B3**	**10%**	**14.595.092**	8,91%	**2.272.088**	13,36%	**3.738.332**					22,27%	**6.010.420**		
2	11	5	2,01	2	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10%	14.595.092	8,91%	2.272.088	13,36%	3.738.332					22,27%	**6.010.420**		

2	**11**	**6**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase tingkat ketaatan pelaku usaha yang di bina dan diawasi setiap tahunnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**100%**	**56.330.468**	6,02%	**9.515.164**	17,19%	**15.545.996**					23,21%	**25.061.160**		
2	**11**	**6**	**2,01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase unit usaha dan atau kegiatan yang mentaati izin lingkungan dan izin PPLH**	**100%**	**56.330.468**	6,02%	**9.515.164**	17,19%	**15.545.996**					23,21%	**25.061.160**		
2	11	6	2,01	1	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	8.506.100	9,47%	1.602.200	19,74%	1.751.000					29,21%	**3.353.200**		
2	11	6	2,01	5	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasiKabupaten/Kota	36 Unit	47.824.368	0,00%	7.912.964	12,75%	13.794.996					12,75%	**21.707.960**		
2	11	8			**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Peningkatan terhadap pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat**	**100%**	**21.100.500**	0,00%	0	4,33%	3.915.200					4,33%	**3.915.200**		
2	11	8	2,01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**21.100.500**	0,00%	0	4,33%	3.915.200					4,33%	**3.915.200**		
2	11	8	2,01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Klompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	**100%**	21.100.500	0,00%	0	4,33%	3.915.200					4,33%	**3.915.200**		
2	11	9			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Tingkat Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**100%**	**38.668.500**	0,00%	0	28,59%	9.275.370					28,59%	**9.275.370**		

2	11	9	2,01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup di Kabupaten Karangasem**	**100%**	**38.668.500**	0,00%	0	28,59%	9.275.370					28,59%	**9.275.370**		
2	11	9	2,01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrop dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	**100%**	38.668.500	0,00%	0	28,59%	9.275.370					28,59%	**9.275.370**		
2	**11**	**10**			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan**	**100%**	**8.166.800**	0,00%	**709.500**	28,32%	**1.411.000**					**28,32%**	**2.120.500**		
2	**11**	**10**	**2,01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100%**	**8.166.800**	0,00%	**709.500**	28,32%	**1.411.000**					**28,32%**	**2.120.500**		
2	11	10	2,01	4	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten /Kota yang ditindaklanjuti /ditangani	100%	8.166.800	0,00%	709.500	28,32%	1.411.000					28,32%	**2.120.500**		
2	**11**	**11**			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Tingkat Pengelolaan Persampahan**	**100%**	**12.200.933.922**	15,68%	**1.519.233.648**	18,91%	**2.251.637.169**					34,58%	**3.770.870.817**		
2	**11**	**11**	**2,01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase sampah terkelola**	**100%**	**12.200.933.922**	15,68%	**1.519.233.648**	18,91%	**2.251.637.169**					34,58%	**3.770.870.817**		
2	11	11	2,01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	30%	3.759.400.000	0,00%	0	0,00%	0					0,00%	**0**		
2	11	11	2,01	9	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	70%	590.256.612	3,73%	4.874.776	14,04%	113.556.379					17,77%	**118.431.155**		
2	11	11	2,01	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	15023 Ton	2.081.364.788	21,50%	416.523.188	17,97%	459.874.782					39,47%	**876.397.970**		
2	11	11	2,01	16	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	70%	4.287.262.746	15,84%	888.561.104	23,71%	1.348.809.148					39,54%	**2.237.370.252**		
2	11	11	2,01	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	45 Laporan	28.713.538	20,36%	5.068.988	11,68%	9.729.232					32,05%	**14.798.220**		

2	11	11	2,01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15023 Ton	1.453.936.238	22,06%	204.205.592	17,53%	319.667.628					39,59%	**523.873.220**		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	46,56%	5.996.488.534		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	Baik	Baik		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Semakin baiknya koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi antar bidang teknis
	2. Meningkatnya komitmen seluruh aparatur dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan apa yang telah ditargetkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Penghambat Capaian Kinerja	1. Tahap Pengadministrasian yang belum selesai
	2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	1. Meningkatkan koordinasi antar bidang teknis untuk mencapai target
	2. Mengejar pencapaian target kinerja yang masih rendah
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja PD tahun Berikutnya	1. Pengembangan kemampuan SDM
	2. Optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan
	3. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana

Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup per triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan pelaksanaan 6 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dimana rata-rata kinerja program mencapai 48,32%. Faktor penghambat capaian kinerja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain reformasi birokrasi belum terinternalisasi dengan baik pada seluruh komponen di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, dimana rencana kerja reformasi birokrasi yang telah disusun belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. Sedangkan faktor pendorong dari capaian kinerja program ini adalah adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup didukung oleh 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program ini mencapai 3,65%. Capaian kinerja yang relative rendah tersebut dikarenakan masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor pendorongnya itu melakukan penjadwalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup baru tercapai 15,97%. Capaian kinerja yang relative rendah tersebut disebabkan oleh karena proses penyusunan perencanaan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang dinamis dikarenakan masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor pendorongnya itu melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan tahapan yang telah di susun.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian program ini yaitu 71,88%.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian program ini yaitu 22,27%. Capaian kinerja yang relative rendah tersebut disebabkan karena kegiatan yang akan dilaksanakan masih menunggu jadwal pelaksanaan pada triwulan berikutnya.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian program ini yaitu 23,21%. Capaian kinerja yang relative rendah tersebut disebabkan karena kegiatan yang akan dilaksanakan masih menunggu jadwal pelaksanaan pada triwulan berikutnya.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian program ini yaitu 4,33%. Capaian kinerja yang relative rendah tersebut disebabkan karena kegiatan yang akan dilaksanakan masih menunggu jadwal pelaksanaan pada triwulan berikutnya.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian program ini yaitu 28,59%. Capaian kinerja yang relative rendah tersebut disebabkan karena kegiatan yang akan dilaksanakan masih menunggu jadwal pelaksanaan pada triwulan berikutnya.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian program ini yaitu 28,32%. Capaian kinerja yang relative rendah tersebut disebabkan oleh karena semakin sedikitnya pengaduan dari masyarakat yang masuk.
10. Program Pengelolaan Persampahan ini didukung oleh 1 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian program ini yaitu 34,58%. Capaian kinerja yang relative rendah tersebut disebabkan oleh karena masih pada tahap proses pengadministrasian.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan/analisis isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Karangasem dilakukan dengan pendekatan ekosistem, dan disepakti dikelompokkan menjadi 3 (tiga) ekosistem. Adapun isu-isu strategis untuk masing-masing jenis ekosistem adalah sebagai berikut :

1. Ekosistem Lingkungan Sungai

   Permasalahan lingkungan yang pada umumnya terjadi di Ekosistem Lingkungan Sungai, adalah:

   a. Pembuangan Sampah
   b. Pencemaran air dari kegiatan industri
   c. Pencemaran air dari limbah domestik
   d. Pencemaran pestisida dan bahan kimia dari sektor pertanian
   e. Pencemaran bakteri coli dari aktifitas peternakan
   f. Pelanggaran sempadan Sungai

2. Ekosistem Perkotaan

Pada umumnya Permasalahan lingkungan yang terjadi di Ekosistem perkotaan, adalah:

a. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b. Peningkatan volume sampah padat baik organik, anorganik maupaun Limbah B3

c. Pencemaran udara terutama dari sektor transportasi

d. Penurunan estetika lingkungan

e. Pencemaran Limbah cair baik domestik maupun industri rumah tangga

3. Ekosistem Perdesaan

Gejala umum yang terjadi pada ekosistem Perdesaan yang muncul dan menjadi permasalahan lingkungan adalah:

a. Pencemaran air tanah dan air sungai akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia dari kegiatan pertanian

b. Alih fungsi lahan (dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian)

c. Masih tingginya volume Sampah non organik yang belum dikelola secara baik

Disamping dengan pendekatan ekosistem, penentuan isu-isu strategis lingkungan hidup juga menggunakan analisa SWOT, seperti berikut :

Matriks SWOT DLH Kabupaten Karangasem

Internal	**Eksternal**
Kekuatan	**Peluang**
1. Luasnya wilayan Kabupaten Karangasem 2. Memadainya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam 3. Adanya Peraturan Perundang-undangan 4. Terbentuknya Tim P3SLH 5. Adanya gedung dan peralatan laboratorium lingkungan 6. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM dll) 7. Adanya program dan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang rutin (sosialisasi, inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi)	1. Adanya LSM lingkungan hidup dan masyarakat pemerhati lingkungan 2. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan 3. Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan hidup yang intensif dari KLH dan lembaga diklat lainnya 4. Berkembangnya pemahaman dan isu lingkungan 5. Adanya peluang pendanaan dari sumber lain 6. Adanya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
Kelemahan	**Ancaman**
1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan 3. Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup 4. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup 6. Belum adanya PPLHD 7. Belum efektifnya penerapan sanksi hukum lingkungan	1. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan partiisipasi swasta untuk berinventasi dalam pengelolaan dan pengendalian LH 2. Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan tata ruang 3. Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi SDA 4. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan bidang LH 5. Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha 6. Adanya kondisi gegografis Kab Karangasem yang berbukit 7. Disharmoni antara perencanaan dan pelaksanaan dengan peraturan.

Melalui perumusan/analisi isu-isu lingkungan hidup di atas serta melalui metode analisa SWOT maka disimpulkan yang menjadi Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem adalah :

1. Kurangnya penataan dan penaatan pada bidang lingkungan hidup
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan pada media lingkungan hidup

Dari apa yang sudah disampaikan diatas maka isu-isu penting didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem sejauh ini berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya indikator kinerja yang telah dibuat. Kemudian koordinasi dan sinergi program antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem berjalan dengan baik, dimana apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka provinsi dan kabupaten sering melakukan koordinasi. Begitu pula dengan pemerintah pusat yang mana tujuannya adalah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Adapun yang menjadi permasalahan selama ini didalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, disamping yang selalu menjadi kendala adalah masalah pendanaan juga kesadaran masyarakat didalam menjaga lingkungan baik itu lingkungan disekitar rumah maupun lingkungan sekitar.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah (periode RPJMD) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dalam dokumen RENJA Perubahan Tahun 2025 ini, perubahan tujuan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika lingkungan strategis, kebutuhan pelayanan publik, serta hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program tahun sebelumnya.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran RPJMD yaitu:

MISI 2:	Menyelenggarakan Pembangunan yang Aman dan Unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi daerah
Tujuan 7:	Mewujudkan Kabupaten Karangasem yang Aman dalam Lingkungan Hidup dan Nyaman dari lingkungan alam sekitar.
Sasaran 27:	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.
Sasaran 28:	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan dan Limbah.
Sasaran 29:	Meningkatkan sanitasi perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Perubahan terhadap Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan aktual, dinamika pembangunan daerah, hasil evaluasi triwulan I dan II, serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional, provinsi, maupun perubahan pagu anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan telaahan terhadap evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, maka dilakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengoptimalan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Perubahan strategi pelaksanaan program ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian-penyesuaian belanja pada kegiatan pendukung Program ini yaitu pada Kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. pemenuhan kebutuhan BBM operasional, pemenuhan kebutuhan perawatan kendaraan dinas dan pemenuhan kebutuhan belanja rekening telepon. Sedangkan pada kegiatan lainnya penyesuaian belanja dilakukan sebagai bentuk efisiensi kegiatan melalui pengurangan belanja ATK, belanja materai, belanja cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Pada program ini dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BBM operasional.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pada program ini dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan wilayah serta lingkungan hidup yang hijau dan indah. Maka dilakukan penataan dan pemeliharaan pertamana yang ada di kota, mulai dari pemangkasan sampai penyiraman tiap harinya. Selain itu pada program ini juga melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat terkait penebangan pohon yang sekiranya membahayakan orang lain. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan operasional yang terus menerus mengalami kenaikan harga, seperti menyesuaiakn kebutuhan Bahan Bakar kendaraan operasional, pemenuhan kebutuhan perawatan kendaraan dinas beserta kelengkapan penataan pertamanan.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
10. Program Pengelolaan Persampahan Pada program ini dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan wilayah serta lingkungan hidup yang bersih dan nyaman. Maka dilakukan pelayanan persampahan dan sosialisasi untuk pengurangan timbunan sampah terus menerus. Karena sampah masih menjadi sumber masalah sampai saat ini. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan operasional yang terus menerus mengalami kenaikan harga, seperti menyesuaiakn kebutuhan Bahan Bakar kendaraan operasional, pemenuhan kebutuhan perawatan kendaraan dinas beserta kelengkapan penyapuan dan pengangkutan persampahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan perubahan kebijakan, berikut ini disajikan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Perubahan DLH Kabupaten Karangasem Tahun 2025:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam APBD Tahun 2025

dan Rencana Perubahan Tahun 2025

Kode					Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2025				Program dan Kegiatan	Perubahan Renja Tahun 2025				Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu DPA 2024 (Rp.)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**10.948.319.755**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**6.019.717.342**	**-4.928.602.413**	
2	**11**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkata Daerah**	**Persentase tingkat penyediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**29.778.622**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkata Daerah**	**Persentase tingkat penyediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**42.527.896**	**12.749.274**	
2	11	01	2,01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab. Karangasem**	2 dokumen	17.753.984	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab. Karangasem**	2 dokumen	24.657.912	**6.903.928**	
2	11	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	239.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	599.000	**359.200**	
2	11	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	239.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	599.000	**359.200**	

2	11	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	489.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	489.800	**0**	
2	11	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	539.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	899.000	**359.200**	
2	11	01	2,01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kab. Karangasem**	3 Laporan	10.515.438	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kab. Karangasem**	3 Laporan	15.283.184	**4.767.746**	
2	**11**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**5.092.474.275**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**5.108.307.268**	**15.832.993**	
2	11	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Karangasem**	29 Orang/bulan	**5.092.474.275**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Karangasem**	25 Orang/bulan	**5.108.307.268**	**15.832.993**	
2	**11**	**01**	**2,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase tingkat pemenuhan administrasi retribusi persampahan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**82.582.476**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase tingkat pemenuhan administrasi retribusi persampahan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**91.399.568**	**8.817.092**	
2	11	01	2,04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	**82.582.476**	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	**Kab. Karangasem**	1 Dokumen	**91.399.569**	**8.817.092**	

2	**11**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tingkat Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**200.804.430**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tingkat Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**227.406.940**	**26.602.510**	
2	11	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	8 Paket	6.874.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	8 Paket	8.568.600	**1.693.800**	
2	11	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	46 Paket	158.772.030	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	46 Paket	159.325.540	**553.510**	
2	11	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	9 Paket	13.980.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	9 Paket	13.335.600	**-644.800**	
2	11	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	365 Dokumen	1.177.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	365 Dokumen	1.177.200	**0**	
2	11	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Laporan	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kab. Karangasem**	1 Laporan	45.000.000	**25.000.000**	
2	**11**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**5.321.149.538**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**306.077.618**	**-5.015.071.920**	
2	11	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kab. Karangasem**	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kab. Karangasem**	1 Laporan	2.500.000	**1.500.000**	

2	11	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	12 Laporan	202.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	12 Laporan	235.500.000	**33.500.000**	
2	11	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	1 Laporan	20.549.538	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Kab. Karangasem**	1 Laporan	68.077.618	**47.528.080**	
2	11	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	**Kab. Karangasem**	100%	5097600000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	**Kab. Karangasem**	100%	0	**-5.097.600.000**	
2	**11**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang diadakan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**221.530.414**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang diadakan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**243.998.052**	**22.467.638**	
2	11	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Kab. Karangasem**	38 Unit	161.079.138	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Kab. Karangasem**	38 Unit	174.729.684	**13.650.546**	
2	11	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	**Kab. Karangasem**	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	**Kab. Karangasem**	1 Unit	20.000.000	**0**	

2	11	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Kab. Karangasem**	59 Unit	40.451.276	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Kab. Karangasem**	59 Unit	49.268.368	**8.817.092**	
2	**11**	**02**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**244.899.100**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**244.883.100**	**-16.000**	
2	**11**	**02**	**2,01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**111.506.100**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**111.506.100**	0	
2	11	02	2,01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	**Kab. Karangasem**	1 dokumen	**111.506.100**	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	**Kab. Karangasem**	1 dokumen	**111.506.100**	0	
2	**11**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Tingkat Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**111.506.101**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Tingkat Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**133.377.000**	0	
2	11	02	2,02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	**Kab. Karangasem**	1 dokumen	133.393.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	**Kab. Karangasem**	1 dokumen	984.000	0	
					Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	**Kab. Karangasem**	1 dokumen	0	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	**Kab. Karangasem**	1 dokumen	**132.393.000**	**-16.000**	

2	**11**	**03**			**Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**Persentase Tingkat Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**359.309.376**	**Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**Persentase Tingkat Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**364.903.167**	0	
2	**11**	**03**	**2,01**		**Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota**	**Persentase Tingkat Pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh unit usaha dan/atau kegiatan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**357.309.376**	**Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota**	**Persentase Tingkat Pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh unit usaha dan/atau kegiatan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**360.641.167**	**14.829.484**	
2	11	03	2,01	0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	**Kab. Karangasem**	3 Dokumen	249.951.276	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	**Kab. Karangasem**	4 Dokumen	254.359.822	132.393.000	
2	11	03	2,01	0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	**Kab. Karangasem**	2 Dokumen	79.520.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	**Kab. Karangasem**	2 Dokumen	78.020.000	5.593.791	
2	11	03	2,01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	**Kab. Karangasem**	150 Dokumen	27.838.100	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	**Kab. Karangasem**	150 Dokumen	28.261.345	3.331.791	
2	**11**	**03**	**2,02**		**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota**	**Persentase Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kab. Karangasem**	**100 %**	**2.000.000**	**Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota**	**Persentase Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kab. Karangasem**	100 %	**4.262.000**	2.262.000	
2	11	03	2,02	0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	**Kab. Karangasem**	6 Laporan	**2.000.000**	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	**Kab. Karangasem**	6 Laporan	**4.262.000**	2.262.000	-
2	**11**	**04**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**893.684.424**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**1.279.494.618**	385.810.194	

2	**11**	**04**	**2,01**		**Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/ kota**	**Persentase Luas Keanikaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten/Kota**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**893.684.424**	**Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/ kota**	**Persentase Luas Keanikaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten/Kota**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**1.279.494.618**	385.810.194	
2	11	04	2,01	0004	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Karangasem**	5 HA	**893.684.424**	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Karangasem**	5 HA	**1.279.494.618**	385.810.194	
2	**11**	**05**			**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**14.595.092**	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**17.367.456**	2.772.364	
2	**11**	**05**	**2,01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Tingkat Pemenuhan Persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara B3**	**Kab. Karangasem**	**25%**	**14.595.092**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Tingkat Pemenuhan Persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara B3**	**Kab. Karangasem**	**25%**	**17.367.456**	2.772.364	
2	11	05	2,01	0002	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	**Kab. Karangasem**	**25 Laporan**	**14.595.092**	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	**Kab. Karangasem**	**25 Laporan**	**17.367.456**	2.772.364	
2	**11**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase tingkat ketaatan pelaku usaha yang di bina dan diawasi setiap tahunnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Kab. Karangasem**	**10 %**	**56.330.468**	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase tingkat ketaatan pelaku usaha yang di bina dan diawasi setiap tahunnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Kab. Karangasem**	10 %	**266.669.924**	210.339.456	

2	**11**	**06**	**2,01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase unit usaha dan atau kegiatan yang mentaati izin lingkungan dan izin PPLH**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**56.330.468**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase unit usaha dan atau kegiatan yang mentaati izin lingkungan dan izin PPLH**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**266.669.924**	210.339.456	
2	11	06	2,01	0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	**Kab. Karangasem**	28 Dokumen	8.506.100	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	**Kab. Karangasem**	28 Dokumen	**207.256.100**	198.750.000	
2	11	06	2,01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasiKabupaten/Kota	**Kab. Karangasem**	60 Badan Usaha	47.824.368	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasiKabupaten/Kota	**Kab. Karangasem**	60 Badan Usaha	59.413.824	11.589.456	
2	11	08			**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Peningkatan terhadap pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat**	**Kab. Karangasem**	**14 %**	**21.100.500**	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Peningkatan terhadap pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat**	**Kab. Karangasem**	**14 %**	**21.100.500**	0	
2	11	08	2,01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota**	**Kab. Karangasem**	36 kali	**21.100.500**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan**	**Kab. Karangasem**	36 kali	**21.100.500**	0	

											Tingkat Kabupaten/Kota					
2	11	08	2,01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Klompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	**Kab. Karangasem**	100 Orang	**21.100.500**	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Klompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	**Kab. Karangasem**	100 Orang	**21.100.500**	0	
2	11	09			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Tingkat Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Kab. Karangasem**	20 %	**48.668.500**	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Tingkat Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Kab. Karangasem**	20 %	**325.059.798**	276.391.298	
2	11	09	2,01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup di Kabupaten Karangasem**	**Kab. Karangasem**	20 %	**48.668.500**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan hidup di Kabupaten Karangasem**	**Kab. Karangasem**	20 %	**325.059.798**	276.391.298	
2	11	09	2,01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrop dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	**Kab. Karangasem**	5 Entitas	**48.668.500**	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrop dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	**Kab. Karangasem**	5 Entitas	**325.059.800**	276.391.300	
2	**11**	**10**			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**8.166.800**	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Tingkat Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**8.166.800**	0	
2	**11**	**10**	**2,01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Kab. Karangasem**	**100 %**	**8.166.800**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Kab. Karangasem**	**100 %**	**8.166.800**	0	

2	11	10	2,01	0004	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten /Kota yang ditindaklanjuti /ditangani	**Kab. Karangasem**	5 Pengaduan	**8.166.800**	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten /Kota yang ditindaklanjuti /ditangani	**Kab. Karangasem**	5 Pengaduan	**8.166.800**	0	
2	**11**	**11**			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Tingkat Pengelolaan Persampahan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**11.801.198.856**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Tingkat Pengelolaan Persampahan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**22.407.205.720**	10.606.006.864	
2	**11**	**11**	**2,01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase sampah terkelola**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**11.801.198.856**	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase sampah terkelola**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**22.407.205.720**	10.606.006.864	
2	11	11	2,01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	**Kab. Karangasem**	2 Unit	3.713.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	**Kab. Karangasem**	10 Unit	11.875.037.000	8.162.037.000	
2	11	11	2,01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	**Kab. Karangasem**	35 Unit	590.256.612	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	**Kab. Karangasem**	35 Unit	594.818.576	4.561.964	
2	11	11	2,01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	**Kab. Karangasem**	15023 Ton	2.021.279.722	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	**Kab. Karangasem**	15023 Ton	2.204.421.876	183.142.154	
2	11	11	2,01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	**Kab. Karangasem**	70 Persentase	4.287.262.746	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	**Kab. Karangasem**	70 Persentase	5.792.057.600	1.504.794.854	

2	11	11	2,01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	**Kab. Karangasem**	45 Laporan	30.213.538	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	**Kab. Karangasem**	45 Laporan	56.901.684	26.688.146	
2	11	11	2,01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	**Kab. Karangasem**	15023 Ton	1.159.186.238	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	**Kab. Karangasem**	15023 Ton	1.883.968.984	724.782.746	
TOTAL									**24.396.272.871**	TOTAL				**30.954.568.425**		

BAB IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, konsisten, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Renja Perubahan ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran dan target RPJMD Kabupaten Karangasem, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem menegaskan komitmennya untuk melaksanakan Renja Perubahan ini secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta siap untuk dievaluasi secara berkala guna memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kaidah pelaksanaan perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Penyusunan RKAP Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan dalam perubahan Renja ini.

Amlapura, 1 Agustus 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karangasem,

Drs. I Nyoman Tari, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196611131992031009

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN ABANG TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN ABANG

JLN. WR. SUPRATMAN-ABANG TELP. NO. (0363) 21641
Email : kantorcamatabang.@gmail.com
KODE POS : 80852 - ABANG

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 779/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);

17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 732/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Camat Abang Kabupaten Karangasem, di Abang.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 779/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Camat Abang Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Camat Abang Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
6.	Kelompok Kerja Pemerintahan	Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kasi Pemerdayaan Masyarakat pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
8.	Kelompok Kerja Kesejahteraan Sosial	Kasi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
9.	Kelompok Kerja Ketentraman dan Ketertiban	Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
10.	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi	1. Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem 2. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugra-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Abang Tahun 2025 dengan tepat waktu. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Renja ini merupakan rumusan sebagai tindak lanjut atau penjabaran untuk mewujudkan Renstra setiap tahunnya untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem untuk lima tahun kedepan yaitu Tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Abang, 1 Agustus 2025

Camat Abang,

Putu Agusteja Pramascita, S.STP.,M.Sc
Pembina
NIP. 19851003 200312 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025..... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II 9

2.2 Isu-isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 17

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……. 17

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 17

3.3 Program dan Kegiatan ……..……... 19

BAB IV PENUTUP 25

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 126 ayat 1 menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, ayat 2, Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, Kecamatan bukan sebagai wilayah administrasi dan Camat Bukan sebagai Kepala Wilayah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Camat mempunyai suatu kewenangan dalam menyusun program maupun kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di Kecamatan, perubahan ini mengakibatkan tidak hanya perubahan pola hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kecamatan, tetapi juga hubungan antara Kecamatan dan Pemerinatahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan terdapat pada lampiran V Permendagri yang merupakan Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan dijadikan dasar untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Daerah. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Abang secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi Wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan

kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada : a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rencana Kerja Perubahan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja PD sebagai penjabaran Renstra PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Kecamatan Abang menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem ke dalam program dan kegiatan Kecamatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Kecamatan secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Perubahan Renja Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Abang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Abang Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perubahan PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD Perubahan dan Renja Perubahan PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,

prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD Perubahan merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBDP

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Intruksi Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomam Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali

Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
30. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 20);
31. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 779/HK/2024 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja ini adalah sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati, dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem. Dan sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, serta untuk gambaran riil tentang permasalahan dan usulan kebutuhan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Tujuan penyusunan perubahan Renja ini adalah :

a. Sebagai acuan Kecamatan Abang dalam mengoperasionalkan RKPD perubahan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Abang dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karangasem
b. Sebagai dasar dalam menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Abang dalam anggaran perubahan tahun 2025
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Abang Tahun 2025
d. Sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Abang dalam perubahan perubahan Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Abang tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

2.2 Isu-isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Abang sampai dengan triwulan II, diperoleh gambaran sebagai berikut :

2.1.1. Capaian Sasaran Renja Tahun 2024:

Dalam Renstra Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 menetapkan 3 tujuan dan 3 sasaran yaitu :

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan
2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Abang dalam periode pembangunan 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya
2. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Capaian Sasaran Kecamatan Abang tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi sampai TW II	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketahanan bencana sertarasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	50,00%	50,00%
2.	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92 %	90%	98%
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87	88	101%

2.1.2. Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025:

Rata-rata capaian kinerja Kecamatan Abang sampai dengan Triwulan II sudah sangat tinggi, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan teknis sudah berjalan dengan baik. Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dalam perencanaan dan dukungan pendanaan kegiatan dan Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses pengadaan masih proses melalui e-Purchasing. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Abang sampai dengan triwulan II adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem

Periode Pelaksanaan : 2025

No	Sasaran	Kode rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		SKPD Penang-gung Jawab
												I		II				
1	2	3						3	4	7		8		9		12=(8)+(9)+(10)+(11)		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7						**UNSUR KEWILAYAHAN**										
		7	**01**					**KECAMATAN ABANG**		**100%**	**4,255,723,867**	**31%**	**648,171,148**	**24%**	**1,028,403,421**	**55.02%**	**1,676,574,569**	
1	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**4,144,087,131**	**28%**	**622,336,694**	**19%**	**996,728,565**	**48%**	**1,619,065,259**	Kecamatan Abang
		7	**01**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	**100%**	**3,707,478,231**	**58%**	**571,995,365**	**25%**	**926,618,824**	**83%**	**1,498,614,189**	**Kecamatan Abang**
		7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	3,654,763,195	25%	554,272,661	25%	900,553,768	50%	1,454,826,429	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 dokumen	52,136,736	50%	17,376,704	50%	26,065,056	100%	43,441,760	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	578,300	100%	346,000	0%	-	100%	346,000	Kecamatan Abang
		7	**01**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	**100%**	**171,474,050**	**36%**	**26,303,849**	**24%**	**30,418,670**	**60%**	**56,722,519**	**Kecamatan Abang**
		7	03	03	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,000,800	0%	-	75%	3,365,970	75%	3,365,970	Kecamatan Abang
		7	03	03	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	146,806,050	22%	18,159,789	38%	26,706,500	60%	44,866,289	Kecamatan Abang
		7	04	04	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	6,667,200	33%	582,500	0%	346,200	33%	928,700	Kecamatan Abang

		7	04	04	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 dokumen	3,000,000	25%	250,000	8%	-	33%	250,000	Kecamatan Abang
		7	04	04	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	10,000,000	100%	7,311,560	0%	-	100%	0	Kecamatan Abang
		7	**01**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase administrasi kantor yang dilaksanakan**	**100%**	**84,238,630**	**26%**	**11,932,992**	**32%**	**13,037,537**	**58%**	**24,970,529**	**Kecamatan Abang**
		7	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	7,517,092	33%	2,422,088	50%	3,258,132	83%	5,680,220	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	30,000,000	25%	7,438,816	25%	6,671,273	50%	14,110,089	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	14,321,538	20%	2,072,088	22%	3,108,132	42%	5,180,220	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	32,400,000	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Abang
		7	**01**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**177,230,220**	**12%**	**11,209,488**	**26%**	**26,368,132**	**38%**	**37,577,620**	**Kecamatan Abang**
		7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	140,379,582	10%	9,137,400	35%	23,260,000	45%	32,397,400	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	17,525,000	11%	-	22%	-	33%	-	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	19,325,638	15%	2,072,088	20%	3,108,132	35%	5,180,220	Kecamatan Abang
		7	**01**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**3,666,000**	**38%**	**895,000**	**8%**	**285,402**	**46%**	**1,180,402**	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.01	02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	484,300	25%	-	50%	285,402	75%	285,402	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	382,900	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	390,800	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	886,100	100%	546,000	0%	-	100%	546,000	Kecamatan Abang

		7	01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	943,600	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Abang
		7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	578,300	100%	349,000	0%	-	100%	349,000	Kecamatan Abang
		7	**1**	**1**	02.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang diadakan**	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	Kecamatan Abang
		7	1	1	02.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Abang
		7	1	1	02.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Abang
		7	1	1	02.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Abang
2	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100%**	**51,185,460**	**19%**	**10,860,440**	**41%**	**16,290,660**	**60%**	**27,151,100**	Kecamatan Abang
		7	**01**	**02**	**2.01**			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**21,117,092**	**15%**	**2,172,088**	**45%**	**3,258,132**	**60%**	**5,430,220**	Kecamatan Abang
		7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	21,117,092	15%	2,172,088	45%	3,258,132	60%	5,430,220	Kecamatan Abang
		7	**01**	**02**	**2.04**			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan**	**100%**	**30,068,368**	**23%**	**8,688,352**	**38%**	**13,032,528**	**60%**	**21,720,880**	Kecamatan Abang
		7	01	02	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	1,500,000	10%	-	30%	-	40%	-	Kecamatan Abang
		7	01	02	2.04	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	28,568,368	35%	8,688,352	45%	13,032,528	80%	21,720,880	Kecamatan Abang

3	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**25,517,092**	**63%**	**9,685,838**	**20%**	**5,062,932**	**83%**	**14,748,770**	Kecamatan Abang
		7	**01**	**03**	**2.01**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100%**	**25,517,092**	**63%**	**9,685,838**	**20%**	**5,062,932**	**83%**	**14,748,770**	Kecamatan Abang
		7	01	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 lembaga kemasyarakatan	13,000,000	100%	7,513,750	0%	1,804,800	100%	9,318,550	Kecamatan Abang
		7	01	03	2.01	02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 sekolah	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Abang
		7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12,517,092	25%	2,172,088	40%	3,258,132	65%	5,430,220	Kecamatan Abang
4	**32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis**	**7**	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100%**	**4,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	Kecamatan Abang
		7	**01**	**05**	**2.01**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali**	**100%**	**4,000,000**	**0%**	**-**	0%	-	**0%**	**-**	Kecamatan Abang
		7	01	05	2.01	05		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14 laporan	4,000,000	10%	-	65%	885,000	75%	885,000	Kecamatan Abang
5	**33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**7**	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**24,534,184**	**50%**	**4,344,176**	**40%**	**10,321,264**	**90%**	**14,665,440**	Kecamatan Abang
		7	**01**	**06**	**2.01**			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**100%**	**24,534,184**	**50%**	**4,344,176**	**40%**	**10,321,264**	**90%**	**14,665,440**	Kecamatan Abang

		7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dokumen	11,017,092	50%	2,172,088	40%	5,163,132	90%	7,335,220	Kecamatan Abang
		7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 dokumen	10,017,092	25%	2,172,088	35%	3,258,132	60%	5,430,220	Kecamatan Abang
		7	01	06	2.01	18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	14 dokumen	3,500,000	0%	-	75%	1,900,000	75%	1,900,000	
6	**31.Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**	**7**	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**6,400,000**	**25%**	**944,000**	**25%**	**-**	**50%**	**944,000**	Kecamatan Abang
		7	**01**	**04**	**2.01**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase fasilitasi penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum**	**100%**	**6,400,000**	**25%**	**944,000**	**25%**	**-**	**50%**	**944,000**	Kecamatan Abang
		7	01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	6,400,000	25%	944,000	25%	-	50%	944,000	Kecamatan Abang
												Rata-rata capaian kinerja (%)				**55.02%**	**39.40%**	
												Predikat kinerja				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dalam perencanaan dan dukungan pendanaan kegiatan																	
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses pengadaan masih proses melalui e-Purchasing																	

2.3 Isu-isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Adapun isu-isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian serta upaya mencarikan solusi terbaik, diantaranya :

1. Masih tingginya potensi gangguan ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum di kecamatan
2. Masih tingginya potensi konflik sosial di kecamatan
3. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ABANG

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Abang merupakan penjabaran atau implementasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada Tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan
2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dati tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Abang dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah :

1. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya
2. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkanm visi dan misi.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Secara rinci rumusan strategi dan arah kebijakan yang diambil kecamatan Abang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	1 Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparatur pemerintah daerah untuk menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Karangasem. 2 Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan	1 Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu	Didukung dengan Satu Program dan Satu Kegiatan

Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	1 Membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap hukum	1 Pendidikan politik kepada masyarakat Desa	Didukung dengan Satu Program dan Satu Kegiatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1 Membangun sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi	1 Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Peningkatan 2 kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan Peningkatan kualitas 3 pelaksanaan dan pengawasan Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta 4 peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima	Didukung dengan Satu Program dan Satu Kegiatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Abang memuat didalamnya indikator kinerja dan kelompok sasaran. Indikator kinerja dan kelompok sasaran menggambarkan tolak ukur pencapaian rencana kerja dalam kurun satu tahun anggaran. Kelompok sasaran merupakan target kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Rencana Kerja tahun 2025 Kecamatan Abang merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja tahun 2025.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025 tersebut disusun berdasarkan potret permasalahan Kecamatan Abang sebagai Perangkat Daerah yang mengemban tugas kewilayahan (teritorial) dengan tugas pokok adalah

menyelenggarakan pemerintahan umum dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki serta keterbatasan alokasi anggaran.

Indikator kinerja dan kelompok sasaran ini merupakan alat yang berguna untuk mencek pelaksanaan tugas dan fungsi serta menngukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan dan seberapa besar kontribusi kecamatan dalam mencapai visi dan misi kabupaten yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten. Selain itu dengan merumuskan indikator kinerja dan sasaran akan lebih bisa mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun anggaran dengan membandingkan rencana target dengan realisasi yang meliputi lima indikator kinerja, yaitu masukan (*in-put)*, Keluaran (*out-put*), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaannya yang akan dituangkan melalui program dan kegiatan, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program Kegiatan Kecamatan Abang Tahun 2025

dan Perubahan Tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Induk 2025			Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Perubahan 2025			Bertambah (Berkurang)		Ket.
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN				**UNSUR KEWILAYAHAN**						
	Kecamatan Abang			**4,255,723,867**	**Kecamatan Abang**			**4,265,159,427**	**9,435,560**	**0.22%**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangkat Daerah**	**100%**	**4,144,087,131**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas-tugas Perangkat Daerah**	**100%**	**4,136,143,779**	**(7,943,352)**	**-0.19%**	
a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	100%	**3,666,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	100%	**3,666,000**	**-**	**0.00%**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	484,300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	484,300	-	0.00%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	382,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	382,900	-	0.00%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	390,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	390,800	-	0.00%	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	886,100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	886,100	-	0.00%	

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	943,600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	943,600	-	0.00%	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	578,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	578,300	-	0.00%	
b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kecamatan yang terpenuhi**	**100**	**3,707,478,231**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kecamatan yang terpenuhi**	**100**	**3,721,709,863**	**14,231,632**	0.38%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	3,654,763,195	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	3,651,615,915	(3,147,280)	-0.09%	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 dokumen	52,136,736	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 dokumen	69,515,648	17,378,912	33.33%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	578,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	578,300	-	0.00%	
c	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kecamatan yang terpenuhi**	**100**	**171,474,050**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kecamatan yang terpenuhi**	**100**	**171,024,410**	**-449,640**	-0.26%	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,000,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,908,600	-92,200	-1.84%	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	146,806,050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	151,793,050	4,987,000	3.40%	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	6,667,200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	6,761,200	94,000	1.41%	

4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 dokumen	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 dokumen	250,000	-2,750,000	-91.67%	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	7,311,560	-2,688,440	-26.88%	
d	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang diadakan**	**100**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang milik daerah yang diadakan**	**100**	**3,782,200**	**3,782,200**	100.00%	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	0.00%	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	3,782,200	3,782,200	#DIV/0!	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	100.00%	
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100**	**84,238,630**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100**	**58,219,540**	**(26,019,090)**	-44.69%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	7,517,092.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	9,289,456	1,772,364	23.58%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	30,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	31,500,000	1,500,000	5.00%	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	14,321,538.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	17,430,084	3,108,546	21.71%	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	32,400,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0	-	-32,400,000	-100.00%	

f	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**177,230,220**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100**	**177,741,766**	**511,546**	0.29%	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	140,379,582.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	141,807,582	1,428,000	1.02%	
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	17,525,000.00	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	13,500,000	-4,025,000	-22.97%	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	19,325,638.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	22,434,184	3,108,546	16.09%	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**51,185,460**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**62,047,280**	**10,861,820**	17.51%	
a	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100**	**21,117,092**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100**	**23,289,456**	**2,172,364**	9.33%	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	21,117,092	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	23,289,456	2,172,364	10.29%	
b	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan**	**100**	**30,068,368**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan**	**100**	**38,757,824**	**8,689,456**	22.42%	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 dokumen	1,500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 dokumen	1,500,000	-	0.00%	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	28,568,368	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	37,257,824	8,689,456	30.42%	

III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**100**	**25,517,092**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan**	**100**	**27,689,456**	**2,172,364**	7.85%	
a	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**100**	**25,517,092**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**100**	**27,689,456**	**2,172,364**	7.85%	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 lembaga kemasyara-katan	13,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 lembaga kemasyara-katan	13,000,000	-	0.00%	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	12,517,092	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	14,689,456	2,172,364	17.36%	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**6,400,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**6,400,000**	**-**	0.00%	
a	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**100**	**6,400,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**100**	**6,400,000**	**-**	0.00%	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	6,400,000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	6,400,000	-	0.00%	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**4,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**4,000,000**	**-**	0.00%	

a	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan**	**100**	**4,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan**	**100**	**4,000,000**	**-**	0.00%	
1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14 laporan	4,000,000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14 laporan	4,000,000	-	0.00%	
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**24,534,184**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**28,878,912**	**4,344,728**	15.04%	
a	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**100**	**24,534,184**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**100**	**28,878,912**	**4,344,728**	15.04%	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dokumen	11,017,092.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dokumen	13,189,456	2,172,364	19.72%	
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 dokumen	10,017,092.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 dokumen	12,189,456	2,172,364	21.69%	
3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	14 laporan	3,500,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	14 laporan	3,500,000	-	0.00%	
				4,255,723,867				**4,265,159,427**	**9,435,560**	**0.22%**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Abang Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun mengacu pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai triwulan II. Perubahan Renja Kecamatan Abang merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah dan kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Abang, penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Abang.

Pembahasan secara sistematis dan detail tentang segala permasalahan di masyarakat maupun menyangkut kewilayahan, hal ini untuk memberikan ruang bagi OPD agar dapat menentukan langkah dalam mencapai sasaran pelayanan yang lebih maksimal dan mewujudkan kesejahteraan di Kecamatan Abang. Rumusan yang digali dari permasalahan mikro diharapkan dapat mengerucut menjadi kegiatan yang dapat mengakomodir setiap permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Abang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan harapan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Abang, 1 Agustus 2025

Camat Abang,

Putu Agusteja Pramascita, S.STP.,M.Sc
Pembina
NIP. 19851003 200312 1 001

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BEBANDEM

KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

OM Swastyastu

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugra-Nya, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bebandem Tahun 2025 dengan tepat waktu. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Renja ini merupakan rumusan sebagai tindak lanjut atau penjabaran untuk mewujudkan renstra setiap tahunnya sesuai visi Kecamatan Bebandem untuk lima tahun kedepan yaitu Tahun 2022-2026.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Kami menyadari Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan) di masa yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang telah ikut membantu demi terselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini kami mengucapkan banyak terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Bebandem, 23 Juli 2025
Camat Bebandem,

I Gusti Ngurah Viranata, S.STP.,MAP
NIP. 19821027 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **11**

2.1. Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bebandem Sampai Triwulan II 11

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bebandem 21

2.1.1 Tingkat Pelayanan Kecamatan Bebandem 22

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bebandem 23

2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bebandem : 24

BAB III **25**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **25**

3.1 Tujuan dan Sasaran 25

3.1.1. Tujuan 25

3.1.2. Sasaran 26

BAB IV **39**

PENUTUP **39**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada :

a. rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Pertimbangan yang menjadi dasar dilaksanakannya perubahan Renja Kecamatan Bebandem Tahun 2025 adalah

telah ditetapkannya perubahan Renja Kecamatan Bebabndem Tahun 2025 adalah telah ditetapkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Bebandem dimaksud dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bebandem ini dapat menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif perangkat daerah sesuai dengan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RENJA Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut **:**

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Intruksi Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomam Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta

Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61)
30. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 732 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025
31. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 772/HK/2024 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Pada Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Rencana Kinerja perlu ditindaklanjuti dengan program kegiatan yang diupayakan untuk mendukung program tersebut melalui pengembangan kegiatan kecamatan dengan memperhatikan semua potensi yang dimiliki. Semua itu perlu pencermatan dalam menyusun suatu rencana kerja sehingga dapat mengambil langkah yang benar-benar strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja disemua bagian.

Maksud Perubahan Renja merupakan perubahan dari rencana rerja yang memuat penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan,

Lokasi kegiatan, kelompok sasaran, Pagu Indikatif. Adapun maksud penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bebandem Tahun 2025 adalah untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Adapun **Tujuan** tersusunnya Perubahan Renja ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bebadem Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dan mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Tujuan yang ingin diraih Satuan Kerja Kecamatan Bebandem dalam kurun waktu 1 s/d 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya optimalisasi pelayanan
2. Meningkatkan partisispasi masyarakat dalam perencanana pembangunan
3. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Terwujudnya kesejahteraan sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya
5. Terwujudnya keamanan dan ketertiban sosial
6. Terwujudnya rasa nasionalisme dikalangan masyarakat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Bebandem berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ayat 3) meliputi :

Rencana Kinerja Kecamatan Bebandem tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

menyajikan secara ringkas tentang latar belakang/pertimbangan dilakukan perubahan renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum/ peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan renja perangkat daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan renja perangkat daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan renja perubahan per Bab.

BAB II. EVALUASI SAMPAI RENCANA KERJA TAHUN 2025

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai TW II. Memuat capaian sasaran renja tahun 2025 capaian program dan kegiatan renja tahun 2025, Isu-isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, adapun faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai triwulan II yaitur paktor penghambatnya : adanya perubahan mekanisme pengamparahan spj kegiatan perlu penyesuai dari manual ke sistem ekatalog dan kesiapkan pejabat pengadaan dan peyedian dalam menanggapi proses pengamparahan. faktor pendorong kerjasama terjalin sangat terintegrasi.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan. (sesuaikan dengan lampiran Perubahan RKPD 2025). Tujuan dan sasaran : Memuat penyesuaian tujuan dan sasaran dan indikatornya (jika ada). Strategi dan arah kebijakan : Memuat penyesuaian strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja (jika ada). Program dan kegiatan : Memuat perubahan program dan kegiatan serta perubahannya

BAB IV. PENUTUP

Memuat tentang catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bebandem Sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bebandem Tahun 2025 sampai dengan triwulan II Semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan meneyesuaikan dengan Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari hasil pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan diperoleh penyesuaian dari program dan kegiatan sebelumnya ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025. Seiring penyesuaian yang dilaksanakan perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 untuk mempertajam program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Berdasarkan pemetaan diperoleh penyesuaian sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota
   a) Penambahan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 6 Sub Kegiatan
   b) Penambahan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan
   c) Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 Sub Kegiatan

d) Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub Kegiatan
e) Pada Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 Sub Kegiatan
f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 Sub Kegiatan

2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
   a) Pada Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan dengan 1 sub kegiatan
   b) Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat 3 sub kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahaan
   a) Pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan 3 Sub Kegiatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 Sub Kegiatan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a) Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 Sub Kegiatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
   a) Pada Kegiatan Fasilitasi Rekomindasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan 3 Sub Kegiatan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran strategik kecamatan Bebandem untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.

b. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.
c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penetapan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bebandem berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan isu-isu strategis daerah selama 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026. Dalam Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Bebandem menetapkan tiga sasaran. Adapun capaian sasaran Kecamatan Bebandem tersebut adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi TW II		
				Target	Realsiasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%
2	Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase partisipasi masyarakat Karangasem dalam setiap Pemilu/Pilkada	90%	92%	100%

3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	87%	80%	90%

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan sampai triwulan II telah dilaksanakan sebagaimana perencanaan namun realisasi anggaran sudah sesuai target yang ditentukan. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai triwulan II diperoleh gambaran sebagai berikut :

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2025

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2024		Penyebab tidak tercapaian target kinerja
					I		II		III		IV				
1	2	3	4		5		6		7		8		13=(9)+(10)+(11)+(12)		10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UNSUR KEWILAYAHAN														
	KECAMATAN BEBANDEM		100,00%	3.452.160.768,00	**27,26%**	677.590.241,00	**44,29%**	907.848.096,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00	**71,55%**	**1.585.438.337,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH**	100 %	**3.380.050.018,00**	**18,21%**	**660.426.416,00**	**13,07%**	**900.156.696,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**31,65%**	**1.560.583.112,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi dalam Menunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**100%**	**6.000.000,00**	**16,67%**	**1.149.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**16,67%**	**1.149.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.250.000,00	100,00%	1.149.000,00	0,00	-	0,00%		0,00%		100,00%	1.149.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00%		0,00		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00%		0,00		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00%		0,00		0,00%		0,00%		0,00%	-	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00%		0,00		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	750.000,00	0,00%		0,00		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	**100%**	**3.013.504.678,00**	**16,75%**	**606.097.042,00**	**33,92%**	**843.646.261,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**50,67%**	**1.449.743.303,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	2.934.253.758,00	27,75%	582.176.162,00	31,25%	807.764.941,00	0,00%		0,00%		59,00%	1.389.941.103,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.770.920,00	22,50%	23.920.880,00	70,50%	35.881.320,00	0,00%		0,00%		93,00%	59.802.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.480.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	**100 %**	**155.939.600,00**	**16,88%**	**19.622.785,00**	**20,50%**	**8.755.905,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**48,60%**	**28.378.690,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	21,00%		28,00%	2.165.080,00	0,00%		0,00%		49,00%	2.165.080,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	133.939.600,00	22,50%	10.751.800,00	22,50%	5.452.600,00	0,00%		0,00%		45,00%	16.204.400,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	24,00%	1.996.225,00	25,00%	1.138.225,00	0,00%		0,00%		49,00%	3.134.450,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakana	0 Dokumen	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.000.000,00	73,00%	6.874.760,00	27,00%	-	0,00%		0,00%		100,00%	6.874.760,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang milik daerah yang diadakan**	**0%**	**0,00**	**0,00%**	-	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang diadakan	0 paket	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase dukungsn oprsional pelaksanaan tugas-tugas perangkat Daerah	0 Unit	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	**100 %**	**85.776.938,00**	**22,38%**	**7.855.413,00**	**14,13%**	**11.140.116,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**36,50%**	**18.995.529,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	47,00%	1.000.000,00	3,00%	-	0,00%		0,00%		50,00%	1.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	25.000.000,00	21,50%	4.583.325,00	27,50%	4.342.984,00	0,00%		0,00%		49,00%	8.926.309,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26.376.938,00	21,00%	2.272.088,00	26,00%	6.797.132,00	0,00%		0,00%		47,00%	9.069.220,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.400.000,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang milik daerah yang diadakan**	**100 %**	**118.828.802,00**	**23,33%**	**25.702.176,00**	**15,67%**	**36.614.414,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**39,00%**	**62.316.590,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	104.828.802,00	30,00%	21.752.676,00	35,00%	34.639.414,00	0,00%		0,00%		65,00%	56.392.090,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	14.000.000,00	40,00%	3.949.500,00	12,00%	1.975.000,00	0,00%		0,00%		52,00%	5.924.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100 %**	**32.000.000,00**	**5,56%**	**0,00**	**29,33%**	**6.480.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**34,89%**	**6.480.000,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga adat tradisional di tingkat Kecamatan**	**100 %**	**25.000.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**34,00%**	**6.480.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**34,00%**	**6.480.000,00**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00%		34,00%	6.480.000,00	0,00%		0,00%		34,00%	6.480.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan**	**100 %**	**7.000.000,00**	**8,33%**	**0,00**	**27,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**35,33%**	**-**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00%		38,00%		0,00%		0,00%		38,00%	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	2.000.000,00	25,00%		13,50%		0,00%		0,00%		38,50%	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.000.000,00	0,00%		29,50%		0,00%		0,00%		29,50%	-	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAAN**	**100 %**	**26.610.750,00**	**39,00%**	**15.694.425,00**	**27,67%**	**635.400,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**66,67%**	**16.329.825,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100 %**	**26.610.750,00**	**39,00%**	**15.694.425,00**	**27,67%**	**635.400,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**66,67%**	**16.329.825,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakat	15.110.750,00	92,00%	12.121.925,00	8,00%	635.400,00	0,00%	0,00	0,00%		100,00%	12.757.325,00	

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.500.000,00	25,00%	3.572.500,00	75,00%	-	0,00%		0,00%		100,00%	3.572.500,00	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100 %**	**2.000.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**43,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**43,00%**	**-**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	**2.000.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**43,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**43,00%**	**-**	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8 Laporan	2.000.000,00	0,00%		43,00%		0,00%		0,00%		43,00%	-	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**100%**	**8.000.000,00**	**30,00%**	**1.469.400,00**	**21,17%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**51,17%**	**1.469.400,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**100%**	**8.000.000,00**	**30,00%**	1.469.400,00	**21,17%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**		**51,17%**	**1.469.400,00**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3.000.000,00	70,00%	1.355.000,00	9,50%	-	0,00%		0,00%		79,50%	1.355.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	3.000.000,00	20,00%	114.400,00	20,00%	-	0,00%		0,00%		40,00%	114.400,00	

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	2.000.000,00	0,00%		34,00%		0,00%		0,00%		34,00%	-	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERESENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100 %**	**3.500.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**38,00%**	**576.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**38,00%**	**576.000,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Koordinasi Upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**3.500.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**38,00%**	**576.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**38,00%**	**576.000,00**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3.500.000,00	0,00%	0,00	38,00%	576.000,00	0,00%		0,00%		38,00%	576.000,00	
					Rata-rata capaian kinerja (%)								**71,55%**	**45,93%**	
					Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

Berdasarkan table di atas rata-rata capaian program dan kegiatan kinerja Kecamatan Bebandem tahun 2025 sampai triwulan II yaitu :

a. Capaian Fisik sebesar 71,55% dengan ini rata-rata capaian predikat kinerja sangat tinggi dengan ini capaian fisik sudah maksimal dilaksanakan.

b. Capaian Keuangan 45,93%, dengan ini rata-rata capaian predikat keuangan sangat tinggi, sudah sesuai dengan target dan sudah maksimal dilaksanakan

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bebandem

Kecamatan Bebandem dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, wilayah kerja meliputi 8 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Bebandem. Dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Bebandem memiliki potensi SDM yang sangat beragam. Kecamatan Bebandem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Karangasem yang dilaksanakan oleh Camat Bebandem beserta seluruh jajaran sesuai SOTK, dalam hal ini menyangkut tugas dan fungsi jajaran aparatur di Kecamatan Bebandem antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur serta SDM Aparatur yang masih kurang memadai dalam persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha untuk meningkatkan sumber daya aparatur sehingga tercapai pelayanan yang maksimal dan fokus kepada tugas pokok dan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat.

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorporate Social Responsibility (CSR),

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa yang masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan Kecamatan dalam meningkatkan jalannya pembangunan di Pedesaan serta kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Desa.

4. Menurunnya penerapan nilai nilai seni dan budaya di masyarakat sebagai akibat dari ancaman kebudayaan luar yang merusak.

5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Desa sehingga berakibat langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

2.1.1 Tingkat Pelayanan Kecamatan Bebandem

Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas

pokok dimaksud Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah sebagai berikut :

1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahanPerumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan daerah;
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Bebandem

Adapun permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahanantara lain :

1. Kwalitas SDM kurang optimal
2. Lingkunan kantor perlu perhatian secara rutin
3. Belum ada SDM pengelola arsip

4. Kondisi bangunan perkantoran yang kurang memadai untuk pelayanan publik.
5. Kompetensi pegawai kurang optimal
6. Sarana dan prasarana kantor kurang memadai

2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bebandem :

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengelolaan surat
2. Melakukan perawatan secara rutin dan berkesinambungan
3. Mengadakan perbaikan peralatan kerja kantor
4. Meningkatkan pengelola arsip, baik arsip dinamis aktif, dinamis in aktif dan dinamis pasif
5. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan bangunan kantor secara kontinu
6. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
7. Diadakan pengelolaan kepegawaian dan pembinaan pegawai secara rutin
8. Menyampaikan laporan keuangan dan pemerintahan yang akurat dan tepat waktu
9. Mengadakan Musrenbang secara berjenjang (*Bottom Up Planning*) mulai dari tingkat desa dan kecamatan
10. Mengadakan peringatan Hari Besar Nasional secara rutin serta mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai, wawasan kebangsaan
11. Mengadakan rapat koordinasi pimpinan atau rapat koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
12. Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga

13. Mengadakan koordinasi monitoring pengendalian dan evaluasi

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Bebandem tahun 2025 disusun berdasarkan program dan kegiatan hasil pemetaan (mapping) dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, isu strategis dan tugas fungsi perangkat daerah serta memperhatikan target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya.

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Bebandem berdasarkan rencana strategis tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan.
2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public.

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar Perubahan Renja Kecamatan Bebandem Tahun 2025 perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara focus, efektif dan efisien. Adapun tujuan dan sasaran dari rencana kerja tahun 2025 terbagi dalam sasaran dan tujuan jangka panjang, menengah dan tahunan. Sasaran strategik kecamatan Bebandem untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
2. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	:	NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI (“KARANGASEM PRAKERTI NADI”)		
MISI V	:	Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Tujuan 20	:	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	1.	Sasaran	: 31	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1.	Pemberdayaan Krama Karangasem dan aparatur pemerintah daerah untuk menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Karangasem.	1.	Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu
							2.	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan		
Tujuan 21	:	Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	1.	Sasaran	: 32	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	1.	Membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap hukum	Pendidikan politik kepada masyarakat	
MISI VI	:	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima								
Tujuan			Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan	
Tujuan 22	:	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Sasaran	: 33	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1.	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	1.	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
									2.	Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan
									3.	Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan
									4.	Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bebandem Tahun 2025.

Tabel 4. 1
RUMUS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BEBANDEM DALAM APBD TAHUN 2024
DAN RANCANGAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	satuan	
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN					3.742.818.492,00					4.073.747.420,00
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DUKUNGAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERANGKAT DAERAH	Kec. Bebandem	100	%	3.670.707.742,00			100	%	3.618.747.420,00
7	1	1	02.01		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi dalam Menunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Kec. Bebandem	100	%	6.000.000,00			100	%	30.500.000,00
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bebandem	2	Dokumen	1.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Dokumen	8.500.000,00
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kec. Bebandem	1	Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	4.500.000,00

						Dokumen RKA-SKPD									
7	**1**	**1**	**02.01**	**3**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Kec. Bebandem**	**1**	**Dokumen**	**1.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**1**	**Dokumen**	**4.500.000,00**
7	**1**	**1**	**02.01**	**4**	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Kec. Bebandem**	**1**	**Dokumen**	**1.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**1**	**Dokumen**	**4.500.000,00**
7	**1**	**1**	**02.01**	**5**	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**	**Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**	**Kec. Bebandem**	**1**	**Dokumen**	**1.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**1**	**Dokumen**	**4.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.01**	**6**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Kec. Bebandem**	**2**	**Dokumen**	**750.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**2**	**Dokumen**	**4.500.000,00**

7	**1**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Kecamatan yang tersusun**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**3.224.298.764,00**			**100**	**%**	**2.678.247.420,00**
7	**1**	**1**	**02.02**	**1**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Kec. Bebandem**	**27**	**orng/bulan**	**3.121.124.204,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**27**	**orng/bulan**	**2.433.247.420,00**
7	**1**	**1**	**02.02**	**3**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Kec. Bebandem**	**12**	**dokumen**	**95.694.560,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**12**	**dokumen**	**225.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.02**	**5**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Kec. Bebandem**	**1**	**laporan**	**7.480.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**1**	**laporan**	**20.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum kantor yang terpenuhi**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**165.364.600,00**			**100**	**%**	**290.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.06**	**1**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**Kec. Bebandem**	**12**	**paket**	**5.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**12**	**paket**	**22.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.06**	**4**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**Kec. Bebandem**	**12**	**paket**	**143.364.600,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**		**12**	**paket**	**135.000.000,00**

											(PAD)				
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bebandem	12	paket	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	paket	35.000.000,00
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakana	Kec. Bebandem	12	dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	dokumen	38.000.000,00
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bebandem	1	laporan	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	laporan	60.000.000,00
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah yang diadakan	Kec. Bebandem	100	%	36.540.000,00			100	%	125.000.000,00
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Bebandem	2	unit	36.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	unit	65.000.000,00
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang diadakan	Kec. Bebandem	0	Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Paket	60.000.000,00

7	**1**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**62.785.484,00**			**100**	**%**	**100.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.08**	**1**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Kec. Bebandem**	**12**	**Laporan**	**2.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**12**	**Laporan**	**15.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.08**	**2**	**Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**Kec. Bebandem**	**12**	**Bulan**	**31.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**12**	**Bulan**	**45.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.08**	**3**	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Kec. Bebandem**	**12**	**Laporan**	**29.785.484,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**12**	**Laporan**	**40.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.08**	**4**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**Kec. Bebandem**	**12**	**Laporan**	**0**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**-**	**-**	**0**
7	**1**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**175.718.894,00**			**100**	**%**	**395.000.000,00**

7	**1**	**1**	**02.09**	**2**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**Kec. Bebandem**	**8**	**Unit**	**161.718.894,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**8**	**Unit**	**190.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.09**	**6**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**Kec. Bebandem**	**15**	**Unit**	**14.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**15**	**Unit**	**50.000.000,00**
7	**1**	**1**	**02.09**	**9**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**Kec. Bebandem**	**1**	**Unit**	**0**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**1**	**Unit**	**155.000.000,00**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**32.000.000,00**			**100**	**%**	**220.000.000,00**
7	**1**	**2**	**02.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga adat tradisional di tingkat Kecamatan**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**25.000.000,00**			**100**	**%**	**135.000.000,00**
7	**1**	**2**	**02.01**	**2**	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**	**Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Bebandem**	**1**	**dokumen**	**25.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**1**	**dokumen**	**135.000.000,00**

					Kecamatan										
7	**1**	**2**	**02. 04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**7.000.000,00**			**100**	**%**	**85.000.000,00**
7	**1**	**2**	**02. 04**	**1**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**	**Kec. Bebandem**	**1**	**Dokumen**	**2.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**1**	**Dokumen**	**25.000.000,00**
7	**1**	**2**	**02. 04**	**2**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan**	**Kec. Bebandem**	**12**	**Laporan**	**2.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**12**	**Laporan**	**30.000.000,00**
7	**1**	**2**	**02. 04**	**3**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan**	**Kec. Bebandem**	**12**	**Laporan**	**3.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**12**	**Laporan**	**30.000.000,00**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERESENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**26.610.750,00**			**100**	**%**	**100.000.000,00**

7	**1**	**3**	**02. 01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**26.610.750,00**			**100**	**%**	**100.000.000,00**
7	**1**	**3**	**02. 01**	**1**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Perencanaan Pembangunan di Desa**	**Kec. Bebandem**	**3**	**Lembaga Kemasyarakat**	**15.110.750,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**3**	**Lembaga Kemasyarakat**	**35.000.000,00**
7	**1**	**3**	**02. 01**	**2**	**Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan**	**Kec. Bebandem**	**3**	**Dokumen**	**0**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**3**	**Dokumen**	**30.000.000,00**
7	**1**	**3**	**02. 01**	**3**	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Kec. Bebandem**	**1**	**Laporan**	**11.500.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**1**	**Laporan**	**35.000.000,00**
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PPERESENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**3.500.000,00**			**100**	**%**	**25.000.000,00**

7	**1**	**4**	**02. 01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Koordinasi Upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**3.500.000,00**			**100**	**%**	**25.000.000,00**
7	**1**	**4**	**02. 01**	**1**	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kec. Bebandem**	**4**	**Laporan**	**3.500.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**4**	**Laporan**	**25.000.000,00**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**2.000.000,00**			**100**	**%**	**30.000.000,00**
7	**1**	**5**	**02. 01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**PPersentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**2.000.000,00**			**100**	**%**	**30.000.000,00**
7	**1**	**5**	**02. 01**	**5**	**Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**Kec. Bebandem**	**8**	**Laporan**	**2.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**8**	**Laporan**	**30.000.000,00**

7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE KETUNTASAN KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**8.000.000,00**			**100**	**%**	**80.000.000,00**
7	**1**	**6**	**02.01**		**Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan**	**Kec. Bebandem**	**100**	**%**	**8.000.000,00**			**100**	**%**	**80.000.000,00**
7	**1**	**6**	**02.01**	**2**	**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**Kec. Bebandem**	**3**	**Dokumen**	**3.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**3**	**Dokumen**	**30.000.000,00**
7	**1**	**6**	**02.01**	**3**	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**Kec. Bebandem**	**16**	**Dokumen**	**3.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**16**	**Dokumen**	**28.000.000,00**
7	**1**	**6**	**02.01**	**18**	**Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**	**Kec. Bebandem**	**8**	**Laporan**	**2.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**8**	**Laporan**	**22.000.000,00**
TOTAL										**3.742.818.492,00**					**4.073.747.420,00**

Berdasarkan tabel rumusan rencana kerja program dan kegiatan Kecamatan Bebandem dalam APBD Tahun 2025 dan Rencana Perubahan Tahun 2024 di atas, bahwa perubahan rencana kerja Kecamatan Bebandem Tahun 2025 hanya pada Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan target kinerja, karena pada rumusan indicator yang ditetapkan pada rencana kerja sebelumnya tidak mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun perubahan rencana kerja Kecamatan Bebandem pada Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif mendapat tambahan dana/pagu indikatif diperubahan tahun 2025 sebesar Rp. 290.657.724,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Adapun alasan penambahan anggaran kegiatan dimaksud yaitu :

Untuk memenuhi pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Kantor Kecamatan Bebandem agar tidak ada permasalahan dan keterlambatan mohon agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 223.869.724,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah untuk makmin sebesar Rp. 9.425.000,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya belanja komputer PC dan printer sebesar Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik berkurang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Rupiah), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu sebesar Rp. 47.763.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah.

BAB IV
PENUTUP

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Bebandem ini dapat diketahui langkah kerja yang pasti dan terarah. Pembahasan secara sistematis dan detail tentang segala permasalahan di masyarakat maupun menyangkut kewilayahan, hal ini untuk memberikan ruang bagi OPD agar dapat menentukan langkah dalam mencapai sasaran pelayanan yang lebih maksimal dan mewujudkan kesejahteraan di Kecamatan Bebandem.

Rumusan yang digali dari permasalahan mikro diharapkan dapat mengerucut menjadi kegiatan yang dapat mengakomodir setiap permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Bebandem sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan harapan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dokumen Perubahan Rencana Kinerja 2025 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bebandem Tahun 2016-2021. Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan solusinya untuk keperluan laporan. Sehingga penilaian dengan mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil dilapangan atau kondisi empiris pada saat program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternative yang mungkin satu-satunya bagi kebutuhan informasi yang valid. Secara umum program dan kegiatan tahun 2025 dapat dikategorikan berhasil dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Bebandem, 28 Juli 2025

Camat Bebandem,

I Gusti Ngurah Wiranatam S,STP., MAP

NIP. 19821027 200012 1 001

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Untung Surapati, Amlapura
Telp :(0363) 23283 Fax : (0363) 4301281
Email : www.satpol-pp@karangasemkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksankan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna, dan bertanggungjawab. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan mengacu kepada Rencana Strategis 2016-2021 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri atas Pendahuluan, evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2023, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja, dan Indikatif berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025. Dalam RENJA , isinya juga untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem

I Ketut Arta Sedana, AP.,M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19730306 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem 14

2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 21

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja 21

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Satuan Polisi Pamong Praja……..... 23

3.3 Program dan Kegiatan 24

BAB IV PENUTUP …..... 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 343 ayat (1) dinyatakan bahwa perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Perubahan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025 yang akan disepakati bersama antara Bupati Karangasem dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem, dan selanjutnya menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dan penyusunan Perubahan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025; 11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024; 16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Karangasem No. 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Bupati Karangasem ***"****MENUJU KARANGASEM YANG "AGUNG" (Aman; Gigih; Unggul; Nyaman; dan Gemah Ripah Loh Jinawi")*** Tahun 2025-2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025, akan dijadikan sebagai Pedoman dan Runjukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD, membuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi Isu-Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil Kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya, aturan pelaksanaannya, maupun rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem selama tahun 2025 pada Triwulan II. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 dapat dilihat **tabel T-C.29**

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota														
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Amlapura	Terlaksana Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	26.020.000,00	-	-	13.400.000,00	10.382.800,00	51,5	41	39,9	15.637.200,00	-	-
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Amlapura	Terlaksana Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.766.017.704,00	3.716.017.704,00	-50.000.000,00	1.723.585.320,00	709.283.090,00	46,38	20	19,09	3.006.734.614,000	-	-
3	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Amlapura	Terlaksana Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan	123.174.644,00	-	-	73.723.370,00	56.679.440,00	59,85	48	46,02	66.495.204,00	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
	dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota											
4	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Amlapura	Terlaksana Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.583.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.583.000,00	-	-
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota														
5	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Amlapura	Terlaksana Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	20.855.000,00	13.355.000,00	-7.500.000,00	13.355.000,00	1.777.500,00	100	14	13,31	11.577.500,00	-	-
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
8	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Amlapura	Terlaksana Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	197.574.926,00	194.724.926,00	-2.850.000,00	115.396.610,00	98.132.215,00	59,26	51	50,4	96.592.711,00	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
			Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota											
9	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Amlapura	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.260.000,00	-	-	52.260.000,00	17.551.500,00	100	34	33,58	34.708.500,00	-	-
10	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Amlapura	Terlaksana Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.305.000,00	-	-	13.958.600,00	4.239.750,00	46,06	14	13,99	26.065.250,00	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
11	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Amlapura	Terlaksana Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	892.620.027,00	792.870.027,00	-99.750.000,00	648.584.580,00	434.059.810,00	81,8	55	54,75	358.810.217,00	-	-
12	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Amlapura	Terlaksana Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.598.926,00	-	-	1.012.500,00	-	9.55	0	0	10.598.926,00	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Amlapura	Terlaksana Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.906.485.887,00	-	-	6.004.571.983,00	4.600.266.10600	50,43	40	38,64	7.306.219.781,00	-	-
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Amlapura	Terlaksana Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	375.000,00	-	-	375.000,00	325.500,00	100,00	95	86,8-	49.500,00	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Amlapura	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	939.600,00	-	-	-	-	-	-	-	939.600,00	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Amlapura	Terlaksana Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	625.000,00	-	-	325.000,00	-	52,00	-	-	625.000,00	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
			SKPD											
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Amlapura	Terlaksana Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.017.200,00	-	-	7.000.000,00	1.585.500,00	63,54	15	14,39	9.431.700,00	-	-
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Amlapura	Terlaksana Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.891.400,00	-	-	76.624.200,00	41.114.005,00	50,78	30	27,25	109.777.395,00	-	-
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Amlapura	Terlaksana Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.133.600,00	-	-	3.000.000,00	-	48,91	-	-	6.133.600,00	-	-
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Amlapura	Terlaksana Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	-	-	6.000.000,00	2.058.000,00	75	26	25,73	5.942.000,00	-	-
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Amlapura	Terlaksana Penyelenggaraan	30.000.000,00	15.000.000.00	-15.000.000,00	15.000.000,00	11.670.000,00	100	80	77,8	3.330.000,00	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
	dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Amlapura	Terlaksana Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	58,82	58,82	61	700.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Amlapura	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	356.400.000,00	-	-	237.600.000,00	0	66.67	0	0	356.400.000,00		
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Amlapura	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	-	-	50.500.000,00	38.775.408,00	67,33	53	51,7	36.224.592,00	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Amlapura	Terlaksana Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	192.839.931,00	-	-	111.839.931,00	98.770.150,00	58	52	51,22	94.069.781,00	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
			atau Kendaraan Dinas Jabatan											
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amlapura	Terlaksana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	13.985.000,00	100	95	93,23	1.015.000,00	-	-
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Amlapura	Terlaksana Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	7.500.000,00	50	-	-	15.000.000,00	-	-
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Amlapura	Terlaksana Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	100	-	-	20.000.000,00	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
17	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Amlapura	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	337.500,00	-	-	337.900,00	310.100,00	100	99	91,77	27.800,00	-	-
18	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Amlapura	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	332,900,00	-	-	-	-	-	-	-	332.900,00	-	-
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Amlapura	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	643.600,00	-	-	643.600,00	-	100	-	-	643.600,00	-	-
20	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Amlapura	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600.200,00	-	-	600.200,00	516.500,00	100	95	86,05	83.700,00	-	-
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Amlapura	Terlaksana Penyusunan Dokumen	336.600,00	-	-	-	-	-	-	-	336.600,00	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)			TARGET REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)			SISA DANA	MASALAH	PEMECAHAN
				DPA (INDUK)	DPPA (PERUBAHAN)	BERTAMBAH / (BERKURANG)			TARGET	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN			
	Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah											
22	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Amlapura	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.200,00	-	-	-	-	-	-	-	600.200,00	-	-
23	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Amlapura	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	337.900,00	-	-	337.900,00	310.100,00	100	99	91,77	27.800,00		
24	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Amlapura	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	332.900,00	-	-	-	-	-	-	-	332.900,00		
JUMLAH				**17.915.270.245,00**	**4.731.967.657,00**	**-175.100.000,00**	**9.213.193.794,00**	**6.142.482.374,00**	**51,93**	**35,81**	**34,62**	**11.597.687.871,00**		

-

Dari realisasi kinerja tersebut di atas, sebagian besar telah memenuhi target kinerja. Terhadap capaian kinerja, maka kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang perlu diambil adalah :

a. Mematangkan evaluasi penetapan kinerja sehingga sasaran yang dicapai bisa lebih efektif.
b. Mengevaluasi anggaran bagi kegiatan yang tidak tepat sasaran.
c. Meningkatkan penganggaran terhadap kegiatan yang sangat bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
d. Secara selektif, terus-menerus mencari terobosan-terobosan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan efektif.

2.2 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karangasem dalam mengemban tugas dan fungsinya adalah terciptanya kondisi masyarakat Kabupaten Karangasem yang tertib, aman dan tentram, taat dan patuh terhadap Peraturan perundang–undangan yang demokratis guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Guna menyelenggarakan Isu-isu penting kegiatan SKPD, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih adanya pelanggaran Perda / Perkada, baik pelanggaran secara Yustisi maupun Non Yustisi
2. Masih terdapat pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
4. Masih rendahnya kompetensi Anggota Perlindungan Masyarakat

Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dapat dikatakan sangat berhasil tetapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun ini masih terdapat Permasalahan dan Hambatan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dimiliki jika dibandingkan jumlah rasio penduduk di Kabupaten Karangasem.

2. Belum Optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Belum optimalnya koordinasi dan dalam penyelenggaraannya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang ekfektifitas program / kegiatan.
5. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RENSTRA SKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
6. Masih terbatasnya jumlah PPNS sehingga sulit dimobilisasi untuk kegiatan Penegakan PERDA.

Satpol.PP dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari, sering kali menghadapi tantangan di lapangan baik dalam Penegakan PERDA maupun dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dan disetiap tantangan yang dihadapi diupayakan untuk, mencari solusi dan jalan keluar. Dalam upaya meningkatkan pelayanan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satpol.PP antar lain yaitu :

1. Melakukan tindakan preventive (Penangkalan) tindakan yang dilakukan antara lain :
    - Menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat
    - Menerima masyarakat dan laporan dari kegiatan patroli
    - Melakukan pencatatan laporan
    - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi PERDA dan Peratuan Kepala Daerah.
    - Melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi PERDA
    - Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelanggaran PERDA dan Perkada bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

    Jika secara preventive (penangkalan) tidak mendapatkan respon ataupun tanggapan maka tindakan yang dilakukan oleh Satpol.PP Kab. Karangasem yaitu dengan tindakan ke dua yaitu:

2. Melakukan tindakan preventif non yustisial yaitu meliputi :
    - Penindakan terhadap para Pelanggar PERDA / PERKADA, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari, sejak penandatanganan surat pernyatan
    - Apabila tidak melaksanakan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka :
        - Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 hari
        - Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 hari
        - Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 hari
    - Untuk daerah yang memiliki PPNS, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik PNS untuk melakukan tindakan yustisial bagi pelanggaran pidana.

Dari isu-isu penting tersebut langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

a. Mematangkan evaluasi program dan kegiatan lebih efektif.
b. Mengevaluasi anggaran agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.
c. Meningkatkan penganggaran terhadap kegiatan yang sangat bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
d. Secara selektif, terus-menerus mencari terobosan-terobosan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan efektif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polsi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Sedangkan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 itu sendiri merupakan penjabaran dari PERDA RPJPD Tahun 2025-2029 terutama pembangunan jangka menengah tahap ke-1 Tahun 2025-2029. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagimana termuat dalam RKP Tahun 2025.

3.1 Tujuan dan Sasaran PERUBAHAN RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran mengambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesific, terinci, terukur dan dapat dicapai.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan Penegakan PERDA dan Peraturan Bupati Karangasem serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karangasem. Untuk itu, disusun visi dan misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD **2025-2029**.

Sebagai salah satu instansi pelaksana tugas pemerintah daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem menetapkan visi tersebut diatas setelah menyerap aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. Dengan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bisa tmpil dan berperan aktif dalam memmantapkan kondisi yang kondisif bagi pengembangan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Maka rumusan misi Kabupaten Karangasem dalam pencapai misi Karangasem 2025 ditetapkan dalam misi

Pemerintah Kabupaten Karangasem. Dengan demikian misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah :

1. Merumuskan kebijakan. Ini dimulai dari penataan administrasi, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya pemahaman tugas dan pelayanan kepada masyarakat misi ini mengandung arti bahwa dengan meningkatkannya kualitas anggota Satpol. PP Kabupaten Karangasem diharapkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Menyelenggarakan pembinaan, penegakan, penertiban dan kepatuhan / ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati : misi ini mengadung arti bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan dengan santun dan transparan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan yang ada dan tindakannya non yustisial.

Tujuan Pembangunan Daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran (Obyektif) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2029.

- Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, sehingga rasa aman dan nyaman beraktivitas dapat dirasakan oleh masyarakat luas
- Untuk dapat menekan sekecil mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang realistis dan dapat diukur tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja tertentu yang disebut indikator kinerja sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

Meningkatkanya kesadaran masyarakat agar dapat memahami dan mematuhi aturan – aturan yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan demikian keterkaitan antara strategi pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2025, Strategi disini merupakan langkah – langkah berisikan program indikatif yang mewujudkan visi dan misi.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Satpol.PP dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari, sering kali menghadapi tantangan di lapangan baik dalam Penegakan PERDA maupun dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dan disetiap tantangan yang dihadapi diupayakan untuk, mencari solusi dan jalan keluar. Dalam upaya meningkatkan pelayanan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satpol.PP antar lain yaitu :

1. Melakukan tindakan preventive (Penangkalan) tindakan yang dilakukan antara lain :

- Menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat
- Menerima masyarakat dan laporan dari kegiatan patroli
- Melakukan pencatatan laporan
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi PERDA dan Peratuan Kepala Daerah.
- Melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi PERDA
- Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelanggaran PERDA dan Perkada bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Jika secara preventive (penangkalan) tidak mendapatkan respon ataupun tanggapan maka tindakan yang dilakukan oleh Satpol.PP Kab. Karangasem yaitu dengan tindakan ke dua yaitu:

2. Melakukan tindakan preventif non yustisial yaitu meliputi :

- Penindakan terhadap para Pelanggar PERDA / PERKADA, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari, sejak penandatanganan surat pernyatan
- Apabila tidak melaksanakan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka :

- Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 hari
- Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 hari

- Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 hari

- Untuk daerah yang memiliki PPNS, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik PNS untuk melakukan tindakan yustisial bagi pelanggaran pidana.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah /Lembaga untuk mencapai dan tujuan serta *Renja Satpol PP* Angggaran, atau Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah (*Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (16),dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (13*). Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan pejabaran rincian tentang langkah-lakah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, program adalah dibentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mecapai sasaran dan tujuan OPD. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan saran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. **Pencapaian visi dan misi kepala daerah.**

   Dalam visi dan misi kepala daerah Kabupaten Karangasem yang dituangkan dalam RPJMD telah ditetapkan arahan kebijakan pembangunan untuk melaksanakan misi 5 RPJMD (Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Bebas KKN) pada sasaran demokratisasi. Keselarasan program yang dituangkan untuk mendukung sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem diarahkan pada meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

2. Pencapaian SPM

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sejalan dengan penerapan SPM, maka dalam memilih program dan kegiatan serta penganggaran juga dipakai SPM sebagai acuan. Indikator SPM yang mesti dilaksanakan:

    - Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan akibat Penegakkan Perda/Perkada

Untuk lebih jelasnya rumusan program dan Kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025 dapat dilihat pada **table T-C.33**

TABEL T-C 33

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025

Kabupaten Karangasem

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Karangasem**	**100**	**%**	**12.793.259.018**	**APBD**		**100**	**%**	**12.623.196.760**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Karangasem**	**100**	**%**	**2.851.400**	**APBD**		**100**	**%**	**2.851.400**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karangasem	2	dokumen	336.600	APBD		2	dokumen	336.600
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Karangasem	1	dokumen	337.900	APBD		1	dokumen	337.900

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Karangasem	1	dokumen	332.900	APBD		1	dokumen	332.900
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Karangasem	1	dokumen	600.200	APBD		1	dokumen	600.200
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Karangasem	1	dokumen	600.200	APBD		1	dokumen	600.200
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Karangasem	4	Laporan	643.600	APBD		4	Laporan	643.600
1	**05**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Karangasem**	**100**	**%**	**11.907.800.487**	**APBD**		**100**	**%**	**11.733.137.737**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Karangasem	83	Orang/Bulan	11.906.485.887	APBD		83	Orang/Bulan	11,731,823,137
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karangasem	4	Laporan	375.000	APBD		4	laporan	375.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karangasem	4	Laporan	939.600	APBD		4	Laporan	939.600
1	**05**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Karangasem**	**100**	**%**	**625.000**	**APBD**		**100**	**%**	**625.000**
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karangasem	5	Laporan	625.000	APBD		5	Laporan	625.000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Karangasem	100	%	**0**	APBD		100	%	**51.500.000**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Karangasem	3	Paket	0	APBD		3	Paket	51,500,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Karangasem**	**100**	**%**	**206.042.200**			**100**	**%**	**184.798.200**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Karangasem	4	Paket	0	APBD		4	Paket	0
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Karangasem	17	Paket	11.017.200	APBD		17	Paket	11.017.200
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Karangasem	13	Paket	150.891.400	APBD		13	Paket	146,647,400
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Karangasem	2	Paket	6.133.600	APBD		2	Paket	4,133,600
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Karangasem	12	dokumen	8.000.000	APBD		12	dokumen	8.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karangasem	20	laporan	30.000.000	APBD		20	Laporan	15,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Karangasem**	**100**	**%**	**433.100.000**	**APBD**		**100**	**%**	**325.220.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karangasem	12	laporan	1.700.000	APBD		12	Laporan	1.700.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Karangasem	12	laporan	75.000.000	APBD		12	Laporan	85,920,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor	Karangasem	12	laporan	356.400.000	APBD		12	Laporan	237,600,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Karangasem	100	%	**242.839.931**	APBD		100	%	**325.064.423**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Karangasem	23	Unit	192.839.931	APBD		23	Unit	271,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Karangasem	30	Unit	15.000.000	APBD		30	Unit	19,064,423
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Karangasem	4	Unit	15.000.000	APBD		4	Unit	15,000,000
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Karangasem	4	Unit	20.000.000	APBD		4	Unit	20.000.000
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Karangasem	100	%	**5.122.011.227**	APBD		100	%	**5.270.155.907**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah**	**Persentase Pelaksanaanm Penanganan Gangguan Ketenteraman dan**	**Karangasem**	**100**	**%**	**1.183.358.879**			**100**	**%**	**1.356.597.861**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kabupaten/Kota	**Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Karangasem	60	Kasus	892.620.027	APBD		60	Kasus	1,053,186,493
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Karangasem	12	kasus	0	APBD		12	kasus	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Karangasem	78	dokumen	197.574.926	APBD		78	dokumen	217,246,568
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Karangasem	9	dokumen	30.305.000	APBD		9	dokumen	30,285,300
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Karangasem	30	orang	52.260.000	APBD		30	orang	52,236,000
1	05	02	2.01	06	Kerjasama Antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Karangasem	1	dokumen	0	APBD		1	dokumen	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	dalam Teknik Pencegahan Kejahatan									
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Karangasem	10	unit	0	APBD		10	unit	0
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Karangasem	1	dokumen	0	APBD		1	dokumen	0
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Karangasem	4	laporan	10.598.926	APBD		4	laporan	3,643,500
1	**05**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Karangasem	100	%	**3.917.797.348**	APBD		100	%	**3.900.203.046**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Karangasem	8	laporan	26.020.000	APBD		8	laporan	26.020.000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Karangasem	4	laporan	123.174.644	APBD		4	laporan	141,881,192
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Karangasem	4	laporan	3.766.017.704	APBD		4	laporan	3,729,716,854

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Awal Tahun 2025					Catatan Penting	Pagu Perubahan Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
								Volume	Satuan				Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	02	2.02	04	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	Karangasem	12	laporan	0	APBD		12	laporan	2,585,000
1	**05**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Karangasem**	**100**	**%**	**0**	**APBD**		**100**	**%**	**13.355.000**
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Karangasem	12	laporan	20.855.000	APBD		12	laporan	13,355,000
					JUMLAH					**17.915.270.245**					**17.893.352.667**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan PERDA, maka rencana kerja ini sangat bermanfaat untuk mendukung terciptanya Keamanan dan Ketentraman Pembangunan Daerah yang Berbasis Masyarakat (CBD/Community Base Development).

Output Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah program tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program. Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem tahun 2025 ini selain menjadi evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja tahun 2025. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, Perubahan RENJA ini juga berguna sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi unit kerja-unit kerja yang melaksanakan kegiatan. Di samping itu, Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Dengan adanya Perubahan RENJA ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem maupun dengan OPD lintas Kabupaten dan Provinsi. Rencana tindak lanjut dalam kemajuan rencana kerja OPD adalah koordinasi dengan instansi terkait baik dilingkungan PEMDA setempat maupun lintas instansi atau koordinasi dengan instansi vertical. Dalam merencanakan suatu program dan kegiatan hendaknya mengedepankan anggaran berbasis kinerja sehingga penekanan atau pengefisienan anggaran bisa optimal. Terobosan-terobosan harus dilakukan agar penerimaan manfaat pelaksanaan program dan kegiatan dapat dirasakan menuju pada pelayanan kesejahteraan masyarakat. Disamping kecermatan perencana bagi OPD

pelaksana, dibutuhkan juga kearifan tim penganggaran baik BAPPEDA maupun pihak legeslatif dalam hal pemberian anggaran yang memang amat dibutuhkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Karangasem selama kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, disamping sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Karangasem juga sebagai pedoma dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2025. Adapun fungsi dari Perubahan RENJA Tahun 2025 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2025 pada Triwulan II bagi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA kami susun, semoga dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk 1 tahun kedepan dan semoga bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Karangasem.

Kepala Satuan Polisim Pamong Praja
Kabupaten Karangasem



I Ketut Arta Sedana,AP.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19730306 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
PERUBAHAN
RENCANA KERJA

DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARANGASEM

Jln Ahmad Yani No. 29 Telp. (0363) 21647 Fax 21647 Amlapura
e-mail : disnakerkarangasem@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widi Wasa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya **Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2025** dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sedangkan Perubahan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA). Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan.Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 7 Agustus 2025
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Karangasem,

Ida Nyoman Astawa, S.STP., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197709031996121001

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI..... 3
BAB I PENDAHULUAN.....
Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum……. 5
1.3 Maksud dan Tujuan .....
1.3.1 Maksud 10
1.3.2 Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan..... 11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II .....
2.1 Evalusi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II
…….. 13
2.2 Isu- isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah… 15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……..... 18
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan ……..... 19
3.3.Program Kegiatan 19
BAB IV PENUTUP……. 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada: a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan meningkatkan kompetensi dan daya saing bagi tenaga kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem untuk 1 (satu) tahun ke depan (Tahun 2025). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi ketenagakerjaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renja ini seyogyanya dijadikan acuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem dalam merencanakan dan melaksanakan

program dan kegiatan meningkatkan kompetensi dan daya saing bagi tenaga kerja tahun 2025 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi pada tahun tersebut. Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem memuat program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan pada tahun 2025.

Pertimbangan yang menjadi dasar dilaksanakannya Renja perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Asumsi keuangan juga mengalami perubahan pada perkiraan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari DAU. Oleh karenanya maka Dinas Ketenagakerjaan menyusun Perubahan Renja Tahun 2025.

Renja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan juga didasarkan adanya penyesuaian-penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Renja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan agar selaras dengan RPJMD/Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024, tentang Kabupaten Karangasem
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
6. Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang – undang nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201520 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penggarusutamaan Gender;
14. Permendagri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);

28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Derah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karan6gasem Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
33. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

35. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD SB Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
36. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
37. Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 592/HK/2023 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk menyediakan dokumen rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem yang memuat tentang perubahan-perubahan terhadap Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 sesuai perkembangan keadaan yang ada sehingga dapat menjadi arah dalam mewujudkan target kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

a) Menjadi pedoman penyusunan RKAP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
b) Menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika penyusuanan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang pertimbangan dilakukannya perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan

1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum/peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja perubahan per Bab

BAB II EVALUASI RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai TW II.

Memuat capaian sasaran Renja tahun 2025, capain program dan kegiatan Renja tahun 2025

2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan.

Memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Memuat penyusunan tujuan dan sasaran dan indikatornya.

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat penyesuain strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja.

3.3 Program dan Kegiatan

Memuat perubahan program dan kegiatan serta perubahannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai TW II

Renja OPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra OPD) sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Uraian hasil evaluasi di triwulan II Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025 sangat tinggi Faktor Pendorong nya adalah Kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian kinerja bersama pimpinan , sedangkan Faktor Penghambatnya adalah Proses pelaksanaan kegiatan di triwulan II Karena Keterlambatan Penyedia/Rekanan melakukan Verifikasi data (Verified Vendor) yang ada di E-Katalog , sehingga realisasi capaian kegiatan atau pun sub kegiatan blum tercapai sesuai target, Pada Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah sangat rendah dimana faktor penghambatnya yaitu Proses pelaksanaan kegiatan baru dilakukan di triwulan II, Keterlambatan Kegiatan di BLK (Balai Latihan Kerja) baru dimulai di triwulan III, sedangkan untuk pengadaan realisasi fisiknya sudah dan masih menunggu administrasi pengadaan, sedangkan untuk kegiatan pembinaan dan konsultasi anggaran kasnya ada perubahan sehingga belum tercapai sesuai target. Pada Program Penempatan Tenaga Kerja realisasi capaian kegiatan atau pun sub kegiatan belum tercapai sesuai target atau masih rendah, Faktor

Penghambatnya adalah Proses pelaksanaan kegiatan baru dimulai di triwulan III seperti Job Fair sedangkan untuk kegiatan yang lain aliran kasnya terdapat di triwulan III. Program Industrial dimana Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah sangat rendah dimana faktor penghambatnya Proses pelaksanaan kegiatan di triwulan II Karena Keterlambatan aliran kasnya terdapat di triwulan III dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025 sangat rendah dimana faktor penghambatnya Proses pelaksanaan kegiatan di triwulan II Karena aliran kasnya di triwulan II baru makan-minum saja Sementara yang lain Aliran Kasnya terdapat di triwulan III.

Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja OPD pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagaimana tabel 2.1 terlampir .

2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem

Permasalahan bidang Ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang tak akan pernah tuntas. Sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 27 (2) yang berbunyi "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja", sehingga penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak akan mampu diselesaikan secara sektoral maupun regional, tetapi harus dilakukan secara komprehensif koordinatif, serentak dan sinergis baik lintas sektoral maupun lintas wilayah (teritorial), serta bersifat terus menerus, mengingat pertumbuhan penduduk yang merupakan generasi angkatan kerja baru selalu muncul dan tidak akan pernah berhenti. Terlambat dalam mempersiapkan penanganan dapat berakibat fatal bagi upaya pembangunan khususnya pembangunan di Kabupaten Karangasem. Pengangguram masih menjadi masalah utama setiap daerah terutama di negara sedang berkembang. Pengangguran terjadi karena rendahnya kompetensi tenaga kerja, terbatasnya kesempatan kerja dan masih rendahnya daya saing tenaga kerja. Demikian juga di Kabupaten Karangasem, penurunan jumlah penduduk yang bekerja meningkatkan jumlah pengangguran. Data BPS. Kab. Karangasem, 2024 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sebesar 5.285 jiwa atau tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 mencapai 1,63% menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 3,09% dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 sebesar 83,74% dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 98,37%. Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Karangasem dalam lima tahun mendatang dalam upaya pengurangan pengangguran adalah:

1) Lapangan pekerjaan yang masih terbatas

2) Masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2024 yaitu 1,63% yang masih tergolong tinggi dibandingkan lima tahun terakhir
3) Minimnya perlindungan hukum tenaga kerja dan Pemberian upah pekerja yang belum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten
4) Rendahnya kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Karangasem

2.2.2 Isu Strategis

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang antara lain :

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 4 isu strategis urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian :

1. Masih banyaknya Tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan dan belum memiliki sertifikat kompetensi
2. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memiliki link and match dengan kebutuhan industri di dalam dan luar negeri
3. Kurang patuhnya pengusaha terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang layak
4. Kurangnya informasi masyarakat akan pentingnya program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Menanggapi isu – isu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan maka mengacu kepada Arah Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021 – 2026, kebijakan Disnaker Kabupaten Karangasem, adalah :

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik. Dilaksanakan dengan program :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja dengan merevitalisasi Balai Latihan Kerja, Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja berbasis komunitas memperhatikan potensi dan pasar kerja, melalui program :
    a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan memberikan fasilitas pemberian pinjaman lunak untuk pekerja yang bekerja ke luar negeri, melalui program :
    a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
    b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Meningkatkan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang layak dan mewajibkan pemberi kerja mengalokasikan jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui program :
    a. Program Hubungan Industrial;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial Krama Karangasem dengan meningkatkan penyuluhan akan pentingnya program transmigrasi, melalui program :
    a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Rencana kinerja adalah produk dari perencanaan kinerja, dan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu..

Sasaran Tahunan merupakan bagian dari sasaran lima tahunan yang tercantum di dalam Renstra, yang akan diwujudkan secara bertahap pada waktu tertentu. Indikator kinerja Sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian sasaran . Sedangkan target indikator kinerja merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat pencapaian sasaran. Sedangkan target indikator kinerja merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan.

3.1.1 Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah disusun yang berkaitan erat dengan Visi dan Misi Kabupaten Karangasem, maka disusun tujuan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karangasem 2021-2026 Adapun tujuan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem, Antara lain :

1. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya saing
2. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan
3. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Krama Karangasem
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2021-2026 :

1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
2. Meningkatnya kesempatan kerja di dalam dan diluar negeri
3. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

5. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yag baik

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Mengacu kepada RPJMD Kabupaten Karangasem dalam upaya pencapaian Visi dan Misi dengan tetap memperhatikan keharmonisan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional maka disusun strategi pembangunan di bidang Ketenagakerjaan meliputi :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Karangasem mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global bersinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri
2. Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan antar kabupaten
3. Peningkatan cakupan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan

3.2.2 Kebijakan

1. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)
2. Pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas memperhatikan potensi dan pasar kerja
3. Sertifikasi tenaga kerja
4. Memfasilitasi pemberian pinjaman lunak kepada masyarakat Karangasem yang keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja
5. muda dan pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
6. Mewajibkan pemberi kerja mengalokasikan jaminan sosial ketenagakerjaan

3.3 Program dan Kegiatan

Program tahunan merupakan bagian dari program lima tahunan yang tercantum di dalam Renstra, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran

tahunan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagai berikut :

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
3. **Administrasi Pendapatan pendaftaran Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.**
    a. Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah .
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
    c. Penyediaan peralatan rumah tangga
    d. Penyediaan bahan logistik kantor
    e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    a. Penyediaan Jasa surat menyurat
    b. Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Konsultansi produktivitas Pada Perusahaan kecil

a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil

4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

III. **Program Penempatan Tenaga Kerja**

1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
b. Pelayanan Antarkerja
c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja

2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi

3. Pengelolaan Informasi Pasar kerja

a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
c. Job Fair/Bursa Kerja

4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalm 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

IV. **Program Hubungan Industrial**

1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

c. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

V. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyuluhan Transmigrasi

Perubahan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 diuraikan dalan tabel 3.1 .

Tabel 3.1
REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Keterangan
							Indikator	Target Capaian		Pagu	Indikator	Target Capaian		Pagu Renja		
								Target	Satuan			Target	Satuan			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	**07**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**100**	**%**	**6.037.511.237,00**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**100**	**%**	**6.714.460.932,00**	**676.949.695,00**	
2	**07**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.828.100**	**persentase terselenggaranya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.828.100**	-	
2	07	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dokumen	1.588.100	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dokumen	1.588.100	-	
2	07	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	laporan	1.240.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	laporan	1.240.000	-	
2	**07**	**1**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**5.281.345.220**	**persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**5.400.935.399**	119.590.179	
2	07	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	49	49 orang /bulan	5.279.869.020	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	51 orang /bulan	5.399.459.199	119.590.179	
2	07	01	2.02	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1	Dokumen	1.476.200	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	10	Dokumen	1.476.200	-	

	2	**07**	**4**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan**	**25**	**izin**	**6.500.000,00**	**Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan**	**25**	**izin**	**17.173.750**	10.673.750	
	2	07	4	2.04	0004	Pendataan Dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah tenaga kerja asing yang terdata pada perusahaan	25	orang	6.500.000	Jumlah tenaga kerja asing yang terdata pada perusahaan	25	orang	17.173.750	10.673.750	
	2	**07**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase teselenggaranya administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**389.337.917,00**	**persentase teselenggaranya administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**403.319.683**	13.981.766	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	1.780.900	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	paket	1.780.900	-	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	47.436.800	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	47.436.800	-	
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7	paket	230.792.048	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	paket	230.792.048	-	
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	49.066.100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	49.066.100	-	
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	17.724.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	paket	17.724.000	-	
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4	dokumen	2.424.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4	dokumen	2.424.000	-	

	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	laporan	40.114.069	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	laporan	54.095.835	13.981.766	
	2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase tersedianya barang pengadaan**	**100**	**%**	**-**	**persentase tersedianya barang pengadaan**	**100**	**%**	**54.300.000**	**54.300.000**	
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	unit	0,00	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	Unit	54.300.000	54.300.000	
	2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**76.000.000,00**	**persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**76.000.000**	-	
	2	07	01	**2.08**	0001	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	1	laporan	1.000.000	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	**2**	laporan	1.000.000	-	
	2	07	01	**2.08**	0002	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	laporan	75.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	laporan	75.000.000	-	
	2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100**	**%**	**281.500.000,00**	**persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100**	**%**	**759.904.000,00**	478.404.000	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17	unit	223.000.000	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	unit	223.000.000		

	2	07	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	unit	43.500.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	unit	45.904.000	2.404.000	
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	15.000.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	**1**	unit	491.000.000	476.000.000	
	2.	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja**	**100**	**%**	**97.500.000**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja**	**100**	**%**	**67.190.000**	-30.310.000	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persntase tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	**100**	**%**	97.500.000	Persntase tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	**100**	**%**	67.190.000	-30.310.000	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	2	Dokumen	97.500.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	2	Dokumen	67.190.000	-30.310.000	
	2	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi**	**14**	**%**	**123.900.000,00**	**Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi**	**14**	**%**	**447.602.910,00**	**323.702.910**	
	2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan**	**100**	**%**	**78.650.000,00**	**Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan**	**100**	**%**	**380.377.910,00**	301.727.910	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksnaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihanberbasis kompetensi pada tahun n	16	orang	78.650.000	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihanberbasis kompetensi pada tahun n	16	orang	380.377.910	301.727.910	
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	2	paket	0,00	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	5	unit	0,00	-	
	2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki izin**	100	**%**	15.000.000	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki izin**	100	**%**	11.975.000	-3.025.000	

	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	25	lembaga	15.000.000	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	25	lembaga	11.975.000	-3.025.000	
	2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi produktivitas Pada Perusahaan kecil**	**Persentase terselengaranya konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil**	**100**	**%**	**30.250.000,00**	**Persentase terselengaranya konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil**	**100**	**%**	**55.250.000,00**	**25.000.000**	
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	1	perusahaan	30.250.000	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	1	perusahaan	55.250.000	25.000.000	
	2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**100**	**%**	**0,00**	**Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**100**	**%**	**0,00**		
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas tenaga Kerja	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	16	dokumen	0,00	Jumlah Dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	16	dokumen	0,00		
	2	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan**	**83**	**%**	**102.250.000,00**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan**	**83**	**%**	**99.223.000,00**	-3.027.000	
	2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase terselenggaranya pelayanan antarkerja di daerah**	**100**	**%**	**20.000.000,00**	**persentase terselenggaranya pelayanan antarkerja di daerah**	**100**	**%**	**16.973.000**	-3.027.000	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antarkerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	5.000.000	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	5.000.000	-	
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	**100**	orang	15.000.000	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	100	orang	11.973.000	-3.027.000	
	2	**7**	**4**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan**	**Jumlah izin yang diterbitkan**	**1**	**izin**	0,00	**Jumlah izin yang diterbitkan**	**1**	**izin**	0,00	-	

						Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	2	7	4	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah layanan perizinan LPTKS secara terintegrasi yang disediakan	1	lembaga	0,00	Jumlah layanan perizinan LPTKS secara terintegrasi yang disediakan	1	lembaga	0,00	-	
	2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar kerja**	**Persentase tersedianya informasi pasar kerja**	**83**	**%**	**82.250.000,00**	**Persentase tersedianya informasi pasar kerja**	**83**	**%**	**82.250.000,00**	-	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	20	orang	0,00	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	20	orang	0,00	-	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	20	orang	82.250.000	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	20	orang	82.250.000	-	
	2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI yang terlindungi (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**0,00**	**Persentase PMI yang terlindungi (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**0,00**	-	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	50	Orang	0,00	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	50	Orang	0,00	-	
	2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama**	**100**	**persen**	**58.750.000**	**Persentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial**	**100**	**persen**	**49.366.200**	-9.383.800	

	2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial**	**100**	**persen**	**58.750.000**	**Persentase penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial**	**100**	**persen**	**49.366.200**	**-**	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang di cegah	3	Perkara	30.861.500	Jumlah perselisihan yang di cegah	3	perkara	30.861.500	-	
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	lembaga	5.816.800	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	lembaga	5.816.800	-	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100	orang	22.071.700	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100	orang	12.687.900	-9.383.800-	
	3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi**	**50**	**%**	0,00	**Persentase masyarakat yang mendapat penyuluhan untuk ikut program transmigrasi**	**50**	**%**	0,00	-	
	3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah**	**Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan**	**50**	**orang**	0,00	**Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan**	**50**	**orang**	0,00	-	

						Kabupaten/Kota										
	3	32	03	2.01	00017	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20	Orang	0,00	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20	Orang	0,00	-	
Jumlah pagu total										**6.419.911.237,00**				**7.377.843.042,00**	**957.931.805,00**	**Jumlah pagu total**

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tahun 2025.

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Karangasem. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Amlapura, 7 Agustus 2025
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Karangasem,

Ida Nyoman Astawa, S.STP., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197709031996121001

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(PERUBAHAN RENJA – OPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 307/ HK / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 432/HK/2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya oleh Badan Perencanaan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pereaturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nmor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9).
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 22);
24. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 307/ HK / 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 432/HK/2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan
3. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah
4. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan
10. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup
11. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
20. Perubahan Renja Sekretariat Daerah
21. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. Perubahan Renja Badan Perencanaan Daerah
23. Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah
25. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Perubahan Renja Inspektorat Daerah
27. Perubahan Renja Kecamatan Karangasem
28. Perubahan Renja Kecamatan Abang

Dipindai dengan CamScanner

29. Perubahan Renja Kecamatan Kubu
30. Perubahan Renja Kecamatan Bebandem
31. Perubahan Renja Kecamatan Selat
32. Perubahan Renja Kecamatan Rendang
33. Perubahan Renja Kecamatan Sidemen
34. Perubahan Renja Kecamatan Manggis
35. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

Pada Hari ini : **Kamis**, tanggal **Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Bapeda Kabupaten Karangasem**, telah dilaksanakan Verifikasi **Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2025**, dengan hasil sebagai berikut:

LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Kesesuaian		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	**SISTEMATIKA RENJA**					
	BAB I. PENDAHULUAN					
	1.1 Latar Belakang	√		√		
	1.2 Landasan Hukum	√			√	• Tambahkan Undang Undang No. 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali • Tambahkan Perbup No. 22 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD SB Tahun 2025 • Masih mencantumkan regulasi yang sudah tidak berlaku, agar disesuaikan dengan yang terbaru
	1.3 Maksud dan Tujuan	√		√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		√		
	BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025					
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	√			√	Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II agar dilengkapi dan diuraikan secara naratif,

Dipindai dengan CamScanner

	sampai TW II					mencakup hasil capaian, faktor pendorong, serta faktor penghambat capaian
	2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	√		√		Terdapat pengulangan poin pada permasalahan urusan kebudayaan yaitu: "*Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada lembaga-lembaga tradisional/adat, sekaa kesenian, pelaku seni, komunitas seni, dan insan seni budaya di Kabupaten Karangasem.*" Salah satu poin dapat dihapus agar tidak terjadi duplikasi
	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1 Tujuan dan sasaran	√		√		
	3.2 Strategi dan arah kebijakan	√		√		
	3.3 Program dan Kegiatan	√			√	Belum mencantumkan Tabel T-C.33 (tabel rencana program dan kegiatan)
	BAB IV. PENUTUP	√			√	Redaksi pada dasar hukum yang tercantum masih merujuk pada *Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024*. Mengingat saat ini telah ditetapkan *Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025* tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian agar mengacu pada regulasi terbaru

Dipindai dengan CamScanner

Tim Verifikasi :

Amlapura, 7 Agustus 2025

PD yang diverifikasi	Tanda tangan	Tim Verifikasi :	Tanda Tangan
1. Gede Hendra Saputra, SKM., MAP.	1.	1. I Nyoman Adi Sudana, SE., M.Si 2. Ni Komang Ayu Aryawati Dewi, SP.	1. 2.
Mengetahui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem, **Putu Eddy Surya Artha, S.STP., MAP.** Pembina Tk. I NIP. 19780910 199810 1 001		Mengetahui Kepala Bapeda Kab. Karangasem, **I Nyoman Sutirtayasa, ,ST., MT.** Pembina Utama Muda NIP. 19670805 199703 1 004	

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunianya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dapat terselesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini atas dasar usulan program, kegiatan dari setiap bidang Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2024

Amlapura, 7 Agustus 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Karangasem

Putu Eddy Surya Artha, S.STP., MAP
NIP 19780910 199810 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025……..... 8

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sampai Triwulan I.....…..... 8

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……... 12

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 16

3.1. Tujuan dan Sasaran 16

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 16

3.3. Program dan Kegiatan 21

BAB IV Penutup..... 22

Lampiran 1. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2024

Lampiran 2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dalam APBD Tahun 2024 dan Rencana Perubahan Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada: a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Pertimbangan yang menjadi dasar dilaksanakannya perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan.

Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah :

1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang – undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8. Undang – undang nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201520 Nomor 10);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penggarusutamaan Gender.
16. Permendagri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024 – 2026.
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6).
31. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 tahun 2023 tentang kedudukan organisasi, tusi
32. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
33. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024.
34. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 307/HK/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 432/HK/2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025.
35. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 582/HK/2023 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusunan program/kegiatan dan Penyusunan RKAP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 serta untuk menyesuaikan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan

capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem;
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran;
3. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas;
4. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pasal 361 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai:

BAB I PENDAHULUAN
memuat tentang latar belakang perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan.

BAB IV PENUTUP
memuat tentang catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan I

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan triwulan I, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Capaian Sasaran Renja Tahun 2025:

Dalam Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan tujuh sasaran yaitu :

1. Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem,
2. Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak,
3. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis Desa Adat
4. berkembangnya produk pariwisata yang kreatif dan inovatif berbasis budaya di kab karangasem
5. Meningkatnya Promosi pasar pariwisata Kabupaten Karangasem baik di pasar domestik dan global Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata
6. Meningkatnya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja maka setiap pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan kewenangan perangkat daerah ditetapkan sebagai sasaran sehingga wajib diukur melalui indikator kinerja tersendiri. Sasaran meningkatnya kreativitas pelaku seni/ budaya diukur dengan dua indikator kinerja yaitu jumlah gelar seni/ budaya yang di laksanakan dan jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali. Sasaran meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan warisan budaya

diukur dengan dua indikator kinerja yaitu jumlah kelompok seni/ budaya hampir punah yang dilestarikan dan jumlah peninggalan sejarah yang di inventarisir. Sasaran meningkatnya fasilitasi dan eksistensi lembaga adat dan tradisional diukur dengan dua indikator kinerja yaitu jumlah lembaga adat dan tradisional yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan keuangan dan jumlah lembaga adat dan tradisional yang mendapat penghargaan. Sasaran meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat dengan indikator yaitu persentase tingkat kepuasan wisatawan berdasarkan hasil survei. Sasaran berkembangnya produk pariwisata yang kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kab. Karangasem dengan dua indikator yaitu jumlah produk pariwisata yang terdata di kabupaten karangasem dan jumlah produk pariwisata berkualifikasi indie 4.0. Sasaran meningkatnya promosi pasar pariwisata kabupaten karangasem baik di pasar domestik dan global dengan dua indikator yaitu persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten karangasem. Sedangkan sasaran meningkatnya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran diukur dengan tiga indikator yaitu persentase penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan transparansi laporan keuangan, Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran dan persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur. Capaian sasaran Dinas kebudayaan tersebut adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025

Sasaran	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi sampai TW I	Capaian (%)
1. Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dibina, dimanfaatkan dan dikembangkan	175	0	0

pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem				
2. Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	Persentase desa adat yang dikelola berdasarkan nilai – nilai Sad Kerthi	84,21	0	0
	Persentase subak yang berkembang berdasarkan nilai – nilai Sad Kerthi	83,72	0	0
3. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis Desa Adat	Persentase tingkat kepuasaan wisatawan berdasarkan hasil survei	80 %	0	0
4. berkembangnya produk pariwisata yang kreatif dan inovatif berbasis budaya di kab karangasem	Jumlah produk pariwisata yang terdata di kabupaten karangasem	675 produk	0	0
	Jumlah produk pariwisata berkualifikasi Indie 4.0	675 produk	0	0
5. Meningkatnya Promosi pasar pariwisata Kabupaten Karangasem baik di pasar domestik dan global	Jumlah kedatangan wisatawan nusantara berdasarkan asal daerah	15 %	68%	453%
	Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara berdasarkan asal negara	19%	6%	31,6%
6. Meningkatnya layanan administrasi dan tata laksana perkantoran	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100%	16%	16%

Berdasarkan tabel diatas untuk peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sudah melampui target yaitu 453% sedangkan peningkatan kunjungan wisatawan nusantara mencapai 31,6%. Dikarenakan realisasi triwulan I dibandingkan dengan target kunjungan wisatawan maka realisasi kunjungan wisatawan mancanegara triwulan I sudah melampaui target kunjungan, untuk realisasi kunjungan wisatawan nusantara dibandingkan dengan target kunjungan wisatawan maka realisasi kunjungan wisatawan nusantara triwulan I baru mencapai 31,6%, sedangkan untuk indikator yang lainnya masih berproses.

Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025:

Hasil evaluasi Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata per triwulan I adalah sebagaimana tabel di bawah ini terlampir.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perngkat Daerah

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan, Penghapusan Kemiskinan *(Poverty Alleviation)*, Pembangunan Berkesinambungan *(Sustainable Development)*, Pelestarian Budaya *(Culture Preservation)*, Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia, Peningkatan Ekonomi dan Industri, dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Karangasem akan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di Kabupaten Karangasem. Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kegiatan promosi pariwisata sangat diperlukan, seperti promosi pariwisata melalui media elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi, maupun promosi secara langsung dengan mengikuti berbagai event-event pariwisata yang dilaksanakan di luar maupun di dalam negeri.

Mempelajari hal diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dapat menganalisis permasalahan urusan kebudayaan sebagai berikut :

- Banyaknya kesenian-kesenian langka maupun sakral yang tidak aktif akibat kurangnya dana dan sarana/prasarana pendukung;
- Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada lembaga-lembaga tradisional/ adat, sekaa-sekaa kesenian, pelaku seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Karangasem;
- Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada lembaga-lembaga tradisional/ adat, sekaa-sekaa kesenian, pelaku seni, komunitas seni

dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Karangasem;

- Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap sekaa-sekaa kesenian, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya;
- Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap lembaga tradisional/ adat istiadat dan penyuratan awig-awig baik di desa pekraman, sekaa teruna maupun subak;

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Kebudayaan bertujuan untuk :

1) memajukan kebudayaan nasional Indonesia sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dalam era globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan lingkungan;
2) melestarikan keanekaragaman kebudayaan suku bangsa; dan
3) menciptakan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mandiri, bermartabat, maju, adil dan makmur.

Secara eksternal, tantangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan kebudayaan antara lain:

a. Belum cukup tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representative;
b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan sektor kebudayaan;
c. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, swasta dan lembaga adat/ tradisional;
d. Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap kesenian dan budaya daerah;
e. Pengaruh budaya luar *(Westernisasi)* terhadap keberadaan seni dan budaya tradisional yang relatif sangat tinggi;

Secara internal, tantangan pembangunan kebudayaan dihadapkan pada situasi belum optimalnya :

a. Kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tupoksi;
b. Sinergitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;

c. Pemanfaatan data dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan;

a. Daya dukung sarana prasarana kerja.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan kebudayaan, dapat dikelompokan ke dalam 3 (tiga) isu strategis sebagai berikut:

1). Belum optimalnya penggalian potensi seni dan budaya daerah;
2). Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kekayaan budaya;
3). Belum optimalnya pemberdayaan dan fasilitasi lembaga adat dan tradisional;

Dari urusan Pariwisata ada beberapa hambatan yang dihadapi yaitu :

1. Sumberdaya Pariwisata yang masih minim dalam menunjang kepariwisataan
2. Sumberdaya manusia dalam Dinas Pariwisata yang masih minim dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata
3. Belum optimalnya pengelolaan Daya Tarik Wisata
4. Belum optimalnya penataan Daya Tarik Wisata
5. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Karangasem

Jika hambatan ini diabaikan tentu saja akan mempunyai dampak antara lain :

1. Sumberdaya pariwisata yang masih minim akan berdampak pada pelayanan terhadap wisatawan. Teknik dalam melayani wisatawan juga sangat di perlukan mengingat pelayanan bisa menjadi nilai tambah di samping dengan daya tarik yang ada jika pelayanan di rasa kurang maka wisatawan menjadi jenuh
2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata ini ditujukan untuk memaksimalkan potensi yang ada di Daya Tarik Wisata tersebut misalnya potensi wisata bahari, wisata alam, wisata buatan dan lain – lain.
3. Penataan Daya Tarik Wisata ini ditujukan untuk melihat fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh Daya Tarik Wisata tersebut seperti pedestrian, gazebo, toilet, dan lain – lain.
4. Promosi dan pemasaran pariwisata yang selama ini ditujukan kepada semua wisatawan dengan memanfaatkan media yang terbatas.

Disamping itu ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain :

1. Sumberdaya di Dinas Pariwisata bisa cepat beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang berdampak pada ketepatan waktu yang di butuhkan untuk mencapai kinerja yang sudah di tawarkan. Hal ini di karenakan kecepatan dan disiplin dalam melaksanakan tugas-tuganya kemudian mengaplikasikanya dalam kegiatan.
2. Kabupaten Karangasem mempunyai beberapa icon pariwisata yang sudah terkenal yaitu Taman Soekasada Ujung, Taman Tirta Gangga, serta Pura Besakih. Sehingga tidak sulit untuk mempromosikan Karangasem baik di Nusantara maupun di luar negeri.
3. Hampir semua stakeholder mempunayai skill dasar dalam hal kepariwisataan sehingga tinggal memberi pembinaan lanjutan agar skil tersebut bisa berkembang.
4. Potensi Kabupaten Karangasem sebagai Daya Tarik Wisata yang memiliki wisata bahari, wisata alam, wisata budaya dan lain – lain dapat dikembangkan untuk menjadi Daya Tarik Wisata yang sesuai dengan standar wisatawan.
5. Promosi dan pemasaran pariwisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti *Facebook, Youtube, Instagram* dan lain – lain yang membuat Daya Tarik Wisata bisa dikenal dan menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan informasi diatas maka isu – isu strategis urusan pariwisata yaitu :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan urusan pariwisata
2. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung kegiatan dalam urusan pariwisata
3. Terbatasnya anggaran guna mendukung kegiatan bidang pariwisata

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, adapun tujuan dan sasaran yang ingin capai adalah sebagai berikut:

Tujuan

- Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem;
- Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Karangasem berdasarkan Sad Kerthi**;**
- Berkembangnya Destinasi Dan Produk Pariwisata Budaya Berbasis Komunitas;
- Meningkatnya kualitas pelayanan dan pasar pariwisata Kabupaten Karangasem;
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan.

Sasaran

- Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem;
- Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak;
- Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten Karangasem;
- Meningkatnya pasar pariwisata Kabupaten Karangasem di pasar domestik dan global
- Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis Desa Adat

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah

sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. Dimana strategi dan arah kebijakan tersebut dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Stretegi dan Arah Kebijakan

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi (*Karangasem Prakerti Nadi*)			
Misi III : Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem	Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai identitas dalam segala aspek kehidupan Krama Karangasem	• Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Karangasem dengan pelembagaan dan internalisasi nilai – nilai tradisi, seni dan budaya melalui system pendidikan formal, non formal dan informal guna memperkokoh jati diri Krama Karangasem dan memperkuat

			integritas moral Krama Karangasem; • Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya Krama Karangasem; • Peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di Karangasem
		Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	• Membangun dan memperkuat kelembagaan seni, sastra dan budaya (Sanggar, Yayasan, Sekaa dan lain lain) dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi
		Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan seni, sastra, dan budaya	• Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya Karangasem • Memberdayakan pelaku seni untuk membina sanggar-sanggar dan lembaga lain di desa adat
		Memberdayakan desa adat dalam upaya pelestarian dan	• Desa adat selaku lembaga untuk melaksanakan

		pembinaan seni, budaya dan kearifan lokal	fungsi pendidikan non formal berbasis agama hindu, memberikan pembinaan seni budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda/ teruna teruni
Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Karangasem berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Subak	• Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat : Banjar, Sekeha Teruna dan Sekeha-sekeha lainnya, dan lembaga lainnya • Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat hukum Adat/awig/perarem di Desa Adat • Revitalisasi Subak melalui Penguatan lembaga dan SDM pengelola Subak serta memberikan bantuan sarana prasarana dan dukungan anggaran
Misi IV : Membangun pariwisata yang handal melalui pembangunan destinasi dan promosi yang ditunjang dengan infrastruktur pedesaan yang memadai dan terkoneksi			
Berkembangnya Destinasi Dan Produk Pariwisata Budaya Berbasis	Meningkatnya kualitas destinasi Pariwisata budaya berbasis Desa	Pemberdayaan masyarakat sebagai subyek dan obyek pariwisata	• Pengembangan destinasi wisata baru (wisata agro, wisata spiritual,

Komunitas	Adat Berkembangnya produk pariwisata yang kreatif dan inovatif berbasis budaya di kab karangasem	Kebudayaan Kabupaten Karangasem sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	wisata alam, wisata minat, wisata pedesaan/wisata budaya) yang menjadi wisata alternatif • Membangun Kawasan Wisata terpadu • Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourisme / penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan). • Pengembangan pariwisata budaya berbasis desa adat dan pengembangan ekonomi kreatif
Meningkatnya Kualitas pelayanan dan pasar pariwisata Kabupaten Karangasem	Meningkatnya Promosi pasar pariwisata Kabupaten Karangasem baik di pasar domestik dan global	Mengadakan event pariwisata yang terintegrasi dengan sektor petanian, perindustrian, UMKM dan sektor Lainnya	• Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata • Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi

3.3 Program dan Kegiatan

Perubahan pada program kegiatan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut terlampir :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dalam APBD Tahun 2025
dan Rencana Perubahan Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA Tahun 2025				Perubahan Renja Tahun 2025				Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
2 22 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**7,865,832,952.00**	**Persentase penyelenggaraan urusan penunjang perkantoran**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**8,397,006,760.00**	**531,173,808.00**	
2 22 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**5,613,900.00**	**Persentase penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**2,643,500.00**	**(773,000.00)**	
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	5 dokumen	1,052,900.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karangasem	5 dokumen	355,500.00	(697,400.00)	
2 22 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Karangasem	5 dokumen	1,240,500.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Karangasem	5 dokumen	600,000.00	(640,500.00)	
2 22 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Karangasem	12 dokumen	2,152,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Karangasem	12 dokumen	1,292,500.00	(859,500.00)	
2 22 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karangasem	5 laporan	1,168,500.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Karangasem	5 laporan	395,500.00	(773,000.00)	
2 22 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**6,479,829,509.00**	**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**6,352,151,173.00**	**(127,678,336.00)**	
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karangasem	1176 orang/bulan	6,478,286,009.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karangasem	1176 orang/bulan	6,351,240,173.00	(127,045,836.00)	pergeseran gaji PPPK ke gaji tenaga kontrak administrasi lagi 2 bulan dan supir lagi 3 bulan

2 22 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karangasem	10 laporan	1,543,500.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karangasem	10 laporan	911,000.00	(632,500.00)	
2 22 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**288,301,500.00**	**Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**257,083,700.00**	**(31,217,800.00)**	
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	1 paket	2,242,900.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	1 paket	1,985,800.00	(257,100.00)	
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	6 paket	193,413,200.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	6 paket	190,290,000.00	(3,123,200.00)	
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	13 paket	46,928,500.00	Jumlah bulan blanko administrasi kantor yang tersedia	Kabupaten Karangasem	13 paket	39,091,000.00	(7,837,500.00)	
2 22 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	720 dokumen	5,500,000.00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	720 dokumen	5,500,000.00	-	
2 22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karangasem	8 laporan	40,216,900.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karangasem	8 laporan	20,216,900.00	(20,000,000.00)	efisiensi perjadin sesuai dengan instruksi presiden
2 22 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang perkantoran**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**775,934,994.00**	**Persentase penyediaan jasa penunjang perkantoran**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**763,917,046.00**	**(12,017,948.00)**	
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	12 laporan	383,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	12 laporan	383,000,000.00	-	
2 22 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	4 laporan	41,022,976.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	4 laporan	42,419,568.00	1,396,592.00	pergeseran untuk pemeliharaan taman budaya
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	12 laporan	351,912,018.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karangasem	12 laporan	338,497,478.00	(13,414,540.00)	

2 22 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**316,153,049.00**	**Persentase penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**1,021,211,341.00**	**705,058,292.00**	
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Karangasem	12 unit	181,833,049.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Karangasem	12 unit	215,186,341.00	33,353,292.00	tambahan untuk gaji supir lagi 3 bulan dan pemeliharaan kendaraan kadis
2 22 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karangasem	30 unit	68,000,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karangasem	30 unit	63,000,000.00	(5,000,000.00)	pergeseran untuk pemeliharaan taman budaya
2 22 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Karangasem	0	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Karangasem	1 unit	693,025,000.00	693,025,000.00	pemeliharan taman budaya
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karangasem	1 unit	66,320,000.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karangasem	1 unit	50,000,000.00	(16,320,000.00)	pergeseran untuk pemeliharaan taman budaya
2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pelestarian kebudayaan**	**Kabupaten Karangasem**	**78.40%**	**41,655,307,994.00**	**Persentase pelestarian kebudayaan**	**Kabupaten Karangasem**	**78.40%**	**42,796,264,250.00**	**1,140,956,256.00**	
2 22 02 2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya pelindungan warisan budaya**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**84,671,838.00**	**Persentase terlaksananya pelindungan warisan budaya**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**87,744,202.00**	**3,072,364.00**	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kabupaten Karangasem	3 objek	84,671,838.00	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kabupaten Karangasem	3 objek	87,744,202.00	3,072,364.00	tambahan untuk tenaga kontrak lagi 2 bulan
2 22 02 2.02	**Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pelindungan dan pelestarian kesenian tradisional**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**1,829,997,392.00**	**Persentase pelaksanaan pelindungan dan pelestarian kesenian tradisional**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**1,882,869,756.00**	**52,872,364.00**	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Provinsi Bali	8 objek	1,455,224,680.00	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Provinsi Bali	8 objek	1,505,224,680.00	50,000,000.00	Penghargaan Kepada seniman (5 Juta x 8 orang) dan tambahan makan minum lapangan
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kabupaten Karangasem	1 laporan	374,772,712.00	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kabupaten Karangasem	1 laporan	377,645,076.00	2,872,364.00	tambahan untuk tenaga kontrak lagi 2 bulan

2 22 02 2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaa pelindungan dan pembinaan lembaga adat**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**39,740,638,764.00**	**Persentase pelaksanaa pelindungan dan pembinaan lembaga adat**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**40,825,650,292.00**	**1,085,011,528.00**	
2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kabupaten Karangasem	1.350 lembaga adat	39,703,666,772.00	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kabupaten Karangasem	1.350 lembaga adat	40,785,905,936.00	1,082,239,164.00	tambahan untuk hibah pokir dan fasilitasi kegiatan penyuluhan hibah dari kejaksaan
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Kabupaten Karangasem	60 orang	36,971,992.00	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Kabupaten Karangasem	60 orang	39,744,356.00	2,772,364.00	tambahan untuk gaji tenaga kontrak lagi 2 bulan
2 22 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pelaku kesenian yang dibina untuk peningkatan tata kelola lembaga kesenian tradisional**	**Kabupaten Karangasem**	**7.00%**	**527,404,680.00**	**Persentase pelaku kesenian yang dibina untuk peningkatan tata kelola lembaga kesenian tradisional**	**Kabupaten Karangasem**	**7.00%**	**1,109,050,340.00**	**581,645,660.00**	
2 22 03 2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota**	**persentase terlaksananya pembinaan kesenian**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**527,404,680.00**	**persentase terlaksananya pembinaan kesenian**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**1,109,050,340.00**	**581,645,660.00**	
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kabupaten Karangasem	32 orang	32,404,680.00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kabupaten Karangasem	32 orang	414,050,340.00	381,645,660.00	Parade Gong kebyar Anak-Anak Antar karangasem
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakanJumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Karangasem	10 lembaga seni	495,000,000.00	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakanJumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Karangasem	10 lembaga seni	695,000,000.00	200,000,000.00	Tambahan belanja hiburan
2 22 04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase pembinaan sejarah di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan setiap tahun**	**Kabupaten Karangasem**	**83.33%**	**80,203,544.00**	**Persentase pembinaan sejarah di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan setiap tahun**	**Kabupaten Karangasem**	**83.33%**	**85,648,272.00**	**5,444,728.00**	
2 22 04 2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pembinaan sejarah lokal di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan setiap tahun**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**80,203,544.00**	**Persentase pembinaan sejarah lokal di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan setiap tahun**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**85,648,272.00**	**5,444,728.00**	

2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kabupaten Karangasem	1 dokumen	80,203,544.00	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kabupaten Karangasem	1 dokumen	85,648,272.00	5,444,728.00	tambahan untuk gaji tenaga kontrak lagi 2 bulan
2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase objek diduga Cagar Budaya yang dilestarikan**	**Kabupaten Karangasem**	**28.13%**	**34,781,032.00**	**Persentase pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karangasem**	**Kabupaten Karangasem**	**28.13%**	**37,853,396.00**	**3,072,364.00**	
2 22 05 2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Prosentase objek diduga cagar budaya yang ditetapkan**	**Kabupaten Karangasem**	**29.43%**	**34,781,032.00**	**Persentase pelaksanaan penginventarisasian objek diduga cagar budaya**	**Kabupaten Karangasem**	**29.43%**	**37,853,396.00**	**3,072,364.00**	
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kabupaten Karangasem	10 objek	34,781,032.00	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kabupaten Karangasem	10 objek	37,853,396.00	3,072,364.00	tambahan untuk gaji tenaga kontrak lagi 2 bulan
3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat di Kabupaten Karangasem**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**126,943,527.00**	**Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat di Kabupaten Karangasem**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**1,154,560,619.00**	1,027,617,092.00	
3 26 02 2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Yang terkelola**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**21,220,500.00**	**Persentase Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Yang terkelola**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**31,220,500.00**	10,000,000.00	
3 26 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Karangasem	1 Laporan	21,220,500.00	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Karangasem	1 Laporan	31,220,500.00	10,000,000.00	tambahan anggaran untuk makanan minuman rapat serta bbm
3 26 02 2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase destinasi pariwisata kabupaten/kota yang terkelola**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**99,710,852.00**	**Persentase destinasi pariwisata kabupaten/kota yang terkelola**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**1,107,327,944.00**	**1,007,617,092.00**	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kabupaten Karangasem	1 unit	49,886,772.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kabupaten Karangasem	1 unit	1,052,559,136.00	1,002,672,364.00	Pemeliharaan Rest Area, TIC dan sarana penunjang kepariwisataan (Yeh Malet dan Putung), Penataan Lila Arnawa
3 26 02 2.03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Karangasem	1 lokasi	29,814,128.00	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Karangasem	1 lokasi	32,486,492.00	2,672,364.00	tambahan untuk gaji tenaga kontrak lagi 2 bulan

3 26 02 2.03 10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Karangasem	10 Laporan	20,009,952.00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Karangasem	10 Laporan	22,282,316.00	2,272,364.00	tambahan untuk gaji tenaga kontrak lagi 2 bulan
3 26 02 2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota yang ditetapkan**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**6,012,175.00**	**Persentase tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota yang ditetapkan**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**16,012,175.00**	**10,000,000.00**	
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kabupaten Karangasem	12 laporan	6,012,175.00	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kabupaten Karangasem	12 laporan	16,012,175.00	10,000,000.00	tambahan anggaran untuk makanan minuman rapat serta bbm
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara**	**Kabupaten Karangasem**	**96%**	**317,628,042.00**	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara**	**Kabupaten Karangasem**	**96%**	**924,985,866.00**	**607,357,824.00**	
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten karangasem	**Kabupaten Karangasem**	**16%**		**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten karangasem**	**Kabupaten Karangasem**	**16%**		**-**	
3 26 03 2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan media pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**317,628,042.00**	**Persentase cakupan media pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota**	**Kabupaten Karangasem**	**100%**	**924,985,866.00**	**607,357,824.00**	
3 26 03 2.01 0003	Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan Luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Karangasem	1 dokumen	14,837,102.00	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Karangasem	1 dokumen	17,309,466.00	2,472,364.00	tambahan untuk gaji tenaga kontrak lagi 2 bulan
3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Karangasem	2 kegiatan	84,563,544.00	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Karangasem	2 kegiatan	389,508,272.00	304,944,728.00	Penyelenggaraan Event Tahunan yang berkelanjutan (Tulamben Festival, Sandikala Ning Putung dan Karangasem Travel Mart)
3 26 03 2.01 0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Karangasem	2 promosi	218,227,396.00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Karangasem	2 promosi	518,168,128.00	299,940,732.00	tambahan anggaran untuk promosi

3 26 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase produk ekonomi kreatif yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**9,388,680.00**	**Persentase produk ekonomi kreatif yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**9,388,680.00**	**-**	
3 26 04 2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**9,388,680.00**	**Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Kabupaten Karangasem**	**6%**	**9,388,680.00**	**-**	
3 26 04 2.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Karangasem	10 produk	9,388,680.00	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Karangasem	10 produk	9,388,680.00	-	
3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi**	**Kabupaten Karangasem**	**11%**	**242,843,860.00**	**Persentase sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi**	**Kabupaten Karangasem**	**11%**	**708,139,118.00**	465,295,258.00	
3 26 05 2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar**	**Kabupaten Karangasem**	**12%**	**242,843,860.00**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar**	**Kabupaten Karangasem**	**12%**	**708,139,118.00**	465,295,258.00	
3 26 05 2.01 0005	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Karangasem	1 Laporan	16,826,768.00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Karangasem	1 Laporan	329,099,132.00	312,272,364.00	fasilitasi kegiatan karangasem akhir pekan
3 26 05 2.01 0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kabupaten Karangasem	0	-	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kabupaten Karangasem	40 orang	150,350,530.00	150,350,530.00	tambahan bersumber dari silpa dak non fisik
3 26 05 2.01 0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kabupaten Karangasem	2 orang	208,017,092.00	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kabupaten Karangasem	80 orang	210,689,456.00	2,672,364.00	tambahan untuk gaji tenaga kontrak lagi 2 bulan

3 26 05 2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Karangasem	10 orang	18,000,000.00	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Karangasem	10 orang	18,000,000.00	-	
Jumlah					**50,860,334,311.00**				**55,222,897,301.00**	**4,362,562,990.00**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diubah dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan pedoman penyusunan RKAP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan rancangan DPPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 Kaidah pelaksanaan perubahan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut

- Penyusunan RKAP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan dalam perubahan Renja ini

Amlapura, 7 Agustus 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Kabupaten Karangasem

Putu Eddy Surya Artha, S.STP., MAP
NIP 19780910 199810 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. KARANGASEM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**49.895.958.880,00**	**50.860.334.311,00**	**55.418.897.301,00**	**5.522.938.421,00**							**23.367.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**8.483.185.392,00**	**7.865.832.952,00**	**8.397.006.760,00**	**3.648.814.608,00**							**12.132.000.000,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	5.614.000,00	5.613.900,00	2.643.500,00	-2.970.500,00			-	- -	-		9.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.053.000,00	1.052.900,00	355.500,00	-697.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.240.500,00	1.240.500,00	600.000,00	-640.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.152.000,00	2.152.000,00	1.292.500,00	-859.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.168.500,00	1.168.500,00	395.500,00	-773.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan*				100 %	100 %	7.373.316.519,00	6.479.829.509,00	6.352.151.173,00	-1.021.165.346,00			-	- -	-		10.002.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1176 Orang /bulan	1176 Orang /bulan	7.371.773.019,00	6.478.286.009,00	6.351.240.173,00	-1.020.532.846,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.543.500,00	1.543.500,00	911.000,00	-632.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			2.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	288.306.100,00	288.301.500,00	257.083.700,00	-31.222.400,00			-	- -	-		580.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.247.500,00	2.242.900,00	1.985.800,00	-261.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	193.413.200,00	193.413.200,00	190.290.000,00	-3.123.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	46.928.500,00	46.928.500,00	39.091.000,00	-7.837.500,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			7.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	40.216.900,00	20.216.900,00	20.216.900,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	**NON URUSAN**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**49.497.592.058,00**	**50.163.530.202,00**	**52.621.823.018,00**	**3.124.230.960,00**							**21.332.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang perkantoran*				100 %	100 %	553.785.100,00	775.934.994,00	763.917.046,00	210.131.946,00			-	- -	-		810.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	383.000.000,00	383.000.000,00	383.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	8.785.100,00	41.022.976,00	42.419.568,00	33.634.468,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	162.000.000,00	351.912.018,00	338.497.478,00	176.497.478,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	262.163.673,00	316.153.049,00	1.021.211.341,00	759.047.668,00			-	- -	-		730.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	149.163.673,00	181.833.049,00	215.186.341,00	66.022.668,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	63.000.000,00	68.000.000,00	63.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	1 0	0,00	0,00	693.025.000,00	693.025.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	66.320.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pelestarian kebudayaan**				**78,40 %**	**78,40 %**	**40.397.568.686,00**	**41.655.307.994,00**	**42.992.264.250,00**	**-32.497.568.686,00**							**7.900.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya pelindungan warisan budaya*				100 %	100 %	75.454.746,00	84.671.838,00	87.744.202,00	12.289.456,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	75.454.746,00	84.671.838,00	87.744.202,00	12.289.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pelindungan dan pelestarian kesenian tradisional*				100 %	100 %	712.809.360,00	1.829.997.392,00	1.882.869.756,00	1.170.060.396,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		2.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	8 Objek	655.224.680,00	1.455.224.680,00	1.505.224.680,00	850.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	57.584.680,00	374.772.712,00	377.645.076,00	320.060.396,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pelindungan dan pembinaan lembaga adat*				100 %	100 %	39.609.304.580,00	39.740.638.764,00	41.021.650.292,00	1.412.345.712,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		5.150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1350 Objek	1350 Objek	39.580.649.680,00	39.703.666.772,00	40.981.905.936,00	1.401.256.256,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			5.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				60 Orang	60 Orang	28.654.900,00	36.971.992,00	39.744.356,00	11.089.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pelaku kesenian yang dibina untuk peningkatan tata kelola lembaga kesenian tradisional**				**7 %**	**7 %**	**527.404.680,00**	**527.404.680,00**	**1.109.050.340,00**	**322.595.320,00**							**850.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*persentase terlaksananya pembinaan kesenian*				100 %	100 %	527.404.680,00	527.404.680,00	1.109.050.340,00	581.645.660,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				32 Orang	32 Orang	32.404.680,00	32.404.680,00	414.050.340,00	381.645.660,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	495.000.000,00	495.000.000,00	695.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase pembinaan sejarah di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan setiap tahun**				**83,33 %**	**83,33 %**	**63.869.360,00**	**80.203.544,00**	**85.648.272,00**	**136.130.640,00**							**200.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pembinaan sejarah lokal di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan setiap tahun*				100 %	100 %	63.869.360,00	80.203.544,00	85.648.272,00	21.778.912,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	63.869.360,00	80.203.544,00	85.648.272,00	21.778.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase objek diduga Cagar Budaya yang dilestarikan**				**28,13 %**	**28,13 %**	**25.563.940,00**	**34.781.032,00**	**37.853.396,00**	**224.436.060,00**							**250.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase objek diduga cagar budaya yang ditetapkan*				29,43 %	29,43 %	25.563.940,00	34.781.032,00	37.853.396,00	12.289.456,00			-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	25.563.940,00	34.781.032,00	37.853.396,00	12.289.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**398.366.822,00**	**696.804.109,00**	**2.797.074.283,00**	**2.398.707.461,00**							**2.035.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**398.366.822,00**	**696.804.109,00**	**2.797.074.283,00**	**2.398.707.461,00**							**2.035.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata budaya berbasis desa adat di Kabupaten Karangasem**				**6 %**	**6 %**	**104.092.251,00**	**126.943.527,00**	**1.154.560.619,00**	**500.907.749,00**							**605.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Yang terkelola*				6 %	6 %	21.220.500,00	21.220.500,00	31.220.500,00	10.000.000,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	21.220.500,00	21.220.500,00	31.220.500,00	10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase destinasi pariwisata kabupaten/kota yang terkelola*				6 %	6 %	76.859.576,00	99.710.852,00	1.107.327.944,00	1.030.468.368,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		515.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	3 Unit	41.869.680,00	49.886.772,00	1.052.559.136,00	1.010.689.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	21.797.036,00	29.814.128,00	32.486.492,00	10.689.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	13.192.860,00	20.009.952,00	22.282.316,00	9.089.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota yang ditetapkan*				100 %	100 %	6.012.175,00	6.012.175,00	16.012.175,00	10.000.000,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				12 Laporan	12 Laporan	6.012.175,00	6.012.175,00	16.012.175,00	10.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten karangasem**				**16 96 % %**	**96 16 % %**	**205.554.570,00**	**317.628.042,00**	**924.985.866,00**	**744.445.430,00**							**950.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase cakupan media pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*				100 %	100 %	205.554.570,00	317.628.042,00	924.985.866,00	719.431.296,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	7.420.010,00	14.837.102,00	17.309.466,00	9.889.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	69.729.360,00	84.563.544,00	389.508.272,00	319.778.912,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	2 Promosi	128.405.200,00	218.227.396,00	518.168.128,00	389.762.928,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase produk ekonomi kreatif yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya**				**6 %**	**6 %**	**9.388.680,00**	**9.388.680,00**	**9.388.680,00**	**40.611.320,00**							**50.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*				6 %	6 %	9.388.680,00	9.388.680,00	9.388.680,00	0,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				10 Produk	10 Produk	9.388.680,00	9.388.680,00	9.388.680,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi**				**11 %**	**11 %**	**79.331.321,00**	**242.843.860,00**	**708.139.118,00**	**350.668.679,00**							**430.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar*				12 %	12 %	79.331.321,00	242.843.860,00	708.139.118,00	628.807.797,00			-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata	-		430.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	10.009.676,00	16.826.768,00	329.099.132,00	319.089.456,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				-	40 Orang	0,00	0,00	150.350.530,00	150.350.530,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KE PARIWISATAAN	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				2 Orang	80 Orang	51.321.645,00	208.017.092,00	210.689.456,00	159.367.811,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Bidang Pariwisata 5. Bidang Pariwisata			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H								**49.895.958.880,00**	**50.860.334.311,00**	**55.418.897.301,00**	**5.522.938.421,00**							**23.367.000.000,00**	

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2025



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karangasem tahun 2025 yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD, Rentra, RKPD dan Renja OPD.

Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi PD dalam rangka penyelenggaran pembangunan daerah adalah Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem berdasarkan prioritas RKPD tahun 2025 dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026

Demikian Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem ini disusun dengan harapan penyelenggaran pembangunan daerah Kabupaten Karangasem berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Amlapura, 8 Agustus 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Karangasem,

Drs. I Gede Loka Santika
Pembina Utama Muda
Nip. 19670613 199403 1 006

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ..... i.

DAFTAR ISI ..... ii.

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang..... 1.

1.2 Landasan Hukum ..... 2.

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4.

1.4 Sistematika Penyusunan ..... 4.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai TW II ..... 6.

2.2 Isu-Isu Penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PD ..... 9.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD..... 22

3.1 Tujuan dan Sasaran.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP ..... 24.

LAMPIRAN

Tabel E.70, Tabel E.81



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD). Dan berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Pada pasal 13 menyebutkan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun melalui proses diawali melalui pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu meliputi, evaluasi pencapaian target program kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), penyusunan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem 2021-2026 dan Perubahan RKPD 2025.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Karangasem sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Sampai pada triwulan II pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga diperlukan penyesuaian

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang -Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 – 2025;
15. Peraturan daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7;
18. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah N0. 17 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana;
20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen rencana kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem yang memuat tentang perubahan perubahan terhadap renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Tahun 2025sesuai perkembangan keadaan yang ada sehingga dapat menjadi arah, pedoman dalam mewujudkan target kinerja perangkat daerah yang ditetapkan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem adalah menjadi pedoman penyusunan RKAP perangkat daerah tahun anggaran 2025, dan menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai TW II

2.2 Isu-Isu Penting Penting terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai TW II.

Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025 s/d TW II.

Hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Triwulan II dapat disajikan dalam Lampiran I Tabel E.81 (terlampir).

DISKOPPERINDAG Kabupaten Karangasem menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 sampai triwulan ke-2 sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah, kegiatan kegiatan pendukung indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan secara rutin yang capainnya sudah 50% yang didukung dengan 6 kegiatan ,dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.572.462.278, Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan rencana.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan didukung 1 Kegiatan dengan indikator kinerja program Persentase Koperasi aktif dengan realisasi kinerja sebesar 28,76% dari target 92% dengan rata rata capaian kinerja 31,26% Capaian kinerja ini dengan adanya pelaksanaan monev terhadap koperasi sebanyak 67 koperasi jadi realisasi 67 / 233(kop wajib RAT) x 100= 28,76%. dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.006.728.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang indikatornya Persentase koperasi yang berkualitas dengan didukung 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan

realisasi kinerja 28,61% dari 94% target yang ditetapkan, dengan rata rata capaian kinerja 30,43%. ini dengan capaian total 38 koperasi dinilai kesehatanya (s/d tw II) di tw I tercapai 14/113 (Jumlah Koperasi yang RAT) x100=12,39 %,di TW II tercapai 24(koperasi yang dinilai kesehatannya)/148(Jumlah Koperasi yang RAT) x100=16,22% jadi total realisasi s/d tw II=28,61% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.28.176.242,-.

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Yang indikatornya Persentase wirausaha baru dengan didukung 1 Kegiatan dengan realisasi capaian kinerja program sebesar 0,13 % ,68 pelaku usaha(dibagi total jumlah umkm 50.717 dikali 100 dari target 1,80%, rata-rata capaian kinerja program 7,45% , dengan realisasi keuangan sebesar Rp.37.588.579,-
5. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator kinerja program Persentase fluktuasi harga komoditas bakpoting dengan realisasi kinerja sebesar 11,78% dari target kinerja 6,19% dengan 3 Kegiatan pendukungnya. Semakin kecil realisasi capaian kinerja programnya semakin bagus. Dengan capaian kinerja s/d tw II 11,72% menunjukkan bahwa terjadi kenaikan inflasi 0,81 % dari target , karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama komoditas cabe dan bawang merah. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.905.344,-
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan indikator kinerja program Persentase pembangunan industri kabupaten/kota dengan satu Kegiatan pendukungnya , dengan realisasi kinerja sebesar 3,65% dari 6% target yg ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja 60,81% yaitu dari target akumulasi meningkatnya jumlah tenaga kerja ikm sampai dengan tahun ini dari jumlah tenaga kerja ikm formal dan non formal dari tahun sebelumnya ,tercapai 1.000 dibagi total jumlah tenaga kerja formal dan non formal 27.407 x 100=3,65%. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 165.180.468,-
7. Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan dengan indikatot kinerja program Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan didukung 2 Kegiatan, dengan realisasi kinerja program sebesar 0% dari target 25% . rata-rata capaian kinerja 0% karena Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pemeliharaan Pasar Hewan Rubaya TW III dari target pemeliharaan pasar dengan realisasi keuangan sebesar Rp.609.527.602.
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen didukung dengan 1 Kegiatan dengan indikator kinerja program persentase pelaksanaan metrologi legal berupa Tera,tera ulang dan pengawasan UTTP dengan realisasi kinerja sebesar 7,11% dari

target 5,04%. Jadi UTTP yang ditera + UTTP terawasi dibagi Jumlah UTTP x2= Jumlah UTTP yang ditera sebanyak 392 + Jumlah UTTP yang diawasi sebanyak 245 : 8.959 x 100= 7,11% . Adanya Peningkatan permohonan untuk tera ulang alat UTTP dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.222.092,-

9. Program Pengembangan Ekspor dengan indikator kinerja Jumlah produk IKM unggulan kabupaten karangasem yang dipromosikan didukung 1 kegiatan dengan target 45 produk terealisasi sebanyak 45 produk, tercapainya 100% dari target kinerja karena Dalam Pelaksanaan Kegiatan bersinergi dengan OPD lainnya. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 362.500,-
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri dengan indikator kinerja jumlah produk IKM kabupaten karangasem yang dipromosikan dan dipasarkan guna peningkatan penggunaan produk dalam negeri , didukung dengan 1 kegiatan dengan realisasi capaian program sebanyak 13 produk dari 23 produk yang ditargetkan. Jadi rata-rata capaian kinerja program ini tercapai 56,62% dengan kegiatan pelaksanaanya terintegrasi dengan Disperindag Provinsi Bali. Karena pelaksanaan kegiatan Dilaksanakan pada TW III dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.645.264,-
11. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan indikator kinerja program persentase peningkatan permohonan izin usaha oleh masyarakat , realisasi kinerja sebanyak 20,69 % dari target 21,74% rata rata capaian kinerja tercapai 95,1% sesuai target dengan didukung 3 kegiatan, dari capaian tw I 55 ijin / 55 target ijin yang dikeluarkan dan capaian tw II 8 ijin/69 di kali 100 = sehingga realisasi dijumlahkan 20,69% karena Faktor Pendorong Adanya kesadaran masyarakat untuk mencari izin usaha untuk mendukung operasional usaha. dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5/55*100
12. Program Pengendalian izin Usaha Industri Kabupaten Karangasem dengan indikator kinerja persentase pelaku ikm yang difasilitasi pendaftarannya dan pengawasannya dengan capaian 30 rekomendasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.456.000,-
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indikator persentase ikm yang masuk dalam SIINAS yang didukung 1 Kegiatan dan dengan realisasi kinerja 0,42% (ini karena ikm yang masuk ke SIINAS ada 2 ikm/ 479 ikm formal x 100=0,42%) dari target kinerja sebesar 8,35% sehingga rata-rata capain kinerja program ini realisasi dibagi target 5% - dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.409.564,-

Permasalahan dan Solusi.

Untuk Rata Rata Capaian Kinerja Program Program yang capaian masih rendah dikarenakan kegiatan dilaksanakan di Tw III dan adanya pergeseran anggaran. Untuk kedepan agar kegiatan dilaksankan sesuai rencana kerja untuk pencapaian target kinerja dapat dicapai secara maksimal.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan dalam perubahan renja diskopperindag tahun 2025.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya manajemen usaha IKM.
   Industri kecil dan menengah perlu memperbaiki manajeman agar dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing produk.

2. Masih lemahnya aspek daya saing produk IKM.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri kecil menengah sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Karangasem tidak memiliki sumber tambang dan Sumber Daya Alam yang cukup, maka ketersediaan bahan baku industri kecil menegah masih kurang karena tergantung dari luar Kabupaten bahkan dari luar pulau. Lemahnya daya saing juga dipengaruhi tingginya harga bahan baku. Keterbatasan peralatan, kemampuan/keterampilan perajin, kualitas, diversity/keragaman produk dan yang tidak kalah pentingnya adalah masih sangat kurangnya promosi dan jejaring produk.

3. Masih terbatasnya pemasaran produk IKM.
4. Belum optimalnya pembinaan sektor perdagangan.
5. Belum optimalnya revitalisasi pasar tradisional.
   Pasar- pasar tradisional masih ada yang belum optimal penataannya dan masih terkesan kumuh dengan revitalisasi pasar tradisional ini diharapkan pengunjung / pembeli lebih tertarik untuk datang dan membelanjakan uangnya ke pasar tradisional.

6. Masih kurangnya perlindungan konsumen terhadap industri dan Perdagangan.
7. Belum optimalnya kontribusi toko modern terhadap perdagangan.
8. Masih berfluktuasinya harga kebutuhan barang pokok .
   Berfluktuasinya harga kebutuhan barang pokok disebabkan sebagian besar kebutuhan barang pokok yang merupakan hasil pabrikan didatangkan dari luar Bali dan perilaku konsumen membeli barang kebutuhan pokok secara berlebihan menjelang Hari Raya Keagamaan serta sistem distribusi barang pokok yang tidak stabil menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.

Menjaga stabilitas kebutuhan barang pokok merupakan kegiatan yang sangat strategis, karena tingginya fluktuasi harga kebutuhan barang pokok akan mempengaruhi inflasi dan kemiskinan.



BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta mengakomodasi issu-issu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026,Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem adalah:

a. Terpenuhinya kebutuhan Pangan Krama Karangasem dengan harga Layak.
b. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya saing.
c. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali.
d. Meningkatnya pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sasaran

Sasaran sektor industri dan perdagangan tahun 2021 - 2026, yaitu:

a. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan.
b. Meningkatnya Daya saing Ekonomi Lokal.
c. Meningkatnya kualitas produksi IKM Branding Bali karangasem yang berorientasi Ekspor.
d. Terwujudnya Pelayanan Prima Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2021	2025	2025	2025	2025	2026
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Krama Karangasem dengan Harga Layak.		Persentase Pemantauan Harga Ketersediaan Bahan Pokok Penting Krama Karangasem.	20%	19,6%	19,2%	18,83%	18,45%	18.08%
	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	persentase fluktuasi harga komoditas pangan	20%	19,6%	19,2%	18,83%	18,45%	18.08%
Terwujudnya pemerataan pertumbuhan unit usaha yang mempunyai daya saing.		Persentase Pertumbuhan unit usaha.	0	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Persentase Pertokoan Krama Bali di Kabupaten Karangasem milik Desa Adat (BUMda)	0	15	20	20	20	25
		Persentase Pertokoan Milik UMKM	0	15	20	20	20	25
		Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	0	10	15	15	15	20

		Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	0	40	50	70	77	90
Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali		Presentase Nilai Ekspor di Kabupaten Karangasem	3,00	4,00	5,30	6,80	8,40	10,00
	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali di Karangasem yang berorientasi Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Branding Bali yang berorientasi Ekspor di Kabupaten Karangasem.	0,01	0,02	0,50	0,80	1,00	1,20
		Persentase produk IKM branding Karangasem yang berkualifikasi Indie 4.0 di Kabupaten Karangasem	1,04	1,88	2,51	3,13	3,55	4,18
	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian mikro kecil dan menengah krama karangasem	Jumlah pusat –pusat perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM.	1	1	1	1	1	6
Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah.		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah.	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Pelayanan Prima Perangkat Daerah.	Persentase Fasilitasi Perizinan Perangkat Daerah.	100	100	100	100	100	100

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Sejalan dengan upaya mewujudkan Karangasem yang "Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem", maka strategi pengembangan Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menegah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, diarahkan pada sebagai berikut:

1. Mengendalikan harga pangan (Bapokting) terjangkau oleh Krama Karangasem.
2. Mengembangkan IKM yang legal serta dalam proses produksinya mengutamakan efesiensi dan efektifitas penggunaan semberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menstabilkan pembangunan industri yang mampu berdaya saing.
3. Mengembangkan umkm, memberdayakan umkm.
4. Melaksanakan Pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.
5. Mempercepat pembentukan koperasi desa/ koperasi merah putih
6. Meningkatkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
7. Meningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen melalui pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
8. Mengenalkan,mempromosikan/mengkampanyekan seluruh produk Karangasem dengan brand Bali di pasar lokal dan ekspor.
9. Mendirikan pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi dan UMKM.
10. Meningkatkan pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan.
11. Meningkatkan pelayanan fasilitasi pengendalian izin usaha industri.
12. Memetakan potensi ikm.

.

3.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan / pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya keterpaduan dan kelancaran.

Kebijakan yang menjadi acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem adalah :

1. Optimalisasi peran TPID
2. Peningkatan pengawasan, pemantauan terhadap fluktuasi harga komoditas Bapokting.

3. Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor, Pemberdayaan umkm.
4. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.
5. Percepatan pembentukan koperasi desa/ koperasi merah putih.
6. Pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata seperti pengerajin arak, pengerajin kerajinan tenun dan pengerajin anyaman.
7. Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten, pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri,Melaksanakan pembinaan ikm, fasilitasi bantuan sarana prasana pendukung terhadap pertumbuhan ikm.
8. Fasilitasi peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan melalui pembangunan,pemeliharaan sarana prasarana pasar, penagihan retribusi dan pelaksanaan pengawasan retribusi guna peningkatan perekonomian masyarakat.
9. Pelaksanaan pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
10. Pengembangan industri kerajinan menengah berbasis budaya bali yang berorientasi ekspor seperti pengerajin arak, pengerajin kerajinan tenun dan pengerajin anyaman.
11. Peningkatan akse KUMKM ke sumber daya produktif.
12. Fasilitasi pelayanan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, tanda daftar gudang,STPW dalam negeri,Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat,Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ KotaDi tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
13. Fasilitasi pelayanan Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin usaha kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota,
14. Pelaksanaan pendataan ikm kabupaten .

3.3. Program dan Kegiatan.

Perubahan pada program kegiatan dapat digambarkan sebagaimana tabel 3.2 berikut :

PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN TAHUN 2025	SEBELUM PERUBAHAN					JUMLAH	SETELAH PERUBAHAN					JUMLAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	BELANJA TRANSFER	BELANJA TIDAK TERDUGA		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	BELANJA TRANSFER	BELANJA TIDAK TERDUGA	JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**															
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,879,900.00		3,879,900.00				3,879,900.00		3,879,900.00			-	3,879,900.00	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,549,500.00		1,549,500.00				1,549,500.00		1,549,500.00			-	1,549,500.00	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,518,200.00		5,518,200.00				5,518,200.00		5,518,200.00			-	5,518,200.00	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,651,200.00		1,651,200.00				1,651,200.00		1,651,200.00			-	1,651,200.00	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22,080,084.00		22,080,084.00				22,080,084.00		28,424,812.00			-	28,424,812.00	6,344,728	tambahan gaji ,jkk,jkm,bpjs tenaga kontrak 2 bulan Rp. 19.034.184
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**															

6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,044,860,081.00	8,044,860,081.00					8,044,860,081.00	8,049,416,155.00				-	8,049,416,155.00	4,556,074.00	Tambahan Gaji dan Tunjangan sesuai TL 100.000.000
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33,282,305.00		33,282,305.00				33,282,305.00		43,771,761.00			-	43,771,761.00	10,489,456.00	tambahan gaji ,jkk,jkm,bpjs tenaga kontrak 2 bulan
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00		3,000,000.00			-	3,000,000.00	-	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,175,500.00		3,175,500.00				3,175,500.00		3,175,500.00			-	3,175,500.00	-	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**															
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,972,300.00		19,972,300.00				19,972,300.00		12,348,900.00			-	12,348,900.00	(7,623,400.00)	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,100.00		10,000,100.00				10,000,100.00		15,745,700.00			-	15,745,700.00	5,745,600.00	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	421,488,900.00	-	421,488,900.00				421,488,900.00		387,932,100.00			-	387,932,100.00	(33,556,800.00)	
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,000,000.00		15,000,000.00				15,000,000.00		9,272,000.00			-	9,272,000.00	(5,728,000.00)	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,400,000.00		8,400,000.00				8,400,000.00		8,400,000.00			-	8,400,000.00	-	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63,765,200.00		63,765,200.00				63,765,200.00		58,905,100.00			-	58,905,100.00	(4,860,100.00)	
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63,879,644.00		63,879,644.00				63,879,644.00		83,986,192.00			-	83,986,192.00	20,106,548.00	tambahan gaji ,jkk,jkm,bpjs tenaga kontrak 2 bulan
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500,056,000.00		500,056,000.00				500,056,000.00		500,056,000.00			-	500,056,000.00	-	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129,600,000.00		129,600,000.00				129,600,000.00		-			-	-	(129,600,000.00)	

5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316,913,240.00		316,913,240.00				316,913,240.00		351,260,370.00			-	351,260,370.00	34,347,130.00	tambahan gaji ,jkk,jkm,bpjs tenaga sopir 3 bulan Rp. 24.092.730
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128,000,000.00		128,000,000.00				128,000,000.00		118,000,000.00			-	118,000,000.00	(10,000,000.00)	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182,629,466.00		182,629,466.00				182,629,466.00		210,839,288.00			-	210,839,288.00	28,209,822.00	tambahan gaji ,jkk,jkm,bpjs tenaga keamanan dan kebersihan 3 bulan Rp. 28.209.822,-
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-		-				-			58,937,200.00		-	58,937,200.00	58,937,200.00	1 ac ditunda(disetujui sesuai TL
II	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**															
1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
23	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	66,034,184.00		66,034,184.00				66,034,184.00		91,736,412.00			-	91,736,412.00	25,702,228.00	Tambahan anggaran sosialisasi koperasi merah putih Rp. 28.900.000, + gaji ,jkk,jkm,bpjs tenaga kontrak 2bln 5.344.728
III	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**															
1	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam**															

	Koperasi Yang Wialayahnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota															
24	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	81,051,276.00		81,051,276.00				81,051,276.00		78,037,368.00			-	78,037,368.00	(3,013,908.00)	pengurangan perjadin ,tambahan gaji,jkm,jkk,bpjs tenaga kontrak 2bln
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**															
1	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**															
25	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	14,492,492.00		14,492,492.00				14,492,492.00		17,164,856.00			-	17,164,856.00	2,672,364.00	tambahan gaji,jkm,jkk,bpjs tenaga kontrak 2 bln
26	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19,042,092.00		19,042,092.00				19,042,092.00		19,989,456.00			-	19,989,456.00	947,364.00	Pengurangan perjadin,
27	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	42,499,600.00		42,499,600.00				42,499,600.00		96,334,600.00			-	96,334,600.00	53,835,000.00	pengurangan perjadin
V	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**															
1	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**															
28	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00			-	1,500,000.00	-	

2	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**															
29	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00			-	1,500,000.00	-	
3	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**															
30	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00			-	1,500,000.00	-	
VI	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**															
1	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**															
31	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	229,945,092.00		229,945,092.00				229,945,092.00		1,397,373,808.00			-	1,397,373,808.00	1,167,428,716.00	tambahan '(+605.984.352=pemeliharaan 2 pasar)+(400.000.000=pemeliharaan pasar subagan)+(158.972.040=rangka besi baliho)+(7.417.092=gaji tenaga kontrak jkk,jkm,bpjs2bln)
32	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,791,781,406.00		1,791,781,406.00				1,791,781,406.00		1,902,996,694.00			-	1,902,996,694.00	111,215,288.00	pengurangan perjadin '(-24000000)+(41300000=pakaian kerja)+(34954200=spanduk sampah plastik)+(14834184=gaji,jkk,jkm,bpjs tenaga kontrak 62bulan)
2	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**															
33	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4,992,000.00		4,992,000.00				4,992,000.00		4,992,000.00			-	4,992,000.00	-	

VII	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**															
1	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**															
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2,085,600.00		2,085,600.00				2,085,600.00		2,085,600.00			-	2,085,600.00	-	
2	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**															
35	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	9,450,092.00		9,450,092.00				9,450,092.00		11,922,456.00			-	11,922,456.00	2,472,364.00	(tamabhan gaji jkk jkm bpjs tenaga kontrak 2bln
36	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	21,534,200.00		21,534,200.00				21,534,200.00		37,534,200.00			-	37,534,200.00	16,000,000.00	pengurangan honor-6000000)+tambahan pasar murah(22000000)
3	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**															
37	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	937,200.00		937,200.00				937,200.00		937,200.00			-	937,200.00	-	
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**															
1	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
38	Pameran Dagang Lokal	521,342,000.00		521,342,000.00				521,342,000.00		505,513,400.00			-	505,513,400.00	(15,828,600.00)	

IX	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**															
1	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**															
39	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	19,650,000.00		19,650,000.00				19,650,000.00		7,822,500.00			-	7,822,500.00	(11,827,500.00)	
40	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	17,425,092.00		17,425,092.00				17,425,092.00		17,446,956.00			-	17,446,956.00	21,864.00	tambahan gajijkk,jkm,bpjs tenaga kontrak 2 bulan
X	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**															
1	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**															
41	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	248,809,826.00		248,809,826.00				248,809,826.00		186,235,918.00	19,000,000.00		-	205,235,918.00	(43,573,908.00)	(-(46591000=pengurangan perjadin))-24200000=pengurangan bbm+(tambahan gaji,jkk,jkm,bpjs tenaga kontrak 2 bulan,tambahan belanja modal
42	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	4,289,025.00		4,289,025.00				4,289,025.00		9,489,025.00			-	9,489,025.00	5,200,000.00	5200000=tambahan
		-		-						-						
XI	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**															
1	**Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota**															

43	Koordinasi , Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	25,129,200.00		25,129,200.00				25,129,200.00		25,129,200.00			-	25,129,200.00	-	
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	107,863,800.00		107,863,800.00				107,863,800.00		60,625,400.00			-	60,625,400.00	(47,238,400.00)	pengurangan honor
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3,900,000.00		3,900,000.00				3,900,000.00		3,372,200.00			-	3,372,200.00	(527,800.00)	pengurangan
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	449,184,484.00		449,184,484.00				449,184,484.00		540,174,212.00			-	540,174,212.00	90,989,728.00	(-84605000=pengurangan perjadin)+(20650100=tambahan sesuai TL baju olga,endek)+(+tambahan gaji kontrak 6 bulan)+(150.000.000=tambahan perjadin)
XII	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**															
1	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**															
47	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	3,900,000.00		3,900,000.00				3,900,000.00		3,900,000.00			-	3,900,000.00	-	

48	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	13,315,000.00		13,315,000.00				13,315,000.00		12,452,500.00			-	12,452,500.00	(862,500.00)	(-862500=pengurangan mami rapat,)
XIII	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**															
1	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**															
49	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	11,317,092.00		11,317,092.00				11,317,092.00		13,789,456.00			-	13,789,456.00	2,472,364.00	Tambahan Gaji kkontrak ,JKK,JKM, BPJS 2 bln
50	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3,900,000.00		3,900,000.00				3,900,000.00		3,900,000.00			-	3,900,000.00	-	
		13,697,072,373.00	**8,044,860,081.00**	**5,652,212,292.00**	-	-	-	**13,697,072,373.00**	**8,049,416,155.00**	**6,903,171,940.00**	**77,937,200.00**	-	-	**15,030,525,295.00**	**1,333,452,922.00**	



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJPMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Permerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Perubahan Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dang fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan perubahan tahun 2025.

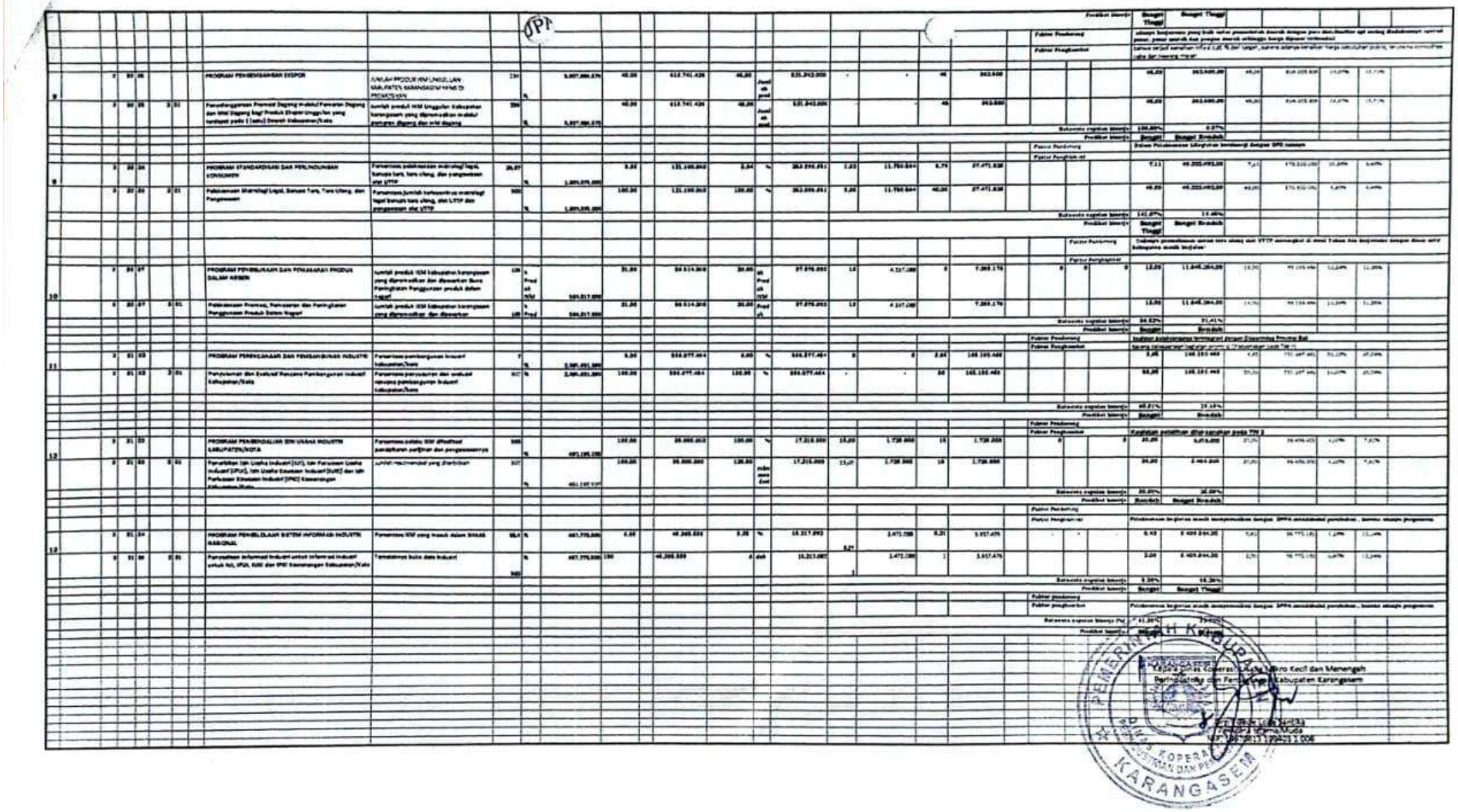
Amlapura, 8 Agustus 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Karangasem,

I Drs. I Gede Loka Santika
Pembina Utama Muda
Nip. 19670613 199403 1 006

Evaluasi Hasil Kerja Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2025

No.	Kewenangan	Kode rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Kinerja Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu			Target kinerja dan anggaran Kinja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang direvisi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Kinja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun		SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12								
			UNSUR KEWILAYAHAN																									
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		3 4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, SENI, BUDAYA, DAN PARIWISATA				111.514.437.267		12.256.915.514			12.697.075.679	23	1.379.498.825	188	9.383.627.540								4.845.126.365		7.698.772.701		
1		3 4.01 2.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan terhadap pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah	100	%	94.2 s.d 114.5 %	100,00		4.295.239.940	100,00		5.076.701.430	25	1.267.477.529	23	2.024.964.699							50	3.675.163.370	50,00	5.722.916.801	72,40%	72,40%
		3 4.01 2.02 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	90.750.000,700	100,00		9.215.441.463	100,00	%	8.264.317.004	38	1.916.762.145	38	1.402.447.180							50	3.913.460.884	37,50	5.722.916.801	72,40%	47,37%
		3 4.01 2.02 04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100	%	5.515.349.525	100,00		946.202.750	100,00	%	5.69 439.500	38	20.194.273	38	48.764.647							50	134.462.500	50,00	175.572.870	72,40%	57,14%
		3 4.01 2.02 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	703.679.101	100,00		951.196.000	100,00		5	-	-	-	-							-	-	72,40%	547.145.501	0,00%	80,00%
		3 4.01 2.02 08	Pemeliharaan Hak Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pemeliharaan hak penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	5.675.201.550	100,00		627.699.340	100,00		692.636.844	38	133.213.176	38	140.672.524							50	268.164.100	50,00	372.822.407	72,40%	38,67%
		3 4.01 2.02 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	5.942.629.454	100,00		960.113.043	100,00		627.643.756	38	89.070.384	38	107.794.051							50	196.647.887	50,00	668.477.844	72,40%	31,33%
		3 4.01 2.02 01	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	906.345.775	100,00		94.142.536	100,00		94.916.204	38	6.144.176	38	14.892.363							50	20.176.539	50,00	90.216.954	72,40%	17,24%
																					Rata-rata capaian kinerja:		48,00%		36,00%		
																					Prioritas kinerja:	Rendah	Sangat Tinggi				
																					Pagu Tersedia		Pelaksanaan Program s/d Hasil sampai dengan triwulan				
																					Pagu Penghematan						
2		3 4.01 2.02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	100	%	2.276.000.000	60,00		94.131.184	95,00	%	94.834.184	-	-	28,70	38.956.728	-	-	-	-		28,70	38.956.728,00	28,70	154.127.912	25,17%	1,44%
		3 4.01 2.02 01	Pemeliharaan dan Pengelolaan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Persentase KSP/USP/Unit diverifikasi dan disetujui	100	%	2.276.000.000	60,00		94.131.184	95,00	%	94.834.184	0	0	67,30	38.956.728		0				67,30	38.956.728,00	67,30%	154.127.912	57,69%	1,44%
																					Rata-rata capaian kinerja:		61,30%		57,50%		
																					Prioritas kinerja:	Rendah	Sangat Tinggi				
																					Pagu Tersedia		Pelaksanaan Program sudah sesuai dengan anggaran kas				
																					Pagu Penghematan						
3		3 4.01	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	100	%	1.030.426.876	65,00		88.696.760	94,00		91.051.376	13,00	0.341.364	14,00	13.004.979	0,00	0	0,00	0		28,40	26.179.343,00	28,40	116.673.130	28,41%	0,63%
		3 4.01 2.02 01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/Usp yang dinilai kesehatannya	100	%	1.030.426.876	65,00		98.696.760	94,00		91.051.376	13,00	0.341.364	14,00	13.004.979						28,40	26.179.343,00	28,40	116.673.130	28,41%	0,63%
																					Rata-rata capaian kinerja:		28,40%		24,70%		
																					Prioritas kinerja:	Rendah	Rendah				
																					Pagu Tersedia						
																					Pagu Penghematan						
4		3 4.01	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENGAH, USAHA MIKRO, DAN USAHA MIKRO(TUNGGAL)	Persentase wirausaha baru	5,5	%	2.945.554.554	1,38		931.589.479	1,38		95.554.154			0,13	17.388,17%						0,13	37.883.879,00	2,40%	676.677.106	2,40%	39,59%
		3 4.01 2.02 01	Pembinaan/usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Sosialisasi, Kemudahan Perizinan, Pengadaan Sarana/prasarana dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pembentukan UMKM	1,5	%	2.945.554.554	1,1		931.589.479	1,38	%	96.554.154			0,13	17.388,17%						0,13	37.883.879,00	7,40%	676.677.106	7,40%	39,59%
																					Rata-rata capaian kinerja:		7,40%		40,00%		
																					Prioritas kinerja:	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
																					Pagu Tersedia						
																					Pagu Penghematan						
5		3 20.03	PROGRAM PEMIMPIN DAN PENGATARAH PENJAMINAN	Persentase pelayanan pemerintah on-site oleh masyarakat	100	%	946.961.000	17,24		15.003.000	31,74	%	4.530.000	0,25	0	11,50	1.150.700		0	0	3		20,00	1.150.700,00	37,74	14.000.000	33,64%	0,24%
		3 20.03 2.03 01	Penyelesaian Izin Pengaduan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terfasilitasinya Pemberian izin Masyarakat	100	%	107.500.000	10,00		7.000.000	34,00	%	1.930.000	0,00	-	0,00	-						1,00	-	3,70	7.000.000	1,00%	0,00%
		3 20.03 2.03 02	Penyelesaian Tanda Daftar Gudang	Terfasilitasinya pemberian tanda daftar gudang alat masyarakat	100	%	46.317.000	30,00		2.427.000	22,00	%	1.930.000	0,00	-	0,00	-						1,00	-	3,70	5.927.000	1,00%	0,00%
		3 20.03 2.03 06	Penyelesaian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Terfasilitasinya penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralk	100	%	117.500.350	100		4.427.000	100	%	1.930.000	0,00	1.140.700	0,00	1.140.700						11,00	1.150.700,00	11,00	7.000.000	11,00%	0,00%
																					Rata-rata capaian kinerja:		28,13%		28,53%		
																					Prioritas kinerja:	Sangat	Rendah				
																					Pagu Tersedia		Pagu Tersedia: Anggaran tersedia untuk disosialisasikan untuk upaya untuk meningkatkan pemahaman untuk				
																					Pagu Penghematan		tersedia tersedia masih di bawah masih mempengaruhi dengan SKPD membutuhkan pembahasan. Sehingga untuk pengawasan.				
6		3 20.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	%	28.941.344.100	30,00		3.313.000.140	29,00	%	3.030.710.440	0,00	0	0	609.127.643	0	0	0	0			609.127.643,00	0,00%	0,00%	21,07%	
		3 20.03 2.03 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Rakyat	100	%	29.790.944.700	100,00		3.300.000.140	100,00	%	3.031.730.440	0	0	0	609.261.003						0,00	609.261.003,00	0,00%	0.000.000.000	0,00%	20,07%
		3 20.03 2.03 02	Pemeliharaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	%	943.913.400	100		26.000.000	26,00	%	4.912.363	0,00	0	0,00	1.274.631						26,00	1.274.640,00	26,00%	26.079.400	26,00%	4,90%
																					Rata-rata capaian kinerja:		0,00%		26,27%		
																					Prioritas kinerja:	Sangat	Rendah				
																					Pagu Tersedia						
																					Pagu Penghematan		Sumber Pelaksanaan Pengujian Hak Pemeliharaan Pasar Kantor Rakyat. TW III				
		3 20.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Bahasan harga kebutuhan pokok/barang penting	6,10	%	914.966.100	4,21		190.446.652	4,19	%	94.007.643	4,79	0.472.366	7,00	13.453.364		0				11,79	13.925.730,00	5,00	93.000.000	5,00%	4,76%
7		3 20.04 2.03	Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distrik Kabupaten/Kota	Prakiraan permintaan bahan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat distrik kabupaten/kota	100	Unit	21.415.000	20,00		12.000.000	20,00	Unit	2.100.000	0		1	500.000						5,00	500.000,00	5,00%	14.000.000	5,00%	4,76%
		3 20.04 2.03 03	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prakiraan permintaan harga pure pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	100	%	840.000.100	117,00		170.000.600	119,00	Unit	80.994.262	12	0.472.366	13	13.014.454						24,00	13.486.794,00	24,00%	79.000.000	24,00%	94,04%
		3 20.04 2.03 05	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	100	Unit	149.123.000	20,00		12.000.000	20,00	Unit	937.000	0		1	500.000						5,00	500.000,00	5,00%	14.000.000	5,00%	4,76%
																					Rata-rata capaian kinerja:		98,00%		98,70%		



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 761/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem;

Dipindai dengan CamScanner

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamSc

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 732/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

Dipindai dengan CamSca

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana KerjaPerangkat DaerahTahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.

Dipindai dengan CamSca

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diAmlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 761/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Bidang Koperasi	1. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Koperasi.
6.	Kelompok Kerja Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)	1. Kepala Bidang Usaha Menengah, kecil dan Mikro (UMKM)pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM).
7.	Kelompok Kerja Bidang Perindustrian	1. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Perindustrian.

Dipindai dengan CamScanner

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
8.	Kelompok Kerja Bidang Perdagangan	1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Perdagangan.
9.	Kelompok Kerja Bidang Metrologi Legal	1 Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem 2.Jabatan Fungsional pada Bidang Metrologi Legal.
10.	PengumpuldanPengolah Data Perencanaan	1. Kepala Sub bagian Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. 2. Kepala Sub bagian Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. 3. Perencana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

Pada Hari ini : **Jumat,** tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima,** bertempat di **Bapeda Kabupaten Karangasem,** telah dilaksanakan Verifikasi **Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Tahun 2025,** dengan hasil sebagai berikut:

LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Kesesuaian		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	**SISTEMATIKA RENJA**					
	BAB I. PENDAHULUAN					
	1.1 Latar Belakang	√		√		Sudah sesuai
	1.2 Landasan Hukum	√			√	• Tambahkan Undang Undang No. 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali • Masih mencantumkan dasar hukum yang sudah tidak berlaku
	1.3 Maksud dan Tujuan	√		√		Sudah sesuai
	1.4 Sistematika Penulisan	√		√		Sudah sesuai
	BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025					
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai TW II	√		√		Ukuran, jenis font serta jarak spasi perlu dibuat konsisten
	2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas	√		√		Sudah sesuai

	dan fungsi perangkat daerah					
	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1 Tujuan dan sasaran	√			√	Belum berisi penomoran tabel
	3.2 Strategi dan arah kebijakan	√		√		Sudah sesuai
	3.3 Program dan Kegiatan	√			√	Bagian atas (header) tabel perlu diatur agar otomatis muncul pada setiap halaman apabila tabel melampaui satu halaman
	BAB IV. PENUTUP	√		√		Sudah sesuai

Tim Verifikasi :

Amlapura, 8 Agustus 2025

PD yang diverifikasi	**Tanda tangan**	**Tim Verifikasi :**	**Tanda Tangan**
1. I Made Puja Suartama, SE.	1.	1. I Nyoman Adi Sudana, SE., M.Si 2. Ni Komang Ayu Aryawati Dewi, SP.	1. 2.

Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem,

Drs. I Gede Loka Santika
Pembina Utama Muda
Nip. 19670613 199403 1 006

Mengetahui
Kepala Bapeda Kab. Karangasem,

I Nyoman Sutirtayasa, .ST., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199703 1 004

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 307/ HK / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 432/HK/2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya oleh Badan Perencanaan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pereaturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nmor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9).
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 22);
24. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 307/ HK / 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 432/HK/2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan
3. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah
4. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan
10. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup
11. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
20. Perubahan Renja Sekretariat Daerah
21. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. Perubahan Renja Badan Perencanaan Daerah
23. Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah
25. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Perubahan Renja Inspektorat Daerah
27. Perubahan Renja Kecamatan Karangasem
28. Perubahan Renja Kecamatan Abang

Dipindai dengan CamScanner

29. Perubahan Renja Kecamatan Kubu
30. Perubahan Renja Kecamatan Bebandem
31. Perubahan Renja Kecamatan Selat
32. Perubahan Renja Kecamatan Rendang
33. Perubahan Renja Kecamatan Sidemen
34. Perubahan Renja Kecamatan Manggis
35. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Dipindai dengan CamScanner

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

DPMPTSP KABUPATEN KARANGASEM

dpmptsp karangasem
Dpmptsp Karangasem
0363 23564
dpmptsp_kabkarangasem
http://dpmptsp.karangasemkab.go.id

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ..... **i**
Daftar Isi ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistimatika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA **7**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra 7
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja 7
B. Evaluasi Capaian Renstra 10
2.2. Isu-Isu penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **18**
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 18
3.2. Strategi dan Kebijakan 21
3.3. Program dan Kegiatan 22

BAB IV PENUTUP **27**

LAMPIRAN

- **Tabel E. 81**
- **Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**
- **Lampiran Renja SIPD**
- **Berita Acara**
- **SK Tim Penyusun Rencana Kerja**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan rencana kinerja tahunan yang didalamnya memuat perubahan rencana kerja tahun 2025, merupakan suatu upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini disusun berdasarkan percepatan strategi dalam pencapaian sasaran serta evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan triwulan I dan II. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan perubahan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Perencanaan suatu program menjelaskan hubungan garis organisasi secara kolektif yang menunjukkan sasaran apa yang hendak dicapai dan bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program dan sasaran tersebut. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi yang nyata untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan telah disusunnya Perubahan Renja tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT MERTADINA, S.STP., MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770510 199601 1 001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan yang ditetapkan sehubungan dengan perubahan rencana kerja pada tahun berjalan. Fungsi Perubahan RENJA adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Perubahan RENJA memuat hasil evaluasi Perubahan Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Perubahan Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian Perubahan RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional mengenai penanaman modal dan pelayanan perizinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Pada pasal 13 menyebutkan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Bahwa berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dalam kontenks tahun 2025 yang melandasi perubahan Renja yaitu :

1. Penyelarasan dengan program prioritas tahun 2025-2029 sehingga menyebabkan perubahan strategi pelaksanaan pencapaian kinerja
2. Inpres 1 tahun 2025
3. Evaluasi triwulan II tahun 2025
4. Pemenuhan kebutuhan dalam rangka menjalan tugas dan fungsi

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Karangasem berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Propinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonedia Nomor 7014);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
12. Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
13. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentng Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9)
27. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
28. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangsem tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Karangasem merumuskan rencana kerja DPMPTSP untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Perubahan Renja adalah sebagai pedoman:

a. menjadi pedoman penyusunan RKAP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
b. menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyajian Perubahan Renja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN PERUBAHAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja sampai tahun 2025
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra

Review evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra, dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Sehubungan dengan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel E.81. Dalam tabel E.81 disajikan capaian renja tahun 2025 sampai dengan triwulan 2.

DPMPTSP Kabupaten Karangasem menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Berikut ini disampaikan ringkasan capaian program yang mendukung:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memuat terdiri dari 6 kegiatan, 19 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok bersifat kesekretariatan. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 4.257.323.534 pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 2.017576.424 atau 47,39%. Capaian Kinerja sebanyak 50% dari dukungan operasional yang direncanakan sebanyak 100%

Kegiatan dalam program ini yang mendukung yaitu :

a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja Perencanaan Daerah capaian dokumen yang disusun pada triwulan II tercapai 50% yaitu Ranwal Renja, Rancangan Renja Akhir Tahun 2025 dan Rancangan Ranwal Perubahan Renja Triwulan II, Pergeseran Anggaran, Penyusunan Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ.

Untuk penyusunan Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ telah selesai dan direview oleh Inspektorat Daerah dengan nilai 79,85 (kategori BB).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian penyelesaian administrasi keuangan pada triwulan II terlaksana 50% berupa pemberian gaji dan tunjangan ASN, verifikasi SPJ, SPP dan SPM serta penyusunan Laporan Keuangan
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian pelayanan administrasi umum pada triwulan II terlaksana 50% berupa penyediaan peralatan listrik, penyediaan logistik kantor, penyediaan barang cetakan, penyediaan bahan bacaan dan penyelenggaraan koordinasi dan konsutansi SKPD.
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah capaian pengadaan barang milik daerah terlaksana 100%, berupa penyediaan peralatan dan mesin yaitu 1 paket mesin antrian dan 2 unit scanner.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada triwulan II terlaksana 50% berupa penyediaan jasa tenaga non asn dalam rangka pengelolaan surat menyurat dan kebersihan, pembayaran tagihan air, listrik, telpon dan internet serta penyediaan alat dan bahan kebersihan.
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah capaian penyediaan pemeliharaan barang milik daerah pada triwulan II terlaksana 50% berupa pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan peralatan dan pembayaran tenaga non asn pengemudi dan satpam.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 2 kegiatan, 3 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan realisasi investasi. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 106.017.500 pada triwulan II belum terealisasi dikarenakan kendala pemilihan penyedia.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 1 kegiatan, 1 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan realisasi investasi. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 52.612.500 pada triwulan II belum terealisasi.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 1 kegiatan, 3 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 442.808.244 pada triwulan II telah terealisasi 129.955.850 atau sebesar 29,35%. Capaian Kinerja sebanyak 97,73% dari dukungan operasional yang direncanakan sebanyak 96%

Kegiatan dalam program ini yang mendukung yaitu Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik capaian jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terealisasi sebesar 97,73%.

Sub kegiatan yang mendukung yaitu Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi/insentif daerah belum terealisasi karena masih menunggu penetapan Perbup fasilitasi/kemudahan berusaha.

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik capaian jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terealisasi sebesar 1.039,63%

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko capaian pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultansi perizinan berusaha sebesar 88,89%

5. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 1 kegiatan, 3 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan realisasi investasi. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 699.522.421 pada triwulan II terealisasi 50.941.900 atau sebesar 7,28%.

Kegiatan dalam program ini yang mendukung yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah capaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebanyak 72 pelaku usaha.

Sub kegiatan yang mendukung yaitu Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha pada triwulan II belum terealisasi. Sub kegiatan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang dihadapi pada triwulan II belum terealisasi. Sub kegiatan pengawasan penanaman modal capaian sub kegiatannya sebanyak 72 kegiatan usaha.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini memuat terdiri dari 1 kegiatan, 1 sub kegiatan, program ini merupakan program yang mendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan program ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 28.165.600 pada triwulan II belum terealisasi.

B. Evaluasi Capaian Renstra

Terhadap sasaran meningkatnya realisasi investasi dengan indikator jumlah realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa banyak jumlah investasi yang telah dipergunakan di Kabupaten Karangasem. Pencapaian terhadap sasaran ini serta pengukurannya secara rinci disampaikan sebagaimana berikut :

Tabel 2.1.
Capaian Sasaran Meningkatnya realisasi investasi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	208.714.000.000	618.431.893.658	296,31%

Realisasi investasi pada triwulan II tahun 2025 sejumlah Rp. 618.431.893.658 terdiri dari realisasi PMDN sejumlah Rp. 300.156.193.313 dan realisasi PMA sejumlah Rp. 318.275.700.345 atau sebesar 296,31% dari target Rp. 208.714.000.000

Tabel 2.2.
Pertumbuhan Realisasi Investasi 2023-2024

Tahun / Jenis Modal	2023	2024	Peningkatan
PMDN	201.308.199.896	119.709.325.932	-40,53
PMA	283.270.180.486	453.881.374.068	60,23
Jumlah	**484.578.380.382**	**573.590.700.000**	**18,37**

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Realisasi Investasi 2024-2025

Tahun / Jenis Modal	2024	Triwulan II Tahun 2025	Peningkatan
PMDN	119.709.325.932	300.156.193.313	150,74
PMA	453.881.374.068	318.275.700.345	-29,88
Jumlah	**573.590.700.000**	**618.431.893.658**	**7,82**

Pertumbuhan realisasi PMDN dari tahun 2024 meningkat pada triwulan II tahun 2025 sebesar 150,74% sedangkan realisasi PMA pada triwulan II tahun 2025 menurun sebesar -29,88%. Namun secara keseluruhan sampai triwulan II tahun 2025 terjadi peningkatan 7,82 dibandingkan tahun 2024. Data realisasi investasi ini disampaikan berdasarkan LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha sehingga sangat tergantung kepada kepatuhan para pelaku usaha PMA maupun PMDN dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya. Peningkatan ini juga tidak terlepas dari peran serta UMKM dalam melaporkan LKPM.

Tingkat daya serap tenaga kerja pada triwulan II sebesar 0,5 dimana jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 266 orang dari 613 jumlah PMA dan PMDN.

Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP.

Hal ini merupakan wujud komitmen DPMPTSP untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui pelaksanaan survey ini diharapkan akan diketahui sejauhmana perkembangan kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) maupun Unit Pelayanan Publik (UPP) dalam pelayanan publik.

Pencapaian terhadap sasaran ini serta pengukurannya secara rinci disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Sasaran II Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,75	84,79	100,05

Untuk sasaran IKM akan dilaksanakan per semster sehingga pada triwulan I belum terdapat data. Namun demikian terhadap sasaran ini didukung oleh dibidang perizinan melaksanakan pelayanan publik dalam penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha. Capaian pelayanan dalam bentuk penerbitan NIB (Nomor Induk

Pengukuran IKM dimaksudkan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Pendekatan dari perspektif publik sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan harus menjadi perhatian penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang disediakan telah memenuhi harapan, kepuasan maupun kebutuhan publik lokal lainnya sebagai penerima layanan.
Dalam upaya mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi pengelolaan pengaduan dan penyampaian informasi perizinan secara berkelanjutan dengan menyiapkan media komunikasi berupa website, media social facebook, sebagai sarana pendukung serta pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha.

2.2. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Karangasem di masa depan, isu-isu

tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan menentukan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan kondisi pelaksanaan program secara umum dapat disampaikan secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu :

Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

Tabel 2.6.
Faktor Pendorong dan Penghambat Program

No.	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan SDM, sarana prasarana pendukung	Perubahan prosedur perpajakan, dan pengadaan barang dan jasa, terbitnya inpres 1 tahun 2025, berkurangnyanya BMD berupa kendaraan roda 4 dikarenakan telah diserahterimakan dengan DLH, Perubahan jadwal penerimaan P3K yang semula dijadwalkan bulan januari menjadi bulan juli 2025.
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Telah ditetapkannya Perda No. 2 Tahun 2024	Pedoman pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2024 belum ada, Masih mengidentifikasi Pengusaha Besar dan UMKM yang memiliki keingginan untuk bekerjasama dalam kemitraan usaha
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Adanya pedoman peraturan dalam penyediaan sarana promosi	Masih proses editing
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dukungan pengembangan aplikasi oleh kementerian sehingga lebih menyederhanakan proses layanan, konsultasi meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperoleh perizinan	sering adanya maintanance sistem sehingga mengganggu pelayanan
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Adanya pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa pengawasan penanaman modal untuk memastikan kepatuhan	kinerja belum terukur karena jadwal input, pelaporan periode pelaporan LKPM TW II (April-Mei) batas waktu pelaporan sampai tgl 10 Juli 2025

No.	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pelaku usaha	
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Adanya sistem digital yang memudahkan dalam pengolahan data sehingga memaksimalkan kesediaan data	-

Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi adalah:

1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal
2. Belum optimalnya kinerja DPMPTSP dalam memberikan pelayanan publik

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan, disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan 1 : Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-3 yaitu Pembangunan daerah mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi. Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem dengan strategi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui meningkatkan realisasi investasi yang diharapkan dapat memberikan multiplayer efect dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan 2 : Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Tujuan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap misi ke-6 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima. Adapun

tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi membangun sistem tata kelola yang terintegrasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan dapat membentuk birokrasi pemerintah yang prima dan responsif ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang penanaman modal.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2025
1.	Mewujudkan peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi	208.714.000.000
2.	Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,75

Beberapa faktor yang menjadi potensi dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

1) DPMPTSP memiliki landasan kelembagaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsi DPMPTSP untuk membantu Bupati dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
2) Memiliki landasan dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Penetapan Standar Operasional Prosedure pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta adanya pendelegasian wewenang dalam

penyelenggaran pelayanan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem No. 61 Tahun 2020.

3) Dukungan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi dengan maksud memperbaiki kemudahan berusaha untuk mempercepat pertumbuhan investasi.
4) Kondisi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Karangasem cukup beragam untuk mendorong realisasi investasi
5) Pengembangan data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman modal yang sesuai dengan trend, perlu adanya informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

1) Realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Karangasem pada tahun 2024 sudah mencapai target, akan tetapi belum maksimal meningkatkan daya serap tenaga kerja
2) Dengan berkembangnya era digital memungkinkan melakukan pekerjaan tanpa langsung melakukan pertemuan merupakan tantangan bagi penyedia layanan pelayanan public untuk menghadirkan pelayanan dengan basis digital.
3) Tantangan dalam pengembangan aplikasi OSS dan Si Cantik Cloud.
   Disini diperlukan sumber daya IT/programmer yang intens untuk pengembangan program serta kerjasama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi karena pengembangan system si cantik cloud berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4) Pemenuhan fasilitas penunjang sesuai kebutuhan masyarakat belum maksimal
5) Masih menggunakan kertas sebagai arsip, DPMPTSP belum memiliki arsip yang terdigitalisasi.

Selain target sasaran yang telah tercantum dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 juga terdapat beberapa target yang mengacu pada target kinerja daerah sebagaimana ditabel berikut :

Tabel 3.2.
Target Indikator Kinerja Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025
1	Jumlah realisasi investasi	208.714.000.000
2	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,75
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	1
4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	213
5	Rasio daya serap tenaga kerja	3,94

3.2. Strategi dan Kebijakan

Adapun strategi dimaksud antara lain:

1. Penyediaan data potensi penanaman modal dalam rangka penyiapan pengembangan iklim penanaman modal
2. Meningkatkan efektivitas promosi, dan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal
3. Perbaikan kualitas Pelayanan Penanaman Modal
4. Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal
5. Perbaikan sistem dan layanan data untuk menunjang pelayanan penanaman modal

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

1. Penyusunan peta potensi peluang penanaman modal
2. Mempromosikan potensi penanaman modal.
3. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman Modal
4. Penyusunan Ranperda kemudahan/fasilitas penanaman modal.
5. Fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha

6. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
7. Koordinasi penerapan sistem aplikasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
8. Menyiapkan sarana dan prasarana
9. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan dukungan terhadap urusan pemerintah daerah lainnya

3.3. Program dan Kegiatan

Berikut adalah Program dan Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai hasil pemetaan

Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal diarahkan untuk menciptakan daya saing dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi sehingga masyarakat akan dihadapkan kepada multiplayer effect yang beragam.

Dari sisi investor peta potensi dan peluang usaha memiliki peranan strategis sebagai bahan informasi dan data juga akan membantu investor dalam membuat kajian yang informatif sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi di Kabupaten Karangasem.

Sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana berikut :

1. **Program Pengembangan iklim penanaman modal**
   - **1.1. Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

     Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota Merupakan upaya lankah strategis untuk mengembangkan iklim penanaman modal dalam bentuk kemitraan dengan UMKM.

2. **Program Promosi Penanaman Modal**
   - **2.1. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal pada tahun 2025 diarahkan pada pembuatan video promosi yang bertujuan untuk menginformasikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Karangasem. Dalam Perubahan Renja Tahun 2025 terdapat perubahan rencana aksi yakni dalam usaha memperkenalkan/menginformasikan potensi peluang usaha di kabupaten maka akan disusun Investment Project Ready to Offer (IPRO) dan Penyusunan Penyusunan profil investasi strategis kabupaten karangasem

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

3.1. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

a. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan kepada pemantauan berupa pengumpulan dan verifikasi LKPM, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah, pengawasan pelaku usaha. Dalam perubahan terdapat penambahan target sehingga menyebabkan penambahan anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menarik minat investasi di Kabupaten Karangasem diperlukan stretegi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi investasi.

Sebagai institusi publik opini masyarakat terhadap pelayanan sangat penting untuk menghadirkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dengan tujuan mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sasaran ini didukung oleh program dan kegitan sebagaimana berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

1.1. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah
b. Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik
c. Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Target kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha, terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha, tersedianya layanan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan serta terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha.

2. Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota

a. Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

3.3. Kegiatan : Administrasi Umum

a. Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

b. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor

c. Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

d. Sub Kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

3.4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

b. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

c. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3.5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

b. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin

3.7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

c. Sub Kegiatan: Pemeliharaan mebel

d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas operasional dalam pencapaian sasaran berupa dukungan tugas-tugas administrasi kesekretariatan, sarana dan prasarana, perencanaan dan administrasi keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, untuk menjamin terlaksananya program-program kegiatan yang tertuang perubahan rencana kerja tahun 2025 serta untuk terwujudnya sinergitas kerja semua unit kerja maka dalam pelaksanaanya memerlukan langkah-langkah strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap unit kerja menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
2. Perubahan Renja Tahun 2025 lebih lanjut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan KUA dan PPAS tahun 2025, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Karangasem
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program

Dengan perubahan RENJA Tahun 2025 yang diharapkan selanjutnya seluruh pegawai memiliki komitmen dalam pelaksanaan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Demikian penyusunan perubahan RENJA DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Amlapura, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,

I Ketut Mertadina,S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Dipindai dengan CamScanner

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**18**	**.01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**100**	**persen**	**6.863.397.348,00**	**100**	**persen**	**6.324.377.853,00**	**- 539.019.495,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**100**	**persen**	**29.701.276,00**	**100**	**persen**	**39.018.368,00**	**9.317.092,00**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	dokumen	29.701.276,00	14	dokumen	39.018.368,00	9.317.092,00	gaji tenaga kontrak
													-	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase penyelesaian administrasi keuangan**	**100**	**persen**	**4.343.641.087,00**	**100**	**persen**	**4.358.646.451,00**	**15.005.364,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	orang/bular	4.343.641.087,00	41	orang/bulan	4.358.646.451,00	15.005.364,00	Impasing, pengurangan gaji P3K digeser ke gaji non asn
													-	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran**	**100**	**persen**	**362.061.230,00**	**100**	**persen**	**303.730.730,00**	**- 58.330.500,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	33.159.400,00	4	paket	36.159.400,00	3.000.000,00	jasa sarana dan prasarana
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	paket	194.056.330,00	15	paket	176.470.530,00	- 17.585.800,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	7.695.500,00	2	paket	6.075.800,00	- 1.619.700,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	6.300.000,00	12	dokumen	6.300.000,00	-	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41	laporan	120.850.000,00	30	laporan	78.725.000,00	- 42.125.000,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah**	**100**	**persen**	**1.046.444.777,00**	**100**	**persen**	**751.052.700,00**	**- 295.392.077,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	269	unit	796.101.977,00	0	unit	-	- 796.101.977,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	unit	250.342.800,00	11	unit	751.052.700,00	500.709.900,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025, Telaah staf No. 007.2.4/400/DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**620.834.836,00**	**100**	**persen**	**419.127.548,00**	**- 201.707.288,00**	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	19.534.184,00	12	laporan	25.278.912,00	5.744.728,00	gaji tenaga kontrak

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	385.118.500,00	12	laporan	302.032.300,00	- 83.086.200,00	Penyesuaian dengan realisasi
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	75.782.152,00	12	laporan	91.816.336,00	16.034.184,00	gaji tenaga kontrak
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	140.400.000,00			-	- 140.400.000,00	penyesuaian gaji tenaga kontrak
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**persen**	**460.714.142,00**	**100**	**persen**	**452.802.056,00**	**- 7.912.086,00**	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	186.778.214,00	9	unit	208.503.852,00	21.725.638,00	Penyesuaian dengan realisasi, Gaji tenaga kontrak
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	unit	20.000.000,00	24	unit	5.000.000,00	- 15.000.000,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	unit	66.375.600,00	50	unit	66.375.600,00	-	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	187.560.328,00	1	unit	172.922.604,00	- 14.637.724,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025, gaji tenaga kontrak
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal**	**8**	**persen**	**7.274.000,00**	**8**	**persen**	**6.754.000,00**	**- 520.000,00**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi**	**1**	**jenis**	**7.274.000,00**	**1**	**jenis**	**6.754.000,00**	**- 520.000,00**	
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2	dokumen	7.274.000,00	2	dokumen	6.754.000,00	- 520.000,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025
													-	
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal**	**51**	**persen**	**54.430.376,00**	**51**	**persen**	**588.897.376,00**	**534.467.000,00**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Banyaknya minat penanaman modal**	**731**	**minat**	**54.430.376,00**	**731**	**minat**	**588.897.376,00**	**534.467.000,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	dokumen	54.430.376,00	3	dokumen	588.897.376,00	534.467.000,00	Penyusunan IPRO, penyusunan profil investasi strategis kabupaten karangasem
													-	
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan**	**96**	**persen**	**276.774.628,00**	**96**	**persen**	**263.647.588,00**	**- 13.127.040,00**	

Kode Rekening					Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang	Alasan
						Indikator	Target Capaian		PAGU	Target Capaian		PAGU		
							Target	Satuan		Target	Satuan			
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota**	**96**	**persen**	**276.774.628,00**	**96**	**persen**	**263.647.588,00**	**- 13.127.040,00**	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	dokumen	13.768.000,00	4	dokumen	13.608.000,00	- 160.000,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	11.000	pelaku usaha	256.544.628,00	11.000	pelaku usaha	243.957.788,00	- 12.586.840,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025, tenaga kontrak
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	36	pelaku usaha	6.462.000,00	120	pelaku usaha	6.081.800,00	- 380.200,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM**	**6**	**persen**	**61.559.276,00**	**6**	**persen**	**435.517.868,00**	**373.958.592,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota**	**Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten**	**65**	**pelaku usaha**	**61.559.276,00**	**120**	**pelaku usaha**	**435.517.868,00**	**373.958.592,00**	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	25	pelaku usaha	8.079.000,00	50	pelaku usaha	121.262.250,00	113.183.250,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025, Penambahan target kinerja, SILPA DAK NF tahun 2024
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40	kegiatan usaha	53.480.276,00	70	kegiatan usaha	314.255.618,00	260.775.342,00	Penambahan target kinerja, gaji tenaga kontrak, SILPA DAK NF tahun 2024
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi**	**94**	**persen**	**18.533.000,00**	**94**	**persen**	**14.533.000,00**	**- 4.000.000,00**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan**	**96**	**persen**	**18.533.000,00**	**96**	**persen**	**14.533.000,00**	**- 4.000.000,00**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	dokumen	18.533.000,00	1	dokumen	14.533.000,00	- 4.000.000,00	SE No.900.1.1/237/ Anggaran/BPKAD/Setda tindak lanjut Inpres 1 Th. 2025
						JUMLAH			**7.281.968.628,00**			**7.633.727.685,00**	**351.759.057,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KARANGASEM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**7.151.060.435,00**	**7.281.968.628,00**	**7.633.727.685,00**	**482.667.250,00**							**7.970.230.110,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.151.060.435,00**	**7.281.968.628,00**	**7.633.727.685,00**	**482.667.250,00**							**7.970.230.110,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**7.151.060.435,00**	**7.281.968.628,00**	**7.633.727.685,00**	**482.667.250,00**							**7.970.230.110,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.866.329.259,00**	**6.863.397.348,00**	**6.324.377.853,00**	**-1.057.919.149,00**							**5.808.410.110,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun*				100 %	100 %	1.750.000,00	29.701.276,00	39.018.368,00	37.268.368,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		47.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	1.750.000,00	29.701.276,00	39.018.368,00	37.268.368,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan*				100 %	100 %	4.253.078.782,00	4.343.641.087,00	4.358.646.451,00	105.567.669,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		3.416.754.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.253.078.782,00	4.343.641.087,00	4.358.646.451,00	105.567.669,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA RETRIBUSI JASA USAHA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.379.754.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	362.867.900,00	362.061.230,00	303.730.730,00	-59.137.170,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		536.732.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33.159.400,00	33.159.400,00	36.159.400,00	3.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	194.863.000,00	194.056.330,00	176.470.530,00	-18.392.470,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			245.932.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.695.500,00	7.695.500,00	6.075.800,00	-1.619.700,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41 Laporan	30 Laporan	120.850.000,00	120.850.000,00	78.725.000,00	-42.125.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*				100 %	- %	1.093.696.177,00	1.046.444.777,00	751.052.700,00	-342.643.477,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				269 Unit	- Unit	840.994.477,00	796.101.977,00	0,00	-840.994.477,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	11 Unit	252.701.700,00	250.342.800,00	751.052.700,00	498.351.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	836.468.600,00	620.834.836,00	419.127.548,00	-417.341.052,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		557.123.860,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.300.000,00	19.534.184,00	25.278.912,00	22.978.912,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.296.836,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	385.118.500,00	385.118.500,00	302.032.300,00	-83.086.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.850.100,00	75.782.152,00	91.816.336,00	63.966.236,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			56.827.024,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	421.200.000,00	140.400.000,00	0,00	-421.200.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	318.467.800,00	460.714.142,00	452.802.056,00	134.334.256,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor DPMPTSP		850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	9 Unit	140.476.300,00	186.778.214,00	208.503.852,00	68.027.552,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	24 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	50 Unit	60.000.000,00	66.375.600,00	66.375.600,00	6.375.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	97.991.500,00	187.560.328,00	172.922.604,00	74.931.104,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal**				**8 %**	**8 %**	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	**6.754.000,00**	**236.726.000,00**							**244.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi*				1 jenis	1 jenis	7.274.000,00	7.274.000,00	6.754.000,00	-520.000,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Calon Pelaku Usaha		122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.274.000,00	7.274.000,00	6.754.000,00	-520.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya*				0 kecamatan	0 kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Calon Pelaku Usaha		122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			122.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal**				**51 %**	**51 %**	**54.430.376,00**	**54.430.376,00**	**588.897.376,00**	**245.569.624,00**							**300.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Banyaknya minat penanaman modal*				731 minat	731 minat	54.430.376,00	54.430.376,00	588.897.376,00	534.467.000,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Calon Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3 Dokumen	54.430.376,00	54.430.376,00	588.897.376,00	534.467.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan**				**96 %**	**96 %**	**174.060.800,00**	**276.774.628,00**	**263.647.588,00**	**535.639.200,00**							**709.700.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota*				96 %	96 %	174.060.800,00	276.774.628,00	263.647.588,00	89.586.788,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku usaha		709.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	13.768.000,00	13.768.000,00	13.608.000,00	-160.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			174.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				11000 Pelaku Usaha	11000 Pelaku Usaha	153.830.800,00	256.544.628,00	243.957.788,00	90.126.988,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				36 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	6.462.000,00	6.462.000,00	6.081.800,00	-380.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penanam modal yang menyampaikan LKPM**				**6 %**	**6 %**	**30.433.000,00**	**61.559.276,00**	**435.517.868,00**	**815.687.000,00**							**846.120.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten*				65 pelaku usaha	120 pelaku usaha	30.433.000,00	61.559.276,00	435.517.868,00	405.084.868,00			-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku usaha		846.120.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				0 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			112.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				25 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	5.204.000,00	8.079.000,00	121.262.250,00	116.058.250,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			412.280.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				40 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha	25.229.000,00	53.480.276,00	314.255.618,00	289.026.618,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan 1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan			321.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi**				**94 %**	**94 %**	**18.533.000,00**	**18.533.000,00**	**14.533.000,00**	**43.467.000,00**							**62.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan*				96 %	96 %	18.533.000,00	18.533.000,00	14.533.000,00	-4.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku usaha		62.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.533.000,00	18.533.000,00	14.533.000,00	-4.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			62.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**7.151.060.435,00**	**7.281.968.628,00**	**7.633.727.685,00**	**482.667.250,00**							**7.970.230.110,00**	

FORMULIR E.81

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN KOTA

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM

PERIODE TAHUN : 2025

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01			Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 persen	27.635.831.867	100	14.751.310.108	100	6.863.397.348	25,00	868.306.293	25,0	1.314.365.089	50,00	2.182.671.382	50,00	16.933.981.490,00	50,00%	61,28%	
01	01			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**100 persen**	**208.701.700**	**100**	**110.473.300**	**100**	**29.701.276**	**7,14**	**9.736.264**	**21,40**	**13.974.396**	**28,54**	**23.710.660**	**28,54**	**134.183.960,00**	**28,54%**	**64,29%**	
01	01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	30 buku	198.391.100	6	34.062.375							-	-	6	34.062.375,00	20,00%	17,17%	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		18	70.187.000	14	29.701.276	1	9.736.264,00	3	13.974.396	4	23.710.660	22	93.897.660,00	366,67%		
01	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	100 buku	4.802.000	13	870.700							-	-	13	870.700,00	13,00%	18,13%	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen		14	2.232.850							-	-	14	2.232.850,00	280,00%		
01	01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	100 buku	4.373.400	16	779.950							-	-	16	779.950,00	16,00%	17,83%	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen		14	1650650							-	-	14	1.650.650,00	280,00%		
01	01	06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	45 buku	1.135.200	9	192.225							-	-	9	192.225,00	20,00%	16,93%	

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggung jawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan		11	497.550							-	-	11	497.550,00	275,00%		
01	02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi keuangan**	**100 persen**	**15.605.644.542**	**100**	**7.172.070.004**	**100**	**4.343.641.087**	**25,0**	**717.671.390**	**25**	**1.024.264.887**	**50,00**	**1.741.936.277**	**50,00**	**8.914.006.281,00**	**50,00%**	**57,12%**	
01	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	15.379.854.942	12	2.386.096.913							-	-	12	2.386.096.913,00	100,00%	15,51%	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/ bulan		21	4.675.656.566	39	4.343.641.087	24	717.671.390,00	24	1.024.264.887	24	1.741.936.277	21	6.417.592.843,00	95,45%		
01	02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	2.250 dokumen	225.789.600	844	36.595.725							-	-	844	36.595.725,00	37,51%	16,21%	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	475 dokumen		3.728	73.720.800							-	-	3728	73.720.800,00	784,84%		
01	**06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran**	**100 persen**	**2.277.085.625**	**100**	**891.496.065**	**100**	**362.061.230**	**25,0**	**38.733.635**	**25**	**63.826.695**	**50,00**	**102.560.330**	**50,00**	**994.056.395,00**	**50,00%**	**43,65%**	
01	06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	2.061 unit	83.000.000	564	19.430.100							-	-	564	19.430.100,00	27,37%	23,41%	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket		8	74.440.000	4	33.159.400			1	14.420.676	1	14.420.676	9	88.860.676,00	225,00%		
01	06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	12 bulan	1.092.439.825	12	147.384.900							-	-	12	147.384.900,00	100,00%	13,49%	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 paket		112	449.204.000	15	194.056.330	2	31.913.635,00	8	34.547.019	10	66.460.654	122	515.664.654,00	259,57%		
01	06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	750 buku	66.500.000	108	6.064.625							-	-	108	6.064.625,00	14,40%	9,12%	
					Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	99.720 lembar		11.745	0							-	-	11745	-	11,78%		

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggung jawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket		12	18105400	2	7.695.500					-	-	12	18.105.400,00	150,00%		
01	06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	9.000 eks	70.000.000	1.125	7.875.000							-	-	1125	7.875.000,00	12,50%	11,25%	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen		120	18.016.600	12	6.300.000			4	1.575.000	4	1.575.000	124	19.591.600,00	258,33%		
01	06	09		Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banyaknya peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	349 kali	965.145.800	52	150.975.440							-	-	52	150.975.440,00	14,90%	15,64%	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 laporan		164	360.799.409	41	120.850.000	6	6.820.000,00	18	13.284.000	24	20.104.000	188	380.903.409,00	361,54%		
01	**07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**480.000.000**	**83,33**	**634.515.196**	**100**	**1.046.444.777**				**0**	**83,33**	**-**	**83**	**634.515.196,00**	**83,33%**	**132,19%**	
01	07			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	25.000.000	0	-	0	-					-	-	0	-	0,00%	0,00%	
01	07			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	22 unit	110.000.000	20	42.800.000	269	796.101.977					-	-	20	42.800.000,00	90,91%	38,91%	
01	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	345.000.000	54	591.715.196	21	250.342.800					-	-	54	591.715.196,00	360,00%	171,51%	
01	**08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**2.732.400.000**	**100**	**1.342.168.930**	**100**	**620.834.836**	**25,0**	**61.677.212**	**25**	**67.509.489**	**50**	**129.186.701**	**50**	**1.471.355.631,00**	**50,00%**	**53,85%**	
01	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat	8.600 surat	310.700.000	3001	49.455.400							-	-	3001	49.455.400,00	34,90%	15,92%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		48	147.560.400	12	19.534.184	3	8.044.176,00	3	8.616.264	6	16.660.440	54	164.220.840,00	450,00%		
01	08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet	7 rekening	2.008.200.000	11	268.540.996							-	-	11	268.540.996,00	157,14%	13,37%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		48	838.815.984	12	385.118.500	3	42.944.684,00	3	42.860.697	6	85.805.381	54	924.621.365,00	450,00%		

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggung jawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01	08	03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	2.457 unit	413.500.000	472	37.796.150							-	-	472	37.796.150,00	19,21%	9,14%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		48	115.836.500	12	75.782.152	3	10.688.352,00	3	16.032.528	6	26.720.880	54	142.557.380,00	450,00%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12	140.400.000											
01	**09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**6.332.000.000**	**100**	**4.600.586.613**	**100**	**460.714.142**	**25,0**	**40.487.792**	**25**	**144.789.622**	**50**	**185.277.414**	**50**	**4.785.864.027,00**	**50,00%**	**75,58%**	
01	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	1.347.600.000	11	187.421.000							-	-	11	187.421.000,00	91,67%	13,91%	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit		40	597.153.614	10	186.778.214	9	20.585.264	9	51.212.146	9	71.797.410	49	668.951.024,00	445,45%		
01	09			Pemeliharaan Mebel	Banyaknya meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara	320 unit	750.000.000	0	0	0	0					-	-	0	-	0,00%		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit		548	400.943.000	50	20.000.000					-	-	548	400.943.000,00	274,00%		
01	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	24 unit	241.000.000	38	37.535.000							-	-	38	37.535.000,00	158,33%	15,57%	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit		212	104.514.100	37	66.375.600			35	18.308.600	35	18.308.600	247	122.822.700,00			
01	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	2 unit	3.993.400.000	1	853.870.119							-	-	1	853.870.119,00	50,00%	21,38%	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		6	2.419.149.780	1	187.560.328	1	19.902.528	1	75.268.876	1	95.171.404	7	2.514.321.184,00	350,00%		
															Rata-rata capaian kinerja (%)	**50,00%**	**31,80%**					
															Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Rendah**					

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggung jawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Faktor Pendorong	**: Ketersediaan SDM, sarana prasarana pendukung**																
					Faktor Penghambat	**: Perubahan prosedur perpajakan, dan pengadaan barang dan jasa**																
						: terbitnya inpres 1 tahun 2025																
						: berkurangnyanya BMD berupa kendaraan roda 4 dikarenakan telah diserahterimakan dengan DLH																
						: Perubahan jadwal penerimaan P3K yang semula dijadwalkan bulan januari menjadi bulan juli 2025																
02			**Meningkatnya realisasi investasi**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal**	**9 persen**	**2.020.461.900**	**147,50**	**212.521.925**	**7**	**7.274.000**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**212.521.925,00**	**0,00%**	**10,52%**	
02	**01**			**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi**	**6 jenis**	**1.260.267.200**	**5**	**208.442.925**	**6**	**7.274.000**		**-**		**-**		**-**	**0**	**208.442.925,00**	**0,00%**	**16,54%**	
02	01	01		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal (SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	8 jenis	714.974.500	5	29.403.025							-	-	5	29.403.025,00	62,50%	4,11%	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen		2	174.080.400							-	-	2	174.080.400,00	200,00%		
02	01	03		Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		545.292.700	2	4.959.500	2	7.274.000					-	-	2	4.959.500,00	0,00%	0,91%	
02	**02**			**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya**	**8 kecamatan**	**760.194.700**	**3**	**4.079.000**	**0**	-		**-**		**-**		**-**	**3**	**4.079.000,00**	**37,50%**	**0,54%**	
02	02	01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Banyaknya RUPM yang tersusun	50 buku	300.000.000	0	0	0	-					-	-	0	-	0,00%	0,00%	
02	02	02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Banyaknya buku pemetaan potensi dan peluang usaha yang tersusun	50 buku	200.000.000	0	4.079.000							-	-	0	4.079.000,00	0,00%	2,04%	

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	50 buku	260.194.700	25	0							-	-	25	-	50,00%		
					Jumlah Peta Potensi Investasi	1 dokumen		3	311.146.372	1						1	-	4	311.146.371,75	400,00%		
															Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00%	0,00%					
															Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
					Faktor Pendorong	**: Telah ditetapkannya Perda No. 2 Tahun 2024**																
					Faktor Penghambat	**: Pedoman pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2024 belum ada**																
						: Masih mengidentifikasi Pengusaha Besar dan UMKM yang memiliki keingginan untuk bekerjasama dalam kemitraan usaha																
03			**Meningkatnya realisasi investasi**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal**	**51 persen**	**1.753.433.050**	**97,4**	**93.346.828**	**51**	**54.430.376**	**50,82**	**-**		**-**		**-**	**0,00**	**93.346.828,00**	**0,00%**	**5,32%**	
03	**01**			**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Banyaknya minat penanaman modal**	**756 minat**	**1.753.433.050**	**5.739**	**93.346.828**	**731**	**54.430.376**	**1.241**	**-**		**-**		**-**	**0**	**93.346.828,00**	**0,00%**	**5,32%**	
03	01	01		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Banyaknya buku kajian strategi promosi penanaman modal	50 buku	250.000.000	0	0	0	-					-	-	0	-	0,00%	0,00%	
03	01	02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	3 kali	1.503.433.050	1	93.346.828							-	-	1	93.346.828,00	33,33%	6,21%	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen		3	234.842.424	1	54.430.376					-	-	3	234.842.424,00	150,00%		
															Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00%	0,00%					
							-								Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
					Faktor Pendorong	**: Adanya pedoman peraturan dalam penyediaan sarana promosi**																
					Faktor Penghambat	**: Masih proses editing**																
04			**Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan**	**96 persen**	**4.130.670.075**	**87,30**	**1.628.737.851**	**96**	**276.774.628**	**99,47**	**41.000.192**	**99,39**	**90.324.288**	**99,39**	**131.324.480**	**99,39**	**1.760.062.331,00**	**103,53%**	**42,61%**	

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggung jawab
													I		II								
1			2	3	4	5			6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04	**01**			**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota**	**96**	**persen**	**4.130.670.075**	**87,30**	**1.628.737.851**	**96**	**276.774.628**	**99,98**	**41.000.192**	**99,80**	**90.324.288**	**99,80**	**131.324.480**	**99,80**	**1.760.062.331,00**	**103,96%**	**42,61%**	
04	01	05		Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	8	kali	772.261.075	16	65.386.750									16	65.386.750,00	200,00%	8,47%	
					Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						4	13.768.000											
04	01	06		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	96	persen	1.697.348.650	100	240.558.725									100	240.558.725,00	104,17%	14,17%	
					Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan	96	persen	-	100	0		-						-	100	-	104,17%		
					Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	96	persen	-	100	0		-						-	100	-	104,17%		
					Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	96	persen	-	100	0		-						-	100	-	104,17%		
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	880	pelaku usaha		43.520	947.166.450	11.000	256.544.628	3.930	41.000.192	3770	90.324.288	7.700	131.324.480	51.220	1.078.490.930,00			

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggung jawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04	01	07		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha Berbasis resiko	Banyaknya pengaduan yang ditangani	99 pengaduan	182.117.150	2	20.785.550	2							-	2	20.785.550,00	2,02%	11,41%	
					Banyaknya buku SKM yang dicetak	360 buku	-	40	0	40								40	-	11,11%		
					Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultansi perizinan Berusaha melalui sistem elektronik	18 orang		163	94.970.926	36	6.462.000	68		31		99	-	262	94.970.926,00	1455,56%		
04	01	02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	96 persen	1.478.943.200	100	103.840.250								-	100	103.840.250,00	104,17%	7,02%	
					Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	96 persen	-	100	0		-						-	100	-	104,17%		
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200 kegiata usaha		1644	156.029.200							-	1644	156.029.200,00	822,00%		
															Rata-rata capaian kinerja (%)	103,53%	47,45%					
															Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
					Faktor Pendorong	: Dukungan pengembangan aplikasi oleh kementerian sehingga lebih menyederhanakan proses layanan : konsultasi meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperoleh perizinan																
					Faktor Penghambat	: sering adanya maintanance sistem sehingga mengganggu pelayanan																
04			Meningkatnya realisasi investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanam modal yang menyampaikan LKPM	7 persen	2.537.750.450	43,98	817.845.500	6	61.559.276	35,71	13.383.764		30.406.196	93,82	43.789.960,00	93,82	861.635.460,00	1340,29%	33,95%	
04	01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten	300 pelaku usaha	2.537.750.450	1016	817.845.500	65	61.559.276	65	13.383.764	15	30.406.196	65	43.789.960	1081	861.635.460,00	360,33%	33,95%	

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04	01	04		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya											-	-					
04	01	05		Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	150 orang	1.134.906.000	0	302.238.800							-	-	0	302.238.800,00	0,00%	26,63%	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 pelaku usaha			235.687.750	25	8.079.000			15	4.327.100	15	4.327.100		240.014.850,00	0,00%		
04	01	06		Pengawasan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	175 kali	519.980.000	0	2.923.200							-	-	0	2.923.200,00	0,00%	0,56%	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 kegiatan usaha		117	100.037.150	40	53.480.276	65	13.383.764		26.079.096	65	39.462.860	182	139.500.010,00	606,67%		
04	01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	75 buku	882.864.450	0	39.699.900							-	-	0	39.699.900,00	0,00%	4,50%	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24 kegiatan usaha		0	137.258.700							-	-	0	137.258.700,00	0,00%		
							-					Rata-rata capaian kinerja (%)				1563,67%	71,13%					
												Predikat kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
					Faktor Pendorong	: Adanya pengendalian pelaksanaan penanaman modal berupa pengawasan penanaman modal untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha																
					Faktor Penghambat	: kinerja belum terukur karena jadwal input, pelaporan periode pelaporan LKPM TW II (April-Mei) batas waktu pelaporan sampai tgl 10 Juli 2025																

No			Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Tahun 2025 (Yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (Pada Tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Penanggungjawab
												I		II								
1			2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05			Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi	96 persen	199.233.600	95,24	28.229.900	94,00	18.533.000	100,00	-	100,00	10.379.600	100,00	10.379.600	100,00	38.609.500,00	104,17%	19,38%	
05	01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	98 persen	199.233.600	100	28.229.900	96	18.533.000	100	-	100	10.379.600	100	10.379.600	100	38.609.500,00	102,04%	19,38%	
05	01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijnan dan non perijinan	1.350 orang	199.233.600	124	28.229.900							-	-	124,00	28.229.900,00	9,19%	14,17%	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen		1	153.280.700	1	18.533.000				10.379.600	-	10.379.600	0	163.660.300,00	0,00%		
															Rata-rata capaian kinerja (%)	106,38%	56,01%					
															Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
					Faktor Pendorong	: Adanya sistem digital yang memudahkan dalam pengolahan data sehingga memaksimalkan kesediaan data																
					Faktor Penghambat	: -																
									17.923.960.580		7.281.968.628		922.690.249		1.445.475.173		2.368.165.422,00					
															Rata-rata capaian kinerja (%)	303,93%	32,52%			167,61%	24,86%	
															Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Rendah					

Keterangan :

- sangat tinggi
- tinggi
- sedang
- rendah
- sangat rendah

BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

Pada Hari ini : **Jumat**, tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Bapeda Kabupaten Karangasem**, telah dilaksanakan Verifikasi **Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2025**, dengan hasil sebagai berikut:

LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Kesesuaian		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	**SISTEMATIKA RENJA**					
	BAB I. PENDAHULUAN					
	1.1 Latar Belakang	√		√		Sudah sesuai
	1.2 Landasan Hukum	√			√	• Tambahkan Undang Undang No. 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali • Tambahkan Perbup No. 22 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD SB Tahun 2025 • Masih mencantumkan regulasi yang sudah tidak berlaku, agar disesuaikan dengan yang terbaru
	1.3 Maksud dan Tujuan	√		√		Sudah sesuai
	1.4 Sistematika Penulisan	√		√		Sudah sesuai
	BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025					
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai TW II	√		√		Sudah sesuai

Dipindai dengan CamScanner

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Kesesuaian		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
	2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	√		√		Sudah sesuai
	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1 Tujuan dan sasaran	√		√		Sudah sesuai
	3.2 Strategi dan arah kebijakan	√		√		Sudah sesuai
	3.3 Program dan Kegiatan	√			√	Tahun perencanaan masih mencantumkan tahun 2024, agar disesuaikan menjadi tahun 2025
	BAB IV. PENUTUP	√		√		Sudah sesuai

Tim Verifikasi :

Amlapura, 8 Agustus 2025

PD yang diverifikasi	Tanda tangan	Tim Verifikasi :	Tanda Tangan
1. Ni Luh Putu Yayuk Suparmi, SE., MM.	1.	1. I Nyoman Adi Sudana, SE., M.Si 2. Ni Komang Ayu Aryawati Dewi, SP.	1. 2.

Mengetahui
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Karangasem,

I Ketut Mertadina, S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Mengetahui
Kepala Bapeda Kab. Karangasem,

I Nyoman Sutirtayasa, ,ST., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199703 1 004

Dipindai dengan CamScanner

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGASEM

BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

Pada Hari ini : **Kamis**, tanggal **Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Bapeda Kabupaten Karangasem**, telah dilaksanakan Verifikasi **Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun 2025**, dengan hasil sebagai berikut:

LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Kesesuaian		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	**SISTEMATIKA RENJA**					
	BAB I. PENDAHULUAN					
	1.1 Latar Belakang	√		√		Sudah sesuai
	1.2 Landasan Hukum	√			√	• Tambahkan Undang Undang No. 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali • Tambahkan Perbup No. 22 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD SB Tahun 2025 • Masih mencantumkan regulasi yang sudah tidak berlaku, agar disesuaikan dengan yang terbaru
	1.3 Maksud dan Tujuan	√		√		Sudah sesuai
	1.4 Sistematika Penulisan	√		√		Sudah sesuai
	BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025					

	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai TW II	√		√		Sudah sesuai
	2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	√		√		Sudah sesuai
	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1 Tujuan dan sasaran	√		√		Sudah sesuai
	3.2 Strategi dan arah kebijakan	√		√		Sudah sesuai
	3.3 Program dan Kegiatan	√		√		Sudah sesuai
	BAB IV. PENUTUP	√		√		Sudah sesuai

Tim Verifikasi :

Amlapura, 7 Agustus 2025

PD yang diverifikasi	**Tanda tangan**	**Tim Verifikasi :**	**Tanda Tangan**
1. Putut Rahayu Agustini, SE.,MM	1.	1. I Nyoman Adi Sudana, SE., M.Si 2. Ni Komang Ayu Aryawati Dewi, SP.	1. 2.
Mengetahui Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kab. Karangasem, **I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT.** Pembina Utama Muda NIP. 19740720 199403 1 003		Mengetahui Kepala Bapeda Kab. Karangasem, **I Nyoman Sutirtayasa, ,ST., MT.** Pembina Utama Muda NIP. 19670805 199703 1 004	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya tersusunlah Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai TW II, memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program, kegiatan dan pendanaan program kegiatan serta memuat penyesuaian strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun 2025, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 7 Agustus 2025
Kepala Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan Kabupaten Karangasem,

I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740720 199403 1 003

DAFTAR ISI

			HAL
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud danTujuan	7
	1.4.	Sistematika Penulisan	8
BAB II	**EVALUASI RENJA TAHUN 2024**		
	2.1.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai TW II	10
	2.2.	Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	16
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		
	3.1.	Tujuan dan Sasaran	24
	3.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	25
	3.3	Program dan Kegiatan	26
BAB IV	**PENUTUP**		36
	LAMPIRAN		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada: a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem untuk 1 (satu) tahun ke depan (Tahun 2025). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renja ini seyogyanya dijadikan acuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2025 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi pada tahun tersebut. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem memuat program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan pada tahun 2025.

Pertimbangan yang menjadi dasar dilaksanakannya Renja perubahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Asumsi keuangan juga mengalami perubahan pada perkiraan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dan DBH (Dana Bagi Hasil). Oleh karenanya maka Dinas Pertanian menyusun Perubahan Renja Tahun 2025.

Renja Perubahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan juga didasarkan adanya penyesuaian-penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan agar selaras dengan RPJMD/Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201520 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penggarusutamaan Gender;
14. Permendagri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024 – 2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Derah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun

2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

34. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
36. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD SB Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
37. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 781/HK/2024 Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Pada Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Karangasem.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk menyediakan dokumen rencana kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang memuat tentang perubahan-perubahan terhadap Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025 sesuai perkembangan keadaan yang ada sehingga dapat menjadi arah dalam mewujudkan target kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan perubahan Renja ini adalah untuk:

a) Menjadi pedoman penyusunan RKAP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
b) Menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pasal 361 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Renja Perubahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang pertimbangan dilakukannya perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum/peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja perubahan per Bab

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai TW II

Memuat capaian sasaran Renja tahun 2025, capain program dan kegiatan Renja tahun 2025.

2.2 Isu-isu Penting yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Memuat permasalahan- permasalahan yang dihadapi.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Memuat penyusunan tujuan dan sasaran dan indikatornya.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat penyesuain strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja.

3.3 Program dan Kegiatan

Memuat perubahan program dan kegiatan serta perubahannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai TW II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah (1) Program Penanganan Kerawanan Pangan rata-rata capaian kinerja pada TW II sangat tinggi, pelaksanaan kegiatan telah sesuai jadwal yang direncanakan; (2) Program Pengawasan Keamanan Pangan Pangan rata-rata capaian kinerja pada TW II sudah sangat tinggi karena kegiatan PSAT telah dilaksanakan di bulan Maret, tinggal pelaksanaan tahap terakhir di bulan Oktober. (3) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap rata-rata capaian kinerja pada TW II sudah tinggi, kegiatan sosialisasi dan pendampingan kelompok telah dilaksanakan. (4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya rata-rata capaian kinerja pada TW II juga sudah sangat tinggi, kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. (5) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat rata-rata capaian kinerjanya masih sangat rendah. Kegiatan pemberdayaan KWT dan demplot sekolah masih dalam proses pelaksanaan kegiatan. (6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian rata-rata capaian kinerjanya masih sangat rendah karena terdapat beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya untuk dilakukan pergeseran di perubahan reguler. (7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian rata-rata capaian kinerjanya sudah sangat tinggi, pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. (8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner rata-rata capaian kinerjanya sudah sangat tinggi, (9) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian rata-rata capaian kinerjanya sudah tinggi, pelaksanaan kegiatan menyesuaikan bulan tanam kegiatan tanaman pangan dan telah sesuai dengan rencana. (10) Program Perizinan Usaha Pertanian rata-rata capaian kinerjanya sangat rendah, keterlambatan dalam pelaksanaan

kegiatan dan akan diselesaikan pada triwulan ke III. (11) Program Penyuluhan Pertanian rata-rata capaian kinerjanya sedang, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan. (12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota rata-rata capaian kinerjanya tinggi, pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana.

2.1.1. Capaian Sasaran Renja Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem menetapkan 5 (Lima) sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Bagi Krama Karangasem, Meningkatnya Diversifikasi dan Optimalisasi Potensi Sumber Daya Pangan Lokal, Meningkatnya Kualitas Hasil Pertanian Krama Karangasem, Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian Krama Karangasem, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Jumlah dana yang dianggarkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sebesar Rp. 27.743.922.887,00 dengan realisasi belanja triwulan II sebesar Rp. 10.871.326.104 (34,93%) dengan capaian fisik sebesar 36,72%. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan akan disajikan dalam Tabel 2.1 (Terlampir). Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran, rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Krama Karangasem

No	Indikator Sasaran	Target Renstra/RPJMD	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (TW II)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase stok pangan aman	100%	100 %	100 %	100 %	100%	-	-%
2	Indeks Ketahanan Pangan	79,5	79,5	83,97	106 %	80	-	-%

ANALISA:

Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Krama Karangasem

Hasil pemantauan ketersediaan pangan utama menggambarkan suatu kondisi dimana ketersediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Karangasem pada kondisi yang cukup dalam arti bahwa capaian konsumsi bahan pangan pokok minimal 104,47 Kg setara beras per kapita per tahun tersedia atau terpenuhi sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Karangasem dapat terwujud. Berdasarkan data ketersediaan pangan utama tahun 2024 yakni 55.850,07 Ton jika dibandingkan dengan angka kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2024 yakni 52.475,28 Ton maka terdapat surplus senilai 3.374,79 Ton. Atau jika dibandingkan antara nilai ketersediaan pangan utama Kabupaten Karangasem Tahun 2024 senilai 111,19 kg/kapita pertahun lebih tinggi dari konsumsi pangan pokok minimal Kabupaten Karangasem Tahun 2024. Sehingga berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dalam kondisi aman. Sedangkan untuk capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem mencapai 83,97 melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Diversifikasi dan Optimalisasi Potensi Sumber Daya Pangan Lokal.

No	Indikator Sasaran	Target Renstra/ RPJMD	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (TW II)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan per Hektar	0,50	0,5	-4,35	1575%	0,60	-	-%
2	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Hortikultura per Hektar	0,010	0,010	2,14	2420%	0,010	-	-%
3	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan per Hektar	0,018	0,018	13,045	724%	0,018	-	-%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa produktivitas tanaman pangan secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,35%, yang disebabkan penurunan produksi komoditas ubi kayu, kacang tanah dan kedelai. Adanya penurunan luas tanam ubikayu dan ubi jalar yang cukup signifikan akibat peralihan pola tanam ke komoditas hortikultura antara lain Bawang Merah, Cabai dan Sawi selain memang dianggap lebih menguntungkan oleh petani, juga merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencegah inflasi dengan mengembangkan komoditas yang rawan mengalami inflasi. Untuk tanaman unggulan hortikultura secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 2,14% yang didominasi oleh peningkatan produktivitas komoditas sayuran, peningkatan ini dicapai karena mulai tingginya minat petani untuk mengembangkan komoditas hortikultura Untuk tanaman perkebunan terdapat peningkatan produktivitas dari tahun sebelumnya sebesar 13,045%, yang disumbangkan oleh komoditas kelapa, kopi dan vanili. Secara umum beberapa kendala yang dihadapi untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain cuaca ekstrem, banyaknya tanaman yang sudah tua dan sudah tidak produktif lagi serta berkurangnya luas tanam akibat peralihan komoditas maupun peralihan fungsi lahan ke lahan bukan pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut banyak upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten

Karangasem diantaranya melakukan kegiatan gerdal (Gerakan pengendalian) hama tanaman, mitigasi bencana terhadap dampak perubahan iklim, peremajaan tanaman, bantuan sarana-prasarana pertanian, serta pembinaan dan pendampingan ke kelompok/subak.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Karangasem

No	Indikator Sasaran	Target Renstra/RPJMD	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (TW II)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	23,76	23,76	39,25	165%	24,94	-	- %

Untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, telah dilakukan pengolahan untuk beberapa komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Dari data yang tercantum pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP) untuk beberapa produk unggulan rata-rata telah mencapai 39,25%. Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui hilirisasi produk merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian Krama Karangasem

No	Indikator Sasaran	Target Renstra/RPJMD	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (TW II)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Proporsi Angkatan kerja disektor pertanian/lebih ditekankan pada kualitas SDM pertanian	100%	100 %	100 %	100 %	100%	- %	- %

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem terus berupaya membangun kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian untuk mewujudkan percepatan penumbuhan dan penguatan petani muda, melalui pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, sekolah lapang, serta latihan kunjungan.

Pembentukan Komando Strategis Pertanian (Kostra Tani) yang berbasis di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan. Kostra Tani mempunyai peranan yang strategis terutama pada pengelolaan data dan informasi dan pusat pergerakan pembangunan pertanian. Lebih dari itu, fungsi Kostra Tani juga bisa dijadikan sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan.

Pembangunan sub sektor pertanian di Kabupaten Karangasem melalui peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam mewujudkannya maka dilaksanakan program penyuluhan pertanian. Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa penyuluhan, pembinaan, pendampingan, pelatihan serta bimbingan teknis telah dilaksanakan serta telah mencapai target yang ditentukan. Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama antar unsur yang terlibat. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Sasaran 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Indikator Sasaran	Target Renstra/ RPJMD	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (TW II)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	BB	100%	B	-	-

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegrasi tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini tentu dapat terwujudkan akibat adanya kerjasama yang baik dari setiap insan pertanian dalam memaknai serta menjalankan setiap aspek area perubahan dalam reformasi birokrasi secara baik dan penuh kesadaran.

Dalam upaya mencapai target nilai SAKIP-RB yang telah ditargetkan, maka dilaksanakan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk SAKIP dilakukan penilaian Kabupaten tidak per OPD. Sehingga nilai yang ditampilkan dalam tabel merupakan hasil nilai SAKIP Kabupaten Karangasem.

2.2 Isu-isu penting yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan pertanian merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan pertanian yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan pertanian pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, serta adanya permasalahan akibat perubahan kebijakan pemerintah atau belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di daerah terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian. Permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Karangasem diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan yang terjadi pada sektor pertanian, baik skala lokal, regional maupun global dalam 2 (dua) tahun terakhir. Demikian juga dengan sektor perikanan, sub sektor ini menjadi salah satu unggulan di Bali. Kebijakan dan strategi di sektor

Perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dengan berfokus kepada peningkatan kesejahteraan nelayan dan daya saing kelompok, peningkatan produksi perikanan, bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan akan protein asal ikan di Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali pada umumnya.

Pengembangan sektor pertanian, tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi atau ketersediaan komoditas untuk konsumsi pangan. Namun lebih daripada itu, sektor pertanian juga memiliki peran dalam menurunkan angka kemiskinan, penanganan stunting dan pengendalian inflasi. Melalui sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota diharapkan permasalahan kemiskinan sedikit demi sedikit dapat teratasi. Dalam penanganan stunting melalui kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L) diharapkan adanya penurunan angka stunting. Stunting dapat disembuhkan dan diatasi dengan pemberian gizi yang baik setiap harinya pada anak. Karena stunting adalah kondisi gizi buruk yang dialami oleh anak balita. Selain pencegahan kemiskinan, stunting pertanian juga memiliki peranan dalam pengendalian inflasi. Melalui sub kegiatan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman, Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dan pemanfaatan SDG hewan/tanaman diharapkan mampu mengendalikan angka inflasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang telah dilaksanakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kemampuan SDM pertanian dan perikanan.
   Sebagian besar penduduk Kabupaten Karangasem yang berprofesi sebagai petani dan nelayan berada di wilayah perdesaan dengan tingkat pendidikannya masih sangat rendah. Selain itu pengetahuan petani serta nelayan tentang teknologi pertanian dan perikanan juga masih rendah, baik budi daya, panen maupun pasca panen.

2. Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat.

   Meningkatnya kebutuhan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi pertanian terutama bahan pangan pokok, serta ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi bahan pangan pokok beras maupun produk olahannya. Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.

   Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian dan perikanan merupakan faktor utama yang menentukan tercapainya target Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Dibandingan dengan jumlah kebutuhan ketersediaan sarana prasarana masih terbatas. Hal ini dapat menghambat pencapaian target Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

4. Adanya serangan OPT dan penyakit ternak

   Adanya serangan OPT dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya perubahan iklim yang cenderung ekstrim, serta masih rendahnya pengetahuan petani tentang pengenalan iklim dan antisipasi maupun penanggulangan serangan OPT dan penyakit ternak.

5. Produksi/produktivitas pertanian belum optimal.
6. Manajemen pemasaran dan pasca panen belum optimal

   Belum optimalnya penanganan pasca panen berdampak pada mutu produk yang kurang memenuhi standar.

7. Akses dan implementasi teknologi pertanian belum memadai
8. Perlunya pelestarian tanaman lokal/upakara Bali
9. Rendahnya ketersediaan bahan baku tenun
10. Terbatasnya permodalan dan akses pasar

    Petani di Kabupaten Karangasem pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Namun demikian adanya bantuan KUR dari pemerintah cukup membantu

petani dalam permodalan. Sedangkan untuk akses pasar masih perlu ditingkatkan.

11. Masih tingginya fluktuasi harga produk pertanian

    Biaya produksi untuk produk pertanian cenderung mengalami peningkatan, hal ini berpengaruh terhadap harga produk pertanian. Selain itu permintaan pasar yang tinggi yang tidak dibarengi dengan ketersediaan produk juga berpengaruh terhadap harga produk pertanian.

12. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

    Masih belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian dimanasebagian lahan tersebut merupakan lahan kering yang produktivitasnya relatif rendah keberadaan lahan di daerah lereng dataran menengah dan tinggi, sehingga pemilik lahan cenderung menjual lahannya selain untuk infrastruktur juga untuk perumahan/vila, pertokoan/restoran maupun fasilitas lainnya yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.

13. Menurunnya tingkat kesuburan lahan

    Menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat perlakuan tanah yang kurang tepat, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan secara terus menerus, tingginya residu pestisida, serta kurangnya ketersediaan air irigasi.

14. Terbatasnya ketersediaan air irigasi

    Terbatasnya ketersediaan air irigasi salah satunya disebabkan oleh keberadaan lahan di daerah lereng dataran menengah dan tinggi, adanya pendangkalan sungai akibat limbah rumah tangga, serta tidak adanya air resapan. Ketersediaan air yang terbatas juga disebabkan karena penggunaan air diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pariwisata.

Pembangunan Pertanian dalam arti luas merupakan pembangunan yang terkait langsung dengan perencanaan tata ruang dan juga lingkungan hidup. Pembangunan di bidang Pertanian diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup dan juga menjaga rencana tata

ruang yang telah ada, terutama lahan – lahan yang diperuntukkan bagi kawasan Pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2031, maka perencanaan pembangunan bidang pertanian yang tertuang dalam Renstra Dinas juga telah mempertimbangkan wilayah kawasan pembangunan pertanian. Dalam Bab III Bagian Ketiga tentang Kawasan Budidaya, pada Pasal 25 ayat (1) pada poin c telah ditetapkan kawasan peruntukan pertanian dalam arti luas. Dalam Pasal 28 tentang Kawasan Peruntukan Pertanian pada ayat (1) poin a dan b telah ditetapkan kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah berada di wilayah Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem, Karangasem, Manggis, dan Abang dengan luasan lahan 7.011 hektar. Sementara kawasan peruntukan pertanian lahan kering mewilayahi seluruh kecamatan dengan luas lahan mencapai 22.389 hektar. Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang telah ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten harus diamankan serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Karangasem dan petani pada khususnya.

Beberapa lingkungan strategis sektor Pertanian, Pangan dan Perikanan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi adalah:

1. Lahan Pertanian

   Kabupaten Karangasem memiliki potensi ketersediaan lahan pertanian yang terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian lahan potensi tersebut merupakan lahan kering yang produktivitasnya relatif rendah, karena kendala kekurangan air, jenis tanah yang kurang subur serta keberadaan lahan di daerah lereng dataran menengah dan tinggi. Namun apabila keberadaan lahan tersebut dapat direkayasa dengan penerapan inovasi teknologi budidaya dan dukungan infrastruktur pertanian, maka lahan tersebut dapat dirubah menjadi lahan-lahan produktif. Di samping itu dapat pula dilakukan perluasan areal tanam melalui peningkatan intensitas

pertanaman (IP) pada lahan subur beririgasi dengan penggunaan varietas unggul. Potensi tersebut merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman apabila dapat dirancang dengan baik pemanfaatannya. Curah hujan yang cukup tinggi di beberapa wilayah sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Embung dan air tanah serta air permukaan lainnya yang ada sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian. Dari luas wilayah Kabupaten Karangasem, terdapat sekitar 29.400 Ha lahan yang dapat diusahakan untuk Pertanian, terdiri dari 7.011 Ha kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan 22.389 Ha kawasan peruntukan pertanian lahan kering.

2. Sumber Daya Manusia Pertanian

   Penduduk Karangasem yang sebagian besar bermata pencaharian dibidang pertanian dan nelayan yang berada di pedesaan serta memiliki kultur budaya kerja keras, sesungguhnya merupakan potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian dan perikanan. Namun penduduk dimaksud belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung pengembangan pertanian dan perikanan yang berdaya saing.

   Apabila keberadaan penduduk tersebut dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat berkerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar. Masih terdapat cukup potensi meningkatkan kapasitas aneka produksi komoditas pertanian dan perikanan melalui penempatan tenaga penyuluh lapangan di pedesaan dengan didukung oleh stimulus dalam bentuk penyediaan faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

3. Teknologi

   Sesungguhnya saat ini sudah cukup banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani dan nelayan untuk

meningkatkan produksi, kualitas dan kapasitas produksi aneka produk pertanian dan perikanan. Berbagai varietas tanaman dan benih ikan berdaya produksi tinggi; berbagai teknologi pemupukan; pakan; penggunaan alat dan mesin pertanian/perikanan; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sudah cukup banyak tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh petani. Namun demikian aneka paket teknologi ini masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh masyarakat petani dan nelayan, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi dan dimiliki petani dan nelayan seperti: kelembagaan dan skala usaha, keterampilan serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi.

4. Pasar dan Daya Beli Penduduk

   Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem dan Provinsi Bali yang cukup besar merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk pertanian dan perikanan yang dihasilkan petani serta nelayan. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian dan perikanan, kecuali beras dan daging, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian dan perikanan ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu belum adanya jaminan pasar serta stabilitas harga di tingkat petani dan nelayan, berakibat pada keengganan para petani dan nelayan melakukan usaha taninya.

Dari berbagai permasalahan dan dikaitkan dengan lingkungan strategis yang ada, maka beberapa isu strategis di bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah:

1. Pemanfaatan potensi laut seperti produksi garam, perikanan tangkap, serta pariwisata bahari yang masih kurang.
2. Pemanfaatan sumberdaya lahan sebagai sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan darat yang masih kurang.
3. Belum optimalnya infrastuktur pertanian (bangunan fisik penunjang pertanian) untuk memenuhi kebutuhan pangan Krama Karangasem dengan kualitas layak.

4. Adanya alih fungsi lahan dan berkurangnya ruang terbuka hijau dan pencemaran lingkungan.
5. Produksi sektor peternakan dalam penyediaan pangan masih rendah.
6. Belum tersedianya TPI yang memadai guna pemasaran hasil sektor perikanan laut di karangasem.
7. Daya saing ekspor produk pertanian masih rendah.
8. Pemasaran produk pangan dan sandang krama Karangasem masih terbatas.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengembangkan budidaya komoditas di *on-farm* yang sesuai dengan persyaratan agroindustri skala besar, memperbaiki infrastruktur transportasi hingga kesentra produksi, mengembangkan agroindustri skala kecil di pedesaan yang terintegrasi dalam pengembangan yang berskala kawasan. Di samping itu kerja sama antar kawasan untuk menumbuhkan agregat permintaan pasar dalam skala wilayah juga sangat diperlukan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan, yang mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Adapun tujuan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dalam Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Krama Karangasem dengan Kualitas Layak
2. Terwujudnya Swasembada Pangan, Bahan Baku Sandang Krama Karangasem, dan Daya Saing Pertanian

Berdasarkan atas tugas dan pokok fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dan sesuai pola misi pertama Pemerintah Kabupaten Karangasem maka tujuan dan sasaran pembangunan sub sektor Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah sebagai berukut:

I.	**MISI 1**	**Membangun pertanian yang tangguh dan mandiri dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan.**
	Tujuan 1	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Krama Karangasem dengan Kualitas Layak.
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Karangasem.

Tujuan 2	Terwujudnya Swasembada Pangan Krama Karangasem dan Daya Saing Pertanian.
Sasaran	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal;
	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Karangasem;
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian Krama Karangasem.

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun strategi dan arah kebijakan yang diampu oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan antara lain:

1. Strategi : Meningkatkan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
   Arah Kebijakan : Pengembangan pertanian Taman Gumi Banten.
2. Strategi : Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
   Arah Kebijakan : Pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi

			geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.
3.	Strategi	:	Meningkatkan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas dan pertanian organik serta peternakan dan perikanan.
	Arah Kebijakan	:	Pemetaaan potensi pertanian (kacang tanah, kacang merah, dan jagung), perkebunan (salak, jambu mente dan kelapa), peternakan (sapi, babi, ayam dan kambing), kelautan (tangkapan ikan nelayan) dan perikanan (gurami, nila dan lele) di Kabupaten Karangasem
4.	Strategi	:	Menyediakan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport;
	Arah Kebijakan	:	Pemetakan dan pengembangkan potensi industri pengrajin arak Pengembangbiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan anggaran pada program kegiatan dapat digambarkan sebagaimana pada tabel 3.3 (terlampir).

Program dan Kegiatan perubahan yang direncanakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub.Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan

			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			1.3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			1.3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

		1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			1.5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1	Pengadaan Mebel
			1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai

				dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			2.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		2.2 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
			2.2.2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
		2.3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan *Peredaran Benih/Bibit* Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.3.1	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak *dan Hijauan Pakan* Ternak
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
			3.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

		3.2 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	3.2.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 3.2.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3.2.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 3.2.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 3.2.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 3.2.6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 3.2.7 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi

			Rumah Potong Hewan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Mayarakat Veteriner	4.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.1.1 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
		4.2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.2.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
		4.3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.3.1 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan 4.3.2 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	5.1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	5.1.1 Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 5.1.2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman

				Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	6.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
7	Program Penyuluhan Pertanian	7.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7.1.1	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa
			7.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
			7.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
			7.1.4	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

8	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	8.1.1 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
		8.2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	8.2.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
9	Program Penanganan Kerawanan Pangan	9.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.1.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
10	Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.1.1 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.1 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.1.1 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan

			Kelembagaan Nelayan Kecil
12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	12.1 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.1.1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
			12.1.2 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		12.2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12.2.1 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas 12.2.2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (*Satu*) *Daerah* Kabupaten/Kota 12.2.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12.2.4 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini, bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Karangasem.

Renja Perubahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan ini merupakan pedoman penyusunan RKAP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan rancangan DPPA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025. Kaidah pelaksanaan renja perubahan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Penyusunan RKAP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025.
- Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan dalam perubahan Renja ini.

Amlapura, 7 Agustus 2025
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem,

I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740720 199403 1 003

LAMPIRAN

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Kode rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=[9]-[10]-[11]-[12]		14=7+13		15=14/6 x100%		16	
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Rumah Tangga																									
		3	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						31,081,876,950.00				7,559,220,228							10,579,039,846						
		3 09 04	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawa Rawan Pangan (desa tahun pangan prioritas 6 pada Peta FSVA)	25	%	5,679,720,168	30	57,842,300	32	54,758,090.00	4.6	8,809,564	13.00	19,937,028					16.6	28,852,292	47	84,695,592	132.14%	1.49%	Dinas PP	
		3 09 04 2.02	Pengawasan Keamanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	100	%	5,679,720,168	100	57,842,300	100	54,758,090.00	15	8,809,564	35	19,937,028					50.31	28,853,292	150	84,695,592	150.31%	1.49%		
																				Ketercapaian capaian kinerja (%)			54.50%	64.04%					
																				Predikat kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
					Faktor Penghambat Capaian Kinerja															Dalam proses penyusunan SPJ							
					Faktor Pendorong Capaian Kinerja															Sosialisasi tentang kewaspadaan pangan ke 5 kecamatan telah dilaksanakan, expor ikan PSVA akan dilaksanakan, pendampingan bantuan pangan pemerintah							
		3 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PRAT lulus uji lab (kecamatan)	100	%	550,022,000.00	100	90,598,700	100	53,011,960	25	5,729,176	38	26,679,002					63	32,408,178	163	129,006,878	163.00%	19.31%		
		3 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten	100	%	658,022,000.00	100	90,598,700	100	53,011,960	25	5,729,176	38	26,679,002					63	32,408,178	163	129,006,878	163.00%	19.31%		
																				Ketercapaian capaian kinerja (%)			63.00%	64.18%					
																				Predikat kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
					Faktor Penghambat Capaian Kinerja															Kegiatan Uji Lab dilaksanakan kepada 10 komoditas pangan dilaksanakan 2 kali setahun yaitu di bulan Maret dan Oktober							
					Faktor Pendorong Capaian Kinerja															Telah dilaksanakan uji PRAT satu kali di bulan Maret							
		3	UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN																							
		3 25	UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
		3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	5	%	6,720,732,000.00	5	2,177,139,020	4.0	63,835,718	0.47	7,516,264	1.15	17,669,795					1.62	25,205,060	5	2,202,344,080	32.40%	32.77%		
		3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah/kabupaten kota	30	Kelompok	6,720,732,000.00	25	2,177,139,020	27	63,835,718	10	7,516,264	35	17,669,795					45	25,205,060	70	2,202,344,080	233.33%	32.77%		
																				Ketercapaian capaian kinerja (%)			60.00%	39.48%					
																				Predikat kinerja			Cukup	Cukup					
					Faktor Penghambat Capaian Kinerja															Cuaca yang ekstrim disertai hujan angin menyebabkan nelayan sulit melaut, adanya migrasi ikan juga berpengaruh terhadap tangkapan ikan. Seragam anggaran dalam proses penyusunan SPJ							
					Faktor Pendorong Capaian Kinerja															Pendampingan dan Sosialisasi pelaksanaan kegiatan ke kelompok nelayan							
		3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3	%	2,516,072,500.00	3.5	947,002,982.71	3.0	210,783,264	0.27	18,299,616	1.4	96,530,689					1.67	114,830,305.00	4.67	1,061,833,288	155.67%	42.20%		
		3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	100	%	1,035,535,779.00	100	230,537,200	100	91,580,968	13	10,773,582	38	34,835,265					50	45,608,848	150.5	385,245,818	150.50%	37.19%		
		3 25 04 2.04	Pengelolaan Perikanbudidayaan Ikan	Terselenjara Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan	100	%	1,480,537,721.00	100	707,365,783.71	100	119,102,376	10	7,516,264	52	61,695,423					62	69,211,687.00	161.5	776,577,471	161.50%	52.45%		
																				Ketercapaian capaian kinerja (%)			55.57%	54.47%					
																				Predikat kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
					Faktor Penghambat Capaian Kinerja															Persediaan benih udang galah yang kurang kontinue sehingga pembudidaya antre untuk mencanggo benih, sehingga kolam tidak optimal digunakan. Seragam anggaran dalam proses penyusunan SPJ							
					Faktor Pendorong Capaian Kinerja															Pendampingan dan Sosialisasi kegiatan ke kelompok pembudidaya							
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Diversifikasi dan Optimalisasi Potensi Sumber Daya Pangan Lokal																									
		3	UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		3 09	UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																							
		3 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	88.5	Skor	4,475,988,300.00	78	130,666,450	88	422,429,264	5	9,589,352	15	42,870,679					20.0	52,459,031	93	188,125,481	110.73%	4.20%		
		3 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase lembaga Distribusi penyaluran pangan yang diberdayakan	100	%	1,018,050,100.00	100	26,534,900	100	56,008,172	17.0	4,794,176	49	27,307,102					66.8	32,101,278	166	58,636,178	165.76%	5.76%		
		3 09 03 2.04	Pelaksanaan Penanganan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan perkapita/tahun	100	%	3,458,938,200.00	100	103,131,550	100	366,414,172	10	4,794,176	4	15,563,577					14	20,357,753	114	129,489,303	114.25%	3.74%		
																				Ketercapaian capaian kinerja (%)			32.23%	13.42%					
																				Predikat kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
					Faktor Penghambat Capaian Kinerja															Seragam anggaran dalam proses pembuatan SPJ							
					Faktor Pendorong Capaian Kinerja															Telah dilaksanakan sosialisasi kegiatan KPL sebanyak di 9 Klp dan Sosialisasi pengunaka fungisit sebanyak							
		4	UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN																							
		4 27	UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																							
		4 27 02	PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian yang memenuhi standar pertanian	100	%	11,701,170,276.00	100	4,924,672,757.50	100	4,556,618,874	10	74,518,726	10	452,377,322					20	526,896,956.00	120	5,451,568,714	120.00%	46.59%		
		4 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan sarana pertanian	100	%	1,820,983,031.00	100	1,879,123,527.00	100	3,041,890,439	15	34,211,780	27	56,098,705					42	90,310,485	142	1,969,434,012	142.14%	######		
		4 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	9,880,187,245.00	100	1,993,338,377.00	100	1,364,539,773	2	23,769,014	23	312,460,314					25	336,229,328	125	2,329,567,705	124.90%	23.58%		
		4 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	0.00	100	1,052,210,753.50	100	150,188,662	20	16,537,940	52	83,818,203					82	100,156,143.00	182	1,152,366,867	182.29%	0.00%		
																				Ketercapaian capaian kinerja (%)			50.00%	11.33%					
																				Predikat kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
					Faktor Penghambat Capaian Kinerja															Seragam anggaran dalam proses spj							
					Faktor Pendorong Capaian Kinerja															Sosialisasi, Pendampingan kegiatan ke kelompok tani, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai jadwal							
3	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Hasil Perusaha Kinara Kerangapan																									

		2					UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN																												
		2	27				UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																												
		2	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100	%	34,567,189,650.00	100	2,115,671,510.00	100	112,281,036	17.5	19,176,704	52	58,879,332					69.50	77,856,036	170	2,193,527,546	160.50%	6.35%	
		2	27	02	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	100	%	1,560,034,550.00	100	219,901,010	100	112,281,036	17.5	19,176,704	52	58,879,332					69.50	77,856,036	170	297,737,046	169.50%	17.72%	
		2	27	02	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	100	%	32,987,155,000.00	100	1,895,770,500																								
																								Rata-rata capaian kinerja (%)			69.50%	69.50%						
																								Predikat kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
									Faktor Penghambat Capaian Kinerja																											
									Faktor Pendorong Capaian Kinerja		Kegiatan telah terlaksana sesuai jadwal																								
		2	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	95	%	8,091,750,750.00	95	2,432,984,150.00	95	425,020,908	28.0	117,080,396	43	308,603,728					73.0	225,683,034	158	2,722,667,174	175.84%	20.71%	
		2	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Perolehan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Perolehan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	95	%	7,336,555,200.00	95	1,573,884,050	95	320,555,332	28	94,317,192	34	159,979,959					52.3	254,297,151	137	1,650,181,201	165.56%	25.20%	
		2	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Penyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Penyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	%	0.00	100	98,051,500	100	104,352,736	14	22,763,104	44	48,532,769					58	71,383,873	158	169,437,373	157.86%	#DIV/0!	
		2	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1,745,095,550.00	100	759,048,600					0	0																			
																								Rata-rata capaian kinerja (%)			79.94%	79.94%						
																								Predikat kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
									Faktor Penghambat Capaian Kinerja																											
									Faktor Pendorong Capaian Kinerja		Kegiatan berjalan sesuai perencanaan yang ditetapkan, kegiatan telaksanai rutin dilaksanakan sesuai jadwal																								
		2	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	95	%	3,096,751,650.00	95	241,827,216	95	219,509,760	15.0	13,937,590	28.0	78,205,732					42.0	92,143,322	138	333,970,538	145.26%	10.78%	
		2	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	95	%	3,096,751,650.00	95	241,827,216	95	219,509,760	15.0	13,937,590	28.0	78,205,732					42.0	92,143,322	138	333,970,538	145.26%	10.78%	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)			43.28%	43.28%						
																								Predikat kinerja			Tinggi	Tinggi						
									Faktor Penghambat Capaian Kinerja		Serapan anggaran dalam proses spj																								
									Faktor Pendorong Capaian Kinerja		Telah dilaksanakan dilaksanakan kegiatan sesuai rencana antara lain monitoring serangan OPT, Pelaksanaan PPHT pofi, Pengadaan pestisida, pelaksanaan PPHT Kopi, PPHT Jambu Mete, serta Gerdal OPT Kabupa																								
		2	27	06			PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan perizinan usaha pertanian yang difasilitasi	100	%	1,721,560,325.00	100	11,083,800	100	12,000,000	10	0	15	1,500,600					25	1,500,600	125	12,584,400	125.00%	0.72%	
		2	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1,755,560,325.00	100	11,083,800	100	12,000,000	10	0	15	1,500,600					25	1,500,600	125	12,584,400	125.00%	0.72%	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)			25%	13%						
																								Predikat kinerja			Sangat Kurang	Sangat Rendah						
									Faktor Penghambat Capaian Kinerja		Proses pelaksanaan masih pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi, kegiatan akan mulai dilaksanakan di bulan Juli																								
									Faktor Pendorong Capaian Kinerja																											
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian Secara Kuantitatif																																
		2					UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN																												
		2	27				UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																												
		2	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	100	%	9,514,453,325.00	100	1,436,806,778	100	563,013,408	22.20	57,817,512	25	133,796,852					47.20	191,514,464	147	1,628,421,242	147.20%	16.94%	
		2	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluh pertanian	100	%	9,514,453,325.00	100	1,436,806,778	100	563,013,408	22.20	57,817,512	25	133,796,852					47	191,514,464	147	1,628,421,242	147.20%	16.94%	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)			47.20%	34.00%						
																								Predikat kinerja			Sangat Tinggi	Sedang						
									Faktor Penghambat Capaian Kinerja		Serapan anggaran dalam proses spj. Kurangnya reference terhadap realisasinya spj dan pencetakan Dok Non Fisik SOP Penyuluh.																								
									Faktor Pendorong Capaian Kinerja		Kegiatan berjalan sesuai perencanaan																								
5	Sasaran 22 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																																
		2	27				UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																												
		2	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	%	119,491,711,888	100	19,246,266,280	100	24,378,851,528	12	2,688,842,010	30	6,422,951,568					42	9,111,794,578	142	27,958,060,855	142.10%	22.90%	
		2	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	954,817,768.00	100	34,666,400	100		15	8,136,254	18	16,994,137					33	25,130,421	133	79,796,821	133.00%	8.36%	
		2	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	104,961,458,169.00	100	15,026,613,873	100	22,055,808,041	12	2,452,485,022	31	5,918,260,555					65	8,370,745,577	162	24,407,559,452	162.18%	23.25%	
		2	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	5,829,640,750.00	100	705,209,913	100	1,334,126,113	11	98,207,400	17	226,860,040					28	322,067,440	128	1,027,277,359	128.10%	17.59%	
		2	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			0.00	100	276,815,000				0		0					0	0	100	276,815,000	0.00%	0.00%	
		2	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	1,577,221,841.00	100	272,425,138	100	899,900,000	13	81,247,508	35	53,707,466					50	136,954,974	150	409,380,112	150.00%	25.96%	
		2	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100	%	6,134,773,620.00	100	900,335,554	100	608,987,374	8	51,766,815	48	205,129,044					55	256,895,160	155	1,157,232,114	155.56%	18.79%	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)			42.10%	37.24%						
																								Predikat kinerja			Tinggi	Tinggi						
									Faktor Penghambat Capaian Kinerja		Serapan anggaran masih dalam proses SPJ																								
									Faktor Pendorong Capaian Kinerja																											
																								Rata-rata capaian kinerja (%)			46.51%	41.50%						
																								Predikat kinerja			Sangat Tinggi	Tinggi						

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dalam APBD Tahun 2025 dan Rencana Perubahan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	APBD Tahun 2025				RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025				Bertambah/ Berkurang
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				190,192,394				553,743,670		
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				190,192,394				553,743,670		
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola Pangan Harapan	Kab. Karanagsem	88 Skor	82,422,344			88 Skor	434,011,800		
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase lembaga Distribusi Penyaluran Pangan yang diberdayakan	Kab. Karanagsem	80%	29,384,172			80%	60,802,900		
2	09	03	2.01	10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Karanagsem	6 Unit	29,384,172	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	60,802,900	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,418,728
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan perkapita/tahun	Kab. Karanagsem	100%	53,038,172			100%	373,208,900		
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Karanagsem	1 Laporan	53,038,172	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	373,208,900	Pajak Daerah	320,170,728

2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah bebas rawan pangan (desa tahan pangan prioritas 6 pada Peta FSVA)	Kab. Karanagsem	33%	54,758,090			33%	61,875,182		
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapaiannya penanganan kerawanan pangan	Kab. Karanagsem	100%	54,758,090			100%	61,875,182		
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota kerawanan pangan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Karanagsem	1 Dokumen	34,167,010	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	38,911,738	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,744,728
2	09	04	2.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Karanagsem	1 Laporan	20,591,080	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	22,963,444	Pajak Daerah	2,372,364
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT lulus uji lab (keamanan)	Kab. Karanagsem	100%	53,011,960			100%	57,856,688		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten	Kab. Karanagsem	100%	53,011,960			100%	57,856,688		
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanagsem	1 Dokumen	53,011,960	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	57,856,688	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,844,728
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				27,553,730,493				39,850,170,723		
3	25				URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		Kab. Karangasem		275,144,062				1,512,251,082		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Kab. Karangasem	4%	64,185,718			4%	1,250,072,810		
3	25	03	2.02		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karangasem	20 Kelompok	64,185,718			20 Kelompok	1,250,072,810		

3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Karangasem	30 Kelompok	64,185,718	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Kelompok	1,250,072,810	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,185,887,092
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**Kab. Karangasem**	**3%**	**210,958,344**			**3%**	**262,178,272**		
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil**	**Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan kecil**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**91,855,968**			**100%**	**130,415,124**		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Karangasem	18 kelompok	42,098,284	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 kelompok	46,955,512	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	4,857,228
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Karangasem	6 Kelompok	49,757,684	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Kelompok	83,459,612	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah	33,701,928
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan pembudidayaan ikan**	**Tersedianya sarana dan prasarana pembudidaya ikan**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**119,102,376**			**100%**	**131,763,148**		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	0 Unit	-	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	-	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-
3	25	04	2.04	09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	10 unit	119,102,376	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Karangasem	10 unit	131,763,148	Pendapatan Asli Daerah	12,660,772
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**27,278,586,431**				**38,337,919,641**		**2,905,092**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas Tugas Perangkat Daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**24,482,290,504**			**100%**	**24,465,159,043**		**2,905,092**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**44,358,476**			**100%**	**47,263,568**		**2,905,092**

3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karangasem	4 Dokumen	26,377,276	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	32,494,368	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,117,092
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karangasem	1 Dokumen	3,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(500,000)
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karangasem	2 Dokumen	3,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(500,000)
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Karangasem	1 Dokumen	2,352,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,924,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(428,000)
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Karangasem	2 Dokumen	2,352,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1,924,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(428,000)
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karangasem	2 Laporan	6,277,200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4,921,200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(1,356,000)
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**22,035,808,041**			**100%**	**22,207,905,694**		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karangasem	164 Orang/Bulan	21,988,195,989	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164 Orang/Bulan	22,145,759,458	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	157,563,469
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karangasem	2 Laporan	47,612,052	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	62,146,236	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14,534,184
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**1,393,236,613**			**100%**	**1,074,344,149**		

3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	1 Paket	9,876,300	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9,876,300	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	1 Paket	204,956,746	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	265,902,028	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60,945,282
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	1 Paket	1,036,188,183	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	614,103,709	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	(422,084,474)
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karangasem	1 Paket	31,481,200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	23,483,200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(7,998,000)
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karangasem	1 Dokumen	20,734,184	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,478,912	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4,744,728
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karangasem	1 Laporan	90,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	135,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,500,000
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Karangasem**	-	-			-	**76,850,000**		
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karangasem	2 Unit	-	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	5,012,000	Pajak Daerah	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Karangasem	4 Unit	-	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	58,857,000	Pajak Daerah	58,857,000
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Karangasem	26 Unit	-	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	12,981,000	Pajak Daerah	12,981,000

3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**399,900,000**			**100%**	**424,000,000**		
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karangasem	2 Laporan	2,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karangasem	12 Laporan	397,400,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	421,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24,100,000
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**608,987,374**			**100%**	**634,795,632**		
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersamsat dan berizin Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan berizin	Kab. Karangasem	223 unit	415,253,190	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223 unit	415,670,920	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	417,730
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karangasem	370 unit	127,734,184	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370 unit	132,478,912	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,744,728
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karangasem	3 unit	66,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 unit	86,645,800	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20,645,800
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan produksi tanaman kapas sebahai bahan baku tenun, Persentase pemenuhan sarana pertanian yang mendukung pertanian organik**	**Kab. Karangasem**	**1% 100%**	**1,823,656,555**			**1% 100%**	**5,943,265,902**		
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase pengawasan sarana pertanian**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**452,884,120**			**100%**	**3,922,314,079**		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Karangasem	4 laporan	387,007,460	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 laporan	3,814,575,599	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	3,427,568,139

3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Karangasem	8 laporan	65,876,660	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 laporan	107,738,480	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	41,861,820
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**1,209,483,775**			**100%**	**1,368,801,343**		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Karangasem	6 Dokumen	887,379,407	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	876,651,519	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	(10,727,888)
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Karangasem	2 Dokumen	322,104,368	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	492,149,824	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	170,045,456
3	**27**	**02**	**2. 05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**161,288,660**			**100%**	**652,150,480**		
3	27	02	2. 05	09	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kab. Karangasem	120000 Ton	161,288,660	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120000 Ton	652,150,480	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	490,861,820
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**112,281,036**			**100%**	**5,324,439,798**		
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase pengembangan prasarana pertanian**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**112,281,036**			**100%**	**131,259,948**		
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Karangasem	4 Laporan	51,909,368	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	61,398,824	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah	9,489,456
3	27	03	2.01	05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Kab. Karangasem	5736 Ha	60,371,668	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5736 Ha	69,861,124	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase pembanguanan prasarana pertanian**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**0**			**1**	**5,193,179,850**		

3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Karangasem	4 Unit	-	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	522,975,000	Pajak Daerah	522,975,000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Karangasem	12 Unit	-	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	4,006,529,850	Pajak Daerah	4,006,529,850
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Karangasem	1 Unit	-	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	129,450,000	Pajak Daerah	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihar	Kab. Karangasem	0 Unit	-	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	-	Pajak Daerah	-
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Karangasem	0 Unit	-	DAK Fisik-Bidang - Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian,Perikanan ,dan Hewan)	Kab. Karangasem, Manggis, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Karangasem,	0 Unit	-	DAK Fisik-Bidang - Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian,Perikanan ,dan Hewan)	-
3	27	03	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kab. Karangasem	7 Unit	-	Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	534,225,000	Pajak Daerah	
3	27	03	2.02	15	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Karangasem	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Karangasem, Tumbu	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat verteriner**	**Kab. Karangasem**	**95%**	**428,020,868**			**95%**	**1,734,574,424**		
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Karangasem**	**95%**	**323,655,132**			**95%**	**820,174,776**		
3	27	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalan satu (1) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Karangasem	1 Laporan	323,655,132	Dana Bagi Hasil (DBH) DDAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	820,174,776	Dana Bagi Hasil (DBH) DDAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	496,519,644

3	**27**	**04**	**2. 03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Pelayanan Jaa Medik Veteriner dala Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**-**			**100%**	**791,055,000**		
3	27	04	2. 03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Karangasem	0 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD) DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	791,055,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	791,055,000
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**104,365,736**			**100%**	**123,344,648**		
3	27	04	2.04	05	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Kab. Karangasem	1 Unit Usaha	63,807,368	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Usaha	73,296,824	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah	9,489,456
3	27	04	2.04	10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Kab. Karangasem	8 Unit Usaha	40,558,368	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit Usaha	50,047,824	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**Kab. Karangasem**	**95%**	**159,424,060**			**95%**	**231,371,580**		
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota**	**Kab. Karangasem**	**95%**	**159,424,060**			**95%**	**231,371,580**		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Karangasem	0 Ha	59,521,000	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Ha	120,090,300	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	60,569,300
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Karangasem	20 Ha	99,903,060	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Ha	111,281,280	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,378,220
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase permohonan perizinan usaha pertanian yang difasilitasi**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**12,000,000**			**100%**	**12,000,000**		

3	27	06	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**12,000,000**			**100%**	**12,000,000**		
3	27	06	2.01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab. Karangasem	2 Laporan	12,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Daerah	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	12,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Daerah	-
3	27	07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase pelaksanaan penyuluh pertanian**	**Kab. Karangasem**	**100%**	**260,913,408**			**100%**	**627,108,894**		
3	27	07	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian**	**Kab. Karangasem**	**8 Kecamatan**	**260,913,408**			**8 Kecamatan**	**627,108,894**		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Karangasem	8 unit	173,881,448	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 unit	224,755,114	DAK Non Fisik -Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50,873,666
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Karangasem	8 unit	27,017,184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 unit	31,761,912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,744,728
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Karangasem	8 unit	60,014,776	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 unit	68,491,868	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8,477,092
3	27	07	2.01	06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Karangasem	53 Orang	-	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53 Orang	302,100,000	DAK Non Fisik -Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	302,100,000
TOTAL									**27,743,922,687**				**40,403,914,393**		

Amlapura, 7 Agustus 2025
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karangasem

I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740720 199403 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

Tahun 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 307/ HK / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 432/HK/2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya oleh Badan Perencanaan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pereaturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nmor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9).
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 22);
24. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor 432/HK/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 307/ HK / 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 432/HK/2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan
3. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah
4. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan
10. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup
11. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Perubahan Renja Dinas Perhubungan
14. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
20. Perubahan Renja Sekretariat Daerah
21. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. Perubahan Renja Badan Perencanaan Daerah
23. Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah
25. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Perubahan Renja Inspektorat Daerah
27. Perubahan Renja Kecamatan Karangasem
28. Perubahan Renja Kecamatan Abang

Dipindai dengan CamScanner

29. Perubahan Renja Kecamatan Kubu
30. Perubahan Renja Kecamatan Bebandem
31. Perubahan Renja Kecamatan Selat
32. Perubahan Renja Kecamatan Rendang
33. Perubahan Renja Kecamatan Sidemen
34. Perubahan Renja Kecamatan Manggis
35. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dapat diselesaikan pada waktunya.

Rencana Kerja ini berisi arah dan kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam menangani permasalahan dan isu yang dihadapi, yang dituangkan dalam program kegiatan perubahan Tahun 2025. Renja Perubahan ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksanan teknis kesehatan yang dituntut untuk dapat selalu meningkatkan kapasitasnya di bidang kesehatan yang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 belum bisa dipenuhi penganggaannya dan baru bisa dipenuhi di Perubahan Rencana Kerja ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem

dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM.
Pembina Utama Muda
NIP 197106082006041006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2025 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II 6
2.2 Isu-Isu Penting Yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 67
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM 68
3.1 Tujuan dan Sasaran 68
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 68
3.3 Program dan Kegiatan 68
BAB IV PENUTUP 136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya pemenuhan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dalam rangka menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif maka dibutuhkan pula penambahan anggaran di perubahan Tahun 2025 dikarenakan anggaran pada DPA induk Dinas Kesehatan Tahun 2025 belum mengcover seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem yang berhak mendapat jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.

Tambahan pula dengan adanya perubahan pendapatan bersumber dari kapitasi FKTP dan Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun 2025, SILPA BLUD 2024 dan SILPA Jasa Pelayanan ASN dan Non ASN dan Jasa Sarana bersumber dari Retribusi dan

Kapitasi FKTP Tahun 2024, Sisa DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Tahun 2024, Hutang Iuran BPJS 4% Tahun 2024, usulan penambahan anggaran untuk pemeliharaan bangunan dan pengadaan alat kesehatan/laboratorium menyebabkan adanya perubahan pada belanja Dinas Kesehatan, RS Pratama dan puskesmas yang tentunya perlu dianggarkan pada Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tashun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Perubahan Tahun 2025 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah :

1. Pemenuhan kekurangan iuran jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage.
2. Perubahan belanja akibat adanya perubahan pendapatan bersumber kapitasi FKTP dan Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun 2024, SILPA BLUD Tahun 2024, SILPA Jasa Pelayanan ASN dan Non ASN dan Jasa Sarana bersumber dari Retribusi Umum dan Kapitasi FKTP Tahun 2024, serta Sisa DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Tahun 2024.

3. Pembayaran Hutang iuran 4% BPJS Tahun Anggaran 2024.
4. Penyesuaian anggaran antar sub kegiatan, antar rekening belanja dan antar uraian belanja untuk pemenuhan program prioritas daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang/pertimbangan dilakukannya perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum/peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan Renja Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja perubahan per bab

BAB II. EVALUASI RENJA TAHUN 2025

Memuat tentang hasil analisis gambar pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II.

2.2. Isu-isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fugsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

3.1. Tujuan dan Sasaran

Memuat penyesuaian tujuan dan sasaran dan indikatornya

3.2. Strategi dan arah kebijakan

Memuat penyesuaian strategis dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat perubahan program dan kegiatan serta perubahannya

BAB IV.PENUTUP

Memuat tentang catatan penting perubahan Renja dan kaidah pelaksanaan perubahan Renja

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di tahun 2025. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan di Dinas Kesehatan dengan melaksanakan program pelayanan yang bersifat esensial seperti pelayanan SPM, pelayanan gizi dan pelayanan yang bersifat pengembangan.

Berdasarkan data capaian sampai dengan triwulan II tahun 2025, seluruh indikator SPM Bidang Kesehatan telah menunjukkan capaian yang tinggi sampai dengan triwulan II Tahun 2025. Dilihat dari capaian indikator mortalitas di Kabupaten Karangasem, Angka Kematian Ibu tercatat sampai dengan Bulan Juni 2025 sebesar 36,51 per 100.000 kelahiran hidup (target 90 per 100.000 kelahiran hidup), Angka Kematian Bayi tercatat sebesar 14,24 per 1000 kelahiran hidup (target 15 per 1000 Kelahiran hidup), angka ini masih lebih rendah dibanding target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Kemudian dari capaian status gizi masyarakat di Kabupaten Karangasem sampai dengan Bulan Mei 2025 diperoleh prevalensi underweight sebesar 3,64%, stunting sebesar 4,22%, dan wasting sebesar 1,72%.

Dilihat dari capaian indikator Morbiditas di Kabupaten Karangasem, angka kesakitan malaria sampai dengan Bulan Juni 2025 tercatat 0 per 1.000 penduduk (target 0,96 per 1.000 penduduk), angka kesakitan kusta sebesar 0,16 per 10.000 penduduk (target 0,96 per 10.000 penduduk), angka kesakitan demam berdarah dengue sebesar 247 per 100.000 penduduk (target 50 per 100.000 penduduk). Sampai dengan Bulan Juni 2025 tercatat ada 4 penyakit menimbulkan KLB yaitu DBD, Campak, Japanese Encephalitis (JE) dan Rabies.

Berikut disampaikan kinerja Dinas kesehatan sampai dengan triwulan II berdasarkan capaian beberapa indikator dan juga kinerja dari realisasi anggaran seperti yang tertuang dalam tabel 2.1. Adapun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem sebagaimana Tabel 2.1 terdapat 5 Program, 14 Kegiatan dan 212 Sub Kegiatan yang sudah mencapai target, sedangkan 6 Kegiatan dan 134 Sub Kegiatan lainnya belum mencapai target pada Triwulan 2. Hal ini dikarenakan target sub kegiatan mengacu pada Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 salah satunya adalah jumlah dokumen dimana dokumen tersebut baru dihasilkan pada akhir tahun. Beberapa hambatan/kendala dalam meningkatkan kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal dan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya.
2. Kurangnya dukungan lintas sektor dalam program kesehatan.
3. Kurangnya sumber daya manusia kesehatan.
4. Tidak semua kader posyandu bersedia untuk mendistribusikan PMT Lokal utamanya di wilayah-wilayah yang letak geografisnya sulit, terlebih PMT tersebut harus didistribusikan setiap hari.

Upaya yang dilakukan dalam mengurangi hambatan tersebut antara lain :

1. Memberikan pelayanan melalui kunjungan rumah.
2. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui media elektronik maupun media cetak.
3. Melakukan skrining di dalam gedung atau di luar gedung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
4. Meningkatkan peran lintas sektor pada bidang kesehatan.
5. Mengusulkan penambahan SDM Kesehatan melalui pengangkatan PPPK Bidang Kesehatan.
6. Mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan dengan mengacu juknis yang terbit.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Sampai dengan Triwulan II 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(7)+(8)		10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
DINAS KESEHATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel**		**100%**	**884.440.305.081**	**100%**	**100.229.006.372**	**100,00%**	**181.415.568.739**	**22,92%**	**30.153.192.781**	**25,82%**	**41.468.460.796**	**48,74%**	**71.621.653.577**	**Dinas Kesehatan**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**		**100%**	**451.265.576.392**	**100%**	**96.361.530.475**	**100%**	**145.147.921.350**	**28,69%**	**26.760.308.722**	**22,02%**	**31.490.138.109**	**50,71%**	**58.250.446.831**	**Dinas Kesehatan**
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan					1913	145.147.921.350	1.291	26.760.308.722	-	31.490.138.109	1.291	58.250.446.831	Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum yang dilaksanakan dan tersedia dengan baik**		**100%**	**5.993.689.795**	**100%**	**1.272.617.241**	**100%**	**608.699.606**	**18,66%**	**45.123.000**	**23,28%**	**142.435.895**	**41,94%**	**187.558.895**	**Dinas Kesehatan**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	26.518.300	-	2.160.000	-	21.035.721	-	23.195.721	Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1	33.589.430	-	0	-	30.959.454	-	30.959.454	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1	375.616.300	-	42.963.000	-	83.695.720	-	126.658.720	Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	64.136.776	-	0	-	6.405.000	-	6.405.000	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					12	2.354.400	3	0	3	340.000	6	340.000	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					2	106.484.400	-	0	-	0	-	0	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**5.647.199.091**	**100%**	**885.752.832**	**100%**	**1.224.293.065**	**19,15%**	**99.934.662**	**27,14%**	**111.983.520**	**46,29%**	**211.918.182**	**Dinas Kesehatan**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					12	61.986.736	3	18.326.704	3	28.990.056	6	47.316.760	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan					12	546.706.329	3	81.607.958	3	82.993.464	6	164.601.422	Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	dan Listrik yang Disediakan														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	615.600.000	-	0	-	0	-	0	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**5.685.817.253**	**100%**	**1.621.723.474**	**100%**	**848.179.812**	**26,46%**	**74.036.748**	**25,34%**	**185.219.330**	**51,80%**	**259.256.078**	**Dinas Kesehatan**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					36	483.740.984	13	5.701.220	10	101.019.038	23	106.720.258	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					30	152.000.000	15	3.554.000	10	37.805.000	25	41.359.000	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					4	212.438.828	2	64.781.528	-	46.395.292	2	111.176.820	Dinas Kesehatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya program kegiatan yang tersusun**		**100%**	**398.022.550**	**100%**	**87.382.350**	**100%**	**40.696.836**	**25,00%**	**20.548.792**	**25,00%**	**30.823.188**	**50,00%**	**51.371.980**	**Dinas Kesehatan**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					5	65.153.828	2	20.548.792	1	30.823.188	3	51.371.980	Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD**		**100%**	**89.421.968.145**	**100%**	**31.512.124.762**	**100%**	**33.545.778.070**	**19,58%**	**3.153.240.857**	**32,12%**	**9.507.860.754**	**51,70%**	**12.661.101.611**	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	2.195.798.000	-	161.357.307	-	278.863.268	-	440.220.575	Manggis I
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	1.080.000.000	-	109.409.960	-	232.195.940	-	341.605.900	Manggis II
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	3.283.000.000	-	431.344.990	-	1.418.262.319	-	1.849.607.309	Rendang
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	2.673.158.670	-	314.988.511	-	980.774.147	-	1.295.762.658	Sidemen
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	3.082.110.000	-	416.438.650		957.328.039	-	1.373.766.689	Selat
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	3.191.330.000	-	349.154.743	-	634.150.206	-	983.304.949	Bebandem
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	3.472.527.500	-	377.500.270	-	954.443.088	-	1.331.943.358	Karangasem I
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Unit Kerja					1	2.920.042.000	-	25.725.180	-	996.882.401	-	1.022.607.581	Karangasem II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Penunjang Pelayanan														
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	2.690.000.000	-	11.914.603	-	909.566.511	-	921.481.114	Abang I
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	3.126.041.400	-	313.754.450	-	620.696.342	-	934.450.792	Abang II
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	2.855.225.500	-	345.253.940		610.640.904	-	955.894.844	Kubu I
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja					1	2.976.545.000	-	296.398.253	-	914.057.589	-	1.210.455.842	Kubu II
									Rata-rata capaian kinerja program(%)				**48,74%**	**39,48%**	
									Predikat kinerja program				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Menurunnya Prevalensi Stunting**		**12,00 %**	**1.034.884.372.713**	**4,09 %**	**306.633.183.686**	**14,00%**	**122.236.082.682**	**4,30%**	**24.108.587.006**	**39,72%**	**27.907.530.992**	**44,02%**	**52.016.117.998**	**Dinas Kesehatan**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS**		**80%**	**197.457.025.076**	**73,40 %**	**9.890.994.759**	**70%**	**10.868.227.802**	**3,80%**	**75.384.364**	**47,00%**	**1.671.599.881**	**50,80%**	**1.746.984.245**	**Dinas Kesehatan**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					4	1.129.000.000	-	0	-	0	-	0	Manggis I
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					3	687.000.000	-	0	-	0	-	0	Manggis II
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					2	61.000.000	-	0	-	0	-	0	Rendang
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					3	1.154.000.000	-	0	-	0	-	0	Sidemen
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					6	800.000.000	-	0	-	0	-	0	Selat

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					1	110.000.000	-	0	-	0	-	0	Bebandem
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					1	107.000.000	-	0	-	0	-	0	Karangasem I
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					1	70.000.000	-	0	-	0	-	0	Abang I
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					1	107.000.000	-	0	-	0	-	0	Kubu II
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					20	912.122.900	-	200.000		2.696.100	-	2.896.100	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit					13	53.626.000	-	0	-	0	-	0	Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	paket					1	5.553.913.902	-	71.724.464	-	1.637.630.381	-	1.709.354.845	Dinas Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	paket					1	123.565.000	-	3.459.900	-	31.273.400	-	34.733.300	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi**		**75%**	**833.683.739.162**	**100%**	**296.586.540.676**	**65%**	**110.979.825.060**	**7,99%**	**24.013.953.242**	**37,01%**	**26.205.256.411**	**45,00%**	**50.219.209.653**	**Dinas Kesehatan**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5573	97.528.181	1.181	3.455.000	1.391	31.227.300	2.572	34.682.300	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					385	43.296.000	105	5.130.000	167	8.720.000	272	13.850.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					168	45.336.000	14,00	3.813.600	34,00	9.075.600	48	12.889.200	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					503	42.078.000	57	4.764.000	57	5.939.000	114	10.703.000	Rendang

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					418	45.330.000	106	881.059	194	8.671.400	300	9.552.459	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					534	58.206.000	104	0	147	21.456.000	251	21.456.000	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					50	11.440.000	155	900.000	173	2.500.000	328	3.400.000	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					847	33.365.000	199	7.984.000	507	20.011.000	706	27.995.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					405	53.444.000	77	0	144	15.775.000	221	15.775.000	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					375	72.406.400	118	0	92	25.408.000	210	25.408.000	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					466	53.444.000	32	8.843.000	103	14.752.000	135	23.595.000	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					329	40.048.800	74	0	98	18.730.000	172	18.730.000	Kubu I

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					504	33.008.000	103	2.700.800	127	8.217.600	230	10.918.400	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5088	26.472.000	1.277	575.000	1.453	3.090.000	2.730	3.665.000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					332	2.160.000	90	0	157	120.000	247	120.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					147	1.000.000	-	0	19	128.200	19	128.200	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					382	1.000.000	96	0	8	75.000	104	75.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					372	6.000.000	119	916.606	231	905.200	350	1.821.806	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					457	990.000	104	0	127	0	231	0	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					578	2.992.000	142	0	164	0	306	0	Bebandem

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					798	832.000	63	0	-	0	63	0	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					394	832.000	76	0	151	0	227	0	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					375	2.534.400	85	0	98	0	183	0	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					443	3.000.000	45	0		0	45	0	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					306	7.500.000	77	0	189	1.725.000	266	1.725.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					504	2.880.000	119	0	146	383.800	265	383.800	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5088	313.144.613	1.275	1.960.000	1.827	2.738.000	3.102	4.698.000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan	orang					332	3.960.000	106	0	158	60.000	264	60.000	Manggis I

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Kesehatan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					147	700.000	-	0	26	125.000	26	125.000	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					382	700.000	106	0	-	0	106	0	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					372	8.000.000	106	275.800	126	355.000	232	630.800	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					457	1.980.000	104	0	127	229.800	231	229.800	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					578	2.992.000	142	0	166	308.800	308	308.800	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					798	345.600	63	0	-	0	63	0	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	orang					394	962.000	81	0	92		173	0	Karangasem II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					375	2.534.400	85	0	99		184	0	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					443	1.900.000	35	0		0	35	0	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					306	4.500.000	79	0	115	0	194	0	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					504	3.600.000	119	0	144	0	263	0	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					29879	18.548.700	8.165	690.000	8.564	690.000	16.729	1.380.000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					1801	3.780.000	398	0	673	140.000	1.071	140.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	orang					1060	4.100.000	-	0	462	1.787.200	462	1.787.200	Manggis II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Kesehatan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					2734	3.060.000	683	0	5	50.000	688	50.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					1984	11.000.000	426	299.800	577	3.927.800	1.003	4.227.600	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					2952	2.900.000	667	0	743	766.000	1.410	766.000	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					3522	2.992.000	723	0	742	102.400	1.465	102.400	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					4008	14.016.000	785	3.250.000	-	0	785	3.250.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					2737	11.154.000	685	0	304	307.200	989	307.200	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					2327	9.187.200	637	0	582		1.219	0	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	orang					2910	5.780.000	198	0	562	3.520.000	760	3.520.000	Abang II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Kesehatan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					1166	7.140.000	344	0	210		554	0	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					2678	6.000.000	645	0	672	0	1.317	0	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					60489	29.625.000	16.832	1.276.500	16.240	637.500	33.072	1.914.000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					4211	21.390.000	972	1.150.000	817	1.550.000	1.789	2.700.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					2060	16.750.000	-	0	1.346	10.947.200	1.346	10.947.200	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5374	29.940.000	430	2.400.000	430	5.727.600	860	8.127.600	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	orang					4359	15.600.000	1.308	3.503.800	1.254	2.744.000	2.562	6.247.800	Sidemen

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Kesehatan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5702	17.500.000	3.276	5.300.000	937	3.283.800	4.213	8.583.800	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					6747	31.700.000	643	1.750.000	698	4.250.000	1.341	6.000.000	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					10490	41.518.400	108	0	3.390	13.416.000	3.498	13.416.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					4471	14.200.000	1.806	0	556	6.659.600	2.362	6.659.600	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					1494	22.243.200	1.144	0	350	6.900.000	1.494	6.900.000	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5392	25.500.000	461	0	1.798	8.100.000	2.259	8.100.000	Abang II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					4099	33.600.000	3.232	0	-	8.100.000	3.232	8.100.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					6090	26.600.000	2.340	3.200.000	951	4.700.000	3.291	7.900.000	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					128367	133.960.398	39.018	2.042.400	76.772	48.404.940	115.790	50.447.340	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					9360	2.850.000	2.404	0	2.307	160.000	4.711	160.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					4812	2.000.000	-	0	947	393.500	947	393.500	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					12401	2.700.000	3.100	0	3.100	734.400	6.200	734.400	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	orang					10298	2.000.000	2.588	0	2.588	0	5.176	0	Sidemen

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Kesehatan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					12304	1.700.000	3.553	0	3.374	103.200	6.927	103.200	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					14292	2.040.000	9.713	0	10.171	25.000	19.884	25.000	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					16641	3.456.000	1.265	0	2.613	543.600	3.878	543.600	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					10716	9.360.000	2.731	0	893	0	3.624	0	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					9296	1.382.400	2.248	0	2.645		4.893	0	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					10050	7.600.000	3.975	0	2.957	5.280.000	6.932	5.280.000	Abang II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					7247	1.382.400	1.812	0	1.812	0	3.624	0	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					10951	24.376.000	2.739	0	2.830	0	5.569	0	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					60328	91.836.000	17.609	2.165.000	15.088	65.970.000	32.697	68.135.000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					4038	3.480.000	667	0	1.142	200.000	1.809	200.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					2775	4.500.000	-	0	777	1.259.200	777	1.259.200	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					4444	1.800.000	1.458	0	1.458	500.000	2.916	500.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan	orang					6045	4.500.000	2.110	875.400	826	827.800	2.936	1.703.200	Sidemen

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Kesehatan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5420	3.000.000	1.440	0	1.440	766.000	2.880	766.000	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5029	10.488.000	1.677	0	1.725	3.589.800	3.402	3.589.800	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					8898	10.080.000	1.833	0	192	217.500	2.025	217.500	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5130	1.848.000	1.319	0	1.056	387.000	2.375	387.000	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5012	6.912.000	1.795	0	865		2.660	0	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					4245	3.600.000	1.846	0	2.144	972.400	3.990	972.400	Abang II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					4111	2.400.000	862	0	887	0	1.749	0	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					5181	2.400.000	1.508	0	1.369	50.600	2.877	50.600	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					8305	14.457.900	2.590	0	4.808	16.962.200	7.398	16.962.200	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					622	1.080.000	293	0	79	**0**	372	0	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					375	1.000.000	-	0	109	291.900	109	291.900	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					972	1.800.000	243	0	243	350.000	486	350.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan	orang					875	2.000.000	223	0	233	204.800	456	204.800	Sidemen

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Kesehatan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					1254	800.000	427	0	470	153.200	897	153.200	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					679	2.040.000	324	0	158	513.600	482	513.600	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					735	2.240.000	60	0	-	0	60	0	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					387	1.820.000	93	0	96	0	189	0	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					1545	1.382.400	423	0	388		811	0	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					251	200.000	92	0	41	0	133	0	Abang II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					273	1.500.000	69	0	68	0	137	0	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					337	3.600.000	106	0	77	704.000	183	704.000	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					3229	9.661.900	1.369	0	2.172	806.750	3.541	806.750	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					344	1.000.000	223	0	62	100.000	285	100.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					135	1.000.000	-	0	-	0	-	0	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					491	360.000	122	0	122	75.000	244	75.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	orang					269	2.000.000	66	0	67	384.000	133	384.000	Sidemen

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Kesehatan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					320	500.000	206	0	58	101.600	264	101.600	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					287	2.040.000	256	0	119	230.600	375	230.600	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					410	2.240.000	36	0	-	0	36	0	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					164	1.820.000	38	0	42	0	80	0	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					428	1.382.400	149	0	68		217	0	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					87	200.000	73	0	30	0	103	0	Abang II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					97	1.500.000	24	0	24		48	0	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang					197	3.600.000	60	0	45	0	105	0	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					1043	10.095.828	456	0	716	2.042.400	1.172	2.042.400	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					106	19.250.000	8	800.000	24	2.930.000	32	3.730.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					67	30.450.000	10	4.500.000	9	4.100.000	19	8.600.000	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					121	25.800.000	11	2.400.000	11	5.475.000	22	7.875.000	Rendang

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					94	6.200.000	56	1.257.600	35	498.400	91	1.756.000	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					106	11.700.000	30	1.400.000	30	2.054.800	60	3.454.800	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					90	13.340.000	57	500.000	12	2.800.000	69	3.300.000	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					140	17.144.000	35	600.000	19	2.300.000	54	2.900.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					80	25.828.000	24	0	24	12.090.000	48	12.090.000	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					51	7.384.000	38	0	10	2.400.000	48	2.400.000	Abang I

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Jiwa Berat Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					58	8.000.000	5	600.000	9	2.406.400	14	3.006.400	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					68	26.000.000	17	4.000.000	17	6.000.000	34	10.000.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang					62	18.850.000	17	2.400.000	15	3.600.000	32	6.000.000	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					2827	99.231.200	406	0	691	2.880.000	1.097	2.880.000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					146	5.580.000	32	1.000.000	55	1.280.000	87	2.280.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	orang					53	9.100.000	7	1.200.000	7	1.200.000	14	2.400.000	Manggis II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Pelayanan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					114	5.680.000	14	700.000	14	600.000	28	1.300.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					176	11.590.000	22	1.100.000	67	2.000.000	89	3.100.000	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					148	3.368.000	40	300.000	43	2.068.000	83	2.368.000	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					320	5.292.000	15	400.000	51	901.394	66	1.301.394	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					1077	3.590.000	26	400.000	300	1.000.000	326	1.400.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					195	6.586.000	20	0	40	3.300.000	60	3.300.000	Karangasem II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					152	6.384.400	25	0	44	1.400.000	69	1.400.000	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					111	7.500.000	7	600.000	27	3.000.000	34	3.600.000	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					143	5.900.000	13	350.000	15	1.200.000	28	1.550.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					192	4.000.000	18	400.000	37	600.000	55	1.000.000	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					6241	29.265.700	1.257	0	1.362	1.849.500	2.619	1.849.500	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					414	1.700.000	76	0	136	0	212	0	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	orang					180	1.500.000	-	0	-	0	-	0	Manggis II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Pelayanan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					526	1.500.000	131	0		0	131	0	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					453	1.500.000	95	300.000	99	400.000	194	700.000	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					563	1.435.000	114	0	140	0	254	0	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					700	1.500.000	113	0	160	0	273	0	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					1171	3.000.000	722	0	228	585.000	950	585.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					443	208.000	96	0	60	0	156	0	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	orang					405	518.400	82	0	101		183	0	Abang I

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					488	1.500.000	40	0		0	40	0	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					357	1.500.000	77	0	98	0	175	0	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang					541	300.000	146	0	153	49.600	299	49.600	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen					1	55.261.000	-	0		150.000	-	150.000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen					1	117.224.350	-	0		4.403.000	-	4.403.000	Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	245.526.000	-	980.000	-	7.732.950	-	8.712.950	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	81.777.500	-	3.700.000	-	7.450.000	-	11.150.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	71.927.500	0,05	3.900.000	0,09	6.850.000	0	10.750.000	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	84.830.000	-	1.800.000		24.146.000	-	25.946.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					12	160.837.500	3	8.775.400	3	12.900.000	6	21.675.400	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	121.601.000	-	7.700.000		11.600.000	-	19.300.000	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	120.017.500	-	1.400.000	-	10.200.000	-	11.600.000	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	127.673.000	-	2.500.000	1	11.517.500	1	14.017.500	Karangasem I

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	76.430.000	-	0	1	18.456.000	1	18.456.000	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	108.096.000	-	0	-	11.800.000	-	11.800.000	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					12	118.515.000	3	0	3	2.400.000	6	2.400.000	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					12	116.172.000	3	8.200.000	3	8.100.000	6	16.300.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					12	179.429.000	3	7.350.000	3	66.772.500	6	74.122.500	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	26.756.000		460.000	0	2.202.300	-	2.662.300	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	4.000.000	-	300.000	-	800.000	-	1.100.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	600.000	-	0	-	0	-	0	Manggis II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	4.800.000	-	600.000		600.000	-	1.200.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					12	3.500.000	3	100.000	3	300.000	6	400.000	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	1.200.000	-	300.000		300.000	-	600.000	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	14.944.000	-	0	-	1.386.000	-	1.386.000	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	14.580.000	-	500.000	1	4.360.400	1	4.860.400	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	5.750.000	-	0	1	3.300.000	1	3.300.000	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	1.300.000		0	-	1.300.000	-	1.300.000	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	3.450.000	-	300.000	12	2.700.000	12	3.000.000	Abang II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	600.000	-	0		400.000	-	400.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	2.400.000	-	0	-	0	-	0	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	87.504.600	-	3.010.000	0	7.266.125	-	10.276.125	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	8.800.000	-		-	2.000.000	-	2.000.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	10.500.000	0,21	2.200.000	0,19	2.000.000	0	4.200.000	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	16.000.000	-	2.200.000		2.500.000	-	4.700.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					64	11.500.000	16	2.000.000	16	3.150.000	32	5.150.000	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	5.952.000	-	1.000.000		1.500.000	-	2.500.000	Selat

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	7.000.000	-	100.000	-	650.000	-	750.000	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	8.400.000	-	1.000.000	1	2.100.000	1	3.100.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	9.000.000	-	0		850.000	-	850.000	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	14.500.000	-	0	-	4.000.000	-	4.000.000	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	16.200.000	1	1.500.000	1	2.500.000	2	4.000.000	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					12	13.800.000	3	1.700.000	3	4.300.000	6	6.000.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					12	3.350.000	3	0	3	1.500.000	6	1.500.000	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen					1	304.996.980	0	2.697.088	0	9.608.132	-	12.305.220	Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen					1	1.870.000	-	0	-	128.200	-	128.200	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen					1	24.914.000	-	0	-	0	-	0	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen					1	7.081.600	-	200.000		1.531.800	-	1.731.800	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	96.629.600	-	690.000		474.500	-	1.164.500	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	39.752.000	-	1.050.000	-	1.450.000	-	2.500.000	Manggis I
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	40.738.000	-	3.837.900	-	5.286.000	-	9.123.900	Manggis II
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	30.028.500	-	500.000		2.000.000	-	2.500.000	Rendang
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	38.800.000	-	3.150.000	-	6.425.600	-	9.575.600	Sidemen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	50.029.000	-	2.300.000	-	10.143.100	-	12.443.100	Selat

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	40.500.000	-	2.900.000	-	1.300.000	-	4.200.000	Bebandem
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	44.844.000	-	3.050.000	-	8.318.000	-	11.368.000	Karangasem I
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	34.500.000	-	0	-	7.137.000	-	7.137.000	Karangasem II
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	32.200.000	-	0	-	4.100.000	-	4.100.000	Abang I
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	33.800.000	-	0	-	15.600.000	-	15.600.000	Abang II
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	38.200.000	-	3.400.000		5.850.000	-	9.250.000	Kubu I
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	29.850.000	-	1.850.000	-	4.082.000	-	5.932.000	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					98	2.200.000	-	0		0	-	0	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					57	2.200.000	-	0	-	0	-	0	Manggis II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					120	2.400.000	15	300.000	15	600.000	30	900.000	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					84	4.400.000	13	0	12	400.000	25	400.000	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					106	2.200.000	30	400.000	30	700.000	60	1.100.000	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					90	2.200.000	57	400.000	12	600.000	69	1.000.000	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					140	4.000.000	-	0	28	800.000	28	800.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					80	2.400.000	24	0	24	1.500.000	48	1.500.000	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan	Orang					71	2.200.000	38	0	10	800.000	48	800.000	Abang I

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Pelayanan Kesehatan														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					84	1.800.000	32	0		0	32	0	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					60	2.000.000	8	200.000	9	600.000	17	800.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					72	4.400.000	18	900.000	18	1.200.000	36	2.100.000	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang					12	6.740.000	-	0	-	0	-	0	Karangasem I
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					91	2.283.911.899	22	75.135.464	22	291.553.206	44	366.688.670	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					1	75.090.000	-	10.700.000	-	13.450.000	-	24.150.000	Manggis I
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	Dokumen					9	55.050.000	1	6.800.000	1	5.950.000	2	12.750.000	Manggis II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Menular dan Tidak Menular														
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					1	70.067.500	-	7.500.000		12.867.500	-	20.367.500	Rendang
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					12	58.247.500	3	6.000.000		12.950.000	3	18.950.000	Sidemen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					1	79.650.000	-	10.350.000		19.950.000	-	30.300.000	Selat
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					1	74.539.000	-	8.050.000	-	20.100.000	-	28.150.000	Bebandem
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					1	73.250.000	-	10.950.000	-	30.700.000	-	41.650.000	Karangasem I
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					1	69.394.000	-	0	-	29.950.000	-	29.950.000	Karangasem II
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					1	68.144.000	-	0	-	21.475.000	-	21.475.000	Abang I
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit	Dokumen					1	65.500.000	-	8.500.000	-	18.150.000	-	26.650.000	Abang II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Menular dan Tidak Menular														
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					12	73.805.000	3	9.700.000	3	14.650.000	6	24.350.000	Kubu I
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					12	78.639.000	3	12.050.000	3	18.200.000	6	30.250.000	Kubu II
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen					1	88.790.199.664	0	22.267.376.388	0	21.796.636.182	-	44.064.012.570	Dinas Kesehatan
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket					12	20.536.000	-	280.000	-	70.000	-	350.000	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen					1	143.688.800	-	460.000	0	3.030.000	-	3.490.000	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen					1	4.815.299.860	-	316.493.897	0	624.081.699	-	940.575.596	RS Pratama
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	207.726.542	-	25.715.056		30.246.056	-	55.961.112	Manggis I
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	138.400.460	-	11.977.352	-	16.740.528	-	28.717.880	Manggis II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	289.433.840	-	38.765.496		76.700.244	-	115.465.740	Rendang
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	244.626.834	-	30.069.668		42.855.552	-	72.925.220	Sidemen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	447.380.160	-	51.640.112		91.066.168	-	142.706.280	Selat
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	187.998.380	-	30.959.232	-	55.788.848	-	86.748.080	Bebandem
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	211.268.888	-	28.737.144	-	86.627.660	-	115.364.804	Karangasem I
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	283.120.910	-	17.040.660	-	104.570.240	-	121.610.900	Karangasem II
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	191.567.104	-	0	-	76.435.420	-	76.435.420	Abang I
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	148.826.552	-	10.910.440	-	33.305.660	-	44.216.100	Abang II
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					1	234.887.472	-	31.969.232	-	58.955.348	-	90.924.580	Kubu I
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					12	149.989.552	3	12.110.440	3	35.907.100	6	48.017.540	Kubu II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen					1	5.182.078.009	-	738.246.853	-	1.027.884.941	-	1.766.131.794	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen					1	329.214.963	-	9.122.767	-	134.880.396	-	144.003.163	Labkesda
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit					12	45.716.700	-	0	6	0	6	0	Dinas Kesehatan
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan					13	464.884.792	3	3.232.088	6	394.708.132	9	397.940.220	Dinas Kesehatan
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan					1	1.144.000	-	0	-	450.000	-	450.000	Karangasem I
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen					1	23.346.000	-	0	-	1.531.800	-	1.531.800	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen					1	1.344.000	-	0	-	0	-	0	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	orang					562	44.072.612	80	230.000	80	693.500	160	923.500	Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	kesehatan sesuai standar														
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang					77	71.512.704	5	2.272.088	9	3.408.546	14	5.680.634	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang					2.104	428.808.136	404	27.797.552	553	62.832.104	957	90.629.656	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan Malaria yang mendapat pelayanan standar	orang					84	146.500	-	0	-	0	-	0	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang					263	200.000	-	0	-	0	-	0	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang					252	150.000	-	0	-	0	-	0	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang					316	96.000	-	0	-	0	-	0	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang					84	100.000	-	0	-	0	-	0	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	8.587.000	-	2.694.000	-	200.000	-	2.894.000	Manggis I

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	1.388.100	-	0	-	0	-	0	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	1.405.000	-	0	-	0	-	0	Rendang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	655.000	-	0	-	0	-	0	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	1.533.000	-	0	-	744.000	-	744.000	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	8.011.000	-	0	-	0	-	0	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	13.880.000	-	0	-	5.552.000	-	5.552.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	8.328.000	-	0	-	600.000	-	600.000	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	4.164.000	-	0	-	2.082.000	-	2.082.000	Abang I

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					1	6.644.000	-	0	-	2.487.000	-	2.487.000	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					12	4.960.000	3	0	3	500.000	6	500.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					12	10.352.000	3	500.000	3	2.156.000	6	2.656.000	Kubu II
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	236.552.000	-	307.560	-	46.150.390	-	46.457.950	Dinas Kesehatan
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	1.200.000	-	0	-	400.000	-	400.000	Manggis I
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	3.315.900	-	0	-	150.000	-	150.000	Manggis II
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	1.200.000	-	0	-	0	-	0	Rendang
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	1.000.000	-	0	-	0	-	0	Sidemen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	250.000	-	0	-	0	-	0	Selat

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	800.000	-	100.000	-	100.000	-	200.000	Bebandem
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	200.000	-	100.000	-	100.000	-	200.000	Karangasem I
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	323.000	-	0	-	300.000	-	300.000	Karangasem II
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	540.000	-	0	-	0	-	0	Abang I
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					1	600.000	-	0	-	0	-	0	Abang II
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					12	862.000	3	0	3	200.000	6	200.000	Kubu I
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen					12	2.550.000	3	0	3	0	6	0	Kubu II
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	2.400.000	-	0	-	1.200.000	-	1.200.000	Manggis I
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	4.800.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	2.000.000	Manggis II
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	1.200.000	-	0	-	400.000	-	400.000	Rendang

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	2.000.000	-	200.000	-	600.000	-	800.000	Sidemen
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	1.200.000	-	200.000	-	300.000	-	500.000	Selat
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	4.800.000	-	0	-	1.500.000	-	1.500.000	Bebandem
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	2.500.000	-	0	-	1.700.000	-	1.700.000	Karangasem I
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	3.500.000	-	0	-	2.300.000	-	2.300.000	Karangasem II
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	4.400.000	-	0	-	1.600.000	-	1.600.000	Abang I
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	3.600.000	-	600.000	-	1.400.000	-	2.000.000	Abang II
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	1.500.000	-	0	-	1.000.000	-	1.000.000	Kubu I
Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	dokumen					1	4.000.000	-	400.000	-	800.000	-	1.200.000	Kubu II
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data**		**70%**	**1.076.725.400**	**85,86 %**	**115.281.200**	**36,5%**	**59.443.600**	**4,70%**	**2.226.600**	**37,06%**	**7.141.350**	**41,76%**	**9.367.950**	**Dinas Kesehatan**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS														
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen					1	59.443.600	-	2.226.600	-	7.141.350	-	9.367.950	Dinas Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**		**100%**	**2.666.883.075**	**100%**	**40.367.050**	**100%**	**328.586.220**	**0,72%**	**17.022.800**	**37,80%**	**23.533.350**	**38,52%**	**40.556.150**	**Dinas Kesehatan**
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit					20	33.665.900	7	0	12	576700	19	576.700	Dinas Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit					12	161.473.320	3	14.979.800	3	20.747.350	6	35.727.150	Dinas Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit					1	105.735.000	-	818.000	-	2.786.000	-	3.604.000	Labkesda

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	unit					15	27.712.000	1	1.225.000	-	0	1	1.225.000	Dinas Kesehatan
									Rata-rata capaian kinerja program(%)				**314,43 %**	**42,55%**	
									Predikat kinerja program				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi**		**55%**	**1.224.645.175**	**78,00 %**	**993.460.460**	**45%**	**1.142.012.092**	**8,55%**	**337.259.158**	**25,00%**	**62.640.576**	**33,55%**	**399.899.734**	**Dinas Kesehatan**
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota**		**85%**	**127.817.175**	**85,50 %**	**50.420.050**	**75%**	**108.876.092**	**5,28%**	**2.272.088**	**11,75%**	**38.040.976**	**17,03%**	**40.313.064**	**Dinas Kesehatan**
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan	Dokumen					1	108.876.092	0	2.272.088	0	38.040.976	-	40.313.064	Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
	Sumber Daya Manusia Kesehatan														
Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**85%**	**1.096.828.000**	**100,00%**	**943.040.410**	**75%**	**1.033.136.000**	**11,82%**	**334.987.070**	**38,25%**	**24.599.600**	**50,07%**	**359.586.670**	**Dinas Kesehatan**
Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang					165	1.033.136.000	85	334.987.070	0	24.599.600	85	359.586.670	Dinas Kesehatan
									Rata-rata capaian kinerja program(%)				**74,56%**	**35,02%**	
									Predikat kinerja program				**Sedang**	**Sangat Rendah**	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat**		**75%**	**2.712.774.044**	**84,60%**	**459.901.420**	**65%**	**512.173.266**	**0,29%**	**4.277.600**	**18,94%**	**89.505.675**	**19,23%**	**93.783.275**	**Dinas Kesehatan**
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha	**Persentase apotik,toko obat,toko alat kesehatan dan optikal,usaha**		**100%**	**398.361.552**	**97,00%**	**28.848.800**	**100%**	**89.706.900**	**0,21%**	**4.277.600**	**48,47%**	**5.012.900**	**48,68%**	**9.290.500**	**Dinas Kesehatan**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**mikro obat tradisional melaksanakan kegiatannya sesuai ijin yang diterbitkan**														
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen					1	89.706.900	-	4.277.600	-	5.012.900	-	9.290.500	Dinas Kesehatan
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki izin**		**75%**	**37.252.626**	**100,00%**	**7.272.800**	**65%**	**3.590.000**	**0,00%**	**0**	**4,30%**	**0**	**4,30%**	**0**	**Dinas Kesehatan**
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen					1	3.590.000	-	0	-	0	-	0	Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase sertifikat yang diterbitkan untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**80%**	**1.384.452.866**	**41,40 %**	**245.499.250**	**70%**	**198.430.166**	**0,94%**	**0**	**7,00%**	**78.475.975**	**7,94%**	**78.475.975**	**Dinas Kesehatan**
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen					70	198.430.166	0	0	26	78.475.975	26	78.475.975	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase tindak lanjut pemeriksaan post market**		**80%**	**892.707.000**	**100,00%**	**178.280.570**	**70%**	**220.446.200**	**0,00%**	**0**	**16,00%**	**6.016.800**	**16,00%**	**6.016.800**	**Dinas Kesehatan**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit					30	220.446.200	0	0	-	6.016.800	-	6.016.800	Dinas Kesehatan
									Rata-rata capaian kinerja program(%)				**29,58%**	**18,31%**	
									Predikat kinerja program				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**		**100%**	**3.012.224.045**	**100%**	**752.439.250**	**100%**	**423.638.573**	**1,72%**	**11.589.600**	**18,52%**	**42.473.180**	**20,24%**	**54.062.780**	**Dinas Kesehatan**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan**		**5**	**134.549.567**	**2**	**317.667.400**	**1**	**24.019.000**	**0**	**0**	**0**	**3.677.250**	**0**	**3.677.250**	**Dinas Kesehatan**
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen					1	24.019.000	0	0	-	3.677.250	-	3.677.250	Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase RT yang berPHBS**		**84%**	**1.760.664.000**	**90,10 %**	**368.370.050**	**82%**	**228.307.373**	**0,89%**	**980.000**	**16,37%**	**6.555.000**	**17,26%**	**7.535.000**	**Dinas Kesehatan**
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen					1	228.307.373	0	980.000	0	6.555.000	-	7.535.000	Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase UKBM yang aktif**		**50%**	**1.117.010.478**	**76,67 %**	**66.401.800**	**50%**	**171.312.200**	**4,28%**	**10.609.600**	**39,18%**	**32.240.930**	**43,46%**	**42.850.530**	**Dinas Kesehatan**
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	39.455.000	0	1.225.000	0	16.116.830	-	17.341.830	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	10.680.000	-	600.000	-	0	-	600.000	Manggis I
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	4.879.800	-	1.204.800	-	1.887.500	-	3.092.300	Manggis II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	7.132.000	-	0	-	0	-	0	Rendang
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					12	4.360.000	3	0	-	2.152.000	3	2.152.000	Sidemen
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	4.179.600	-	300.000	-	2.104.800	-	2.404.800	Selat
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	6.724.000	-	0	-	250.000	-	250.000	Bebandem
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	21.606.000	-	0	-		-	0	Karangasem I
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	Dokumen					1	8.380.000	-	0	-	250.000	-	250.000	Karangasem II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	10.979.000	-	0	-	0	-	0	Abang I
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	14.378.800	-	0		0	-	0	Abang II
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					12	30.379.000	3	4.000.000	3	6.000.000	6	10.000.000	Kubu I
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					1	8.179.000	-	3.279.800	-	3.479.800	-	6.759.600	Kubu II
													-	0	
									Rata-rata capaian kinerja program(%)				**20,24%**	**12,76%**	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Lokasi
									I		II				
									Predikat kinerja program				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
									Rata-rata capaian kinerja keseluruhan (%)				51,17%	40,62%	
									Predikat kinerja keseluruhan				Rendah	Sangat Rendah	

2.2. Isu-Isu Penting Yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem tahun 2025 sampai dengan triwulan II belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang belum mencapai setengah dari target yang ditentukan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan II dapat digambarkan kondisi kesehatan di Kabupaten Karangasem adalah munculnya kejadian luar biasa akibat adanya kematian akibat penyakit rabies pada warga Kabupaten Karangasem.

Isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat tahun 2025 berdasarkan hasil kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Adanya kematian akibat penyakit rabies dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa untuk penanganannya.
2. Tingginya angka kesakitan demam berdarah dengue.
3. Masih rendahnya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga, serta Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
4. Adanya kematian ibu dan balita.
5. Adanya balita stunting.

Dari beberapa isu strategis di atas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tahun 2025 sebagai perwujudan dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan periode tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

3.1. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dalam pembangunan di Kabupaten Karangasem mengacu RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 Bidang Kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah :

1. Meningkatnya kesehatan keluarga
2. Meningkatnya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya sumber daya kesehatan

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem periode 2021-2026 sesuai dengan tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1 : Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Karangasem periode 2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan krama Karangasem sejahtera	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pendekatan banjar, RT.RW dan keluarga
Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Mendorong kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan	Penyediaan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang kesehatan	Pembinaan dan pengawasan fasilitas penunjang kesehatan

3.3. Program dan Kegiatan

Guna menyesuaikan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN maka dibutuhkan pergeseran anggaran pada Perubahan 2025 untuk kebutuhan gaji PPPK yang dilantik Tahun 2025. Juga dibutuhkan anggaran untuk pembayaran hutang Iuran BPJS 4%

untuk Tahun 2024. Perubahan belanja juga terjadi akibat penambahan anggaran bersumber Silpa DAK Fisik dan Silpa DBHCHT pada Perubahan Tahun 2023.

Untuk memenuhi pembayaran iuran jaminan kesehatan masyarakat bagi peserta PBPU dan BP Kelas III dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Karangasem Tahun 2025, maka dibutuhkan penambahan anggaran untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 Bulan Desember 2025. Tambahan pula dengan adanya perubahan pendapatan bersumber dari kapitasi FKTP dan Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun 2025 serta SILPA Jasa Pelayanan ASN dan Non ASN dan Jasa Sarana bersumber dari Kapitasi FKTP Tahun 2024, menyebabkan adanya perubahan pada belanja RS Pratama dan puskesmas yang tentunya perlu dianggarkan pada Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Selain itu, menindaklanjuti usulan dari UPTD Kesehatan RS Pratama, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan terkait pemenuhan peralatan kesehatan serta rehabilitasi/pemeliharaan bangunan kesehatan maka perlu direncanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025.

Untuk itu dirumuskanlah rencana program dan kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 yang terdiri dari 5 Program, 18 Kegiatan, dan 374 Sub Kegiatan yang secara rinci tertuang dalam Tabel 3.1. Adapun jumlah sub kegiatan dimaksud diperoleh dengan menjumlahkan seluruh sub kegiatan yang ada pada sekretariat, bidang, Puskesmas, RS Pratama dan Laboratorium Kesehatan, sub kegiatan yang sama dihitung satu namun dalam pelaksanaannya nanti tetap diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing untuk sub kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas dan RS Pratama.

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Anggaran Perubahan Tahun 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5		6	7		8	9
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**303.582.137.948**			**315.859.692.031**	**12.277.554.083**
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**303.582.137.948**			**315.859.692.031**	**12.277.554.083**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**		%	100	**181.546.510.131**	%	100	**182.533.982.908**	987.472.777
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya program kegiatan yang tersusun**		**%**	**100**	**65.153.828**	**%**	**100**	**82.205.104**	**17.051.276**
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Laporan	5	65.153.828	Laporan	5	82.205.104	17.051.276
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**		**%**	**100**	**145.147.921.350**	**%**	**100**	**140.294.466.737**	**-4.853.454.613**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	orang/ bulan	1913	145.147.921.350	orang/ bulan	1845	140.294.466.737	- 4.853.454.613
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum yang dilaksanakan dan tersedia dengan baik**		**%**	**100**	**715.184.006**	**%**	**100**	**719.228.639**	**4.044.633**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	paket	1	26.518.300	paket	1	30.703.300	4.185.000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	paket	0	-	paket	6	78.473.433	78.473.433
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Kesehatan	paket	1	33.589.430	paket	1	34.789.430	1.200.000
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	paket	1	375.616.300	paket	1	391.486.900	15.870.600
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	paket	1	64.136.776	paket	1	64.136.776	-
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	dokumen	12	2.354.400	dokumen	12	2.354.400	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	laporan	2	212.968.800	laporan	2	117.284.400	- 95.684.400
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**100**	**1.224.293.065**	**%**	**100**	**627.021.977**	**- 597.271.088**
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	laporan	12	61.986.736	laporan	12	80.315.648	18.328.912
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan	laporan	12	546.706.329	laporan	12	546.706.329	-
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	laporan	1	615.600.000	laporan	0	-	- 615.600.000
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**%**	**100**	**848.179.812**	**%**	**100**	**1.149.248.818**	**301.069.006**
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kesehatan	unit	36	483.740.984	unit	36	700.783.714	217.042.730
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan	unit	30	152.000.000	unit	30	152.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	unit	4	212.438.828	unit	4	296.465.104	84.026.276
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD**		**%**	**100**	**33.545.778.070**	**%**	**100**	**39.661.811.633**	**6.116.033.563**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Manggis I	unit kerja	1	2.195.798.000	unit kerja	1	2.580.534.525	384.736.525
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Manggis II	unit kerja	1	1.080.000.000	unit kerja	1	1.213.589.541	133.589.541
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Rendang	unit kerja	1	3.283.000.000	unit kerja	1	3.559.294.857	276.294.857
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sidemen	unit kerja	1	2.673.158.670	unit kerja	1	3.023.683.848	350.525.178
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan	Selat	unit kerja	1	3.082.110.000	unit kerja	1	3.517.528.449	435.418.449
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Bebandem	unit kerja	1	3.191.330.000	unit kerja	1	3.998.089.706	806.759.706

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Karangasem I	unit kerja	1	3.472.527.500	unit kerja	1	4.182.826.247	710.298.747
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Karangasem II	unit kerja	1	2.920.042.000	unit kerja	1	3.268.074.007	348.032.007
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Abang I	unit kerja	1	2.690.000.000	unit kerja	1	3.697.450.892	1.007.450.892
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Abang II	unit kerja	1	3.126.041.400	unit kerja	1	3.416.867.476	290.826.076
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kubu I	unit kerja	1	2.855.225.500	unit kerja	1	3.798.878.544	943.653.044
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kubu II	unit kerja	1	2.976.545.000	unit kerja	1	3.404.993.541	428.448.541
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Menurunnya Prevalensi Stunting**		**%**	**5,0**	**119.957.803.886**	**%**	**5,0**	**131.245.612.828**	**11.287.808.942**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan RS**		**%**	**75**	**9.168.227.802**	**%**	**75**	**12.175.956.076**	**3.007.728.274**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Manggis I	Unit	4	1.129.000.000	Unit	4	1.129.000.000	-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Manggis II	Unit	3	687.000.000	Unit	3	687.000.000	-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Rendang	Unit	2	61.000.000	Unit	2	61.000.000	-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Sidemen	Unit	3	1.154.000.000	Unit	3	1.154.000.000	-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Selat	Unit	6	800.000.000	Unit	6	800.000.000	-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Bebandem	Unit	1	110.000.000	Unit	1	110.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Karangasem I	Unit	1	107.000.000	Unit	1	107.000.000	-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Abang I	Unit	1	70.000.000	Unit	1	70.000.000	-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kubu II	Unit	1	107.000.000	Unit	1	107.000.000	-
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	Unit	20	112.122.900	Unit	20	912.122.900	800.000.000
1	02	02	02.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Unit	13	53.626.000	Unit	13	123.626.000	70.000.000

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	paket	1	4.653.913.902	paket	1	6.791.642.176	2.137.728.274
1	02	02	02.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke FasilitasKesehatan	Dinas Kesehatan	paket	1	123.565.000	paket	1	123.565.000	-
1	**02**	**02**	**02.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitas kesehatan UKM dan UKP yang terakreditasi**		**%**	**70**	**110.401.546.264**	**%**	**70**	**118.681.626.932**	**8.280.080.668**
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	5573	97.528.181	orang	5573	97.528.181	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis I	orang	385	43.296.000	orang	385	43.296.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis II	orang	168	45.336.000	orang	168	45.336.000	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rendang	orang	503	42.078.000	orang	503	42.078.000	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidemen	orang	418	45.330.000	orang	418	45.330.000	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Selat	orang	534	58.206.000	orang	534	58.206.000	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bebandem	orang	50	11.440.000	orang	50	11.440.000	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	847	33.365.000	orang	847	33.365.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	405	53.444.000	orang	405	53.444.000	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang I	orang	375	72.406.400	orang	375	72.406.400	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang II	orang	466	53.444.000	orang	466	53.444.000	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu I	orang	329	40.048.800	orang	329	40.048.800	-
1	02	02	02.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu II	orang	504	33.008.000	orang	504	33.008.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	5088	26.472.000	orang	5088	26.472.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis I	orang	332	2.160.000	orang	332	2.160.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis II	orang	147	1.000.000	orang	147	1.000.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rendang	orang	382	1.000.000	orang	382	1.000.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidemen	orang	372	6.000.000	orang	372	6.000.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Selat	orang	457	990.000	orang	457	990.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bebandem	orang	578	2.992.000	orang	578	2.992.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	798	832.000	orang	798	832.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	394	832.000	orang	394	832.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang I	orang	375	2.534.400	orang	375	2.534.400	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang II	orang	443	3.000.000	orang	443	3.000.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu I	orang	306	7.500.000	orang	306	7.500.000	-
1	02	02	02.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu II	orang	504	2.880.000	orang	504	2.880.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	5088	313.144.613	orang	5088	313.144.613	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis I	orang	332	3.960.000	orang	332	3.960.000	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis II	orang	147	700.000	orang	147	700.000	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rendang	orang	382	700.000	orang	382	700.000	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidemen	orang	372	8.000.000	orang	372	8.000.000	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Selat	orang	457	1.980.000	orang	457	1.980.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bebandem	orang	578	2.992.000	orang	578	2.992.000	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	798	345.600	orang	798	345.600	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	394	962.000	orang	394	962.000	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang I	orang	375	2.534.400	orang	375	2.534.400	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang II	orang	443	1.900.000	orang	443	1.900.000	-
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu I	orang	306	4.500.000	orang	306	4.500.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu II	orang	504	3.600.000	orang	504	3.600.000	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	29879	18.548.700	orang	29879	18.548.700	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis I	orang	1801	3.780.000	orang	1801	3.780.000	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis II	orang	1060	4.100.000	orang	1060	4.100.000	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rendang	orang	2734	3.060.000	orang	2734	3.060.000	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidemen	orang	1984	11.000.000	orang	1984	11.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Selat	orang	2952	2.900.000	orang	2952	2.900.000	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bebandem	orang	3522	2.992.000	orang	3522	2.992.000	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	4008	14.016.000	orang	4008	14.016.000	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	2737	11.154.000	orang	2737	11.154.000	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang I	orang	2327	9.187.200	orang	2327	9.187.200	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang II	orang	2910	5.780.000	orang	2910	5.780.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu I	orang	1166	7.140.000	orang	1166	7.140.000	-
1	02	02	02.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu II	orang	2678	6.000.000	orang	2678	6.000.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	60489	29.625.000	orang	60489	29.625.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis I	orang	4211	21.390.000	orang	4211	21.390.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis II	orang	2060	16.750.000	orang	2060	16.750.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rendang	orang	5374	29.940.000	orang	5374	29.940.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidemen	orang	4359	15.600.000	orang	4359	15.600.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Selat	orang	5702	17.500.000	orang	5702	17.500.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bebandem	orang	6747	31.700.000	orang	6747	31.700.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	10490	41.518.400	orang	10490	41.518.400	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	4471	14.200.000	orang	4471	14.200.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang I	orang	1494	22.243.200	orang	1494	22.243.200	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang II	orang	5392	25.500.000	orang	5392	25.500.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu I	orang	4099	33.600.000	orang	4099	33.600.000	-
1	02	02	02.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu II	orang	6090	26.600.000	orang	6090	26.600.000	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	128367	133.960.398	orang	128367	133.960.398	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis I	orang	9360	2.850.000	orang	9360	2.850.000	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis II	orang	4812	2.000.000	orang	4812	2.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rendang	orang	12401	2.700.000	orang	12401	2.700.000	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidemen	orang	10298	2.000.000	orang	10298	2.000.000	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Selat	orang	12304	1.700.000	orang	12304	1.700.000	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bebandem	orang	14292	2.040.000	orang	14292	2.040.000	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	16641	3.456.000	orang	16641	3.456.000	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	10716	9.360.000	orang	10716	9.360.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang I	orang	9296	1.382.400	orang	9296	1.382.400	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang II	orang	10050	7.600.000	orang	10050	7.600.000	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu I	orang	7247	1.382.400	orang	7247	1.382.400	-
1	02	02	02.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu II	orang	10951	24.376.000	orang	10951	24.376.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	60328	91.836.000	orang	60328	91.836.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis I	orang	4038	3.480.000	orang	4038	3.480.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis II	orang	2775	4.500.000	orang	2775	4.500.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rendang	orang	4444	1.800.000	orang	4444	1.800.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidemen	orang	6045	4.500.000	orang	6045	4.500.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Selat	orang	5420	3.000.000	orang	5420	3.000.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bebandem	orang	5029	10.488.000	orang	5029	10.488.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	8898	10.080.000	orang	8898	10.080.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	5130	1.848.000	orang	5130	1.848.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang I	orang	5012	6.912.000	orang	5012	6.912.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang II	orang	4245	3.600.000	orang	4245	3.600.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu I	orang	4111	2.400.000	orang	4111	2.400.000	-
1	02	02	02.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu II	orang	5181	2.400.000	orang	5181	2.400.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	8305	14.457.900	orang	8305	14.457.900	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis I	orang	622	1.080.000	orang	622	1.080.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis II	orang	375	1.000.000	orang	375	1.000.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rendang	orang	972	1.800.000	orang	972	1.800.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidemen	orang	875	2.000.000	orang	875	2.000.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Selat	orang	1254	800.000	orang	1254	800.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bebandem	orang	679	2.040.000	orang	679	2.040.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	735	2.240.000	orang	735	2.240.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	387	1.820.000	orang	387	1.820.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang I	orang	1545	1.382.400	orang	1545	1.382.400	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang II	orang	251	200.000	orang	251	200.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu I	orang	273	1.500.000	orang	273	1.500.000	-
1	02	02	02.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu II	orang	337	3.600.000	orang	337	3.600.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	3229	9.661.900	orang	3229	9.661.900	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis I	orang	344	1.000.000	orang	344	1.000.000	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Manggis II	orang	135	1.000.000	orang	135	1.000.000	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rendang	orang	491	360.000	orang	491	360.000	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar	Sidemen	orang	269	2.000.000	orang	269	2.000.000	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Selat	orang	320	500.000	orang	320	500.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bebandem	orang	287	2.040.000	orang	287	2.040.000	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	410	2.240.000	orang	410	2.240.000	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	164	1.820.000	orang	164	1.820.000	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang I	orang	428	1.382.400	orang	428	1.382.400	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Abang II	orang	87	200.000	orang	87	200.000	-
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu I	orang	97	1.500.000	orang	97	1.500.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kubu II	orang	197	3.600.000	orang	197	3.600.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	1043	10.095.828	orang	1043	10.095.828	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Manggis I	orang	106	19.250.000	orang	106	19.250.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Manggis II	orang	67	30.450.000	orang	67	30.450.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Rendang	orang	121	25.800.000	orang	121	25.800.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Sidemen	orang	94	6.200.000	orang	94	6.200.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Selat	orang	106	11.700.000	orang	106	11.700.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Bebandem	orang	90	13.340.000	orang	90	13.340.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Karangasem I	orang	140	17.144.000	orang	140	17.144.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Karangasem II	orang	80	25.828.000	orang	80	25.828.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Abang I	orang	51	7.384.000	orang	51	7.384.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Abang II	orang	58	8.000.000	orang	58	8.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kubu I	orang	68	26.000.000	orang	68	26.000.000	-
1	02	02	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kubu II	orang	62	18.850.000	orang	62	18.850.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	2827	99.231.200	orang	2827	109.311.200	10.080.000
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Manggis I	orang	146	5.580.000	orang	146	5.580.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Manggis II	orang	53	9.100.000	orang	53	9.100.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rendang	orang	114	5.680.000	orang	114	5.680.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Sidemen	orang	176	11.590.000	orang	176	11.590.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Selat	orang	148	3.368.000	orang	148	3.368.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Bebandem	orang	320	5.292.000	orang	320	5.292.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	1077	3.590.000	orang	1077	3.590.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	195	6.586.000	orang	195	6.586.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Abang I	orang	152	6.384.400	orang	152	6.384.400	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Abang II	orang	111	7.500.000	orang	111	7.500.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kubu I	orang	143	5.900.000	orang	143	5.900.000	-
1	02	02	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kubu II	orang	192	4.000.000	orang	192	4.000.000	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	orang	6241	29.265.700	orang	6241	29.265.700	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Manggis I	orang	414	1.700.000	orang	414	1.700.000	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Manggis II	orang	180	1.500.000	orang	180	1.500.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rendang	orang	526	1.500.000	orang	526	1.500.000	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Sidemen	orang	453	1.500.000	orang	453	1.500.000	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Selat	orang	563	1.435.000	orang	563	1.435.000	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Bebandem	orang	700	1.500.000	orang	700	1.500.000	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Karangasem I	orang	1171	3.000.000	orang	1171	3.000.000	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Karangasem II	orang	443	208.000	orang	443	208.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Abang I	orang	405	518.400	orang	405	518.400	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Abang II	orang	488	1.500.000	orang	488	1.500.000	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kubu I	orang	357	1.500.000	orang	357	1.500.000	-
1	02	02	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kubu II	orang	541	300.000	orang	541	300.000	-
1	02	02	02.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	55.261.000	Dokumen	1	55.261.000	-
1	02	02	02.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	117.224.350	Dokumen	1	102.224.350	- 15.000.000

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	245.526.000	Dokumen	1	320.526.000	75.000.000
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Manggis I	Dokumen	1	81.777.500	Dokumen	1	81.777.500	-
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Manggis II	Dokumen	1	71.927.500	Dokumen	1	71.927.500	-
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rendang	Dokumen	1	84.830.000	Dokumen	1	84.830.000	-
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sidemen	Dokumen	12	160.837.500	Dokumen	12	160.837.500	-
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Selat	Dokumen	1	121.601.000	Dokumen	1	121.601.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Bebandem	Dokumen	1	120.017.500	Dokumen	1	120.017.500	-
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Karangasem I	Dokumen	1	127.673.000	Dokumen	1	127.673.000	-
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Karangasem II	Dokumen	1	76.430.000	Dokumen	1	76.430.000	-
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Abang I	Dokumen	1	108.096.000	Dokumen	1	108.096.000	-
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Abang II	Dokumen	12	118.515.000	Dokumen	12	118.515.000	-
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kubu I	Dokumen	12	116.172.000	Dokumen	12	116.172.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kubu II	Dokumen	12	179.429.000	Dokumen	12	179.429.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	26.756.000	Dokumen	1	26.756.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Manggis I	Dokumen	1	4.000.000	Dokumen	1	4.000.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Manggis II	Dokumen	1	600.000	Dokumen	1	600.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rendang	Dokumen	1	4.800.000	Dokumen	1	4.800.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Sidemen	Dokumen	12	3.500.000	Dokumen	12	3.500.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Selat	Dokumen	1	1.200.000	Dokumen	1	1.200.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Bebandem	Dokumen	1	14.944.000	Dokumen	1	14.944.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Karangasem I	Dokumen	1	14.580.000	Dokumen	1	14.580.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Karangasem II	Dokumen	1	5.750.000	Dokumen	1	5.750.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Abang I	Dokumen	1	1.300.000	Dokumen	1	1.300.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Abang II	Dokumen	1	3.450.000	Dokumen	1	3.450.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kubu I	Dokumen	1	600.000	Dokumen	1	600.000	-
1	02	02	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kubu II	Dokumen	1	2.400.000	Dokumen	1	2.400.000	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	87.504.600	Dokumen	1	87.504.600	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Manggis I	Dokumen	1	8.800.000	Dokumen	1	8.800.000	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Manggis II	Dokumen	1	10.500.000	Dokumen	1	10.500.000	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rendang	Dokumen	1	16.000.000	Dokumen	1	16.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Sidemen	Dokumen	64	11.500.000	Dokumen	64	11.500.000	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Selat	Dokumen	1	5.952.000	Dokumen	1	5.952.000	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Bebandem	Dokumen	1	7.000.000	Dokumen	1	7.000.000	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Karangasem I	Dokumen	1	8.400.000	Dokumen	1	11.470.000	3.070.000
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Karangasem II	Dokumen	1	9.000.000	Dokumen	1	9.000.000	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Abang I	Dokumen	1	14.500.000	Dokumen	1	14.500.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Abang II	Dokumen	1	16.200.000	Dokumen	1	16.200.000	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kubu I	Dokumen	12	13.800.000	Dokumen	12	13.800.000	-
1	02	02	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kubu II	Dokumen	12	3.350.000	Dokumen	12	3.350.000	-
1	02	02	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	304.996.980	Dokumen	1	307.119.344	2.122.364
1	02	02	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Bebandem	Dokumen	1	1.870.000	Dokumen	1	1.870.000	-
1	02	02	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Karangasem I	Dokumen	1	24.914.000	Dokumen	1	24.914.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	7.081.600	Dokumen	1	7.081.600	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	96.629.600	Dokumen	1	96.629.600	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Manggis I	Dokumen	1	39.752.000	Dokumen	1	39.752.000	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Manggis II	Dokumen	1	40.738.000	Dokumen	1	40.738.000	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rendang	Dokumen	1	30.028.500	Dokumen	1	30.028.500	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sidemen	Dokumen	1	38.800.000	Dokumen	1	38.800.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Selat	Dokumen	1	50.029.000	Dokumen	1	50.029.000	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Bebandem	Dokumen	1	40.500.000	Dokumen	1	40.500.000	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Karangasem I	Dokumen	1	44.844.000	Dokumen	1	44.844.000	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Karangasem II	Dokumen	1	34.500.000	Dokumen	1	34.500.000	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Abang I	Dokumen	1	32.200.000	Dokumen	1	32.200.000	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Abang II	Dokumen	1	33.800.000	Dokumen	1	33.800.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kubu I	Dokumen	1	38.200.000	Dokumen	1	38.200.000	-
1	02	02	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kubu II	Dokumen	1	29.850.000	Dokumen	1	29.850.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Manggis I	Orang	98	2.200.000	Orang	98	2.200.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Manggis II	Orang	57	2.200.000	Orang	57	2.200.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Rendang	Orang	120	2.400.000	Orang	120	2.400.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Sidemen	Orang	84	4.400.000	Orang	84	4.400.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Selat	Orang	106	2.200.000	Orang	106	2.200.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Bebandem	Orang	90	2.200.000	Orang	90	2.200.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Karangasem I	Orang	140	4.000.000	Orang	140	4.000.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Karangasem II	Orang	80	2.400.000	Orang	80	2.400.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Abang I	Orang	71	2.200.000	Orang	71	2.200.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Abang II	Orang	84	1.800.000	Orang	84	1.800.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kubu I	Orang	60	2.000.000	Orang	60	2.000.000	-
1	02	02	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kubu II	Orang	72	4.400.000	Orang	72	4.400.000	-
1	02	02	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Karangasem I	orang	12	6.740.000	orang	12	6.740.000	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Dokumen	91	2.288.471.899	Dokumen	24	2.405.154.388	116.682.489
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Manggis I	Dokumen	1	75.090.000	Dokumen	1	75.090.000	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Manggis II	Dokumen	9	55.050.000	Dokumen	9	55.050.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rendang	Dokumen	1	70.067.500	Dokumen	1	70.067.500	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sidemen	Dokumen	12	58.247.500	Dokumen	12	58.247.500	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Selat	Dokumen	1	79.650.000	Dokumen	1	79.650.000	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Bebandem	Dokumen	1	74.539.000	Dokumen	1	74.539.000	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Karangasem I	Dokumen	1	73.250.000	Dokumen	1	73.250.000	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Karangasem II	Dokumen	1	69.394.000	Dokumen	1	69.394.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Abang I	Dokumen	1	68.144.000	Dokumen	1	68.144.000	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Abang II	Dokumen	1	65.500.000	Dokumen	1	65.500.000	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kubu I	Dokumen	12	73.805.000	Dokumen	12	73.805.000	-
1	02	02	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kubu II	Dokumen	12	78.639.000	Dokumen	12	78.639.000	-
1	02	02	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	87.881.942.745	Dokumen	1	93.075.094.676	5.193.151.931
1	02	02	02.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dinas Kesehatan	paket	12	20.536.000	paket	12	20.536.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	29	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	143.688.800	Dokumen	1	140.618.800	- 3.070.000
1	02	02	02.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RS Pratama	Dokumen	1	4.227.299.860	Dokumen	1	5.163.691.590	936.391.730
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Manggis I	Dokumen	1	207.726.542	Dokumen	1	204.228.456	- 3.498.086
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Manggis II	Dokumen	1	138.400.460	Dokumen	1	615.137.280	476.736.820
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Rendang	Dokumen	1	289.433.840	Dokumen	1	268.831.120	- 20.602.720
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Sidemen	Dokumen	1	244.626.834	Dokumen	1	221.651.112	- 22.975.722

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Selat	Dokumen	1	447.380.160	Dokumen	1	359.676.080	- 87.704.080
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Bebandem	Dokumen	1	187.998.380	Dokumen	1	221.083.840	33.085.460
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Karangasem I	Dokumen	1	211.268.888	Dokumen	1	220.506.984	9.238.096
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Karangasem II	Dokumen	1	283.120.910	Dokumen	1	257.712.280	- 25.408.630
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Abang I	Dokumen	1	191.567.104	Dokumen	1	196.335.472	4.768.368
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Abang II	Dokumen	1	148.826.552	Dokumen	1	140.210.736	- 8.615.816

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kubu I	Dokumen	1	234.887.472	Dokumen	1	238.680.296	3.792.824
1	02	02	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kubu II	Dokumen	12	149.989.552	Dokumen	12	141.798.736	- 8.190.816
1	02	02	02:02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	5.187.078.009	Dokumen	1	6.475.278.527	1.288.200.518
1	02	02	02:02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Labkesda	Dokumen	1	329.214.963	Dokumen	1	667.576.173	338.361.210
1	02	02	02:02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Unit	12	45.716.700	Unit	12	45.716.700	-
1	02	02	02.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Laporan	13	464.884.792	Laporan	13	467.157.156	2.272.364

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Karangasem I	Laporan	1	1.144.000	Laporan	1	1.144.000	-
1	02	02	02.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	23.346.000	Dokumen	1	13.346.000	- 10.000.000
1	02	02	02.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Karangasem I	Dokumen	1	1.344.000	Dokumen	1	1.344.000	-
1	02	02	02.02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	orang	562	44.072.612	orang	562	44.072.612	-
1	02	02	02.02	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	orang	77	71.512.704	orang	77	63.705.068	- 7.807.636
1	02	02	02.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Dinas Kesehatan	orang	2104	428.808.136	orang	2104	428.808.136	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan Malaria yang mendapat pelayanan standar	Sidemen	orang	84	146.500	orang	84	146.500	-
1	02	02	02.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Karangasem I	orang	263	200.000	orang	263	200.000	-
1	02	02	02.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Karangasem II	orang	252	150.000	orang	252	150.000	-
1	02	02	02.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Abang II	orang	316	96.000	orang	316	96.000	-
1	02	02	02.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kubu I	orang	84	100.000	orang	84	100.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Manggis I	dokumen	1	8.587.000	dokumen	1	8.587.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Manggis II	dokumen	1	1.388.100	dokumen	1	1.388.100	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Rendang	dokumen	1	1.405.000	dokumen	1	1.405.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Sidemen	dokumen	1	655.000	dokumen	1	655.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Selat	dokumen	1	1.533.000	dokumen	1	1.533.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Bebandem	dokumen	1	8.011.000	dokumen	1	8.011.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Karangasem I	dokumen	1	13.880.000	dokumen	1	13.880.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Karangasem II	dokumen	1	8.328.000	dokumen	1	8.328.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Abang I	dokumen	1	4.164.000	dokumen	1	4.164.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Abang II	dokumen	1	6.644.000	dokumen	1	6.644.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kubu I	dokumen	12	4.960.000	dokumen	12	4.960.000	-
1	02	02	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kubu II	dokumen	12	10.352.000	dokumen	12	10.352.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dinas Kesehatan	dokumen	1	236.552.000	dokumen	1	236.552.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Manggis I	dokumen	1	1.200.000	dokumen	1	1.200.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Manggis II	dokumen	1	3.315.900	dokumen	1	3.315.900	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Rendang	dokumen	1	1.200.000	dokumen	1	1.200.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Sidemen	dokumen	1	1.000.000	dokumen	1	1.000.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Selat	dokumen	1	250.000	dokumen	1	250.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Bebandem	dokumen	1	800.000	dokumen	1	800.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Karangasem I	dokumen	1	200.000	dokumen	1	200.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Karangasem II	dokumen	1	323.000	dokumen	1	323.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Abang I	dokumen	1	540.000	dokumen	1	540.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Abang II	dokumen	1	600.000	dokumen	1	600.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kubu I	dokumen	12	862.000	dokumen	12	862.000	-
1	02	02	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kubu II	dokumen	12	2.550.000	dokumen	12	2.550.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Manggis I	dokumen	1	2.400.000	dokumen	1	2.400.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Manggis II	dokumen	1	4.800.000	dokumen	1	4.800.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Rendang	dokumen	1	1.200.000	dokumen	1	1.200.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Sidemen	dokumen	1	2.000.000	dokumen	1	2.000.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Selat	dokumen	1	1.200.000	dokumen	1	1.200.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Bebandem	dokumen	1	4.800.000	dokumen	1	4.800.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Karangasem I	dokumen	1	2.500.000	dokumen	1	2.500.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Karangasem II	dokumen	1	3.500.000	dokumen	1	3.500.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Abang I	dokumen	1	4.400.000	dokumen	1	4.400.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Abang II	dokumen	1	3.600.000	dokumen	1	3.600.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kubu I	dokumen	1	1.500.000	dokumen	1	1.500.000	-
1	02	02	2.02	47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kubu II	dokumen	1	4.000.000	dokumen	1	4.000.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	**02**	**02**	**02.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyediakan data based kesehatan masyarakat melalui SIK KBS**		**%**	**56**	**59.443.600**	**%**	**56**	**59.443.600**	**-**
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	dokumen	1	59.443.600	dokumen	1	59.443.600	-
1	**02**	**02**	**02.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**	**Persentase rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**		**%**	**100**	**328.586.220**	**%**	**100**	**328.586.220**	**-**
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dinas Kesehatan	Unit	20	33.665.900	Unit	20	33.665.900	-
1	02	02	02.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	unit	12	161.473.320	unit	12	161.473.320	-
1	02	02	02.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Labkesda	unit	1	105.735.000	unit	1	105.735.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	02	02.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	unit	15	27.712.000	unit	15	27.712.000	-
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi**		**%**	**50**	**1.142.012.092**	**%**	**50**	**1.144.284.456**	**2.272.364**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota**	**Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten Kota**		**%**	**80**	**108.876.092**	**%**	**80**	**111.148.456**	**2.272.364**
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	108.876.092	Dokumen	1	111.148.456	2.272.364
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**%**	**80**	**1.033.136.000**	**%**	**80**	**1.033.136.000**	**-**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan	orang	165	1.033.136.000	orang	165	1.033.136.000	-
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat**		**%**	**70**	**512.173.266**	**%**	**70**	**512.173.266**	**-**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase apotik,toko obat,toko alat kesehatan dan optikal,usaha mikro obat tradisional melaksanakan kegiatannya sesuai ijin yang diterbitkan**		**%**	**100**	**89.706.900**	**%**	**100**	**89.706.900**	**-**
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	89.706.900	Dokumen	1	89.706.900	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki izin**		**%**	**70**	**3.590.000**	**%**	**70**	**3.590.000**	**-**
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	3.590.000	Dokumen	1	3.590.000	-
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase sertifikat yang diterbitkan untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**%**	**75**	**198.430.166**	**%**	**75**	**198.430.166**	**-**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Dokumen	70	198.430.166	Dokumen	70	198.430.166	-
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase tindak lanjut pemeriksaan post market**		%	75	**220.446.200**	%	75	**220.446.200**	**-**
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	unit	30	220.446.200	unit	30	220.446.200	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase peserta jamkesmas yang bisa mengakses sarana kesehatan saat mereka butuh**		**%**	**100**	**423.638.573**	**%**	**100**	**423.638.573**	**-**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan**		**kebijakan**	**1**	**24.019.000**	**kebijakan**	**1**	**24.019.000**	**-**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	dokumen	1	24.019.000	dokumen	1	24.019.000	-
1	**2**	**5**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase RT yang ber PHBS**		**%**	**91**	**228.307.373**	**%**	**91**	**228.307.373**	**-**
1	2	5	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	228.307.373	Dokumen	1	228.307.373	-
1	**2**	**5**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase UKBM yang aktif**		**%**	**50**	**171.312.200**	**%**	**50**	**171.312.200**	**-**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Dokumen	1	39.455.000	Dokumen	1	39.455.000	**-**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Manggis I	Dokumen	1	10.680.000	Dokumen	1	10.680.000	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Manggis II	Dokumen	1	4.879.800	Dokumen	1	4.879.800	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rendang	Dokumen	1	7.132.000	Dokumen	1	7.132.000	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Sidemen	Dokumen	12	4.360.000	Dokumen	12	4.360.000	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Selat	Dokumen	1	4.179.600	Dokumen	1	4.179.600	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bebandem	Dokumen	1	6.724.000	Dokumen	1	6.724.000	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Karangasem I	Dokumen	1	21.606.000	Dokumen	1	21.606.000	-

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2025			Sesudah Perubahan Anggaran Tahun 2025			Bertambah / Berkurang
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Karangasem II	Dokumen	1	8.380.000	Dokumen	1	8.380.000	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Abang I	Dokumen	1	10.979.000	Dokumen	1	10.979.000	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Abang II	Dokumen	1	14.378.800	Dokumen	1	14.378.800	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kubu I	Dokumen	12	30.379.000	Dokumen	12	30.379.000	-
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kubu II	Dokumen	1	8.179.000	Dokumen	1	8.179.000	-
Jumlah….. (A)										**303.582.137.948**			**315.859.692.031**	**12.277.554.083**

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh hasil kinerja berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dapat kami sampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Peningkatan pencapaian beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target di tahun 2025 sampai dengan triwulan II melalui peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam upaya kemandirian dalam bidang kesehatan khususnya dalam hal preventif dan promotif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.
2. Mengupayakan anggaran kesehatan dari berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan peran lintas sektor dan swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan kompetensi dan pemerataan SDM kesehatan.

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 765/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 732/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 765/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Kesehatan Masyarakat	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Kesehatan Masyarakat
6.	Kelompok Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7.	Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
8.	Pengumpul dan Pengolah Data Perencanaan	1. Kasubag Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 2. Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 3. Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

Pada hari ini : **Jumat**, tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Pukul : 09.00 Wita. sampai dengan selesai, bertempat di Bapeda Kabupaten Karangasem, telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah **Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem** dengan hasil sebagaimana lembar verifikasi berikut :

LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Kesesuaian		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tdk sesuai	
1	**SISTEMATIKA RENJA**					
	BAB I. PENDAHULUAN					
	1.1 Latar Belakang	√		√		Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian Perumusan Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Th 2025
	1.2 Landasan Hukum	√			√	Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian, Landasan Hukum ada yang perlu ditambahkan
	1.3 Maksud dan Tujuan	√		√		Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian Perumusan Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Th 2025
	1.4 Sistematika Penulisan	√		√		Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian Perumusan Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Th 2025
2	**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**					
	2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Triwulan II (T-C.29)	√		√		Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian Perumusan Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Th 2025
	2.2 Isu-isu Penting Yg Terkait Dgn Pelaks. Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah (T-C.30)	√		√		Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian Perumusan Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Th 2025
	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					

	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1 Tujuan dan Sasaran	√		√		Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian Perumusan Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Th 2025
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	√		√		Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian Perumusan Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Th 2025
	3.3 Program dan Kegiatan	√		√		Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian Perumusan Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Th 2025
	BAB IV. PENUTUP	√		√		Sudah sesuai dgn Pedoman penyajian Perumusan Ranhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Th 2025

Karangasem, 8 Agustus 2025

PD yang diverifikasi	Tanda Tangan	Tim Verifikasi :	Tanda Tangan
1. I Putu Eka Suardika, SKM.	1.	1. I Nyoman Wira Karmana, SKM., MAP	1.
		2. I Wayan Bagiartha, S.Si.	2.

Mengetahui, **Kepala Dinas Kesehatan** **Kabupaten Karangasem** **dr. I Gusti Bagus Putra PERTAMA,MM.** Pembina Utama Muda NIP. 19710608 200604 1 006	**Mengetahui,** **Kepala Badan Perencanaan Daerah** **Kabupaten Karangasem** **I Nyoman Sutirtayasa, ST., MT** Pembina Utama Muda NIP. 19670805 199703 1 004

Sekretaris Dinas	
JF	

RENJA

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



2025
PERUBAHAN

bpkad.karangasemkab.go.id
bpkad.karangasemkab@gmail.com

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 747/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 732/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem;

d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Kepala Biro Penyusunan Program Setda Provinsi, di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Para Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
11. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
12. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
13. Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem, di Amlapura.
14. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 747/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem
		2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Bidang Anggaran Daerah	1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Ka.Sub.Bid Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Penyusunan dan Informasi Anggaran pada Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
6.	Kelompok Kerja Perbendaharaan Daerah	1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Ka.Sub.Bid Pelayanan Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		Kabupaten Karangasem 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
7.	Kelompok Kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Ka.Sub.Bid Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
8.	Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Ka.Sub.Bid Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 4. Penata Laksana Barang pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
9.	Kelompok Kerja Bidang Pendapatan Daerah	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Ka.Sub.Bid Pengembangan dan Pelayanan Pajak Daerah pada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		4. Ka.Sub.Bid Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah pada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 5. Ka.Sub.Bid Pendataan Pajak Daerah pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 6. Ka.Sub.Bid Penetapan Pajak Daerah pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perencanaan, Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
10.	Kelompok Kerja Sekretariat	1. Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan pada Sekretariat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Perencana pada Sekretariat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 3. Analis Kebijakan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghyang Widhi Wasa, atas restu-Nya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025. Penyusunan Renja ini merupakan perubahan dokumen perencanaan berdasarkan atas perubahan asumsi – asumsi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan induk serta menyelaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode Tahun 2021 sd 2026, yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sd 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2021-2026

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance*, *clean government*, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 31 Juli 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Karangasem,

Drs. I Wayan Ardika, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 198903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2025 **8**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD th. 2023 Sampai TW II 8

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 37

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD **38**

3.1 Tujuan dan Sasaran----------38

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 38

3.3 Program dan Kegiatan 40

BAB IV PENUTUP..... 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan tahun 2025 telah diimplementasikan 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Setelah mulai bangkitnya perekonomian dunia, nasional dan daerah pasca menurunnya tingkat penyebaran *Corona Viruss Deseasse (*COVID-19) tentunya berpengaruh juga terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebelumnya yang berfokus ke penanganan pandemi menjadi pemulihan ekonomi

Kondisi ini menyebabkan adanya perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Asumsi keuangan juga mengalami perubahan pada perkiraan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dan DBH (dana bagi hasil). Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian anggaran yang diawali menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

Selain itu pelaksanaan perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga didasarkan adanya penyesuaian-penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II dan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 663)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024
29. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 747/ HK/ 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah melalui perencanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025, serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 dan dipergunakan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra BPKAD Tahun 2021-2026

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah :

a) Mewujudkan tertib sistem perencanaan pembangunan daerah.
b) Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan perangkat daerah dengan sistem perencanaan pembangunan di daerah.
c) Tercapainya pemanfaatan sumber daya yang efesien dan efektif dalam pembangunan daerah
d) Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program dan kegiatan Perubahan tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD sampai dengan Triwulan II

2.1.1 Capaian Sasaran Renja 2025

Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan. Sasaran "Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Ketepatan waktu penyampaian dokumen RAPBD Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan sasaran "Peningkatan kualitas pelayanan publik" diukur dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah BPKAD Kab. Karangasem yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka target sasaran pada BPKAD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi sampai TW II	Capaian (%)
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dokumen RAPBD	Tepat Waktu	-	50%
	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83,01	82,87	
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	9,88%		

Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Ketepatan waktu penyampaian dokumen RAPBD belum ada karena target

dan realisasinya untuk semester II sehingga capaian sasaran tersebut baru mencapai 50%. Sedangkan capaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk periode semester I dengan capaian 82,87. Dan untuk sasaran Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah realisasinya juga belum bisa diukur karena menunggu tahun anggaran berakhir

2.1.2 Capaian Program dan kegiatan Renja 2025

Evaluasi terhadap Renja BPKAD Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sampai dengan triwulan II meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta hasil rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKAD Tahun 2021-2026. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2025 ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 secara umum target indikator kegiatannya sudah tercapai, namun ada beberapa target yang masih minim pencapaiannya namun sedang dalam proser pelaksanaan,

Sedangkan untuk Rencana Kerja Tahun 2025 yang masih berjalan saat ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan berusaha seoptimal mungkin mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota
Renja Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Karangasem
Periode Pelaksanaan: 2025

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
	KEUANGAN							273.660.253.955		41.290.905.343,32		42.484.552.694,12						83.775.458.037,44					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Kabupaten / Kota	100 %	107.620.570.538,00	100	22.174.730.141,37	100 %	33.034.288.047,00	25,00	3.606.492.995,66	25,00	4.760.827.480,90		0,00		0,00	50,00	8.367.320.476,56	150,00	30.542.050.618	150,0%	28,38%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	60 Bulan	83.026.233.622,00	12	19.643.735.649,13	12	31.374.091.377,00	3,0	3.423.107.631,66	3,0	4.476.824.761,90		0,00		0,00	6,00	7.899.932.393,56	18,00	27.543.668.042,69	30,0%	33,17%	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		perangkat daerah																					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	410 Orang/Bulan	82.433.033.322,00	82	19.580.126.499,13	82	31.330.406.851,00		3.413.491.367,66		4.459.161.334											
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	2.500 Dokumen	349.596.800,00	1000	38.471.200,00	500	24.971.934,00		6.194.176,00		9.291.264											
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	243.603.500,00	2	25.137.950,00	1	18.712.592,00		3.422.088,00		8.372.164											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksanya administrasi umum perangkat daerah**	**60 Bulan**	**5.637.518.180,00**	**24**	**681.311.597,00**	**12**	**522.900.997,00**	**3,0**	**36.532.440,00**	**3,0**	101.253.426,00		**0,00**		**0,00**	**6,00**	**137.785.866,00**	**30,00**	**819.097.463,00**	**50,0%**	**14,53%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	130.950.000,00	2	6.840.000,00	1	8.937.400,00		0,00		0											
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	1.428.701.650,00	6	106.047.700,00	3	99.616.557,00		15.110.440,00		31.572.855,00											
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 Paket	2.289.791.530,00	12	273.915.250,00	6	282.177.540,00		10.140.000,00		31.950.785,00											
	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah paket barang	2 Paket	492.626.250,00	4	0,00	2	22.444.000,00		0,00		0											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Pengganda an	cetakan dan penggand aan yang disediakan																					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0 undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan	250 Dokumen	297.836.250,00	100	23.733.600,00	250	30.000.000,00		3.939.200,00		5.742.300,00											
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyeleng garaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	997.612.500,00	24	270.775.047,00	12	79.725.500,00		7.342.800,00		31.987.486,00											
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terlaksanany a pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerint**	**500 %**	**10.969.371.518,00**	**200**	**692.200.000,00**	**100 %**	**0,00**	**25,0**	**0,00**	**25,0**	0,00		**0,00**		**0,00**	**50,00**	**0,00**	**250,00**	**692.200.000,00**			

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		ah Daerah																					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket mebeleur yang diadakan	Jenis	862.000.000,00		305.500.000,00																	
	Pengadaan Mebel											0,00											
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	21 Unit	1.825.000.000,00	10	245.600.000,00	10			0													
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terbangun	Unit	7.379.363.918,00																			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	243.007.600,00	4	141.100.000,00	2			0,00													

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**500 %**	**2.871.899.650,00**	**200**	**264.219.479,00**	**100**	**407.651.760,00**	**25,0**	**60.017.366,00**	**25,0**	63.055.837,00		**0,00**		**0,00**	**50,00**	**123.073.203,00**	**250,00**	**387.292.682,00**	**50,0 %**	**13,49%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	144 Laporan	117.176.650,00	24	454.390,00	12	2.482.400,00		0,00		0											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	144 Laporan	1.956.570.000,00	24	173.489.089,00	12	201.660.000,00		44.306.926,00		39.490.177,00											
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	144 Laporan	798.153.000,00	24	90.276.000,00	12	203.509.360,00		15.710.440,00		23.565.660,00											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah kondisi baik dan rusak ringan**	**500 %**	**4.649.362.218,00**	**200**	**858.426.766,24**	**100**	**696.697.021,00**	**25,00**	**83.513.470,00**	**25,00**	109.798.324,00		**0,00**		-	**50,0**	**193.311.794,00**	**250,00**	**1.051.738.560,24**	**50,0 %**	**22,62%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	56 Unit	1.700.763.400,00	56	321.077.093,00	56	304.227.511,00		36.580.678,00		42.366.286											
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	6 Unit	161.092.500,00	6	0	6	10.000.000,00		0		-											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	258 Unit	1.308.178.000,00	258	170.619.800,00	258	213.632.440,00		22.500.264,00		30.783.246											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	1.479.328.318,00	3	366.729.873,24	3	168.837.070,00		24.432.528,00		36.648.792											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia**	**500 %**	**401.185.350,00**	**200**	**34.836.650,00**	**100**	**32.946.892,00**	**25,0**	**3.322.088,00**	**25,0**	9.895.132,00		**0,00**		**0,00**	**50,00**	**13.217.220,00**	**250,00**	**48.053.870,00**	**50,0 %**	**11,98%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dokumen	202.465.350,00	12	27.494.550,00	6	22.592.192,00		3.322.088,00		7.936.132											
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan	5 laporan	198.720.000,00	2	7.342.100,00	1	10.354.700,00		0,00		1.959.000											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD																					
Rata-rata capaian kinerja program (%)																	50,00 %	25,33%					
Predikat kinerja Program																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan yang akuntabel**	**500 %**	**1.279.840.961.990,00**	**200**	**260.264.978.465,00**	**100 %**	**237.099.428.280,00**	**25**	**36.950.670.455,66**	**25**	36.377.697.816,22		-		-	**50,00**	**73.328.368.272**	**250,00**	**333.593.346.737**	**50,0 %**	**26,07%**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah**	**500 %**	**5.892.358.935,00**	**200**	**1.012.687.987,00**	**100 %**	**834.449.784,00**	**25,00**	**87.204.176,00**	**25,00**	252.513.521,00		**0,00**		**0,00**	**50,00**	**339.717.697,00**	**250,00**	**1.352.405.684,00**	**50,0 %**	**22,95%**	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	10 Dokumen	623.907.400,00	4	144.752.200,00	2	111.006.800,00		0,00		44.017.139,00											
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	10 Dokumen	609.879.400,00	4	87.431.200,00	2	67.377.800,00		0,00		5.867.665											
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	165 Dokumen	344.262.600,00	66	16.494.900,00	34	3.680.900,00		0,00		3.310.760											
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	165 Dokumen	344.262.600,00	66	16.797.200,00	34	3.680.900,00		0,00		3.310.760											
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	165 Dokumen	510.122.300,00	66	68.532.600,00	34	42.320.900,00		37.000.000,00		3.347.720											
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	165 Dokumen	501.686.100,00	66	16.797.200,00	34	3.820.900,00		0,00		-											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	20 Dokumen	1.156.602.206,00	8	215.088.500,00	4	158.501.600,00		0,00		20.428.250											
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	20 Dokumen	1.167.972.329,00	8	446.794.187,00	4	444.059.984,00		50.204.176,00		172.231.227											
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi yang tersusun		633.664.000,00						0,00													

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang akuntabel**	**500 %**	**2.439.736.400,00**	**200**	**458.609.123,00**	**100 %**	**174.151.276,00**	**25**	**11.972.704,00**	**25**	**72.633.256,00**					50,00	84.605.960,00	**250,00**	**543.215.083,00**	**50,0 %**	**22,27%**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	30 Dokumen	129.682.900,00	12	9.888.800,00	6	6.752.000,00		0,00		805.300											
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaa	250 Dokumen	411.555.700,00	100	153.582.883,00	50	41.067.200,00				3.726.200											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Transfer Lainnya	n dana perimbangan dan dana transfer lainnya																					
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D deangan instansi terkait	280 Dokumen	1.089.749.500,00	112	140.643.640,00	56	75.310.476,00		10.716.264,00		44.190.856											
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah	300 Orang	808.748.300,00	120	154.493.800,00	60	51.021.600,00		1.256.440,00		23.910.900,00											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kabupaten /kota																					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu**	**500 %**	**1.817.546.106,00**	**200**	**254.248.530**	**100 %**	**197.752.552,00**	**25**	**23.560.528,00**	**25**	27.873.792,00		**0,00**		**0,00**	**50,00**	**51.434.320,00**	**250,00**	**305.682.850,00**	**50,0 %**	**16,82%**	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	70 Laporan	444.432.154,00	28	48.192.550,00	14	39.082.584,00		6.402.176,00		8.016.264											
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban,	1020 Dokumen	76.508.224,00	408	13.473.350,00	204	13.710.500,00		3.920.000,00		-											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembiayaan, Pendapatan OLO dan Beban	ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban																					
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	65 Laporan	289.071.607,00	26	58.171.000,00	13	33.227.901,00		6.244.176,00		9.366.264											
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	35 Laporan	176.292.080,00	14	17.666.550,00	7	12.112.559,00		0,00		-											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten /kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten /kota	20 Dokumen	718.835.541,00	8	94.548.880,00	4	70.446.072,00		6.994.176,00		10.491.264										
	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan /tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban	5 Dokumen	38.494.851,00	2	4.380.450,00	1	6.266.277,00		0,00		-										

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pelaksanaan APBD																					
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen hasil analisis atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	5 Dokumen	52.392.312,00	2	5.705.850,00	1	14.660.576,00		0,00		-											
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah kabupaten /kota	500 Orang	21.519.337,00	200	12.109.900,00	100	8.246.083,00		0,00		-											
	Penunjang Urusan Kewenang	**Terselenggaranya urusan**	**60 Bulan**	**1.268.195.968.564,00**	**24,00**	**258.539.432.825,00**	**12 bulsn**	**235.893.074.668,00**	**3**	**36.827.933.047,66**	**3**	36.024.677.247,22		**0,00**		**0,00**	**6,00**	**72.852.610.294,88**	**30,00**	**331.392.043.119,88**	**50,0%**	**26,13%**	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	an Pengelolaan Keuangan Daerah	**kewenangan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah**																					
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran dan bantuan keuangan	90 Laporan	1.119.602.583.964,00	36	219.369.240.625,00	18	190.094.478.375,00		30.362.308.864,00		26.462.069.136,00											
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	5 Laporan	57.357.864.490,00	2	0,00	1	2.500.000.000,00		0,00		-											
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	10 Laporan	91.235.520.110,00	4	39.170.192.200,00	2	43.298.596.293,00		6.465.624.183,66		9.562.608.111,22											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Terselenggaranya penerapan sistem informasi pada lingkup keuangan daerah**	**60 Bulan**	**1.495.351.985,00**	**24**					**0,00**							**0,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**40,0 %**	**0,00 %**	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase masa waktu pemeliharaan dan pengembangan website dalam setahun Persentase pemeliharaan dan pengembangan aplikasi komputer pengelolaan pajak daerah	500%	1.495.351.985,00	100																		
Rata-rata capaian kinerja program (%)																	**50,00 %**	**30,93%**					

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja Program																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah**	**500 %**	**3.832.662.000,00**	**200**		**100 %**	**411.697.876,00**	**25**	**14.992.064,00**	**25**	144.110.031,00		**0,00**		**0,00**	**50,00**	**159.102.095,00**	**250,00**	**159.102.095**	**50,0 %**	**4,15 %**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah**	**165 OPD**	**3.832.662.000,00**	**66**	**498.178.798**	**34**	**411.697.876,00**	**34**	**14.992.064,00**	**0**	**144.110.031,00**		**0,00**		**0,00**	**34,00**	**159.102.095,00**	**100,00**	**657.280.893,00**	**60,6 %**	**17,15%**	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	5 Dokumen	381.972.000,00	2	104.747.800,00	1	117.060.092,00		3.670.388,00		101.079.137,00											
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	5 Dokumen	171.092.500,00	2	5.724.400,00	1	15.331.600,00		0,00		660.010,00											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	5 Laporan	288.487.500,00	2	92.207.684,00	1	70.325.192,00		4.053.088,00		9.588.137,00											
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) barang milik daerah	5 Laporan	214.790.000,00	2	8.704.900,00	1	24.828.900,00		0,00		330.005,00											
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	10 Laporan	1.366.487.500,00	4	83.650.800,00	2	108.063.900,00		961.500,00		22.400.000,00											
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	10 Laporan	259.138.750,00	4	124.278.314,00	2	34.566.692,00		3.609.588,00		5.902.942,00											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat daerah yang terfasilitasi data asetnya untuk digunakan, dimanfaatkan, dimusnahkan, dan dihapuskan	500%	171.092.500,00	200	40.859.150,00																	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghausan barang milik daerah	5 Dokumen	737.962.500,00	2	26.433.250,00	1	41.521.500,00		2.697.500,00		4.149.800,00											
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	5 Laporan	136.743.750,00	2	8.142.500,00																	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Laporan Barang Milik Daerah	dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah																					
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	5 Laporan	104.895.000,00	2	3.430.000,00																	
Rata0rata capaian kinerja program (%)																	50,00 %	38,65%					
Predikat kinerja Program																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tingkat capaian target penerimaan pajak daerah**	**500 %**	**30.584.822.023,00**	**200**		**100 %**	**3.114.839.752**	**###**	**718.749.828**	**100,00**	1.201.917.366		**0**		**0**	**20,00**	**1.920.667.194,00**	**220,00**	**1.920.667.194**	**44,0 %**	**6,28 %**	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Jumlah jenis pajak daerah yang dikelola sebagai sumber pendapat**	**50 Jenis**	**30.584.822.023,00**	**20**	**8.177.604.476**	**10**	**3.114.839.752**	**10**	**718.749.828**	**0**	1.201.917.366		**0**		**0**	**10,00**	**1.920.667.194,00**	**30,00**	**10.098.271.670,00**	**60,0 %**	**33,02%**	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		an daerah																					
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	20 Dokumen	1.410.340.750,00	8	152.464.496,00	4	39.806.676,00		8.516.264,00		14.512.496,00											
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	20 Laporan	870.652.872,00	8	84.541.800,00	4	37.830.484,00		9.421.176,00		10.106.264,00											
	Pendataan dan Pendaftaran	Jumlah laporan hasil	10 Laporan	702.234.096,00	4	715.866.208,00	2	156.472.736,00		32.416.804,00		46.210.156,00											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Objek Pajak Daerah	pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah																					
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	5 Laporan	690.431.421,00	2	82.041.367,00	1	10.875.092,00		3.372.088,00		5.058.132											
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	1.425 Objek Pajak	741.781.285,00	570	518.979.699,00	285	35.426.592,00		6.058.788,00		17448932											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	939.000 Dokumen	1.834.590.868,00	375.600	141.190.352,00	187.800	159.209.092,00		68.661.488,00		44.469.831											
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan konsultasi pajak daerah	1.000 Layanan	371.076.273,00	400	70.314.650,00	200	38.521.776,00		9.816.264,00		15.362.396											
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			992.006.849,00																			
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	7.000 Dokumen	1.757.387.836,00	2.800	315.147.550,00	1.400	157.931.584,00		12.127.576,00		40.705.264											
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	60 Dokumen	159.071.138,00	24	2.637.500,00	12	10.347.750,00				408.000											
	Pengendalian, Pemeriksaa	Jumlah dokumen hasil	60 Dokumen	21.055.248.635,00	24	3.712.654.600,00	12	2.090.945.078,00		558.653.192,00		863.869.388											

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)Tahun lalu		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9)+(10)+(11)+(12)		14=7+13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	n dan Pengawasan Pajak Daerah	pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah																					
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan		1	2.381.766.254,00	1	377.472.892,00		9.706.188,00		143.766.507,00											
Rata-rata capaian kinerja program (%)															20,00 %		61,66%						
Predikat kinerja Program															Tinggi		Sangat Tinggi						
Rata-rata capaian kinerja Keseluruhan (%)															42,50 %		30,61%						
Predikat kinerja Keseluruhan															Sangat Tinggi		Sangat Tinggi						

2.2 Isu – Isu Penting Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil telaahan atas faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka ditetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Sumber daya manusia yang ada belum memiliki kompetensi teknis yang cukup dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2. Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan, aset daerah maupun pendapatan daerah belum didukung dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
3. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah belum sepenuhnya dapat diterapkan di Daerah dalam waktu cepat.
4. Sistem pengelolaan data dan informasi yang belum memadai sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Sumber daya manusia belum memiliki kompetensi teknis yang cukup dalam pelayanan prima
6. Belum tersedianya standar pelayanan yang memadai dalam upaya peningkatan pelayanan prima
7. Pengembangan pelayanan secara elektronik masih rendah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem, maka berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, mendukung pelaksanaan Misi Nomor 6, yaitu *"Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima."*

Pelaksanaan Misi tersebut pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya mendukung tercapainya:

Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima

Sasaran :
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator untuk sasaran tersebut adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   b. Ketepatan waktu penyampaian dokumen RAPBD
   c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
   a. Persentase peningkatan pendapatan asli daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II, maka dilakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan dalam

melaksanakan program dan kegiatan Renja BPKAD Kab. Karangasem Tahun 2025, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi	Arah Kebijakan
Mendorong upaya pelaksanaan penganggaran yang berkualitas	Melaksanakan penyampaian RAPBD tepat waktu
Mendorong efektivitas dan optimalisasi penyerapan APBD	Mengoptimalkan penyerapan APBD sesuai Rencana Anggaran Kas
Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dan tepat waktu	Penyampaian dokumen LKPD yang tepat waktu
Meningkatkan pengamanan aset tanah Pemda	Meningkatkan upaya pensertifikatan tanah aset Pemda
Melaksanakan Penatausahaan BMD dengan tertib	Meningkatkan pengelolaan BMD mulai dari tingkat Pengguna BMD
Mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan	Mengikuti bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah dan pelayanan

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan lingkungan kerja yang nyaman dan disiplin dengan membuat sistem kerja yang berorientasi pada output yang berkualitas;	Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik

	Melaksanakan penataan fasilitas untuk menjaga kenyamanan dan kedisiplinan kerja
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Mendorong upaya keterbukaan informasi	Melaksanakan Keterbukaan Informasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (tujuan & sasaran). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem untuk Perubahan Tahun 2025 Program, kegiatan dan sub kegiatantannya tetap mengacu Permendagri 90 Tahun 2019 dan Renja 2025 dengan melaksanakan 4 Program dan 12 Kegiatan dan 64 sub kegiatan. Total pendanaan yang diperoleh untuk Pagu Belanja Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 283.098.383.496,-

Secara rinci perubahan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Rencana Perubahan Tahun 2025
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**276.563.581.105,00**				**283.098.383.496,00**	**6.534.802.391,00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**276.563.581.105,00**				**283.098.383.496,00**	**6.534.802.391,00**
5.02	**KEUANGAN**				**276.563.581.105,00**				**283.098.383.496,00**	**6.534.802.391,00**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**		**100 %**	**33.121.757.547,00**			**100 %**	**35.741.159.929,00**	**2.619.402.382,00**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-		-	**32.946.892,00**		**Sekretariat**	-	**35.796.756,00**	**2.849.864,00**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karangasem	6 Dokumen	22.592.192,00	APBD	Sekretariat	6 Dokumen	25.577.056,00	2.984.864,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab. Karangasem	1 Laporan	10.354.700,00	APBD	Sekretariat	1 Laporan	10.219.700,00	135.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-		-	**31.374.091.377,00**		**Sekretariat**	-	**33.345.036.539,00**	**1.970.945.162,00**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karangasem	266 Orang/ bulan	31.330.406.851,00	APBD	Sekretariat	266 Orang/ bulan	33.294.613.921,00	1.964.207.070,00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karangasem	500 Dokumen	24.971.934,00	APBD	Sekretariat	500 Dokumen	28.426.662,00	3.454.728,00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karangasem	1 Laporan	18.712.592,00	APBD	Sekretariat	1 Laporan	21.995.956,00	3.283.364,00
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-		-	**609.570.497,00**		**Sekretariat**	-	**567.967.027,00**	**41.603.470,00**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	1 Paket	8.937.400,00	APBD	Sekretariat	1 Paket	8.937.400,00	-
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	3 Paket	99.616.557,00	APBD	Sekretariat	3 Paket	122.284.287,00	22.667.730,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	6 Paket	282.177.540,00	APBD	Sekretariat	6 Paket	284.575.840,00	2.398.300,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karangasem	2 Paket	29.388.000,00	APBD	Sekretariat	2 Paket	22.444.000,00	6.944.000,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karangasem	250 Dokumen	30.000.000,00	APBD	Sekretariat	250 Dokumen	30.000.000,00	-
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karangasem	12 Laporan	159.451.000,00	APBD	Sekretariat	12 Laporan	99.725.500,00	59.725.500,00
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-		-	**0,00**		**Sekretariat**	-	**702.884.000,00**	**702.884.000,00**
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Karangasem	19 Unit	0,00	APBD	Sekretariat	19 Unit	0,00	-
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Karangasem	0 Unit	0,00	APBD	Sekretariat	2 Unit	17.875.600,00	17.875.600,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karangasem	4 Unit	0,00	APBD	Sekretariat	1 Unit	31.121.400,00	31.121.400,00
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karangasem	100% Unit	0,00	APBD	Sekretariat	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karangasem	2 Unit	0,00	APBD	Sekretariat	14 Unit	153.887.000,00	153.887.000,00
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		-	**408.451.760,00**		**Sekretariat**	-	**294.181.180,00**	**114.270.580,00**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karangasem	12 Laporan	2.482.400,00	APBD	Sekretariat	12 Laporan	500.000,00	1.982.400,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karangasem	12 Laporan	201.660.000,00	APBD	Sekretariat	12 Laporan	225.660.000,00	24.000.000,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karangasem	12 Laporan	204.309.360,00	APBD	Sekretariat	12 Laporan	68.021.180,00	136.288.180,00
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		-	**696.697.021,00**		**Sekretariat**	-	**795.294.427,00**	**98.597.406,00**
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karangasem	56 Unit	304.227.511,00	APBD	Sekretariat	56 Unit	341.434.549,00	37.207.038,00
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Karangasem	6 Unit	10.000.000,00	APBD	Sekretariat	0 Unit	0,00	10.000.000,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karangasem	258 Unit	213.632.440,00	APBD	Sekretariat	258 Unit	224.699.532,00	11.067.092,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karangasem	3 Unit	168.837.070,00	APBD	Sekretariat	3 Unit	229.160.346,00	60.323.276,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Ketersedian dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel**		**100 %**	**239.882.285.930,00**			**100 %**	**242.116.827.479,00**	**2.234.541.549,00**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah Persentase tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah`**		**100 %**	**924.834.184,00**	**APBD**	**Bidang Anggaran**	**100 %**	**841.194.512,00**	**83.639.672,00**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Karangasem	2 Dokumen	111.006.800,00	APBD	Bidang Anggaran	2 Dokumen	111.006.800,00	-
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Karangasem	2 Dokumen	67.377.800,00	APBD	Bidang Anggaran	2 Dokumen	67.377.800,00	-
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Karangasem	34 Dokumen	3.682.000,00	APBD	Bidang Anggaran	34 Dokumen	3.680.900,00	1.100,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Karangasem	34 Dokumen	3.682.000,00	APBD	Bidang Anggaran	34 Dokumen	3.680.900,00	1.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Karangasem	34 Dokumen	42.362.000,00	APBD	Bidang Anggaran	34 Dokumen	42.320.900,00	41.100,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Karangasem	34 Dokumen	3.862.000,00	APBD	Bidang Anggaran	34 Dokumen	3.820.900,00	41.100,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Karangasem	4 Dokumen	197.001.600,00	APBD	Bidang Anggaran	4 Dokumen	158.501.600,00	38.500.000,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Karangasem	4 Dokumen	495.859.984,00	APBD	Bidang Anggaran	4 Dokumen	450.804.712,00	45.055.272,00
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang akuntabel**		**100 %**	**174.151.276,00**		**Bidang Perbendaharaan**	**100 %**	**219.565.118,00**	**45.413.842,00**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Karangasem	6 Dokumen	6.752.000,00	APBD	Bidang Perbendaharaan	6 Dokumen	7.749.666,00	997.666,00
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Kab. Karangasem	50 Dokumen	41.067.200,00	APBD	Bidang Perbendaharaan	50 Dokumen	46.568.566,00	5.501.366,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Karangasem	56 Dokumen	75.310.476,00	APBD	Bidang Perbendaharaan	56 Dokumen	100.594.264,00	25.283.788,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	60 Orang	51.021.600,00	APBD	Bidang Perbendaharaan	60 Orang	64.652.622,00	13.631.022,00
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu**		**100 %**	**197.752.552,00**		**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**	**100 %**	**241.336.736,00**	**43.584.184,00**
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Karangasem	14 Laporan	39.082.584,00	APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	14 Laporan	44.427.312,00	5.344.728,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Karangasem	204 Dokumen	13.710.500,00	APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	204 Dokumen	13.710.500,00	-
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Karangasem	13 Laporan	33.227.901,00	APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	13 Laporan	39.472.629,00	6.244.728,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Karangasem	7 Laporan	12.112.559,00	APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	7 Laporan	12.112.559,00	-
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	4 Dokumen	70.446.072,00	APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	4 Dokumen	77.440.800,00	6.994.728,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Karangasem	1 Dokumen	6.266.277,00	APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1 Dokumen	6.266.277,00	-
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Karangasem	-	0,00		Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Karangasem	1 Dokumen	14.660.576,00	APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1 Dokumen	14.660.576,00	-
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	100 Orang	8.246.083,00	APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	100 Orang	8.246.083,00	-
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terselenggarayа urusan kewenangan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah**		**100 %**	**238.585.547.918,00**		**Bidang Perbendaharaan**	**100 %**	**240.814.731.113,00**	**2.229.183.195,00**
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran	Kab. Karangasem	18 Laporan	192.786.951.625,00	APBD	Bidang Perbendaharaan	18 Laporan	190.094.478.375,00	2.692.473.250,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Bantuan Keuangan								
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Karangasem	1 Laporan	2.500.000.000,00	APBD	Bidang Perbendaharaan	1 Laporan	2.500.000.000,00	-
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	2 Laporan	43.298.596.293,00	APBD	Bidang Perbendaharaan	2 Laporan	48.220.252.738,00	4.921.656.445,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah**		**100 %**	**429.697.876,00**			**100 %**	**551.964.968,00**	**122.267.092,00**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah**		**34 OPD**	**429.697.876,00**		**Bidang Pengelolaan BMD**	**34 OPD**	**551.964.968,00**	**122.267.092,00**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Karangasem	1 Dokumen	117.060.092,00	APBD	Bidang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	120.382.456,00	3.322.364,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Karangasem	1 Dokumen	15.331.600,00	APBD	Bidang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	15.331.600,00	-
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Karangasem	1 Laporan	77.825.192,00	APBD	Bidang Pengelolaan BMD	1 Laporan	90.122.556,00	12.297.364,00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Karangasem	1 Laporan	24.828.900,00	APBD	Bidang Pengelolaan BMD	1 Laporan	25.620.900,00	792.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Karangasem	1 Laporan	108.063.900,00	APBD	Bidang Pengelolaan BMD	1 Laporan	167.063.900,00	59.000.000,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Karangasem	2 Laporan	39.566.692,00	APBD	Bidang Pengelolaan BMD	2 Laporan	87.422.056,00	47.855.364,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Karangasem	1 Dokumen	47.021.500,00	APBD	Bidang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	46.021.500,00	1.000.000,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tingkat capaian target penerimaan pajak daerah**		**100 %**	**3.129.839.752,00**			**100 %**	**4.688.431.120,00**	**1.558.591.368,00**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah jenis pajak daerah yang dikelola sebagai sumber pendanaan daerah**		**8 Jenis**	**3.129.839.752,00**		**Bidang P3E dan P2D**	**8 Jenis**	**4.688.431.120,00**	**1.558.591.368,00**
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Karangasem	4 Dokumen	39.806.676,00	APBD	Bidang P3E	4 Dokumen	48.323.768,00	8.517.092,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Karangasem	4 Laporan	37.830.484,00	APBD	Bidang P3E	4 Laporan	81.073.612,00	43.243.128,00
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Karangasem	2 Laporan	156.472.736,00	APBD	Bidang P2D	2 Laporan	325.851.648,00	169.378.912,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Karangasem	1 Laporan	10.875.092,00	APBD	Bidang P2D	1 Laporan	14.247.456,00	3.372.364,00
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Karangasem	285 Obyek Pajak	35.426.592,00	APBD	Bidang P2D	285 Obyek Pajak	38.748.956,00	3.322.364,00
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Karangasem	187800 Dokumen	159.209.092,00	APBD	Bidang P2D	187800 Dokumen	162.781.456,00	3.572.364,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Karangasem	200 Layanan	38.521.776,00	APBD	Bidang P3E	200 Layanan	53.338.868,00	14.817.092,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Karangasem	1400 Dokumen	157.931.584,00	APBD	Bidang P2D	1400 Dokumen	321.056.312,00	163.124.728,00
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Karangasem	12 Dokumen	10.347.750,00	APBD	Bidang P3E	12 Dokumen	10.347.750,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA Tahun 2025				Catatan Penting/ Pengampu Program Kegiatan	Rencana DPA Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Karangasem	12 Dokumen	2.090.945.078,00	APBD	Bidang P3E	12 Dokumen	2.731.316.038,00	640.370.960,00
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Karangasem	1 Laporan	392.472.892,00	APBD	Bidang P3E	1 Laporan	901.345.256,00	508.872.364,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025. Kaidah pelaksanaan perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKAP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam perubahan Renja ini.

PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGASEM

dispustaka
Karangasem

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

JALAN NGURAH RAI NO 27. AMLAPURA

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 778/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 732/HK/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem;

b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem;
c. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem;
d. menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 778/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem
5.	Kelompok Kerja Bidang Perpustakaan	1. Kepala Bidang Perpustakaan 2. Jabatan Fungsional Pustakawan
6.	Kelompok Kerja Bidang Kearsipan	1. Kepala Bidang Kearsipan 2. Jabatan Fungsional Arsiparis
7.	Pengumpul dan Pengolah Data Perencanaan	1. Kepala Sub dan Bagian Umum Keuangan 2. Jabatan Perencana Muda

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap Renja Tahun 2025 yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi, serta perubahan dinamika pelaksanaan dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Renja sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari unsur internal dinas, Perangkat Daerah terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dengan tersusunya dokumen Renja Perubahan ini, besar harapannya menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025. Dan menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan mutu layanan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 25 September 2025
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Karangasem

Ida Nyoman Astawa, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770903 199612 1 001

DAFTAR ISI

Rencana Rerja Perubahan Tahun 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

2

1.3 Maksud dan Tujuan

3

1.4 Sistematika Penulisan

4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA

6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

21
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

25
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

37
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan PD Tahun 2025

37
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

37
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

38
BAB IV PENUTUP

54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan tahunan sebagai bagian dari tahapan pembangunan daerah serta ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Dengan dasar hukum tersebut penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem termasuk Renja Perubahan Tahun 2025 ini memiliki landasan yang kuat dalam rangka memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen tahunan yang disusun apabila terjadi perubahan mendasar atas asumsi, arah kebijakan, program, kegiatan maupun sub kegiatan termasuk juga pendanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja awal. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dilakukan sebagai penyesuaian atas dinamika kebutuhan pembangunan, perubahan kebijakan fiskal daerah, dan penyesuaian target kinerja sesuai dengan kondisi aktual. Renja Perubahan ini berperan sebagai dokumen operasional yang menjembatani kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah

dengan implementasi nyata pada tahun berjalan, sehingga tetap terjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Dengan demikian tersusunnya Renja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem pada Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang operasionalnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap adanya perubahan dinamika pembangunan, perubahan kebijakan dan kondisi fiskal daerah, maupun kebutuhan pelayanan publik yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dengan demikian Renja Perubahan dimaksud untuk menjamin agar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah penyesuaian dari Rencana Kerja Tahun 2025 Triwulan I dan II dan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa arah, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja perangkat daerah tetap selaras dengan dinamika pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang

Secara khusus, Renja Perubahan bertujuan untuk memberikan pedoman operasional bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan mengacu pada target kinerja yang telah disesuaikan. Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Dengan adanya Renja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dokumen ini juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.4 **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KARANGASEM TRIWULAN I SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem TW I sampai TW II Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KARANGASEM TRIWULAN I SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perpsutakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem TW I sampai TW II Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem pada triwulan I sampai triwulan II Tahun 2025 menunnjukkan capaian yang relatif baik. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada semester pertama tahun berjalan sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen Renja awal, baik dari aspek serapan anggaran maupun capaian kinerja.

Pada Bidang Perpustakaan, terdapat 2 (dua) program yaitu 1) Program Pembinaan Perpustakaan; dan 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, kedua program telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain kurangnya anggaran untuk menjalankan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, keterbatasan prasarana berupa koleksi buku-buku dan majalah yang terbaru. Selain itu perlu ditambahnya SDM jabatan fungsional pustakawan untuk miningkatkan kualitas layanan perpustakaan, mengembangkan program literasi, serta memperluas akses layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten karangasem.

Sedangkan pada Bidang Kearsipan terdapat 2 (dua) program yaitu 1) Program Pengelolaan Arsip; dan 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Kedua program sudah dijalankan dengan baik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2025. Adapun beberapa faktor kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya SDM jabatan fungsional arsiparis, selain itu perlu adanya pelatihan atau pendidikan secara berkala bagi staf pengelola arsip agar lebih profesional, serta masih kurangnya pendanaan untuk mendukung sarana dan prasarana penyimpanan arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten karangasem.

Selain dua bidang diatas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sekretariat. Pada Sekretariat kegiatan operasional sudah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya pendanaan anggaran yang dialokasi di Sekretariat untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional agar berjalan lancar. Selain itu perlu adanya penambahan SDM untuk jabatan fungsional perencana untuk memperlancar kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Anggaran belanja tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada APBD sebesar Rp. 15,304,044,559,00 yang terdiri dari 5 Program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengaan realisasi anggaran per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp. 11,941,815,921,53 atau sebesar 78%.

- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Untuk mengatasi permasalahan yang mempengaruhi capaian hasil (*outcome*) dari target kinerja program/kegiatan, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan menetapkan kebijakan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengantisifasi kebutuhan anggaran melalui perencanaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara lebih baik.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2025, alokasi anggaran belanja langsung Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD sebesar Rp 5.108.942.608,00 terdiri dari 3 program, 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (input)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan sub kegiatan tahun n	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2					PERPUSTAKAAN									
2	**23**				URUSAN KABUPATEN / KOTA									
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan								
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100

2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	100
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah anggaran yang direalisasikan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah buku yang di cetak	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	100	6 jenis cetakan	18 jenis cetakan	100
						Jumlah digandakan	8000 lembar foto copy	8000 lembar foto copy	8000 lembar foto copy	8000 lembar foto copy	100	8000 lembar foto copy	24 lembar foto copy	100
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	100	5 gedung	15 gedung	100
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100	12 jenis	36 jenis	100
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100

2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	9 kali	100
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan mebel								
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 jenis peralatan	4 jenis peralatan	4 jenis peralatan	4 jenis peralatan	100	4 jenis peralatan	12 jenis peralatan	100
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	100	400 lembar	1.200 lembar	100
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	23	01	2.08	03	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	100	13 mobil dan sepeda motor	39 mobil dan sepeda motor	100
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	5 buah	5buah	5 buah	5 buah	100	5 buah	15 buah	100
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor terpelihara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	23	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	100	5 gedung	15 gedung	100

2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2	23	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina								
2	**23**	02	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perpustakaan yang dibina	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan		50 Perpustakaan		
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat	12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	100	12 Perpustakaan	36 perpustakaan	100
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	100	50 Perpustakaan	150 perpustakaan	100
2	**23**	02	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kunjungan ke sekolah/desa				0		0		
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	50 orang	50 orang	50 orang	150 orang	100	50 orang	200 orang	100
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan								
2	**23**	03	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan								
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	8 naskah	8 naskah	8 naskah	8 naskah	100	8 naskah	24 naskah	100
2	24				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**									

2	24	02			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase perangkat daerah yang tata kelola kearsipannya baik							
2	24	02	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
2	24	02	2.02	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina	50 PD/Desa	50 PD/Desa	50 PD/Desa	50 PD/Desa	100	50 PD/Desa	150 PD/Desa	100
						Jumlah pengelola arsip yang dibintek					100			100
2	24	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Jumlah penataan arsip dan tersedianya layanan informasi arsip yang smart								
2	24	03	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem	4 PD	4 PD	4 PD	4 PD		4 PD		
2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah PD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	3 PD	3 PD	3 PD	3 PD	100	3 PD	9 PD	100
2	24	03	2.03		**Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab./ Kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	Jumlah Penyelamatan arsip								
2	24	03	2.03	04	Pendampingan penyelamatan arsiap bagi pemekaran desa / Kelurahan	Jumlah Desa yang dimekarkan	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	100	3 Desa	9 PD	100

2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. perangkat daerah harus mempunyai tolak ukur dan indikator yang bisa diuji, yang bisa menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Karangasem

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyeksi						Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n+3	Tahun 2025 (thn n+4	Tahun 2026 (thn n+5	Tahun 2021 (thn n	Tahun 2022 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n+3	Tahun 2025 (thn n+4	Tahun 2026 (thn n+5	Tahun 2021 (thn n	Tahun 2022 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n+3	Tahun 2025 (thn n+4	Tahun 2026 (thn n+5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan			7 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen													
	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			7 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen													
	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
	Jumlah anggaran yang direalisasikan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-
	Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah buku yang di cetak			5 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	5 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	-	-	5 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	6 jenis cetakan	-	-	-
	Jumlah digandakan			4990 lembar foto copy	6000 lembar foto copy	8000 lembar foto copy	9000 lembar foto copy	9000 lembar foto copy	9000 lembar foto copy	4990 lembar foto copy	6000 lembar foto copy	8000 lembar foto copy	9000 lembar foto copy	-	-	4990 lembar foto copy	6000 lembar foto copy	8000 lembar foto copy	9000 lembar foto copy	-	-	-
	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor			5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	-	-	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	-	-	-
	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat			12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	-	-	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	-	-	-
	Jumlah logistik yang tersedia			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-

	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			2 kali	3 kali	**3 kali**	4 kali	4 kali	4 kali	2 kali	3 kali	**3 kali**	4 kali	-	-	2 kali	3 kali	**3 kali**	4 kali	-	-	-
	Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ			400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	-	-	400 lembar	400 lembar	400 lembar	400 lembar	-	-	-
	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-
	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-
	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	-	-	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	13 mobil dan sepeda motor	-	-	-
	Jumlah Pemeliharaan Mebel			25 buah	25 buah	25 buah	25 buah	25 buah	25 buah	25 buah	25 buah	25 buah	25 buah	-	-		25 buah	100 buah	100 buah	-	-	-
	Jumlah peralatan kantor terpelihara			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-
	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	-	-	5 gedung	5 gedung	5 gedung	5 gedung	-	-	-
2	Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina			38,63	50,94	63,25	75,56	87,87	100	38,63	50,94	63,25	75,56	87,87	100	38,63	50,94	63,25	75,56	87,87	100	
	Jumlah Perpustakaan yang dibina			50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	

	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat			2500 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1.100 orang	1.300 orang	2500 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	-	-	2500 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	-	-	-
	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina			50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	55 kali	60 Kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	-	-	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	-	-	-
	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina				50 kali	50 kali	50 kali	55 kali	60 Kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	-	-		50 kali	50 kali	50 kali	-	-	-
	Jumlah kunjungan ke sekolah/desa			0	50 kali	**50 kali**	**50 kali**	**50 kali**	**50 kali**	50 kali	50 kali	**50 kali**	**50 kali**	**50 kali**	**50 kali**	0	50 kali	**50 kali**	**50 kali**	**50 kali**	**50 kali**	
	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				50 kali	50 Kali	50 Kali	55 Kali	50 Kali	50 Kali	50 kali	50 Kali	50 Kali	-	-		50 kali	50 Kali	50 Kali	-	-	-
	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana			1 kali	1 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 kali	1 kali	1 Kali	1 Kali	-	-	1 kali	1 kali	1 Kali	1 Kali	-	-	-
	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita				20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	-	-		20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	20 TK/RA dan PAUD	-	-	-
	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan				3 lomba	3 lomba	3 lomba	3 lomba	3 lomba	3 lomba	3 lomba	3 lomba	3 lomba	-	-		3 lomba	3 lomba	3 lomba	-	-	-
3	Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan			108 naskah	488	596	704	812	920	108 naskah	488	596	704	812	920	108 naskah	488	596	704	812	920	
	Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan			108 naskah	78 naskah	88 naskah	88 naskah	99 naskah	99 naskah	108 naskah	78 naskah	88 naskah	88 naskah	99 naskah	99 naskah	108 naskah	78 naskah	88 naskah	88 naskah	99 naskah	99 naskah	
	Jumlah pendataan dan pelesterian naskah kuno yang di simpan oleh masyarakat				70 naskah	80 naskah	80 Naskah	90 Naskah	90 Naskah	-	70 naskah	80 naskah	80 Naskah	-	-		70 naskah	80 naskah	80 Naskah	-	-	-

	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat			8 naskah	8 naskah	8 naskah	8 naskah	9 naskah	9 naskah	8 naskah	8 naskah	8 naskah	8 naskah	-	-	8 naskah	8 naskah	8 naskah	8 naskah	-	-	-
4	Persentase perangkat daerah yang tata kelola kearsipannya baik			25,42	38,13	50,85	63,55	80,5	100	25,42	38,13	50,85	63,55	80,5	100	25,42	38,13	50,85	63,55	80,5	100	
	Jumlah pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem						12 bulan	12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya							40 PD/Desa	40 PD/Desa					-	-					-	-	-
	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						12 bln	12 bln	12 bln				12 bln	-	-				12 bln	-	-	-
	Jumlah pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem					4 PD	4 PD	4 PD	4 PD			4 PD	4 PD	4 PD	4 PD			4 PD	4 PD	4 PD	4 PD	
	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan akuisisi					5 PD/Desa	5 PD/Desa	5 PD/Desa	5 PD/Desa			5 PD/Desa	5 PD/Desa	-	-			5 PD/Desa	5 PD/Desa	-	-	-
	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran							3 lembaga	5 lembaga					-	-					-	-	-
	Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-

	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina			24 PD/Desa	50 PD/Desa/Lembaga	50 PD/lembaga	50 PD/lembaga	50 PD/lembaga	50 PD/lembaga	24 PD/Desa	50 PD/Desa/Lembaga	50 PD/lembaga	50 PD/lembaga	-	-	24 PD/Desa	50 PD/Desa/Lembaga	50 PD/lembaga	50 PD/lembaga	-	-	-
	Jumlah pengelola arsip yang dibintek						40 PD/Desa	40 PD/Desa	40 PD/Desa				40 PD/Desa	-	-				40 PD/Desa	-	-	-
5	Jumlah penataan arsip dan tersedianya layanan informasi arsip yang smart			916	941	981	1021	1061	1101	916	941	981	1021	1061	1101	916	941	981	1021	1061	1101	
	Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem			2 PD	3 PD	4 PD	5 PD	5 PD	5 PD	2 PD	3 PD	4 PD	5 PD	5 PD	5 PD	2 PD	3 PD	4 PD	5 PD	5 PD	5 PD	
	Jumlah PD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi			2 PD	3 PD	3 PD	3 PD	5 PD/Desa	5 PD/Desa	2 PD	3 PD	3 PD	3 PD	-	-	2 PD	3 PD	3 PD	3 PD	-	-	-
	Jumlah Penyelamatan arsip				10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/ Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah /Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/ Perangkat Desa		10 Perangkat Daerah /Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah /Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah /Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa		10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah /Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah/ Perangkat Desa	10 Perangkat Daerah /Perangkat Desa	
	Jumlah Perangkat Daerah/ Desa yang di data						75 PD/Desa	75 PD/Desa	75 PD/Desa				75 PD/Desa	-	-				75 PD/Desa	-	-	-
	Jumlah Desa yang dimekarkan				3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa		3 Desa	3 Desa	3 Desa	-	-		3 Desa	3 Desa	3 Desa	-	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem.

   Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi;

   a. Unsur Pimpinan: **Kepala Dinas**
   b. Unsur Pembantu Pimpinan: **Sekretaris Dinas**, terdiri dari:
      1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
      2) Jabatan Fungsional Perencana
   c. Unsur Pelaksana: Kepala Bidang, terdiri dari 2 (dua) Bidang:
      1) Bidang Perpustakaan
      2) Bidang Kearsipan
   d. Unsur Jabatan Fungsional: Pustakawan, Arsiparis, dan Perencana.

   Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah 35 (tiga puluh lima) orang, ditambah tenaga kontrak sebanyak 5 (lima) orang, dengan total keseluruhan menjadi 40 (empat puluh orang). Sumber daya manusia tersebut belum mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem;

   Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi:

   Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

   a. Rendahnya minat baca masyarakat
   b. Kurangnya sarana pelayanan yang berbasis digital
   c. Kurangnya adanya regulasi yang mendukung turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
   d. Kurangnya komitmen *stakeholder* (pemangku kepentingan) terhadap Perpustakaan dan Kearsipan.
   e. Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan Perpustakaan Desa

f. Kurangnya respon dari Aparat Desa terkait pengelolaan Perpustakaan
g. Kurangnya tenaga Pustakawan pada Bidang Perpustakaan dan Arsiparis pada Bidang Kearsipan
h. Kurangnya prasarana berupa koleksi buku dan majalah yang terbaru
i. Kurangnya pemahaman pengelolaan arsip pada masing-masing Perangkat Daerah.

3. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi:
   a. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
   b. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masih kurang;
   d. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah:
   a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.
   b. Upaya peningkatan budaya baca sehingga tercipta masyarakat yang kompeten dan berdaya saing tinggi serta memiliki kemampuan yang luas di bidang ilmu dan pengetahuan minim peningkatan
   c. Jaminan kemudahan sebagai bentuk penciptaan pelayanan prima kepada masyarakat tidak terealisasi
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah, diperlukan suatu analisis yang mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi internal maupun eksternal organisasi. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan (*strength*) yang dimiliki, kelemahan (*weakness*) yang perlu diperbaiki, peluang (*opportunity*) yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman (*threat*) yang harus diantisipasi. Melalui analisis ini, diharapkan strategi pengembangan pelayanan dapat disusun secara lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan instansi.

Kekuatan:

a. Lokasi kantor yang strategis
b. Bangunan gedung Perpustakaan baru, luas, dan nyaman
c. Terdapat jaringan komputer dan internet
d. Respon Masyarakat terhadap keberadaan Perpustakaan cukup tinggi
e. Digitalisasi pelayanan perpustakaan
f. Koleksi buku bervariasi
g. Mobil Pintar
h. Mobil Perpustakaan Keliling
i. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Urusan Wajib

Kelemahan:

a. Minimnya kesadaran akan pentingnya Perpustakaan dan Kearsipan di OPD, BUMD/BUMN, swasta dan masyarakat
b. Masih kurangnya tenaga SDM jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis
c. Keterbatasan prasarana berupa koleksi buku-buku dan majalah yang terbaru
d. Fasilitas Informasi dan Teknologi belum memenuhi tuntutan masyarakat
e. Keterbatasan anggaran untuk menjalankan kegiatan pada Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
f. Terbatasnya kesempatan pelatihan dan pendidikan pengembangan diri untuk SDM di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
g. Sarana dan Prasarana masih kurang untuk mendukung Bidang Kearsipan
h. Jam operasional layanan perpustakaan yang terbatas pada jam dan hari kerja

Peluang:

a. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
b. Kemudahan transportasi menuju lokasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
c. Gedung Pelayanan Perpustakaan dekat dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap literasi dan pengarsipan
e. Arsip sebagai pendukung tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan

Ancaman:

a. Perubahan kebijakan nasional/daerah yang bisa berdampak pada pengurangan alokasi anggaran untuk bidang perpustakaan dan kearsipan
b. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat sementara adaptasi SDM maupun infrastruktur di daerah masih terbatas
c. Minat baca masyarakat yang cenderung menurun akibat dominasi hiburan digital (media sosial, *game*, dll)
d. Persaingan dengan sumber informasi digital komersial (*e-book* berbayar, platform belajar online) yang bisa menggeser peran perpustakaan
e. Keterbatasan dukungan dari pemangku kepentingan eksternal seperti Lembaga Pendidikan dan komunitas
f. Kurangnya kesadaran masyarakat/instansi terhadap pentingnya arsip.
g. Risiko kerusakan arsip akibat sarana-prasarana penyimpanan yang kurang memadai

6. Formulasi Isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem
   a. Terbatasnya personil yang profesional di Bidang pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan
   b. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia
   c. Kurang berperannya perpustakaan membangun masyarakat dan bangsa yang berkarakter, serta bisa bersaing dalam kancah global
   d. Belum optimalnya jaringan *website* yang dapat digunakan untuk memberikan informasi secara luas seperti adanya Perpustakaan elektronik, tersedianya ruang Audio Visual dan Fasilitas Penunjang lainnya
   e. Tidak tersedianya data yang akurat dalam pengambilan Kebijakan dan Perencanaan
   f. Belum tersedianya alat bantu pelayanan untuk meminimalisir kehilangan koleksi

g. Kurangnya dukungan *stakeholder* (Masyarakat dan Aparat Pemerintah Kelurahan/Desa) untuk pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

2.4 **Reviu terhadapan Rancangan Awal RKPD Dispustaka Tahun 2025**

Reviu adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Karangasem disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses *Button-up* dan *Top-down*). Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2025 yang diusulkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 5.108.942.608,00-**,** terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem melaksanakan 5 Program, 11 kegiatan dengan 27 sub kegiatan, dan pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem melaksanakan 3 Program, 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.
b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Karangasem.

Tabel T.C. 31
Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem

	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	PERPUSTAKAAN				**5.108.942.608**					**5.564.574.294**	
	URUSAN KABUPATEN / KOTA				**4.997.905.872**					**5.414.574.294**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	**8 dokumen**	**4.898.358.592**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	**8 dokumen**	**5.280.996.647**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	**8 dokumen**	**61.642.568**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	**8 dokumen**	**22.374.200**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispustaka	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	**1 dokumen**	**2.963.000**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispustaka	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	**1 dokumen**	**2.963.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**1 dokumen**	**2.963.000**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**1 dokumen**	**2.963.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**1 dokumen**	**2.963.000**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**1 dokumen**	**2.963.000**	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**1 dokumen**	**2.963.000**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**1 dokumen**	**2.963.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	**1 dokumen**	**2.963.000**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dispustaka	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	**1 dokumen**	**2.963.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispustaka	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	**2 dokumen**	**43.864.568**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispustaka	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	**2 dokumen**	**4.596.200**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispustaka	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja	**1 dokumen**	**2.963.000**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispustaka	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja	**1 dokumen**	**2.963.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah anggaran yang direalisasikan	**12 bulan**	**3.507.051.024**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah anggaran yang direalisasikan	**12 bulan**	**3.970.551.327**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispustaka	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	**12 bulan**	**3.507.051.024**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispustaka	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	**12 bulan**	**3.970.551.327**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	**12 bulan**	**251.068.519**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	**12 bulan**	**375.188.934**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispustaka	Jumlah buku yang di cetak	**6 jenis cetakan**	**10.208.000**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispustaka	Jumlah buku yang di cetak	**6 jenis cetakan**	**14.369.657**	
		Dispustaka	Jumlah digandakan	**9000 lembar foto copy**			Dispustaka	Jumlah digandakan	**9000 lembar foto copy**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispustaka	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor	**5 gedung**	**5.008.000**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispustaka	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan	**5 gedung**	**8.000.000**	

								bangunan kantor			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispustaka	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat	**12 jenis**	**20.000.000**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispustaka	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat	**12 jenis**	**24.200.000**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispustaka	Jumlah logistik yang tersedia	**12 bulan**	**154.929.103**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispustaka	Jumlah logistik yang tersedia	**12 bulan**	**174.724.000**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispustaka	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**4 kali**	**80.923.416**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispustaka	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**4 kali**	**153.896.277**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan mebel	**8 buah**	**89.099.735**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah pengadaan mebel	**8 buah**	**98.009.708**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	
	Pengadaan Mebel	Dispustaka	Jumlah Pengadaan Mebel		-	Pengadaan Mebel	Dispustaka	Jumlah Pengadaan Mebel		-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispustaka	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	**3 Unit**	**336.080.000**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispustaka	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	**3 Unit**	**78.649.708**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor	**12 bulan**	**176.213.180**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor	**12 bulan**	**350.311.128**	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispustaka	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	**400 lembar**	**25.278.912**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispustaka	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	**400 lembar**	**59.891.128**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispustaka	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**12 bulan**	**106.000.000**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispustaka	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**12 bulan**	**110.000.000**	
	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dispustaka	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman	**12 bulan**	**44.934.268**	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dispustaka	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman	**12 bulan**	**50.820.000**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispustaka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**12 Bulan**	**-**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispustaka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**12 Bulan**	**129.600.000**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	**12 bulan**	**566.303.301**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	**12 bulan**	**483.921.350**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	**13 mobil dan sepeda motor**	**242.868.326**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	**13 mobil dan sepeda motor**	**308.471.350**	
	Pemeliharaan Mebel	Dispustaka	Jumlah Pemeliharaan Mebel	**25 buah**	**5.000.000**	Pemeliharaan Mebel	Dispustaka	Jumlah Pemeliharaan Mebel	**25 buah**	**6.050.000**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispustaka	Jumlah peralatan kantor terpelihara	**12 bulan**	**84.834.184**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispustaka	Jumlah peralatan kantor terpelihara	**12 bulan**	**108.900.000**	
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dispustaka	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya	**12 bulan**	**7.000.000**	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dispustaka	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya	**12 bulan**	**12.100.000**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispustaka	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	**5 gedung**	**226.600.791**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispustaka	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	**5 gedung**	**48.400.000**	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina	**12 Bulan**	**99.547.280**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina	**12 Bulan**	**133.577.647**	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perpustakaan yang dibina	**12 Bulan**	**99.547.280**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah Perpustakaan yang dibina	**12 Bulan**	**133.577.647**	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dispustaka	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		-	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dispustaka	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	-	-	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat	**1000 orang**	-	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat	**1000 orang**		
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Karangasem	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina	**12 Perpustakaan**	**99.547.280**	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Karangasem	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina	**12 Perpustakaan**	**133.577.647**	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina			
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispustaka	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD yang terselenggara dengan baik			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispustaka	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD yang			

								terselenggara dengan baik			
	Pengembangan Bahan Pustaka	Dispustaka	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya			Pengembangan Bahan Pustaka	Dispustaka	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya			
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dispustaka	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dispustaka	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya			
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah kunjungan ke sekolah/desa	**50 kali**	**-**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		Jumlah kunjungan ke sekolah/desa	**50 kali**	**370.000.000**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Karangasem	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	**50 kali**	**-**	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Karangasem	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	**50 kali**	**100.000.000**	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dispustaka	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	**1 kali**	**-**	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dispustaka	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	**1 kali**	**80.000.000**	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispustaka	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita	**20 TK/RA dan PAUD**	**-**	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispustaka	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita	**20 TK/RA dan PAUD**	**95.000.000**	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispustaka	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan	**3 lomba**	**-**	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispustaka	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan	**3 lomba**	**95.000.000**	

	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan	**64,20**	**-**	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalih mediaan	**64,20**	**151.000.000**	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan	**88 naskah**	**-**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalih mediaan	**88 naskah**	**105.744.300**	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Karangasem	Jumlah pendataan dan pelesterian naskah kuno yang di simpan oleh masyarakat	**80 naskah**	**-**	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Karangasem	Jumlah pendataan dan pelesterian naskah kuno yang di simpan oleh masyarakat	**80 naskah**	**31.227.200**	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kab. Karangasem	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	**8 naskah**	**-**	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kab. Karangasem	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	**8 naskah**	**74.517.100**	
	Pengembangan Koleksi Budaya Eknis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	**3 kali**	**-**	**Pengembangan Koleksi Budaya Eknis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	**3 kali**	**45.255.700**	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Karangasem	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	**3 kali**	**-**	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kab. Karangasem	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah	**3 kali**	**45.255.700**	

								kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana			
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN				**111.036.736**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**				**150.000.000**	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase instansi yang telah mendapatkan pembinaan tata kelola kearsipan		**111.036.736**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		Persentase instansi yang telah mendapatkan pembinaan tata kelola kearsipan		**150.000.000**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem	**12 bulan**	**-**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem	**12 bulan**	**-**	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya		-	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya		-	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	**12 bulan**	-	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	**12 bulan**	-	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem	**4 PD**	-	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota**		Jumlah pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem	**4 PD**	-	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Karangasem	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan akuisisi	**5 PD/Desa**	-	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Karangasem	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan akuisisi	**5 PD/Desa**	-	

		Kab. Karangasem	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran		-		Kab. Karangasem	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran		-	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota		Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem	**12 bulan**	**111.036.736**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota**		Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem	**12 bulan**	**150.000.000**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Dispustaka	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	**12 bulan**	-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Dispustaka	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	**12 bulan**	-	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina	**50 PD/Desa/ Lembaga**	**111.036.736**	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina	**50 PD/Desa/ Lembaga**	**111.036.736**	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Jumlah lembar arsip yang masuk dalam aplikasi JIKN/SIKN			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		Jumlah lembar arsip yang masuk dalam aplikasi JIKN/SIKN			
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten Karangasem			**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**		Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem			

	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Karangasem	Jumlah PD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	**3 PD**		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Karangasem	Jumlah PD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	**3 PD**		
	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab./ Kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan		Jumlah Penyelamatan arsip	**10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa**		**Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab./ Kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**		Jumlah Penyelamatan arsip	**10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa**		
	Pendataan , penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Pearangkat Daerah Kab/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah Perangkat Daerah/ Desa yang di data	**75 PD/Desa**		Pendataan , penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Pearangkat Daerah Kab/Kota	Kab. Karangasem	Jumlah Perangkat Daerah/ Desa yang di data	**75 PD/Desa**		
	Pendampingan penyelamatan arsiap bagi pemekaran desa / Kelurahan	Kab. Karangasem	Jumlah Desa yang dimekarkan	**3 Desa**		Pendampingan penyelamatan arsiap bagi pemekaran desa / Kelurahan	Kab. Karangasem	Jumlah Desa yang dimekarkan	**3 Desa**		
	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP		Persentase terlayaninya permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup			**PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP**		Persentase terlayaninya permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup			
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota		Persentase permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup			**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota**		Persentase permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup			
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	Jumlah SOP penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup			Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	Jumlah SOP penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup			

	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Arsip Yang Bersifat Tertutup	2 PD		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Arsip Yang Bersifat Tertutup	2 PD		

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2025

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Dalam rangka mencapai Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem telah ditetapkan tujuan merujuk pada Renstra 2021-2026

1. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan sasaran merujuk pada Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RPJMN 2021-2026 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem telah menentukan arah kebijakan yang akan di ambil. Kebijakan tersebut mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kebijakan-kebijakan ini merupakan prioritas untuk melaksanakan program kerja. Kebijakan di maksud adalah:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat
2. Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan
3. Melaksanakan sosialisasi/pemasyarakatan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan
4. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan
5. Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi, konservasi,restorasi
6. Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian, hibah/ sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak.
7. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi
8. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna
9. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

      Perumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di atas berdasarkan visi Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang dalam

RPJMD tahun 2021-2026 adalah *"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"* dengan POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU KARANGASEM ERA BARU yang "*PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI"*, dimana kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem menetapkan 6 (enam) Misi, yang kaitannya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem yaitu Misi nomor (3) yaitu Mengembangkan sektor ekonomi, sosial dan budaya secara konfrehensif dan terintegrasi, Tujuan (10) Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem, Sasaran (18) Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali di Kabupaten Karangasem dan Misi nomor (6) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima, Tujuan (22) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik, Sasaran (33) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Karangasem perihal 7 bidang prioritas untuk mendukung arah kebijakan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, yaitu : Bidang (4) : Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya. Yang dikaitkan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem salah satunya Bidang Tradisi, Seni dan Budaya dengan didukung Program Pelestarian Koleksi Nasioanl dan Naskah Kuno bertujuan untuk meningkatkan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dimana merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem dalam bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Analisa dari 6 (enam) misi, 22 (dua puluh dua) tujuan dan 34 (tiga puluh empat) sasaran yang meliputi 7 bidang prioritas dilaksanakan untuk mengidentifikasi keserasian dan keselasaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bupati Karangasem 2021-2026, dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah untuk

menuntaskan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan program masing-masing perangkat daerah. Selain itu perumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan didasarkan pada aspirasi masyarakat dan juga memperhatikan kebutuhan pemerintah Kabupaten Karangasem

b. Pencapaian MDGs,

Millenium Development Goals merupakan kesepakan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Perangkat Daerah.

c. Pengentasan kemiskinan,

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius, upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian

serius dari pemerintah Provinsi Bali, demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Program, kegiatan dan sub kegitan yang dirancang pada Renja dan Renja Perubahan tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem diarahkan pula untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya manusia. Strategi tersebut diwujudkan dengan memperluas akses layanan perpustakaan, memperkaya bahan bacaan yang mendukung literasi dasar maupun literasi digital. Serta pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan informasi dan pengetahuan.

Selain itu, penguatan fungsi kearsipan dilakukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kepastian layanan publik yang berkualitas.

Jadi upaya-upaya tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, meningkatkan daya saing SDM, serta mendorong terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru, yang pada akhirnya bermuara pada pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

d. Pencapaian NSPK dan SPM,

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah Birokrasi yang tinggi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi hal tersebut dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya

penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

e. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah,

Kabupaten Karangasem sebagai sebuah Kabupaten di Bali memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Provinsi Bali. Potensi itu terutama terkait dengan di bidang Pertanian seperti komoditi salak, jambu mete, buah kelapa, serta aneka kerajinan seperti kerajinan tenun songket, kerajinan ata, kerajinan arak serta obyek-obyek pariwisata budaya terutama *culture heritage* (warisan budaya) dan budaya rohani. Rencana Kerja Perubahan 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem menuangkan potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja. Potensi ini diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan lagi di Kabupaten Karangasem melalui penyusunan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan ini.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi:
   a. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

      Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah 3 Program, 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.
   b. Sifat Penyebaran Lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

      Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan melingkupi semua Sekolah/Desa.
   c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp.5.108.942.608,-.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah:

   Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau diajukan pada tahun mendatang.

   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem melaksanakan 3 Program, 8 Kegiatan dan 25 sub kegiatan. Dengan Dukungan Anggaran sebesar Rp.5.108.942.608,- dan untuk lebih lengkapnya dituangkan dalam Tabel T-C.33.

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2025dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	IndikatorProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2					PERPUSTAKAAN				**5.108.942.608**				**5.564.574.294**
2	**23**				URUSAN KABUPATEN / KOTA				**4.997.905.872**				**5.414.574.294**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		**8 dokumen**	**4.898.358.592**			**8 dokumen**	**5.280.996.647**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		**8 dokumen**	**61.642.568**			**8 dokumen**	**22.374.200**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.963.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.963.000**
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.963.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.963.000**
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.963.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.963.000**

2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.963.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.963.000**
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.963.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.963.000**
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat	Dispustaka	**2 dokumen**	**43.864.568**	APBD		**2 dokumen**	**4.596.200**
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Capaian Kinerja	Dispustaka	**1 dokumen**	**2.963.000**	APBD		**1 dokumen**	**2.963.000**
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah anggaran yang direalisasikan		**12 bulan**	**3.507.051.024**			**12 bulan**	**3.970.551.327**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Dispustaka	**12 bulan**	**3.507.051.024**	APBD		**12 bulan**	**3.970.551.327**
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran		**12 bulan**	**251.068.519**			**12 bulan**	**375.188.934**
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah buku yang di cetak	Dispustaka	**6 jenis cetakan**	**10.208.000**	APBD		**6 jenis cetakan**	**14.369.657**
						Jumlah digandakan	Dispustaka	**9000 lembar foto copy**		APBD		**9000 lembar foto copy**	**3.375.000**

2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan alat listrik untuk penerangan bangunan kantor	Dispustaka	**5 gedung**	**5.008.000**	APBD		**5 gedung**	**8.000.000**
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya media cetak untuk dilayankan kepada masyarakat	Dispustaka	**12 jenis**	**20.000.000**	APBD		**12 jenis**	**24.200.000**
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia	Dispustaka	**12 bulan**	**154.929.103**	APBD		**12 bulan**	**174.724.000**
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dispustaka	**4 kali**	**80.923.416**	APBD		**4 kali**	**153.895.277**
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan mebel		**8 buah**	**336.080.000**			**8 buah**	**78.649.708**
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispustaka		**-**				**-**
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Dispustaka	**8 buah**	**-**	APBD		**8 buah**	**-**
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Dispustaka	**3 unit**	**336.080.000**	APBD		**4 jenis peralatan**	**78.649.708**
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah penyediaan jasa penunjang kantor		**12 bulan**	**176.213.180**			**12 bulan**	**350.311.128**
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terkirimnya surat dan SPJ	Dispustaka	**400 lembar**	**25.276.912**	APBD		**400 lembar**	**59.891.128**

2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispustaka	**12 bulan**	**106.000.000**	APBD		**12 bulan**	**110.000.000**
2	23	01	2.08	03	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kantor menjadi bersih dan nyaman	Dispustaka	**12 bulan**	**44.934.268**	APBD		**12 bulan**	**50.820.000**
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor**		**12 bulan**	**129.600.000**			**12 bulan**	**129.600.000**
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispustaka	**12 Bulan**	**-**	APBD		**12 Bulan**	**129.600.000**
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		**12 bulan**	**566.303.301**			**12 bulan**	**483.921.350**
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Dispustaka	**13 mobil dan sepeda motor**	**242.868.326**	APBD		**13 mobil dan sepeda motor**	**308.471.350**
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Dispustaka	**25 buah**	**5.000.000**	APBD		**25 buah**	**6.050.000**
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor terpelihara	Dispustaka	**12 bulan**	**84.834.184**	APBD		**12 bulan**	**108.900.000**
2	23	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya	Dispustaka	**12 bulan**	**7.000.000**	APBD		**12 bulan**	**12.100.000**
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Dispustaka	**5 gedung**	**226.600.791**	APBD		**5 gedung**	**48.400.000**

2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**99.547,280**				**133.577.647**
2	23	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Tenaga Pengelola perpustakaan yang dibina		**75,56**	**99.547,280**			**75,56**	**133.577.647**
2	**23**	02	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah Perpustakaan yang dibina		**50 kali**	**99.547,280**			**50 kali**	**133.577.647**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dispustaka	**12 bulan**	-	APBD		**12 bulan**	-
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perpustakaan untuk melayani masyarakat	Kab. Karangasem	**1000 orang**	-	APBD		**1000 orang**	-
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah dibina	Kab. Karangasem	**12 Perpustakaan**	**99.547.280**	APBD		**12 Perpustakaan**	**133.577.647**
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan desa yang sudah dibina	Kab. Karangasem	**50 kali**	-	APBD		**50 kali**	-
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah/PD yang terselenggara dengan baik	Dispustaka	**2 kali**	-	APBD		**2 kali**	-
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku yang bertambah koleksinya	Dispustaka	**8 jenis**	-	APBD		**8 jenis**	-

2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis buku dikelola yang bertambah koleksinya	Dispustaka	**12 bulan**	-	APBD		**12 bulan**	-
2	**23**	02	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah kunjungan ke sekolah/desa		**50 kali**	-			**50 kali**	-
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Karangasem	**50 kali**	-	APBD		**50 kali**	-
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah perayaan hari kunjung perpustakaan yang terlaksana	Dispustaka	**1 kali**	-	APBD		**1 kali**	-
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah taman kanak-kanak/RA dan PAUD yang meningkat kemampuan anak dalam bercerita	Dispustaka	**20 TK/RA dan PAUD**	-	APBD		**20 TK/RA dan PAUD**	-
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lomba minat baca yang sudah dilaksanakan	Dispustaka	**3 lomba**	-	APBD		**3 lomba**	-
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan		**64,20**	-			**64,20**	-
2	**23**	03	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah Naskah Kuno melalui Pendataan dan Pengalihmediaan		**88 naskah**	-			**88 naskah**	-

2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah pendataan dan pelesterian naskah kuno yang di simpan oleh masyarakat	Kab. Karangasem	**80 naskah**	-	APBD		**80 naskah**	-
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah turunan bahan pustaka/naskah kuno/lontar yang tersedia untuk dilayankan kepada masyarakat	Kab. Karangasem	-	-	APBD		**8 naskah**	-
2	**23**	03	2.02		**Pengembangan Koleksi Budaya Eknis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana		**3 kali**	-			**3 kali**	-
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pendaftaran naskah kuno/lontar kepada masyarakat yang terlaksana	Kab. Karangasem	**3 kali**	-	APBD		**3 kali**	-
2	24				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**				**111.036.736**				**150.000.000**
2	24	02			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase instansi yang telah mendapatkan pembinaan tata kelola kearsipan		**65,55**	**111.036.736**			**65,55**	**150.000.000**
2	24	02	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah pengelolaan arsip dinamis kabupaten karangasem		**12 bulan**	-			**12 bulan**	-

2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah PD/desa yang sudah tertata arsipnya	Kab. Karangasem		-			**40/PD/Desa**	**25.000.000**
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Karangasem	**12 bulan**	-			**12 bulan**	-
2	24	02	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota**	Jumlah pengelolaan arsip statis kabupaten karangasem		**4 PD**	-			**4 PD**	-
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan akuisisi	Kab. Karangasem	**5 PD/Desa**	-	APBD		**5 PD/Desa**	-
						Jumlah perangkat daerah/perangkat desa/lembaga yang dilaksanakan penelusuran	Kab. Karangasem		-			**3 lembaga**	
2	24	02	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota**	Jumlah pelayanan informasi arsip kabupaten karangasem		**12 bulan**	**111.036.736**			**12 bulan**	**150.000.000**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/kota Melalui JIKN	Jumlah arsip yang sudah dimasukkan ke aplikasi SIKN dan JIKN	Dispustaka	**12 bulan**		APBD		**12 bulan**	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD/desa/lembaga yang dibina	Kab. Karangasem	**50 PD/Desa/Lembaga**	**111.036.736**	APBD		**50 PD/Desa/Lembaga**	**150.000.000**
						Jumlah pengelola arsip yang dibintek	Kab. Karangasem	**40 PD/Desa**				**40 PD/Desa**	
2	24	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Jumlah lembar arsip yang masuk dalam aplikasi JIKN/SIKN		**1021**				**1061**	

2	24	03	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Jumlah daftar arsip usul musnah kabupaten karangasem		**5 PD**				**5 PD**	
2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah PD yang berkurang arsipnya yang telah jatuh retensi	Kab. Karangasem	**3 PD**		APBD		**3 PD**	
2	24	03	2.03		**Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab./ Kota yang digabung dan / atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	Jumlah Penyelamatan arsip		**10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa**				**10 Perangkat Daerah/Perangkat Desa**	
2	24	03	2.03	01	Pendataan , penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Pearangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah/ Desa yang di data	Kab. Karangasem	**75 PD/Desa**	-			**75 PD/Desa**	
2	24	03	2.03	04	Pendampingan penyelamatan arsiap bagi pemekaran desa / Kelurahan	Jumlah Desa yang dimekarkan	Kab. Karangasem	**3 Desa**		APBD		**3 Desa**	
2	24	04			**PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase terlayaninya permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		100%				100%	
2	24	04	2.01		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten / Kota**	Persentase permohonan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		100%				100%	
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan Arsip Yang Bersifat tertutup	Dispustaka						

2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Arsip Yang Bersifat Tertutup	Dispustaka	2 PD		APBD		2 PD	

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan saat ini. Pada kesempatan ini dapat kami rangkum beberapa perubahan pada Renja Induk 2025 meliputi perubahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan. Adapun juga perubahan pada struktur organisasi SDM pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 semester I, menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap kerangka pendanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem Tahun 2025. serta menuangkan jumlah realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini memuat beberapa penyesuaian, yang nantinya digunakan sebagai panduan Perangkat Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan program-program pembangunan agar dapat berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi semua pihak baik instansi maupun masyarakat.

Amlapura, 25 September 2025
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Karangasem

Ida Nyoman Astawa, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770903 199612 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia -Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2025 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 06 Agustus 2025

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
JF. Perencana Ahli Muda	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangasem

I Wayan Sutapa, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.196911021990031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang..... 4

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ……..... 10

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II .....……..... 11

2.2 Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol..... 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL..... 19

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol..... 19

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan……..... 19

3.3 Program dan Kegiatan..... 20

BAB IV PENUTUP..... 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, forum PD, dan penetapan renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karangasem tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai Perangkat daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana itu dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem tahun 2025 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Karangasem nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semseta Berencana Tahun 2025 sehingga perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol ini harus disesuikan dengan Peraturan Bupati tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah**:**

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomo 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Karangasem 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 20)
19. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 608/HK/2024 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2025;
2. Untuk memenuhi kebutuhan yang belum terakomodir dalam DPA Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan perubahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi target dan capaian progam, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan.

1.4 Sistematika penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menguraikaan secara ringkas tentang latar belakang / pertimbangan dilakukannya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum / peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikaan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen

BAB II EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen.

2.1. Hasil evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesbangpol Kabupaten

Karangasen sampai TW II

Memuat capaian sasaran renja tahun 2025, capaian program dan kegiatan renja tahun 2025

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen, berisikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KARANGASEM

3.1. Tujuan dan Sasaran

Memuat penyesuaian tujuan dan sasaran dan indikator kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen untuk tahun 2025.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan perubahan program dan kegiatan serta perubahannya.

BAB IV PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk:

a. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan
c. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator outputnya.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem selama tahun 2024 dan perkiraan capian target tahun 2025.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II

Pada tahun anggaran 2025 Badan Kesbangpol dalam pagu indikatif melaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 34 subkegiatan. Dari beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dievaluasi kembali sehingga perlu dilaksanakan perubahaan anggaran menyesuaikan dengan situasi saat ini.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol tahun 2025 dan pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2025 digambarkan sebagaimana tabel 2.1. Dari tabel 2.1 dapat digambarkan target dan realisasi dari Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, yaitu masih adanya perencanaan anggaran yang masih harus diperbaiki sehingga menyebabkan program/kegiatan belum terlaksana sesuai target.

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 sampai triwulan II

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja		Pagu Tahun 2025 (Rp)	Realisasi sd TW II		
						Fisik	Keu (Rp.)	Persentase
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100	Persen	5.628.774.113	50,27%	2.375.261.682	42,53%
A1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	12.451.800	57,82%	4.072.141	35,14%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3.325.200	50,00%	937.524	38,09%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.197.600	60,00%	464.700	38,80%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.659.500	50,00%	379.208	22,85%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.932.500	100,00%	1.826.500	94,51%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.400.000	30,00%	464.209	19,34%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	937.000	50,00%	-	0,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.000.000	80,00%	-	0,00%
A2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	4.606.881.309	50,02%	2.086.587.339	45,29%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	29	Orang	4.605.456.309	50,00%	2.085.224.714	45,28%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.425.000	100,00%	1.362.625	95,62%
A3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	412.995.900	51,05%	90.643.497	23,72%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	5.904.100	50,00%	1.798.500	30,46%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Paket	13.320.300	50,00%	4.901.139	36,79%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	252.801.300	50,00%	42.782.840	18,13%
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	47.970.200	50,00%	4.171.000	8,69%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja		Pagu Tahun 2025 (Rp)	Realisasi sd TW II		
						Fisik	Keu (Rp.)	Persentase
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perat uran perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	15.000.000	50,00%	1.986.000	24,83%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	70.000.000	50,00%	27.004.018	42,86%
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Laporan	8.000.000	100,00%	8.000.000	100,00%
A4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	241.793.828	54,06%	106.529.777	45,37%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	11.000.000	30,00%	1.000.000	9,09%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	38.000.000	50,00%	12.124.665	31,91%
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	55.000.000	40,00%	8.875.000	18,49%
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	137.793.828	62,00%	84.530.112	61,35%
A5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	354.651.276	50,00%	87.428.928	25,00%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenda raan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15	Unit	339.651.276	50,00%	87.428.928	26,13%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	Unit	15.000.000	50,00%	-	0,00%
B	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100	Persen	2.690.410.876	29,66%	267.887.754	10,66%
B1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Persen	2.690.410.876	29,66%	267.887.754	10,66%
23	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350	Orang	970.369.076	25,00%	76.983.062	8,69%
24	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan bermasyarakat ,Berbangsa, dan Bernegara	160	Keluarga	193.804.400	0,00%		0,00%
25	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	50	Orang	1.497.146.200	35,00%	190.904.692	12,76%
26	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	Dokumen	29.091.200	0,00%		0,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	Pagu Tahun 2025 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp.)	Persentase
C	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	1.666.718.676	62,07%	984.223.792	59,94%
C1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	1.666.718.676	62,07%	984.223.792	59,94%
27	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerin tahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 Orang	1.606.462.276	63,00%	968.323.792	61,22%
28	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demok rasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	18.756.400	10,00%		0,00%
29	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan	41.500.000	50,00%	15.900.000	38,31%
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	127.882.400	74,87%	76.225.000	62,98%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksa naan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	127.882.400	74,87%	76.225.000	62,98%
30	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaf taran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evalu asi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawa san Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibid ang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengaw asan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	117.532.400	80,00%	76.225.000	68,87%
31	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawa san Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	10.350.000	20,00%	-	0,00%
D	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	364.751.476	25,00%	53.758.792	14,78%
D1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	364.751.476	25,00%	53.758.792	14,78%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	Pagu Tahun 2025 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp.)	Persentase
32	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketaha nan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beraga ma dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	364.751.476	25,00%	53.758.792	14,78%
E	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	1.025.854.592	36,24%	157.082.209	21,29%
E1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	1.025.854.592	36,24%	157.082.209	21,29%
33	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	560.688.892	40,00%	115.873.009	25,15%
34	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspa daan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	49.815.400	30,00%	4.799.200	12,05%
35	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	415.350.300	30,00%	36.410.000	15,33%
JUMLAH				11.504.392.133	16,33%	1.222.800.999	10,63%

Menyimak realisasi kinerja 2025 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas dan dikomparasikan dengan kinerja OPD, ada beberapa kegiatan yang pengelolaan keuangannya belum optimal. Demikian juga terhadap keseluruhan indikator yang diukur dalam aspek akuntabilitas kinerja, rata-rata semua kegiatan sudah terpenuhi. Hanya saja yang harus tetap diperjuangkan adalah aspek kualitas hasil kinerja yang akuntabel. Beberapa faktor yang mempengaruhi aspek pelaksanaan kinerja adalah sebagai berikut.

a. Optimalisasi anggaran pada keseluruhan program dan kegiatan.
b. Kualitas sumber daya yang dimiliki.
c. Perencanaan yang terukur.
d. Koordinasi lintas unit kerja dan lintas sektoral.

Terhadap pencapaian kinerja baik dari sudut pengelolaan anggaran maupun akuntabilitas kinerja yang dicapai, maka secara langsung berimplikasi terhadap program renstra OPD yang dalam hal ini pencapaian renstra OPD sampai tahun 2025 telah memenuhi target yang diharapkan. Beberapa kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah; meningkatkan validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan yang akuntabel, dan anggaran yang optimal

2.2 Isu – Isu Penting Pelaksanaanan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kualitas penyelenggraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggraan kegiatan tersebut meliputi :

1. Struktur masyarakat adat di Kabupaten Karangasem yang memiliki karakteristik kebersamaan dan gotong royong yang mendukung pengembangan budaya politik
2. Makin berperannya lembaga legislative dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah
4. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat bernegara

kebangsaan

5. Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Makin meningkatnya koordinasi antar instansi pada perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
7. Semakin baiknya kerjasama dan kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat pemuka desa adat dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban
8. Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2025 didasarkan pada indikator Kinerja Keberhasilan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyangkut :

1. Belum maksimalnya partisipasi pemilih pada pemilihan umum.

   Pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat terlapas dari partisipasi pemilih, partisipasi pemilih akan mempengaruhi tingkat capaian kesuksesan dari pada pemilu tersebut, sehingga peningkatan partisipasi pemilih sangatlah penting dalam pemilu.
2. Masih kurangnya wawasan politik masyarakat.

   Wawasan politik pada masyarakat perlu ditingkatkan dalam peningkatan Indek Demokrasi Indonesia. Indek Demokrasi Indonesia merupakan asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Indek Demokrasi Indonesia merupakan gambaran pada setiap provinsi di Indonesia baik berada pada tingkat demokrasi baik, sedang maupun buruk, dengan hal tersebut pemerintah pusat atau provinsi/daerah dapat memberikan prioritas pembangunan politik di daerah tersebut.
3. Belum maksimalnya komunikasi pemerintah daerah dengan partai politik. Sebagai wadah dalam melaksanakan komunikasi maupun koordinasi perlu dibentuk sebuah forum diskusi politik yaitu dalam hal pembahasan pembangunan dan pembanguna politik yang baik di daerah.

4. Belum maksimalnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam berpartisipasi untuk pembangunan di daerah. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di daerah sangat penting yaitu untuk berfartisipasi dalam pembangunan di daerah, organisasi kemasyarakatan perlu difasilitasi dan diberikan pembinaan. Disamping itu juga Pemerintah Daerah memiliki peran menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan di daerah, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan melalui fasilitasi kebijakan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan wajib dilakukan agar adanya kontroling pemerintah terhadap organisasi kemasyrakatan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap Ormas guna untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari ormas tersebut, pengawasan yang dilakukan beersifat eksternal.
6. Belum tuntasnya pemahaman terhadap Ideologi Negara dan rasa Nasionalisme yang ditanamkan kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Karangasem .
7. Masih potensialnya konflik Sosial di beberapa daerah yang berdampak nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol

Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian sasaran dan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM. Dengan Sasaran Meningkatnya peran serta krama karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.

Adapun penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 bertujuan untuk mengakomodir semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, diperlukan strategi yang meliputi:

1. Peningkatan pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
2. Peningkaatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Pelaksanaan Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Strategi ini adalah sebagai pedoman kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka ditempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

3.3 Program dan Kegiatan

Program dapat diartikan sebagai intrumen dari kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dalam perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini direncanakan ada 6 (enam) program utama dalam pencapaian sasaran peningkatan PAD baik yang berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan PAD maupun yang berpengaruh secara tidak langsung.

Setiap program yang telah direncanakan, dijabarkan lebih teknis kedalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut.

Kegiatan dijelaskan dengan penetapan indikator kinerja yang sifatnya cenderung dengan maksud untuk mempermudah pengukuran dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan. Namun tidak menghindar juga penggunaan indikator kualitatif yang akan dapat mendukung angka dan presentase dari target yang telah ditetapkan karena sifat indikator kualitatif yang kaya informasi sehingga menghidupkan informasi hasil dari suatu kegiatan.

Rencana kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem selalu berpedoman pada perioritas mengingat keterbatasan dana dan sesuai renstra Badan KesbangPol pada Perubahan RKPD tahun 2025. Bedasarkan rencana kerja Badan Kesbangpol dan RKPD Tahun 2025 terdiri dari 6 Program dan 10 kegiatan serta 35 Subkegiatan dirancang dalam RKPD Perubahan menjadi 6 Program dan 11 kegiatan serta 36 Subkegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang terakomodir di Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

A1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

A1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

A1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

A1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

A1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

A1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

A2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

A3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

A3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

A3.2 Penyediaan peralatan rumah tangga

A3.3 Penyediaan bahan logistik kantor

A3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

A3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

A3.6 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

A3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

A4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

A5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

A5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

A5.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

A6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

A6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

B1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

B1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

B1.2. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

B1.3. Pembentukan Paskibraka

B1.4. Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

C1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

C1.1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C1.2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C1.3. Pelaksanaan Tugas Paskibraka

D. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

D1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

D1.1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

D1.2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

E. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

E1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

E1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

F1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

F1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

F1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

F1.6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2025 adalah segaimana tabel 3.1

Tabel 3.1

Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2025			Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	5.628.774.113	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	5.555.346.565	- 73.427.548	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	12.451.800	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	11.587.800	- 864.000	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.325.200	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.461.200	- 864.000	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.197.600	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.197.600	-	
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.659.500	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.659.500	-	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.932.500	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.932.500	-	
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.000	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2025			Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	937.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	937.000	-	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	-	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.606.881.309	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.529.319.293	- 77.562.016	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	29 Orang	4.605.456.309	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	43 Orang	4.527.894.293	- 77.562.016	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.425.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.425.000	-	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	412.995.900	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	377.132.500	- 35.863.400	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.904.100	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.904.100	-	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	13.320.300	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	13.715.800	395.500	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	252.801.300	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	230.542.400	- 22.258.900	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	47.970.200	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	47.970.200	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2025			Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	8.000.000	- 7.000.000	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	63.000.000	- 7.000.000	
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	8.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	8.000.000	-	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	28.993.500	28.993.500	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	28.993.500	28.993.500	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	241.793.828	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	222.945.104	- 18.848.724	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.000.000	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.000.000	-	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	38.000.000	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	38.000.000	-	
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	55.000.000	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	48.000.000	- 7.000.000	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	137.793.828	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	125.945.104	- 11.848.724	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2025			Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	354.651.276	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	385.368.368	30.717.092	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15 Unit	339.651.276	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15 Unit	370.368.368	30.717.092	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15.000.000	-	
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.690.410.876	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	3.246.759.168	556.348.292	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.690.410.876	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	3.246.759.168	556.348.292	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	970.369.076	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	990.831.368	20.462.292	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2025			Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	160 Keluarga	193.804.400	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	160 Keluarga	155.494.400		
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	50 Orang	1.497.146.200	Jumlah Paskibraka	70 Orang	2.072.482.200	575.336.000	
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Laporan	29.091.200	Jumlah laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Laporan	27.951.200	- 1.140.000	
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	1.666.718.676	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	1.653.612.268	- 13.106.408	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	1.666.718.676	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	1.653.612.268	- 13.106.408	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2025			Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 Orang	1.606.462.276	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 Orang	1.593.355.868	- 13.106.408	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	18.756.400	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	18.756.400	-	
8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan	41.500.000	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan	41.500.000	-	
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	127.882.400	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	121.035.000	- 6.847.400	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2025			Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksa naan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	127.882.400	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksa naan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	121.035.000	- 6.847.400	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	117.532.400	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	110.685.000	- 6.847.400	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawa san Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	10.350.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	10.350.000	-	
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	364.751.476	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	559.251.476	194.500.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	364.751.476	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	559.251.476	194.500.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2025			Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketaha nan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	364.751.476	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	559.251.476	194.500.000	
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social	100 Persen	1.025.854.592	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	741.520.206	- 284.334.386	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	1.025.854.592	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	741.520.206	- 284.334.386	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	560.688.892	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	464.261.256	- 96.427.636	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2025			Anggaran Perubahan 2025			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspa daan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	49.815.400	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	39.815.400	- 10.000.000	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	415.350.300	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	237.443.550	- 177.906.750	
JUMLAH				11.504.392.133			11.877.524.683	373.132.550	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tahun 2025. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam menjalan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem serta kerjasama dan peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Karangasem untuk mencapai kinerja yang optimal.

Amlapura, 06 Agustus 2025

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
JF. Perencana Ahli Muda	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangasem

I Wayan Sutapa, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196911021990031006

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Diponegoro Nomor 46, Telepon: (0363) 2720004, Amlapura

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Waranugraha-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Karangasem Tahun 2025 telah selesai disusun sesuai jadwal yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sesuai dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 dan masih berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 29 Juli 2025
Kepala Badan,

I Ketut Mertadina, S.STP., MAP
Pembina Utama Muda
NIP.19770510 199601 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II 10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BRIDA 13
BAB IV PENUTUP 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunann Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Karangasem Tahun 2025 menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan mengacu pada RKPD Semesta Berencana Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 merupakan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BRIDA. Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026. Mengingat kelembagaan BRIDA Kabupaten Karangasem baru terbentuk ditahun 2024, yang sebelumnya masih menjadi satu kesatuan dengan Bappelitbangda. Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 digunakan sebagai dasar pengusulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan ditetapkan menjadi Renja BRIDA Tahun 2025 yang nantinya akan diakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang ditetapkan menjadi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 masih mengacu

pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 mengingat BRIDA baru terbentuk dan belum mempunyai Renstra tersendiri, selain itu juga berpedoman pada Rencana Induk Kelitbangan (RIK).

Brida sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan (litbang). Dalam upaya pemenuhan capaian cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung tupoksi Brida maka terjadi pergeseran anggaran di perubahan Tahun 2025 dikarenakan terdapat instruksi dari pusat untuk efisiensi maka terdapat beberapa pos anggaran yang mengalami perubahan, dimana terdapat pengurangan dan pergeseran pada DPA SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 adalah **:**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD SB Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
23. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
24. Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 317/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan BRIDA Kabupaten Karangasem Perubahan Tahun 2025 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi

tolok ukur penilaian kinerja BRIDA Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Tujuan penyusunan Renja Perubahan BRIDA Tahun 2025:

1. Perubahan belanja akibat adanya efisiensi;
2. Penyesuaian anggaran antar sub kegiatan, antar rekening belanja dan antar uraian belanja untuk pemenuhan program prioritas daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Brida Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Brida agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang/pertimbangan dilakukannya perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya terkait dengan dilakukannya Renja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Renja perubahan BRIDA.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja perubahan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2025

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.1. Evaluasi Renja sampai Triwulan II.

2.2. Isu-isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA Kabupaten karangasem.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BRIDA KABUPATEN KARANGASEM

3.1. **Tujuan dan Sasaran**

Memuat penyesuaian tujuan dan sasaran serta indikatornya.

3.2. **Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat penyesuaian strategis dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja.

3.3. **Program dan Kegiatan.**

Memuat perubahan program dan kegiatan serta perubahannya.

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang cacatan penting perubahan Renja dan kaidah pelaksanaan perubahan Renja.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai TW II

Renja OPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra OPD) sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Uraian hasil evaluasi di triwulan II Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi 2025 sangat tinggi Faktor Pendorong nya adalah Kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian kinerja bersama pimpinan, sedangkan faktor penghambatnya adalah proses pelaksanaan kegiatan di triwulan II karena keterlambatan penyedia/rekanan melakukan verifikasi data (*verified vendor*) yang ada di E-Katalog, sehingga realisasi capaian kegiatan atau pun sub kegiatan belum tercapai sesuai target. Kinerja pelayanan Kelitbangan Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2025 didasarkan pada indikator kinerja yang ada pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Secara umum pelayanan Kelitbangan menunjukan kinerja yang cukup baik, dimana lomba-lomba inovasi sudah berjalan, dan kajian-kajian beberapa sudah mampu dihasilkan, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target dan

pencapaian sasaran strategis dari program, kegiatan dan sub kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh BRIDA Kabupaten Karangasem.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BRIDA

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BRIDA Kabupaten Karangasem tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu strategis terkait pembangunan yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun di masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan tugas dan fungsi BRIDA antara lain :

1. Hasil penelitian/ kajian dan inovasi belum sepenuhnya menunjang proses perencanaan;
2. Masih kurangnya inovasi dalam memecahkan berbagai macam permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah daerah;
3. Masih kurangnya SDM yang mampu melakukan riset;
4. Belum optimalnya ketersediaan data serta informasi penelitian dan pengembangan daerah yang akan mampu memberikan kelengkapan informasi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Belum optimalnya arah hasil penelitian sebagai bahan teknologi terapan bagi masyarakat dalam rangka mendukung usaha produktif dengan memanfaatkan sumber daya potensi yang tersedia.

Dari isu-isu dan permasalahan yang dihadapi perlu adanya dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mampu menjawab isu dan permasalahan tersebut. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 terdiri dari 2 program, 1 program prioritas yaitu:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dan 1 program pendukung yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA BRIDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Visi, Misi Pemerintah Daerah serta memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional, sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem sebagai lembaga yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah dimana hasilnya dimanfaatkan untuk membantu merumuskan Kebijakan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional. Tema RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yaitu **"Penguatan Ekonomi dan Sosial Melalui Pembangunan Pertanian Yang Tangguh dan Mandiri, Pengembangan SDM yang Handal, Pembangunan Pariwisata dan Budaya, Peningkatan Ketahanan Bencana**

didukung Infrastruktur yang Memadai". Sesuai dengan tema tersebut diatas BRIDA bertugas menghasilkan kajian dan inovasi yang mampu memberikan dukungan dan kontribusi terhadap peningkatan daya saing sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi melalui SDM yang handal serta memiliki daya saing.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang dalam Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 ditujukan untuk memfasilitasi dan mendukung pencapaian Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Karangasem yang dituangkan dalam RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dengan tema yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem yang ke 7 yaitu " Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik", dengan arah kebijakan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BRIDA

Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian sasaran dan tujuan BRIDA Kabupaten Karangasem. Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 mendukung misi ke 6 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 **"Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima".** Tujuan 22 **"Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik",** sasaran 33 **"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik".** Dimana dalam implementasinya dirumuskan melalui tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi BRIDA yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan. Tujuan dan Sasaran yang diampu masih mengacu pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dari BRIDA yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BRIDA

Sedangkan sasaran dari BRIDA meliputi:

1. Meningkatnya penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang berkualitas;
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan BRIDA

Adapun penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 bertujuan untuk mengakomodir semua program, kegiatan dan sub Kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh BRIDA Tahun 2025 selalu berpedoman pada skala perioritas mengingat keterbatasan dana dan sesuai Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan yang terakomodir pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) BRIDA Tahun 2025 terdiri dari :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan yaitu:
   a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1. Pengadaan Mebel
   2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   1. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

b) Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan pagu indikatif terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Perubahan program kegiatan dan sub kegiatan, serta pendanaan tahun 2025 diuraikan seperti pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan
							Indikator	Target Capaian		Pagu	Indikator	Target Capaian		Pagu Renja		
								Target	Satuan			Target	Satuan			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5	**0 5**	**0 1**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.198.377.865**	**Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.145.445.974**	**(52.931.891)**	
5	**0 5**	**0 1**	**2.0 1**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**3.800.000**	**persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**3.800.000**	**-**	
5	0 5	0 1	2.01	000 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dokumen	500.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dokumen	500.000	-	
5	0 5	0 1	2.01	000 4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil kooordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	10	dokumen	1.400.000	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil kooordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	10	dokumen	1.400.000	-	

	5	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	10	dokumen	1.400.000	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	10	dokumen	1.400.000	-	
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	laporan	500.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	laporan	500.000		
	5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase terlaksananya administrasi keuangan (gaji dan tunjangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan akuntansi SKPD)**	**100**	**%**	**1.561.628.483**	**persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.561.628.483**	**-**	
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	orang / bulan	1.538.534.423	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	orang / bulan	1.531.989.695	(6.544.728)	
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian	150	dokumen	22.494.060	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian	150	dokumen	29.038.788	6.544.728	
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun	6	laporan	600.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun	6	laporan	600.000	-	
	5	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan lancar**	**100**	**%**	**203.950.582**	**persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan lancar**	**100**	**%**	**161.969.991**	**(41.980.591)**	

	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	paket	5.166.300	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	paket	5.166.300	-	
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	paket	106.211.600	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	paket	100.430.000	(5.781.600)	
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	paket	15.149.700	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	paket	15.149.700	-	
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	dokumen	5.000.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	dokumen	5.000.000	-	
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8	laporan	72.422.982	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8	laporan	36.223.991	(36.198.991)	
	5	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase tersedianya kebutuhan peralatan dan mesin kantor penunjnag urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**119.427.300**	**persentase tersedianya kebutuhan peralatan dan mesin kantor penunjnag urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**113.467.600**	**(5.959.700)**	
	5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	7	unit	59.261.200	Jumlah paket mebel yang disediakan	7	unit	59.261.200		
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	21	unit	60.166.100	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	21	Unit	54.206.400	(5.959.700)	

	5	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**58.118.100**	**persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**58.118.100**	**-**	
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	12	laporan	2.000.000	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	12	laporan	2.000.000	-	
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	32.800.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	32.800.000	-	
	5	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	23.318.100	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	23.318.100		
	5	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100**	**%**	**251.453.400**	**persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100**	**%**	**246.461.800**	**(4.991.600)**	
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	unit	100.303.400	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	unit	95.311.800	(4.991.600)	
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	21.000.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	21.000.000	-	

	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	130.150.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	130.150.000	-	
	5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan**	**90**	**%**	**267.633.000**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan**	**90**	**%**	**418.092.300**	**150.459.300**	
	5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**90**	**%**	**0,00**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**90**	**%**	**100.000.000**	**100.000.000**	
	5	05	02	2.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	1	laporan	0,00	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	1	laporan	100.000.000	100.000.000	
	5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan bidang sosial dan kependudukan**	**90**	**%**	**133.541.500**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan bidang sosial dan kependudukan**	**90**	**%**	**233.541.500**	**100.000.000**	
	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	1	dokumen	0,00	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	1	dokumen	100.000.000	100.000.000	

	5	05	02	2.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan tenaga kerja	1	dokumen	133.541.500	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan tenaga kerja	1	dokumen	133.541.500	-	
	5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase hasil inovasi dan teknologi yang menunjang perkembangan daerah**	**100**	**%**	**134.091.500**	**Persentase hasil inovasi dan teknologi yang menunjang perkembangan daerah**	**100**	**%**	**84.550.800**	**(49.540.700)**	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	1	dokumen	115.619.000	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	1	dokumen	68.090.800	(47.528.200)	
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual	1	laporan	18.472.500	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual	1	laporan	16.460.000	(2.012.500)	
Jumlah pagu total										**2.466.010.865**				**2.563.538.274**	**97.527.409**	**Jumlah pagu total**

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan serta menjadi ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas kelitbangan yang dilaksanakan oleh BRIDA Kabupaten Karangasem tahun 2025. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 yang akan dimanfaatkan oleh jajaran di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem sendiri maupun stakeholder terkait yang berkepentingan. Renja akan dipedomani sebagai alat kendali sampai dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 serta acuan dalam penyusunan RKA 2025 sampai menjadi DPA BRIDA Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karangasem serta kerjasama dan peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Karangasem untuk mencapai kinerja yang optimal.